LKj

LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN TANAH LAUT



TAHUN 2023

SETELAH EVALUASI


panrb
KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
TANAH LAUT
Kompeten
Akuntabel
BERorientasi Pelayanan
Harmonis
Loyal
Adaptif
Kolaboratif
DAHNIAL KIFLI
#BanggaMelayaniBangsa
Saya ASN
KAB.TANAH LAUT
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
0852 4529 2385
organisasi.tala
bangga melayani bangsa

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdullilah, kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Karunia Nya sehingga Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 dapat diselesaikan. Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun kinerja yang diukur dalam laporan ini didasarkan atas Dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sekretariat Daerah Tahun 2023.

Untuk Tahun Anggaran 2023 capaian Kinerja Sekretariat Daerah sebesar **213.52%** dan capaian Keuangan adalah **92.27 %** dengan kategori **Sangat Berhasil** serta capaian fisik sebesar **98.34%**, yang di dukung dengan **40** (empat puluh) Sasaran Strategis dan **50** (lima puluh) Indikator Sasaran serta didukung oleh **3** (tiga) Program, **18** (delapan belas) Kegiatan dan **47** (Empat Puluh Tujuh) Sub Kegiatan.

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 yang disusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan tolok ukur pelaksanaan Kinerja Sekretariat Daerah pada tahun yang akan datang.

Pelaihari, 19 Januari 2024

Sekretaris Daerah,
Kabupaten Tanah Laut

Drs. H. DAHNIAL KIFLI,MAP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19640425 198703 1 012

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pendekatan yang digunakan adalah dengan menyajikan dokumen perencanaan jangka menengah berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), perencanaan tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Penetapan Kinerja, serta Pengukuran Pencapaian Sasaran yang dilengkapi dengan identifikasi faktor - faktor yang mendukung keberhasilan dan atau kegagalan.

Di samping itu LKj ini juga melaporkan tingkat pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Penyusunan LKj ini berpedoman pada dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut, yang mana dalam Renstra tersebut tercantum Visi **"Terwujudnya Tanah Laut yang "BERINTERAKSI" (Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, Sinergi)"**. Sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2018-2023, Sekretariat Daerah mengampu Misi ke- :

1. **Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya;**
2. **Menciptakan Inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif;**
3. **Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*);**
5. **Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.**

Keempat Misi yang di ampu oleh Sekretariat Daerah telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis yang mana masing- masing sasaran strategis yang ditetapkan mempunyai indikator kinerja sebagai alat untuk mengukur tingkat ketercapaiannya. Untuk Tahun 2023 Sekretariat Daerah mempunyai anggaran belanja sebesar **Rp 85.460.903.356,00**,- dengan

capaian realisasi sebesar **Rp 78.850.708.747,00**,- (**92.27%**) sebagaimana tabel dibawah ini :

Anggaran dan Capaian Realisasi Anggaran Bagian-bagian lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 :

No	Bagian	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pemerintahan	1.503.669.876	1.366.611.561	90.89%
2	Hukum	2.229.556.766	1.625.809.811	72.92%
3	Organisasi	522.274.530	435.682.009	83.42%
4	Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam	724.329.579	585.280.050	80.80%
5	Pengadaan Barang/Jasa	1.392.152.439	1.084.222.634	77.88%
6	Kesejahteraan Rakyat	34.804.336.890	33.317.495.150	95.73%
7	Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.329.521.582	1.217.231.423	91.55%
8	Umum	19.532.460.840	18.325.249.158	93.82%
9	Perencanaan dan Keuangan	23.422.600.854	20.893.126.951	89.20%
	Jumlah	**85.460.903.356**	**78.850.708.747**	**92.27%**

**Sumber/Pengolah Data Bagian Perencanaan dan Keuangan*

Sedangkan Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	82	89.98	109.75%
2	Inovasi publik yang diciptakan oleh SKPD	Jumlah inovasi SKPD yang didaftarkan	1	8 inovasi	800%
3	Meningkatnya skor LPPD Kabupaten	Skor LPPD Kabupaten	ST 3,150	Nilai belum terbit dari KEMENDAGRI	Nilai belum terbit dari KEMENDAGRI
4	Meningkatnya Penerapan RB Pemerintah Daerah	Persentase SKPD dengan nilai RB minimal B	0	0	0
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Persentase SKPD dengan nilai SAKIP minimal BB	100	77.5	77.5
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	83	82	98.79%
		Nilai SPIP Sekretariat Daerah	3,7	Masih dalam tahap *Baseline* SPIP	Masih dalam tahap *Baseline* SPIP

7	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Nilai RB Sekretariat Daerah	92	Sekretariat Daerah tidak termasuk RB Tematik	Sekretariat Daerah tidak termasuk RB Tematik
		Nilai ZI Sekretariat Daerah	85	80.83	95.09%
8	Meningkatnya Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang diterapkan	100%	100%	100%
	Total				213.52%

Diharapkan LKj ini telah mempresentasikan kinerja nyata Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut sekaligus sebagai perwujudan Akuntabilitas dan Transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta dapat memberikan informasi pengambilan keputusan Pimpinan guna peningkatan kinerja organisasi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
IKHTISAR EKSEKUTIF ii
DAFTAR ISI iv
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Maksud dan Tujuan 1
C. Dasar Hukum 2
D. Cascading Kinerja 3
E. Proses Bisnis, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi 4
F. Isu Strategis Perangkat Daerah 24
G. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran 32
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya 40
I. Sistematika Penyajian 46

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Visi RPJMD 47
B. Misi RPJMD 50
C. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah 51
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 61
E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja 66

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi 71
1. Sasaran RPJMD 71
2. Eselon II 88
2.1 Eselon II (Sekretaris Daerah) 88
2.2 Eselon II (Staf Ahli) 136
2.3 Eselon II (Asisten Sekretaris Daerah) 140
3. Eselon III (Kepala Bagian) dan Eselon IV (Kasubbag) 151
3.1 Bagian Umum 151
3.2 Bagian Pemerintahan 194

3.3 Bagian Organisasi 254
3.4 Bagian Perencanaan dan Keuangan..... 284
3.5 Bagian Pengadaan Barang/Jasa 361
3.6 Bagian Hukum 386
3.7 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 402
3.8 Bagian Kesejahteraan Rakyat 421
3.9 Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan SDA..... 473
4. Perbandingan Realisasi Capaian Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2023..... 491
5. Laporan Pengukuran Kinerja Sekretariat Daerah Triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023..... 495
6. Tabel Rencana Aksi dan Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah Triwulan I s.d Triwulan IV Tahun 2023 504

B. Akuntabilitas Keuangan 504
1. Anggaran dan Realisasi APBD 2023 504
2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 406
3. Perbandingan Program dan kegiatan Tahun 2022 dan 2023 513
4. Efisiensi Dan Efektifitas Capaian Kinerja Dengan Realisasi Anggaran 519

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 525
B. Strategi Peningkatan Kinerja 526

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. IKU Sekretariat Daerah Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV Tahun 2023
2. Pernyataan Hasil Reviu SAKIP Sekretariat Daerah Tahun 2022
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ber tanda tangan
4. Pohon Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2023

5. Laporan Pengukuran Kinerja Sekretariat Daerah Triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023
6. Monev Rencana Strategis
7. Matriks Keselarasan Tahun 2023

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Daerah Tahun 2023, sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Selaras dengan telah diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values* **ASN BerAKHLAK** (**Ber**orientasi Pelayanan, **A**kuntabel, **K**ompeten, **H**armonis, **L**oyal, **A**daptif, dan **K**olaboratif) dan *Employer Branding* **Bangga Melayani Bangsa**, maka diharapkan ASN dan PTT di Lingkungan Sekretariat Daerah dapat mengimplementasikan nilai-nilai dasar BerAKHLAK menjadi Dasar penguatan budaya kerja guna mendukung pencapaian kinerja dan tujuan organisasi sesuai dengan Misi yang di emban Sekretariat Daerah.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana proses pencapaian berkaitan dengan mandat yang telah diterima instansi tersebut. Adapun maksud penyusunan LKj tahun 2023 ini adalah:

a. Untuk mengetahui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2023.
b. Untuk mengukur tingkat pencapaian atau keberhasilan dan kegagalan sasaran strategis yang telah dilaksanakan selama tahun 2023.
c. Sebagai dasar untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya.
d. Sebagai bahan evaluasi kinerja instansi Pemerintah Daerah.

e. Sebagai bahan laporan Kinerja Pimpinan

Tujuan penyusunan dan penyampaian LKj adalah :

a. Untuk mewujudkan akuntabilitas/pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi mandat/amanah.
b. Untuk pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan, untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta anggaran.
c. Upaya perbaikan dan peningkatan kinerja Sekretariat Daerah di masa yang akan datang

C. Dasar Hukum

Adapun Dasar Hukum yang mendasari Kegiatan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi SAKIP.
4. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

D. Cascading Kinerja

Cascading Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2023 digambarkan dalam bentuk urutan tingkatan berjenjang dari Tujuan, Sasaran, dan Indikator Eselon II sampai dengan Eselon IV dengan rincian sebagai berikut :

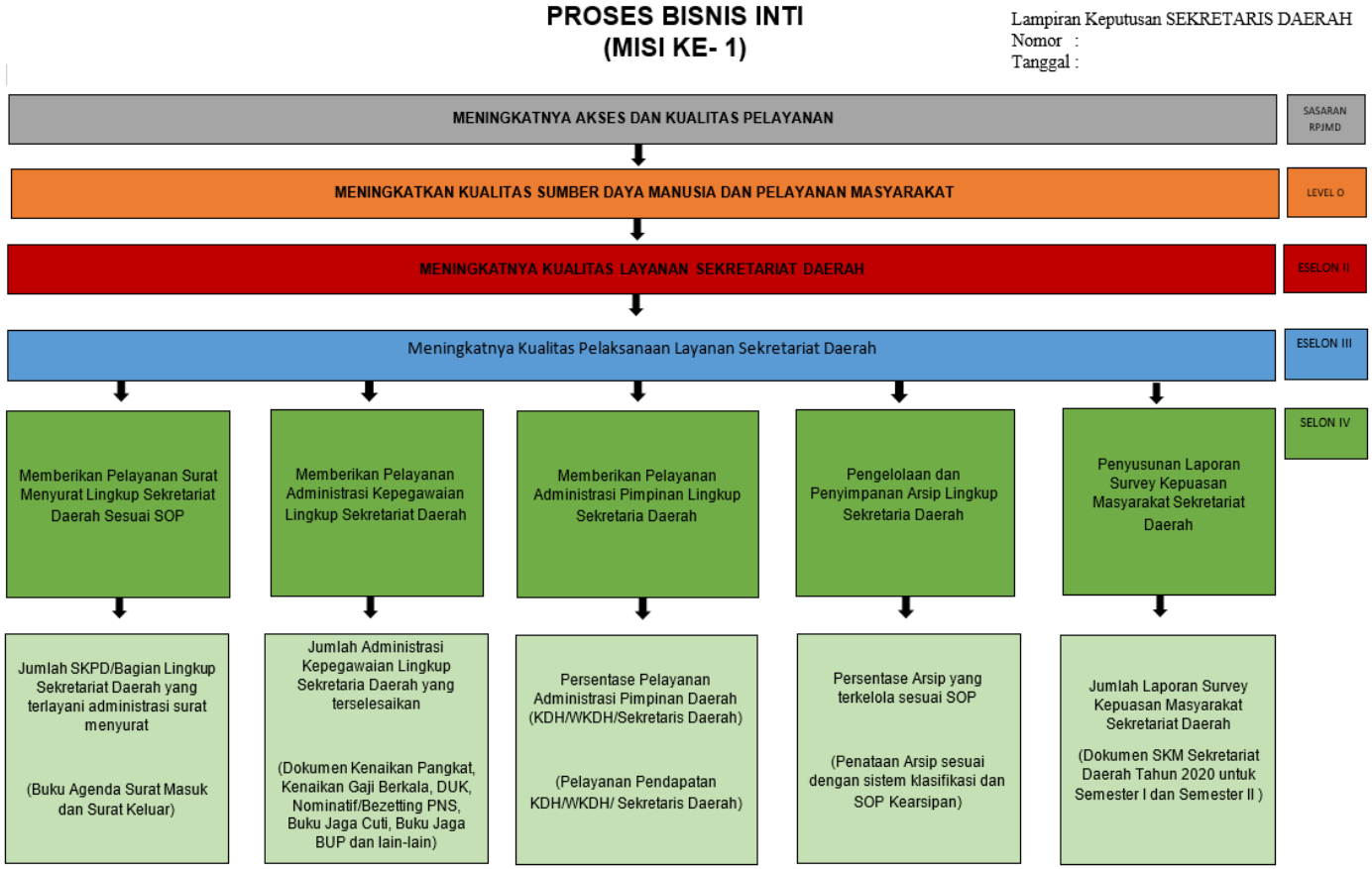
1. Sekretariat Daerah memiliki 5 (Lima) Tujuan Strategis dengan 5 (Lima) Indikator Tujuan.
2. Sekretariat Daerah memiliki 8 (Delapan) Sasaran Strategis Eselon II dengan 10 (Sepuluh) Indikator Sasaran Eselon II.
3. Sekretariat Daerah memiliki 32 (Tiga Puluh Dua) Sasaran Strategis Eselon III dengan 39 (Tiga Puluh Sembilan) Indikator Sasaran Eselon III.
4. Sekretariat Daerah memiliki 16 (Enam Belas) Sasaran Strategis Eselon IV dengan 16 (Enam Belas) Indikator Sasaran Eselon IV.

Bagan Cascading Kinerja Sekretariat Daerah terlampir.

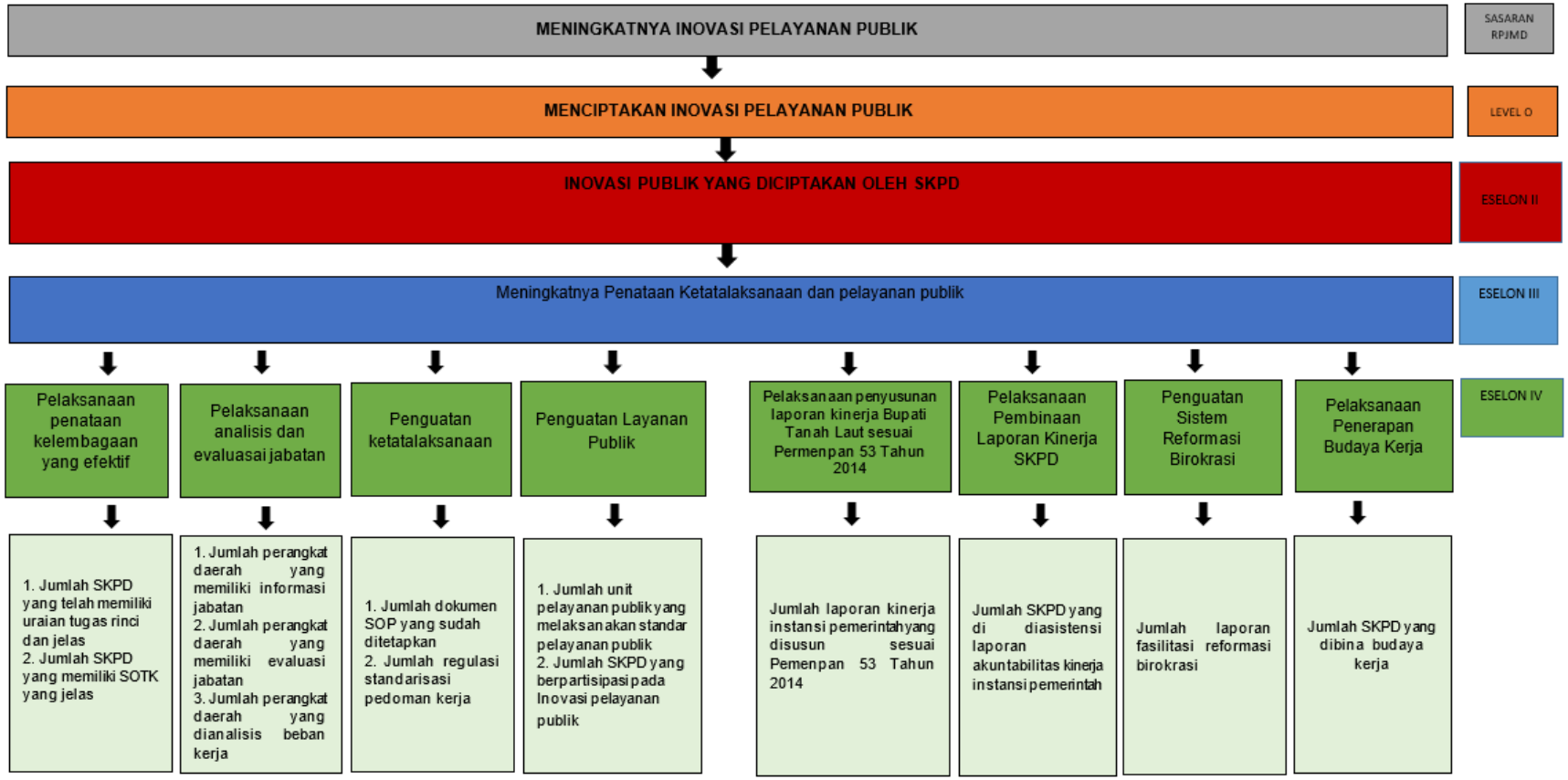
E. Proses Bisnis, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

1. Peta Proses Bisnis

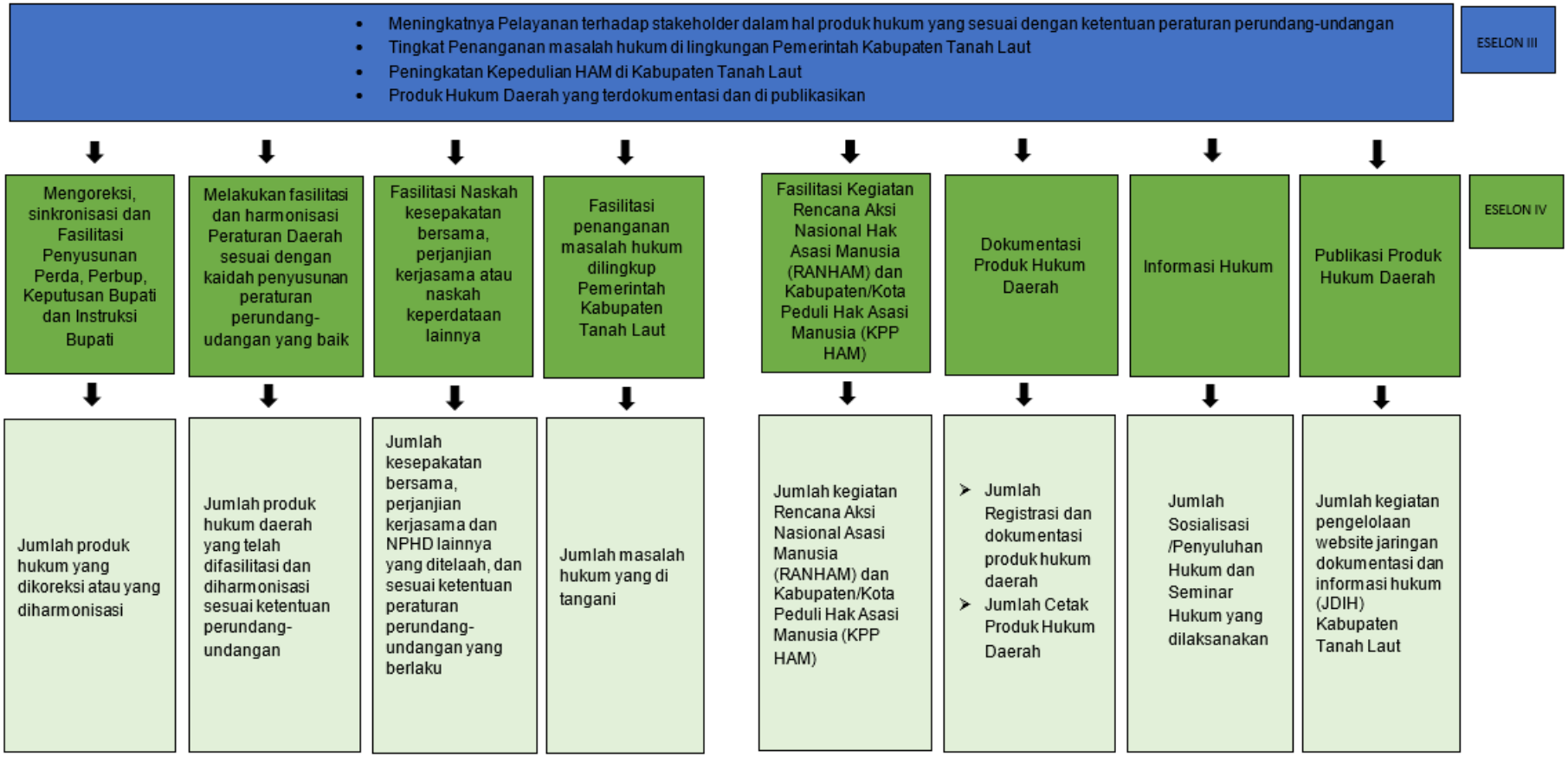
Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 33/KEP-SEKDA/2021 Tanggal 13 Agustus 2021 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut , Sekretariat Daerah telah menyusun Peta Proses Bisnis dengan gambaran sebagai berikut :



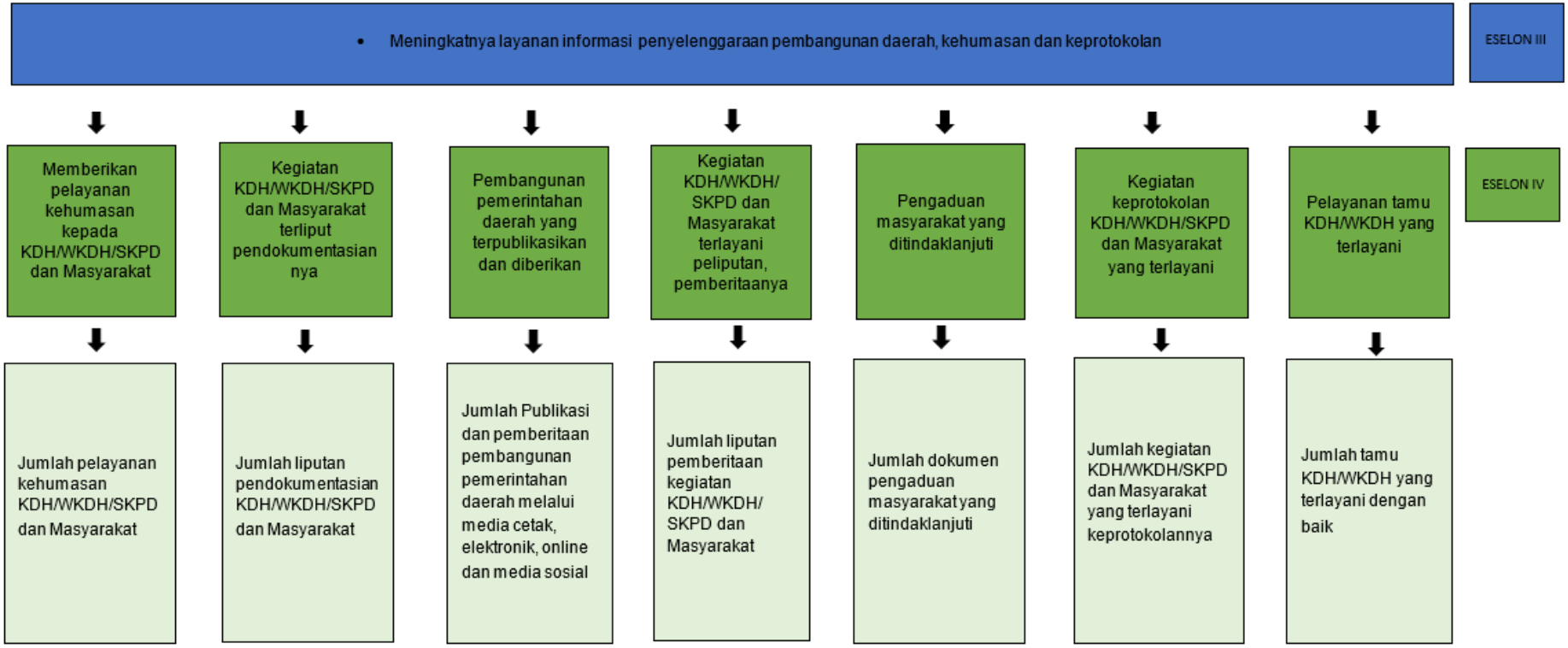
PROSES BISNIS INTI
(MISI KE- 2)



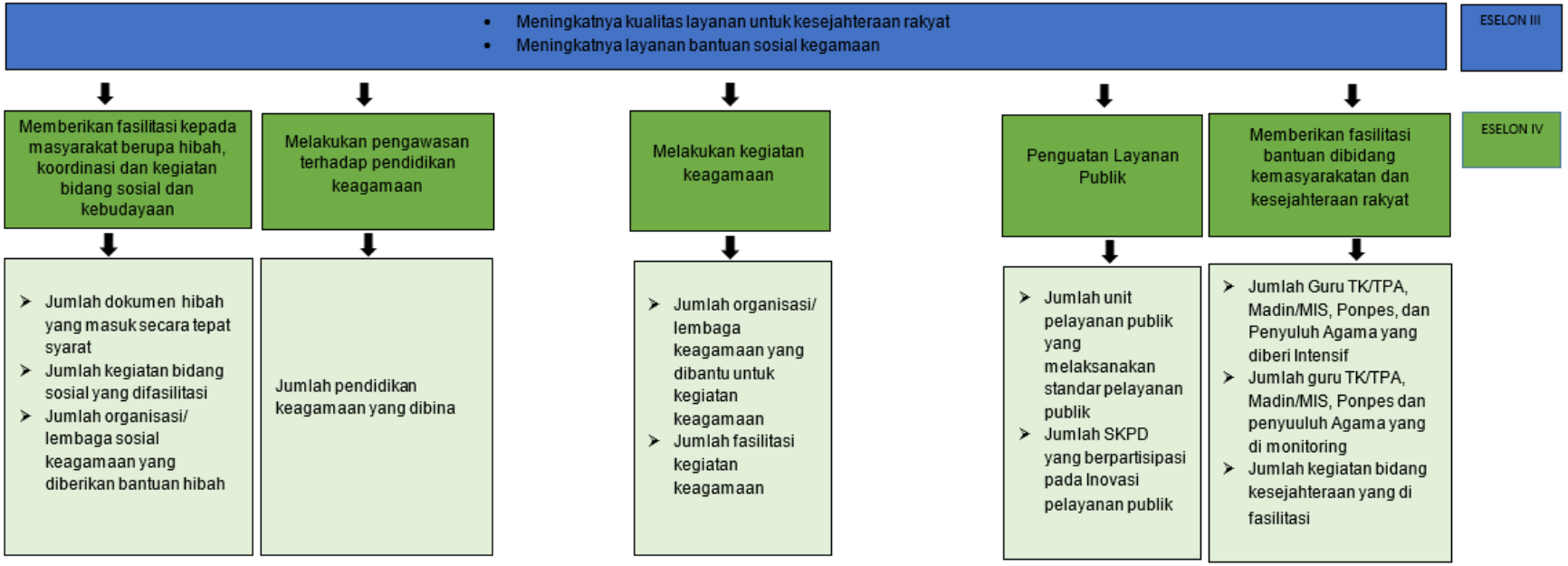
PROSES BISNIS INTI
(MISI KE- 3)



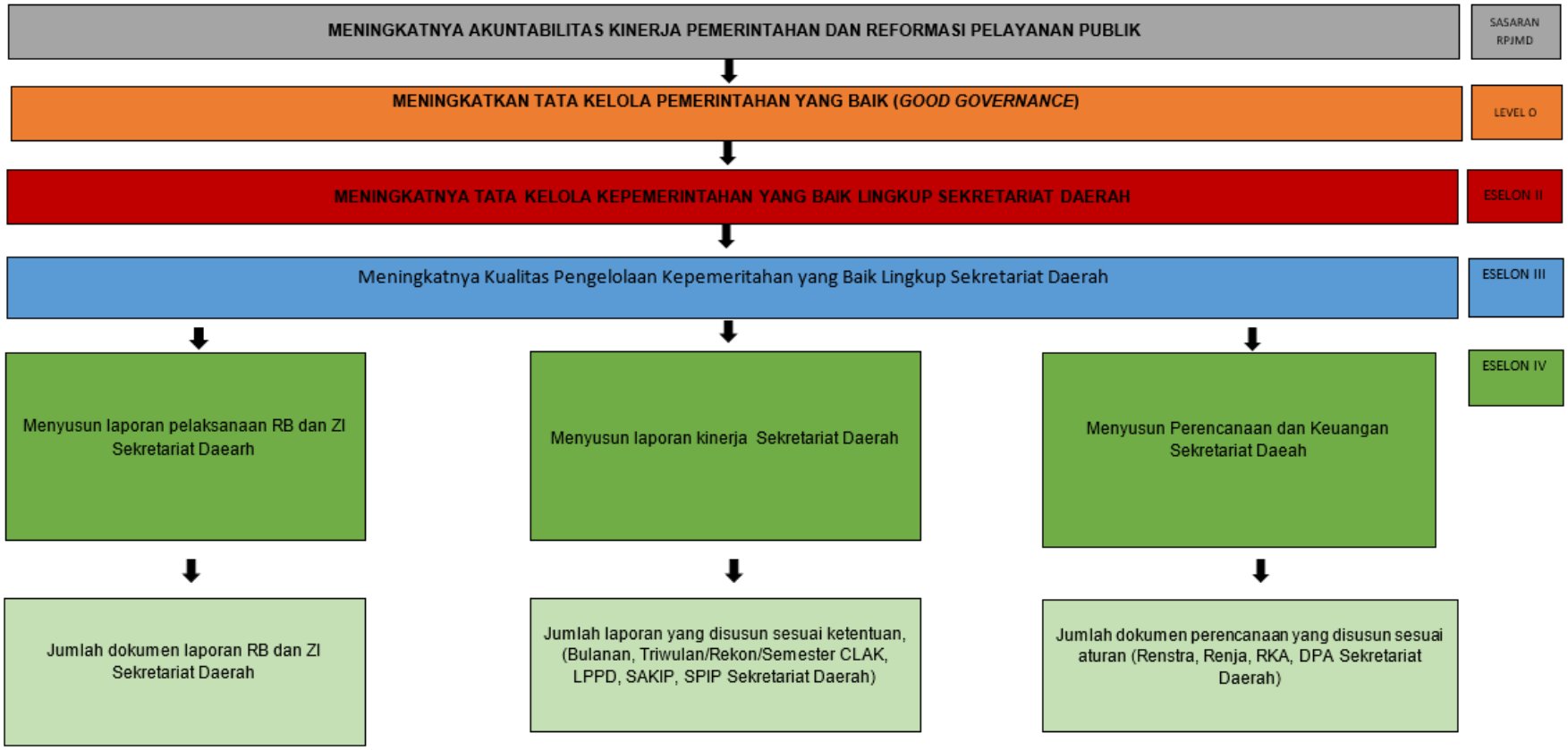
PROSES BISNIS INTI
(MISI KE- 3)



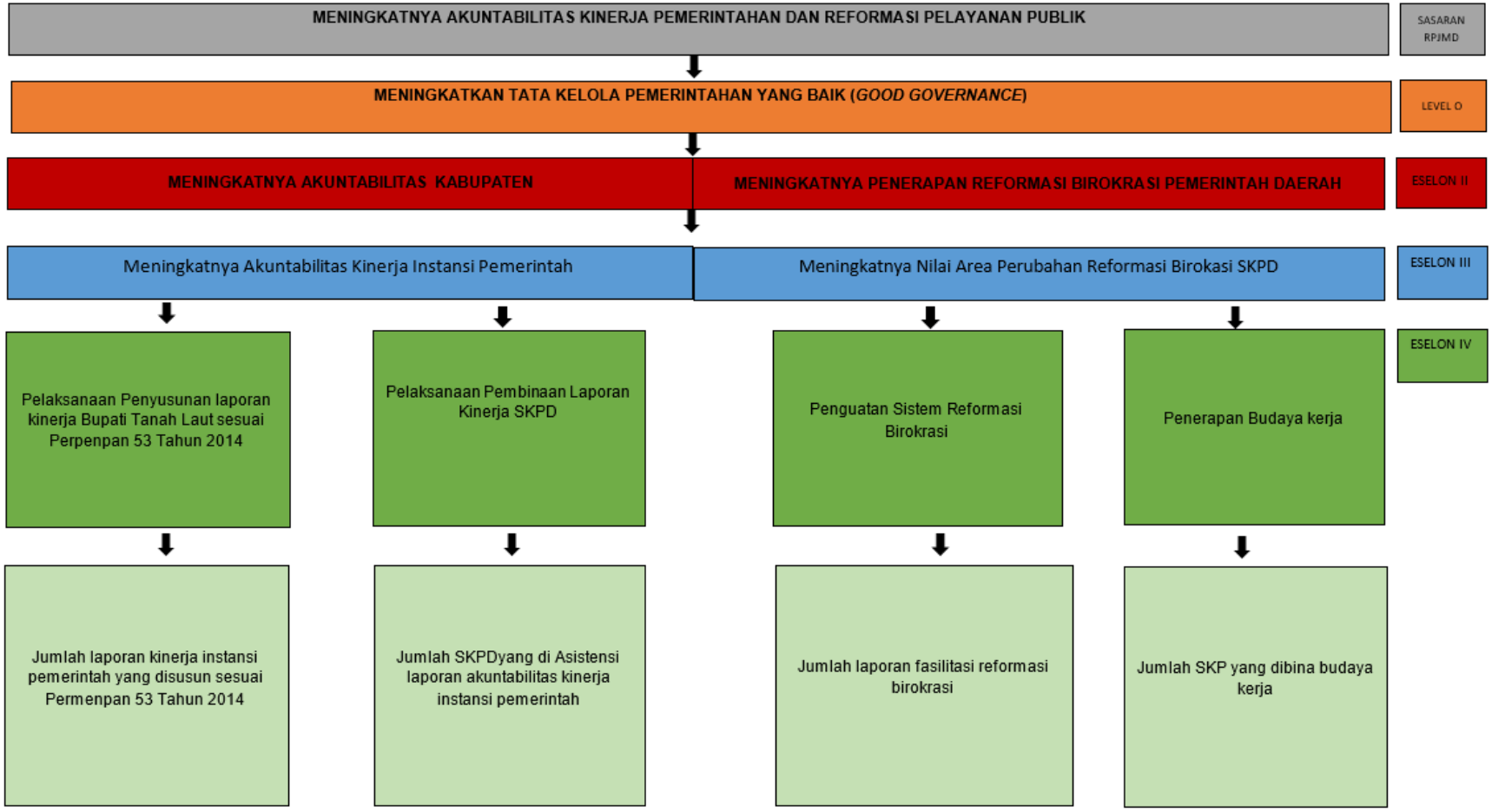
PROSES BISNIS INTI
(MISI KE- 3)



PROSES BISNIS INTI
(MISI KE- 3)



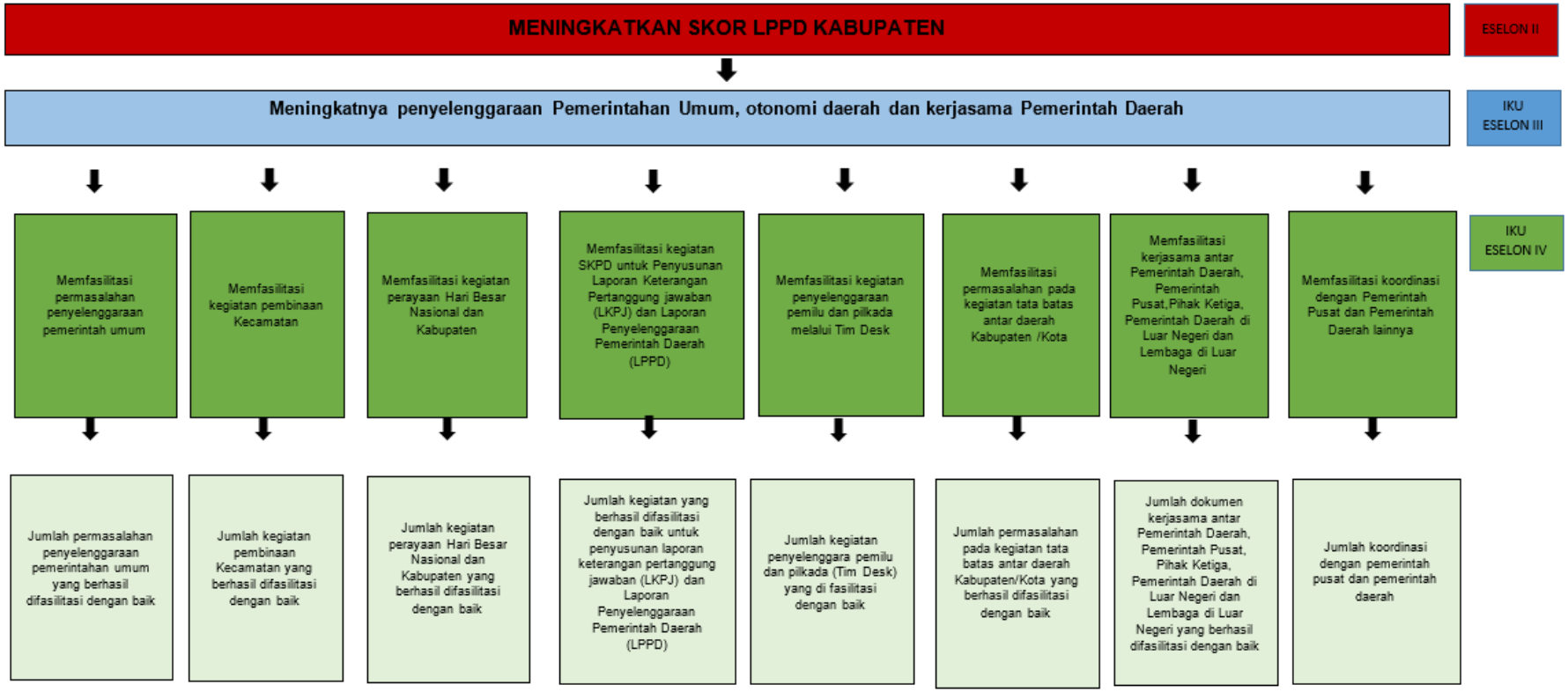
PROSES BISNIS INTI
(MISI KE- 3)



PROSES BISNIS INTI
(MISI KE- 3)



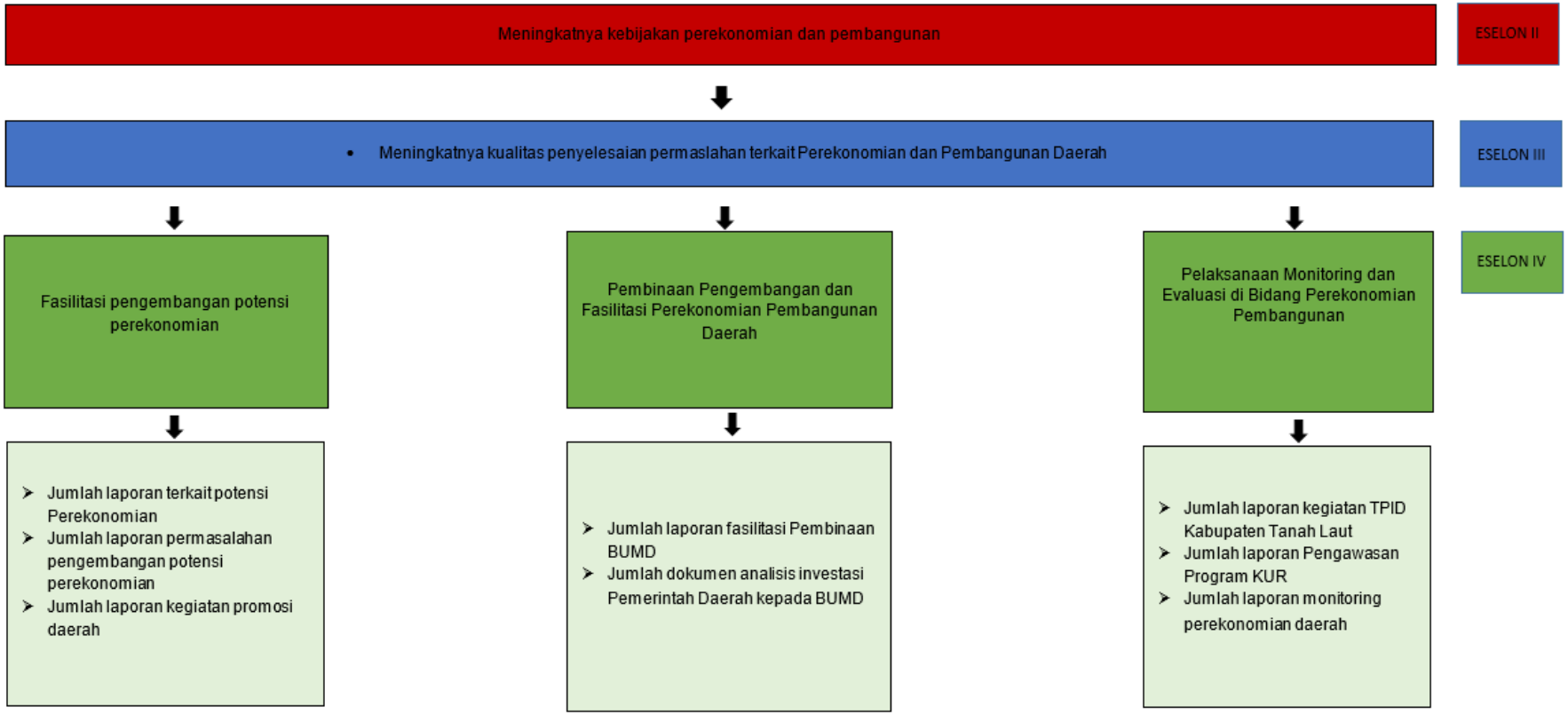
PROSES BISNIS INTI
(MISI KE- 3)



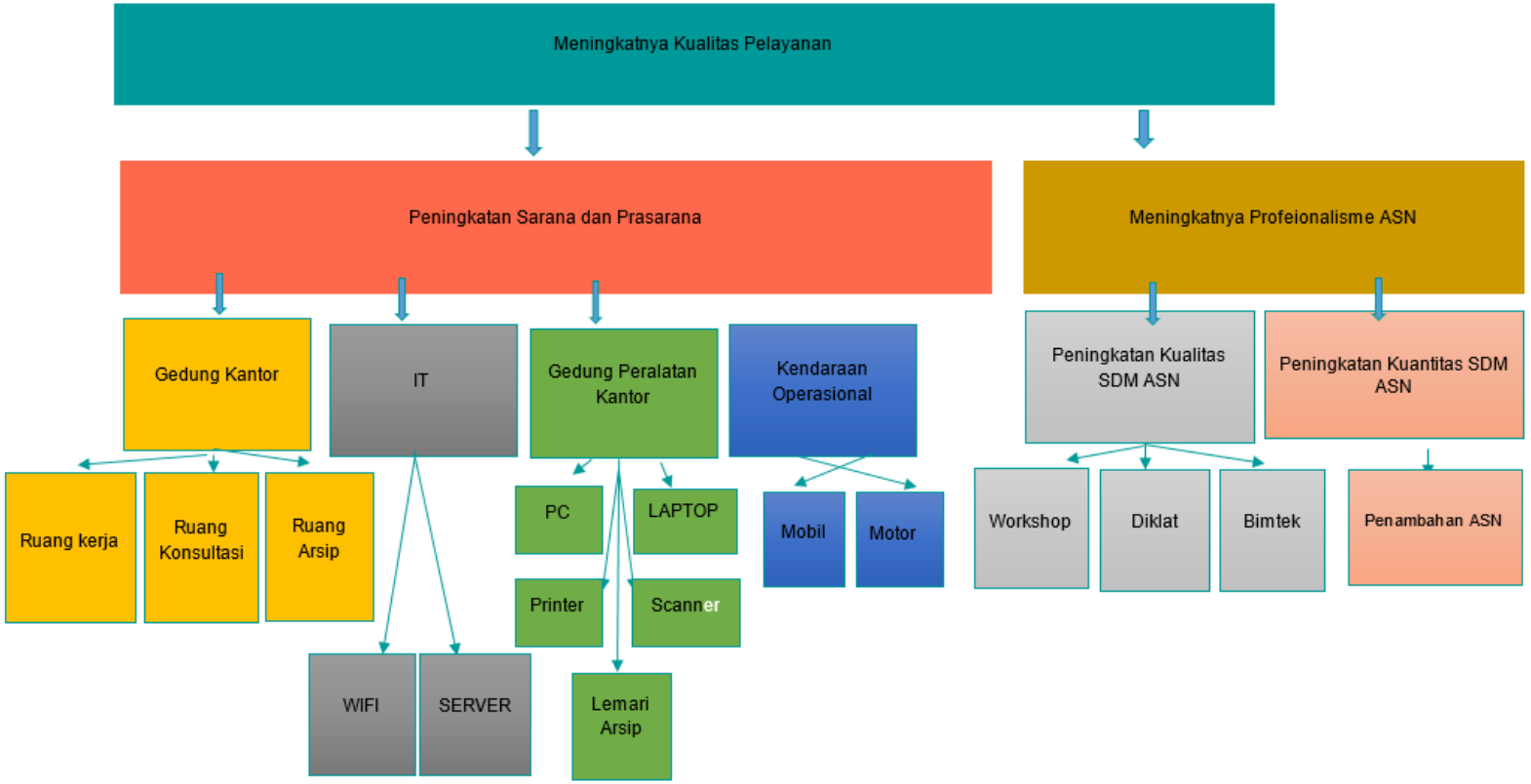
PROSES BISNIS INTI
(MISI KE- 3)



PROSES BISNIS INTI
(MISI KE- 5)



PROSES BISNIS PENDUKUNG



2. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembar Negara Republik IndonesiaTahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah di ubah dengan peraturan pemerintah nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubuhan Atas peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 06 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
b. pengoordinasian pelaksanaan tugas administrasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
c. perumusan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, perumusan produk hukum Daerah serta di bidang kesejahteraan masyarakat;
d. perumusan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengawasi di bidang Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam, dan Pengadaan Barang/Jasa;
e. perumusan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengawasi di bidang umum, organisasi, protokol, dan komunikasi pimpinan serta perencanaan dan keuangan;
f. perumusan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengembangkan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas:

a. Sekretaris Daerah;
b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
d. Asisten Administrasi Umum.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
a. Bagian Pemerintahan;
b. Bagian Hukum; dan
c. Bagian Kesejahteraan Rakyat.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:
a. Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam; dan
b. Bagian Pengadaan Barang/Jasa, yang terdiri atas Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/ Jasa.

Asisten Administrasi Umum, membawahi:
a. Bagian Umum, yang terdiri atas:
    1) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
    2) Sub Bagian Aset dan Perlengkapan; dan
    3) Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga.

b. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, yang terdiri atas Sub Bagian Protokol;
c. Bagian Organisasi; dan
d. Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dipimpin oleh Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten.

Sub bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Bagian.

(1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan kebijakan, penyusunan kebijakan Daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat melalui:

1) **Bagian Pemerintahan** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan darah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinaskan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrsi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerjasama dan otonomi daerah.
2) **Bagian Hukum** mempunyai tugas melaksanaan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang hukum dan hak asasi manusia dan pembentukan produk hukum penetapan, dokumentasi dan informasi hukum.
3) **Bagian Kesejahteraan Rakyat** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Pernagkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan budaya serta kesehjahteraan masyarakat.

(2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian administrasi pembangunan dan sumber daya alam dan pengadaan barang/jasa melalui:

1) **Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam** mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan

evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pembinaan BUMD dan BLUD, Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam;

2) **Bagian Pengadaan Barang/Jasa** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa.

(3) Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan kebijakan, penyusunan kebijakan Daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang umum, protokol dan komunikasi pimpinan, organisasi, dan perencanaan dan keuangan melalui:

1) **Bagian Umum** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi dibidang Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli, dan Kepegawaian, Aset Perlengkapan Serta Umum dan Rumah Tangga;
2) **Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan** mempunyai tugas melaksanakan penyiapaan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi;
3) **Bagian Organisasi** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana, dan Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
4) **Bagian Perencanaan dan Keuangan** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional

a. Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
b. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
c. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d. Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris Daerah.
e. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
f. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan kententuan peraturan perundang-undangan.
g. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber Daya Aparatur Sekretariat Daerah

Sumber daya aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Pendidikan dan Golongan Ruang sebagai berikut :

a. Sumber Daya Apaatur

Susunan Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut pada akhir Tahun 2023 berdasarkan Jabatan Struktural, JFT,JFU/Pelaksana berjumlah 99 (Sembilan puluh sembilan) orang, 1 (satu) orang PPPK dan 143 (seratus empat puluh tiga) orang Non PNS/PTT, yang meliputi :

1.	Sekretaris Daerah	:	1	Orang
2.	Asisten	:	3	Orang
3.	Staf Ahli Bupati	:	3	Orang
4.	Kepala Bagian Pemerintahan	:	1	Orang
5.	Kepala Bagian Hukum	:	1	Orang
6.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	:	1	Orang
7.	Kepala Bagian Perekonomian, Adminsitrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam	:	1	Orang
8.	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa	:	1	Orang
9.	Kepala Bagian Umum	:	1	Orang

10. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan : 1 Orang
11. Kepala Bagian Organisasi : 1 Orang
12. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan : 1 Orang
13. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa : 1 Orang
14. Kepala Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga : 1 Orang
15 Kepala Sub Bagian Aset dan Perlengkapan : 1 Orang
16. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian : 1 Orang
17. Kepala Sub Bagian Protokol : 1 Orang
18. JFU/ JFT/Pelaksana : 78 Orang
19. P3K : 1 Orang
20. Non PNS 143 Orang

Sedangkan susunan kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Golongan/Ruang adalah sebagai berikut :

Tabel Jumlah PNS berdasarkan Golongan/Ruang
Per 31 Desember 2023

NO	BAGIAN	GOLONGAN																	
		IV/d	IV/c	IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	II/b	II/a	I/d	I/c	I/b	I/a	IX	JML
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(19)
1	Sekretaris Daerah	1																	1
2	Asisten Sekretaris Daerah		3																3
3	Staf Ahli		2		1														3
4	Pemerintahan			1		1	1	1		2									6
5	Hukum			1		1	1	2										1	7
6	Kesejahteraan Rakyat				1	2		1	3										7
7	Pengadaan Barang/Jasa				2	8	3	2	3	3									21
8	Perekonomian Administrasi Pembangunan Sumber Daya Alam				1	2	1		1										5
9	Umum				1	1	2	4	5	4	1		2	1	1				22
10	Protokol dan Komunikasi Pimpinan				1		1	2	4	1									9
11	Organisasi			1		2		3	1										7
12	Perencanaan dan Keuangan			1		2		1	3	2									9
JUMLAH		1	5	4	7	19	10	16	20	12	1	-	2	1	1	-	-	1	100

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Umum Tahun 2023*

b. Aspek SDM Sekretariat Daerah

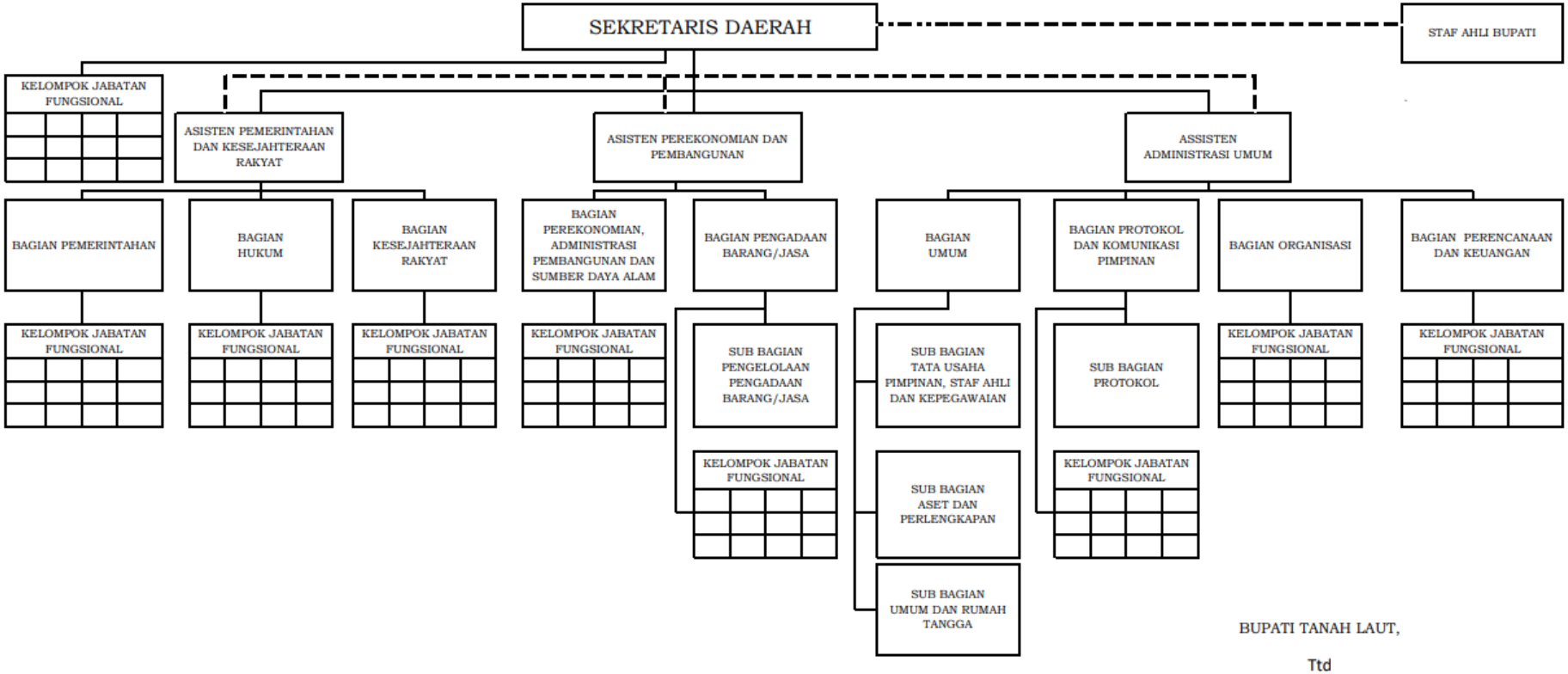
Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut berdasarkan pendidikan sebagai berikut :

NO	BAGIAN	PENDIDIKAN									
		S3	S2	S1	DIV	D3	D2	SMU	SMP	SD	JUMLAH
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Sekretaris Daerah		1								1
2	Asisten Sekda		3								3
3	Staf Ahli			3							3
4	Pemerintahan		2	2		1		1			6
5	Hukum		1	5		1					7
6	Organisasi			7							7
7	Pengadaan Barang Jasa		2	15		3		1			21
8	Perekonomian Adm Pembangunan SDA		3	1		1					5
9	Kesejahteraan Rakyat		1	3		2		1			7
10	Umum			4		2		12	1	3	22
11	Perencanaan dan Keuangan			5		1		3			9
12	Protokol dan Komunikasi Pimpinan			4			1	4			9
JUMLAH		-	13	49	-	11	1	22	1	3	100

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Umum Tahun 2023*

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 114 TAHUN 2021
TANGGAL : 13 Desember 2021



KETERANGAN
: Garis Komando
: Garis Koordinasi

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

F. Isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun , Sekretariat Daerah dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang *Good Governance* diperlukan penelaahan dan implementasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah yang merupakan unsur Staf.

Isu-isu Strategis pada Sekretariat Daerah antara lain sebagai berikut :

i. **Belum maksimalnya pemanfaatan sistem pengadaan guna mendapatkan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik sebagai salah indikator Reformasi Birokrasi General aspek indikator ANTARA dalam Indeks Reformasi Birokrasi**

Berdasarkan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Minimal Baik sebagai Aspek Indikator Antara Dalam Indeks Reformasi Birokrasi (RB) disebutkan bahwa ITKP minimal Baik terdiri dari indikator yang mengukur tata kelola pengadaan dalam tingkat operasional, baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kelembagaan, maupun dari segi sistem pengadaan, yaitu sebagai berikut :

1. Pemanfaatan Sistem Pengadaan, yang terdiri dari:
   a. SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan);
   b. *E-Tendering/E-Seleksi*;
   c. *E-Purchasing*;
   d. *Non-E-Tendering & Non-E-Purchasing*; dan
   e. E-Kontrak.
2. Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ.
3. Tingkat Kematangan UKPBJ.

Nilai ITKP minimal BAIK ini akan berpengaruh terhadap Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).

Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Tahun 2023 Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut memperoleh penilaian dengan **bobot 80.82** dengan predikat **BAIK**. Adapun nilai pembobotan per *item* penilaian yaitu :

NO	PENILAIAN INDIKATOR		NILAI BOBOT
1.	Pemanfaatan Sistem Pengadaan		
	a.	SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan)	10
	b.	E-Tendering (Tender/Seleksi/Tender Cepat)	4.99
	c.	E-Purchasing + Toko Daring	1
	d.	Non E-Tendering dan Non E-Purchasing; dan	3.09
	e.	E-Kontrak	4.44
	Total pemanfaatan sistem pengadaan		23.51
2.	Kualifikasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ)		17.31
3.	Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) (Surat Edaran LKPP RI No. 4 Tahun 2021, 2021).		40.00
	Total capaian ITKP		80.82

Dari tabel di atas maka diketahui bahwa salah satu **isu strategis Bagian PBJ** adalah pemanfaatan sistem pengadaan oleh pelaku pengadaan guna menaikkan nilai ITKP Kab. Tanah Laut sebagai aspek indikator ANTARA dalam Indeks Reformasi Birokrasi.

Adapun langkah yang akan dilakukan oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa guna menaikkan nilai ITKP Kab. Tanah Laut di Tahun 2023 yaitu :

- Membuat Surat Edaran untuk disebarkan ke SKPD guna pemenuhan Data ITKP;
- Melaksanakan pendampingan ke SKPD untuk pemanfaatan sistem pengadaan;
- Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pemanfaatan sistem pengadaan di SKPD (setiap triwulan).

ii. Belum terpenuhinya Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) sesuai dengan rekomendasi dari LKPP

Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen penting agar sebuah organisasi lembaga dapat berjalan dengan baik. Tanpa adanya elemen tersebut atau kualitasnya yang kurang baik, organisasi lembaga akan sulit untuk berjalan dan beroperasi dengan semestinya meski sumber daya yang lain telah terpenuhi.

Berdasarkan Jumlah eksisting, ketersedian Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) di Pemerintah Kab. Tanah Laut saat ini adalah :

NO	JABATAN	JUMLAH
1.	JF PPBJ Pertama	4 orang
2.	JF PPBJ Muda	7 orang
3.	JF PPBJ Madya	2 orang
	Total	**13 orang**

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2023*

Berdasarkan surat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP) RI tanggal 25 Mei 2021 Nomor : 10197/D.3.1/05/2021 Perihal : Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kab. Tanah Laut, disampaikan bahwa Rekomendasi Kebutuhan JF PPBJ di Lingkungan Pemerintah Kab. Tanah Laut yg disampaikan LKPP RI terkait usulan perhitungan kebutuhan JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kab. Tanah Laut, yaitu :

NO	Nama Jabatan	Rekomendasi Instansi Pembina
1	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	14
2	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	9
3	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya	3
	TOTAL	26

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2021*

Dari paparan kedua tabel di atas maka diketahui bahwa masih terdapat kekurangan formasi JF PPBJ sebanyak 13 orang.

Untuk itu maka, Bagian Pengadaan Barang/Jasa berusaha mengusulkan kepada Bupati Tanah Laut untuk dapat memenuhi formasi JF PPBJ tersebut sesuai dengan jumlah yang ditentukan dengan cara pembukaan formasi pada penerimaan CPNS untuk Kabupaten Tanah Laut atau memfasilitasi melalui perpindahan dari jabatan lain ke JF PPBJ.

iii. Pengendalian Inflasi di Kabupaten Tanah Laut

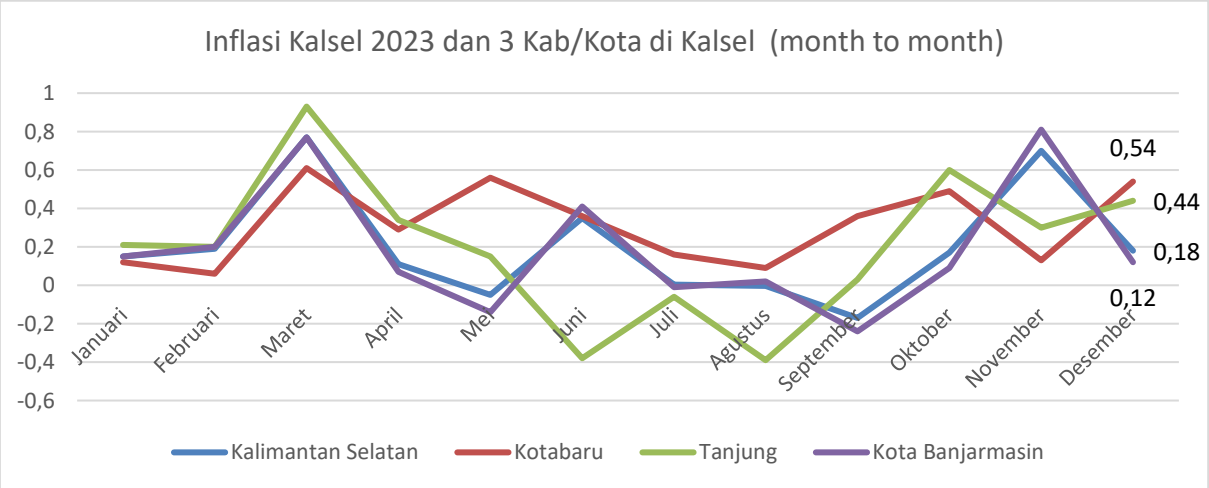
Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi. Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di Indonesia. BPS melakukan survei untuk mengumpulkan data harga dari berbagai macam barang dan jasa yang dianggap mewakili belanja konsumsi masyarakat. Data tersebut kemudian digunakan untuk menghitung tingkat inflasi dengan membandingkan harga-harga saat ini dengan periode sebelumnya.

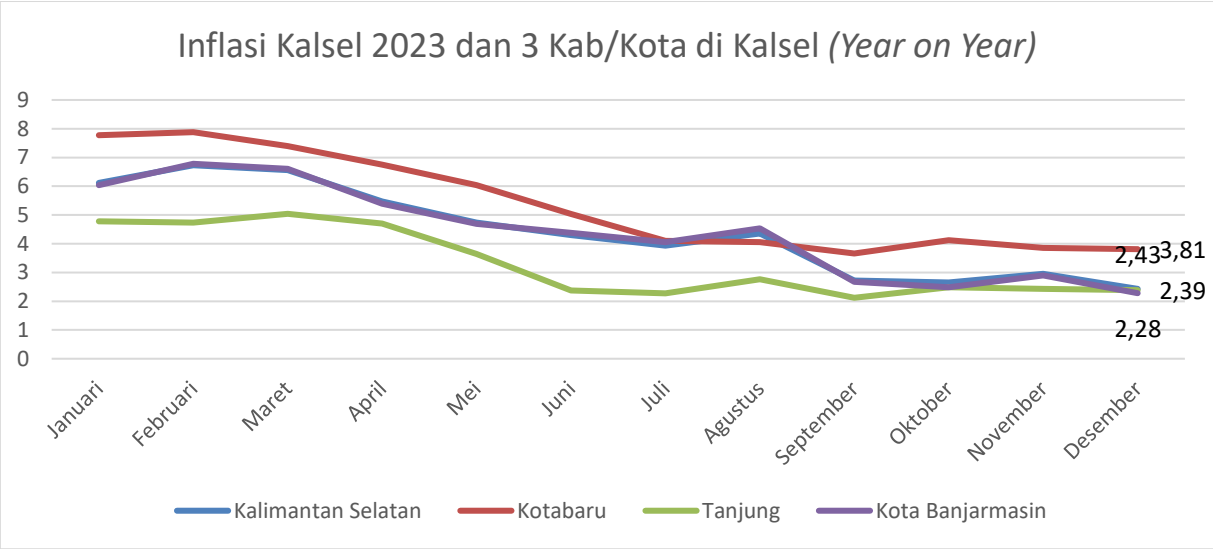
Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pertama, inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin. Kedua, inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (uncertainty) bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, tingkat inflasi domestik yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat inflasi di negara tetangga menjadikan tingkat bunga domestik riil menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai Rupiah. Keempat, kestabilan harga memiliki peran penting dalam mendukung upaya menjaga stabilitas sistem keuangan.

Dengan pertimbangan bahwa laju inflasi juga dipengaruhi oleh faktor yang bersifat kejutan tersebut maka pencapaian sasaran inflasi memerlukan kerja sama dan koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia melalui kebijakan makroekonomi yang terintegrasi baik dari kebijakan fiskal, moneter maupun sektoral. Lebih jauh, karakteristik inflasi Indonesia yang cukup rentan terhadap kejutan-kejutan dari sisi penawaran memerlukan kebijakan-kebijakan khusus untuk permasalahan tersebut.

Kabupaten Tanah Laut sampai dengan Tahun 2023 bukan sebagai Kabupaten penghitung inflasi di Kalimantan Selatan dan pada tahun 2024 Kabupaten Tanah Laut ditambahkan sebagai Kabupaten Penghitung Inflasi di Kalimantan Selatan bersama dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Adapun kota penghitung inflasi di Kalimantan selatan yang sudah ada adalah Kota Banjarmasin, Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Kotabaru. Inflasi Kabupaten Tanah Laut selama ini digunakan adalah inflasi Kota Banjarmasin.

Berikut adalah trend inflasi selama tahun 2023 untuk provinsi kalsel dan 3 Kabupaten/Kota lainnya di Kalimantan Selatan

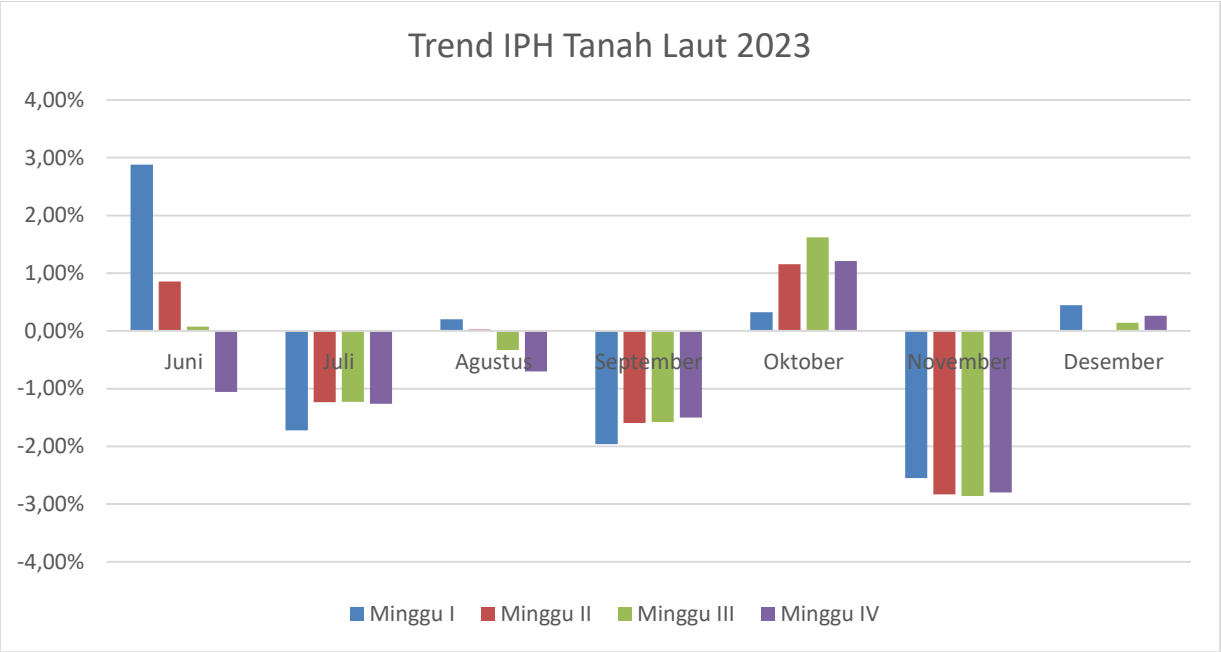




Inflasi Provinsi Kalimantan Selatan dan 2 Kab/Kota di Kalimantan Selatan sudah selaras dengan tingkat inflasi nasional 2,61%, kecuali Kabupaten Kota Baru yang angka inflasinya masih diatas angka provinsi dan nasional yaitu 3,81%.

Walaupun bukan sebagai penghitung inflasi, Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2023 adalah salah satu Kabupaten yang dihitung IPH nya (baca, Indeks Perubahan Harga). IPH adalah indeks yang mengukur perubahan harga-harga 20 komoditas pangan yang memiliki bobot besar dalam IHK dan dapat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah daerah. IPH memiliki beberapa keunggulan, seperti dapat dikendalikan dalam jangka pendek, dapat digunakan sebagai sarana evaluasi kinerja kepala daerah dalam pengendalian inflasi, dan mudah dihitung dan dipahami. IPH dihitung oleh BPS RI dengan sumber data dari dinas perdagangan setempat.

20 komoditas yang termasuk dalam penghitungan IPH adalah beras, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, cabe merah, cabe rawit, minyak goreng, gula pasir, bawang putih, daging sapi, tepung terigu, ikan bandeng, ikan nila, ikan lele, kangkung, bayam, wortel, tomat, pisang, dan jeruk. Masing-masing komoditas memiliki bobot masing-masing, dengan bobot terbesar adalah beras (28.50%), daging ayam ras (10.14%), dan telur ayam ras (7.86%). Berikut adalah trend IPH Tanah Laut dalam 6 bulan terakhir.



permasalahan – permasalahan yang muncul dalam rangka menjaga IPH Kabupaten Tanah Laut antara lain :

A. Beberapa komoditi yang dihitung IPH nya berasal dari luar daerah seperti bawang merah, bawang putih, gula pasir dan minyak goreng.

B. Beberapa komoditi bahan pangan yang dihasilkan di Tanah Laut tapi harganya masih tidak bisa dikendalikan karena tergantung dari harga korporasi (daging ayam ras dan telur ayam ras).

C. Hasil pertanian di Kabupaten Tanah Laut masih banyak yang keluar daerah dan harga di internal Kabupaten Tanah Laut masih tergantung harga pasar di luar daerah.

D. Tidak adanya pedagang besar yang dapat bertindak sebagai agen, sehingga kerjasama antar daerah sulit untuk dilaksanakan.

E. Supply data pergerakan IPH dan komoditi pendorong IPH masih lambat dari BPS sehingga antisipasi dari Pemerintah Daerah sering terlambat.

Adapun beberapa langkah yang telah dilakukan oleh Bagian Perekonomian, Adm Pembangunan dan SDA dalam menyikapi permasalahan tersebut antara lain :

1) Optimalisasi kegiatan monitoring stock dan harga bapok penting yang masuk dalam perhitungan IPH untuk memastikan ketersediaan dan harga yang stabil.

2) Secara rutin melaksanakan kegiatan operasi pasar murah dilokasi prioritas daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi.
3) Merancang penggunaan BTT untuk kegiatan pengendalian IPH dan inflasi di tahun 2024
4) Mengkaji pemanfaatan koperasi sebagai offtaker bahan pokok, khususnya menyerap hasil pertanian agar tidak semua kelaur daerah dan dapat mengontrol harga di dalam daerah
5) Mendorong koperasi untuk menjadi agen bahan pokok yang berasal dari luar daerah.

Pengendalian laju dan tingkat inflasi memiliki peran vital dalam bidang makroekonomi. Keberhasilan pengendalian inflasi menjadi sangat penting karena dampak dari inflasi akan dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat, terutama saat inflasi berada pada tingkat tinggi dan tidak stabil mengakibatkan menurunnya kesejahteraan masyarakat. Pengendalian inflasi harus tetap dijaga sesuai dengan range target yang ditetapkan, hal ini sangatlah penting karena inflasi yang tinggi pada suatu daerah akan menggerus pertumbuhan ekonominya.

Inflasi dan pertumbuhan ekonomi adalah dua hal yang saling berkaitan satu sama lain, menjaga inflasi tetap rendah dan stabil akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan dengan inflasi yang rendah dan stabil maka kegiatan perekonomian akan berjalan dengan baik. Inflasi yang rendah dan stabil akan mendorong pengusaha untuk meningkatkan produksi mereka. Kenaikan harga yang diciptakan oleh inflasi akan menstimulasi pengusaha untuk meningkatkan produksi mereka dikarenakan keuntungan yang diharapkan oleh mereka menjadi lebih besar. Peningkatan produksi berarti menimbulkan kenaikan nilai produk domestik bruto (PDB) yang berarti akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

G. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran

Pelaksanaan Indikator Kinerja Eselon III Lingkup Sekretariat Daerah yang didukung oleh Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasaranan dan Anggaran Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran
Sekretariat Daerah Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2023 (Rp)	%	SDM	KET
1	Persentase layanan Pimpinan/ Bagian/ SKPD/ Masyarakat dengan baik	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA KABUPATEN/ KOTA**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**					BAGIAN UMUM
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.314.600.000	4.457.108.602	92.57%	3 Orang	
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					BAGIAN UMUM
			- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	241.812.064	357.851.077	99.90%	3 Orang	
2	Persentase layanan pada bagian-bagian Lingkup Setda sarana prasarana/ aset milik Setda terkelola dengan baik		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**					BAGIAN UMUM
			- Sub Kegiatan Peyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bagunan Kantor	61.704.905	82.066.500	94.65%	3 Orang	
			- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	75.822.034	96.542.900	77.71%	3 Orang	
			- Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.480.000	6.275.000	38.73%		
			Kegiatan Peyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					BAGIAN UMUM
			- Sub Kegiatan Peyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	284.582.310	1.215.531.386	93.56%	3 Orang	

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2023 (Rp)	%	SDM	KET
			- Sub Kegiatan Peyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.362.939.601	3.628.988.218	98.21%	3 Orang	
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					BAGIAN UMUM
			- Sub Kegiatan Peyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	246.896.500	326.865.589	99.11%	3 Orang	
			- Sub Kegiatan Peyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	1.149.740.000	1.746.410.598	99.99%	3 Orang	
			- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	241.812.064	304.924.250	99.44%	3 Orang	
			- Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya		357.851.077	99.90%	3 Orang	
3	Persentase Pelaksanaan Kebijakan, Pemantauan dan Evalusai di Bidang Tata Usaha Pimpina, Staff Ahli dan Kepegawaian		**Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**					BAGIAN UMUM
			Penyedia Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	138.379.817	120.782.250	87.28%	3 Orang	
			Kegiatan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat daerah				3 Orang	BAGIAN UMUM
			- Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam melaksanakan tugas	30.000.000	0	0		
			Kegiatan Adminstrasi Umum Perangkat daerah					BAGIAN UMUM
			- Sub Kegiatan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang Undangan	15.000.000	14.820.000	98.80%		
			- Sub Kegiatan Peyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.314.600.000	4.457.108.602	92.57%	3 Orang	

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2023 (Rp)	%	SDM	KET
			- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	166.514.628	1.215.531.386	93.56%	3 Orang	
4	Nilai Komponen area perubahan Reformasi Birokrasi lingkup Sekretariat Daerah		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**					BAGIAN UMUM
5	Nilai Komponen area perubahan Zona Integritas lingkup Sekretariat Daerah		Sub Kegiatan Peyediaan barang cetakan dan Penggandaan	43.454.423	60.410.990	89.33%	3 Orang	
			Kegiatan Peyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					BAGIAN UMUM
			Sub Kegiatan Peyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.674.000.000	1.590.715.747	95.02%	3 Orang	
			Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah					BAGIAN UMUM
			- Sub Kegiatan Peyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	631.990.000	681.221.000	86.24%	3 Orang	
			- Sub Kegiatan Peyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	419.990.000	343.384.000	81.76%	3 Orang	
			- Penyedia Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1.048.835.000	1.451.080.850	97.35%		
1	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang berhasil di tindaklanjuti	**PROGRAM PEMERITAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan**					BAGIAN PEMERINTAHAN
2	Persentase kegiatan peringatan hari besar Nasional/Kabupaten yang diselenggarakan		Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	207.496.995	271.381.868	89.93%	4 (empat) orang	
3	Persentase Penyelesaian Permasalahan Pada Kegiatan Pemekaran Kecamatan		**Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan**					BAGIAN PEMERINTAHAN
			Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	216.916.270	217.838.271	80.53%	4 (empat) orang	

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2023 (Rp)	%	SDM	KET
4	Persentase Pemenuhan IKK SKPD		**Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan**					BAGIAN PEMERINTAHAN
			Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	174.535.403	638.602.000	95.04%	4 (empat) orang	
5	Persentase Dokumen Kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil ditindaklanjuti		**Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah**					BAGIAN PEMERINTAHAN
			Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	149.928.665	271.381.868	89.93%	4 (empat) orang	
	Persentase SKPD dengan nilai komponen pelaporan kinerja minimal 10	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA KABUPATEN/ KOTA**	**Kegiatan Penataan Organisasi**					BAGIAN ORGANISASI
	Nilai Komponen Area Perubahan RB SKPD		Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	295.047.321	254.588.847	86.29%	3 Orang	
	Persentase unit pelayanan dengan nilai SKM minimal 80		**Kegiatan Penataan Organisasi**					BAGIAN ORGANISASI
	Persentase SKPD yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)		Sub Kegiatan Fasilitasi pelayanan publik dan tatalaksana	124.754.512	85.217.862	86.31%	2 Orang	
	Persentase Perangkat daerah dengan kelembagaan yang efektif		**Kegiatan Penataan Organisasi**					BAGIAN ORGANISASI
			Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	102.472.697	95.875.300	93.56%	2 Orang	

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2023 (Rp)	%	SDM	KET
	Persentase layanan administrasi Bidang Perencanaan	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kegiatan Perancanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				- Kabag Perencanaan dan Keuangan - Sub Koordinator Perencanaan - Pengelolaa Perencanaan - PTT (2 Orang)	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
			- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.749.891	15.749.891	15.696.200		
	Persentase kualitas penyusunan pelaporan kinerja yang sesuai aturan		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				- Kabag Perencanaan dan Keuangan - Sub Koordinator Keuangan - Verifikator Keuangan - Bendahara Pengeluaran - Pengadministrasi Keuangan - Pengadministrasi Penerimaan PTT (3 Orang)	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
			- Sub Kegiatan Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	21.22.961.218.512	21.22.961.218.512	20.183.402.971		
	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan sesuai aturan		- Sub Kegiatan Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	14.999.893	14.999.893	11.175.600		
			Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	817.592.612	817.592.612	670.787.480		
	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				- Kabag Perencanaan dan Keuangan - Sub Koordinator Pelaporan - PTT (2 Orang)	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	Nilai SPIP Sekretariat Daerah		- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.999.529	14.999.529	12.064.700		
	Persentase paket pengadaan yang terlayani dalam pengadaan/jasa sesuai standard dan tepat waktu	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa**					BAGIAN PBJ

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2023 (Rp)	%	SDM	KET
			Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	649.706.599	442.424.156	66.03%	1 Kasubbag, 15 JF PPBJ dan 1 Pengelola ULP 2 PTT	
	Persentase SKPD yang melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem LPSE							
	Persentase SDM yang Kompeten dalam pengadaan Barang/Jasa		**Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa**					BAGIAN PBJ
	Persentase Efisiensi pagu Pengadaan Barang Jasa		Sub Kegiatan Pengelolaan layanan Pengadaan Secara Elektronik	224.540.658	279.597.500	97.90%	1 (Sub Koordinator) dan 3 Staf LPSE 2 PTT 2 TENAGA AHLI	
			Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa					BAGIAN PBJ
			sub kegiatan pengelolaan barang dan jasa	436.527.295	362.200.978	82.97%	1 (Sub Koordinator) 2 PTT	
	Persentase informasi produk hukum	**PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**					BAGIAN HUKUM
			Sub Kegaiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	268.095.055	313.830.296	80.79%	5 - Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda (1 orang) - Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum (1 orang) PTT (3 orang)	
	Persentase produk hukum yang harmonis		**Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**					BAGIAN HUKUM
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	584.439.643	734.031.291	81.33%	4 - Penyuluh Hukum Muda (1 orang)	

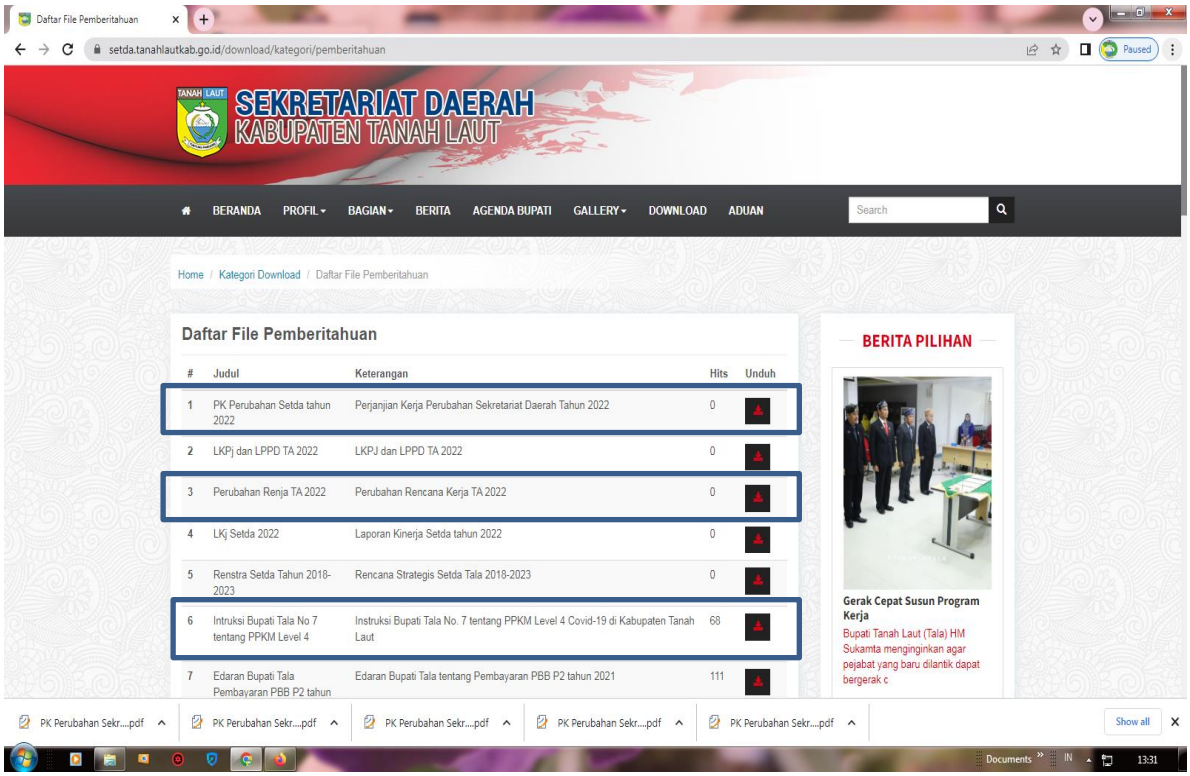
NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2023 (Rp)	%	SDM	KET
							- Penyusun Bahan Bantuan Hukum (1 orang) PTT (2 orang)	
	Persentase kasus/perkara hukum yang tertangani	Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat	**Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**					BAGIAN HUKUM
	Nilai Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM)	Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	297.667.972	577.948.224	61.58%	4 - Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda (1 orang) - Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum (1 orang) PTT (2 orang)	
	Persentase penyebarluasan informasi/ pemberitaan pembangunan pemerintahan daerah yang bisa diakses masyarakat melalui media	Program Penunjang Urusan Pemda Kabupaten/Kota	**Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**					BAGIAN PROKOPIM
	Presentase komunikasi pimpinan yang terfasilitasi		- Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	265.883.641	349.788.200	92.82%	7	
	Persentase pengaduan masyarakat yang ditandaklanjuti							
	Persentase kegiatan dokumentasi KDH/WKDH yang terlayani		- Sub Kegiatan Fasilitasi Pendokumentasian Tugas Pimpinan	205.515.838	422.330.100	90.72%	8	
	Persentase kegiatan KDH/WKDH/SKPD/ tamu Daerah yang terlayani keprotokolannya		- Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	189.640.028	445.113.123	91.37%	11	
	Persentase peningkatan Lembaga sosial dan keagamaan yang dibina	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHRTERAAN RAKYAT**	**Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**					BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
			- Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	9.217.255.530	8.921.864.464	96.09%	4	

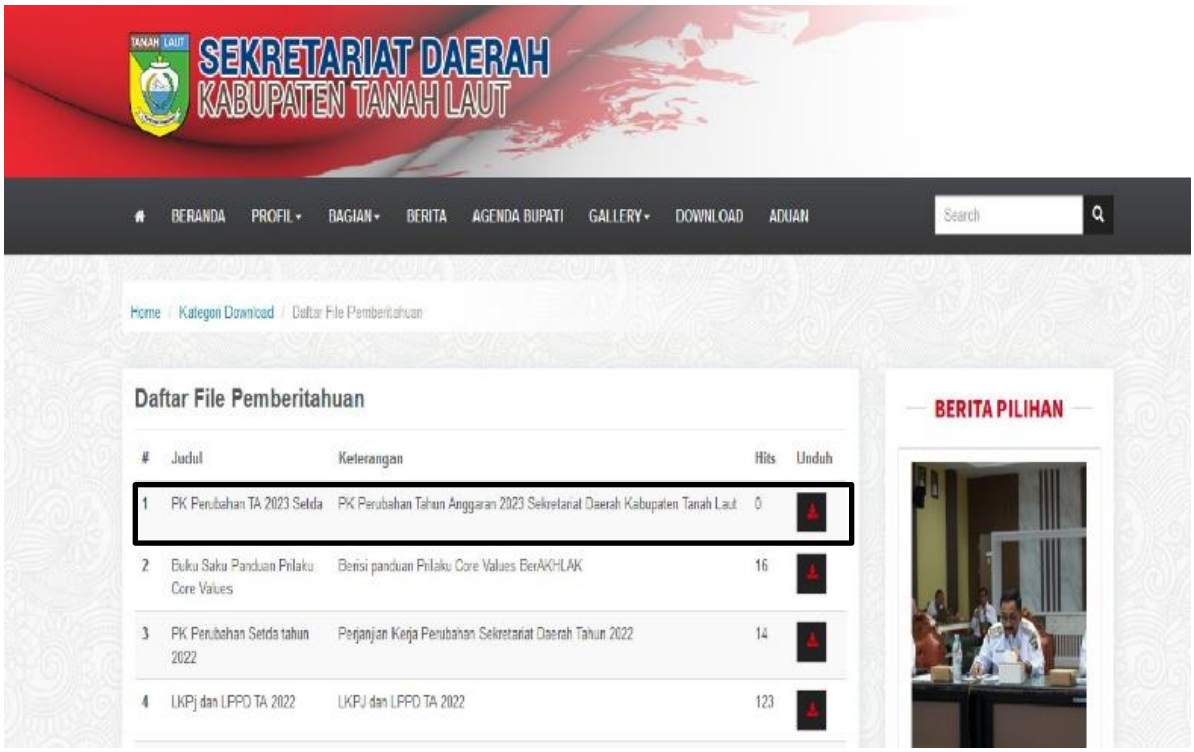
NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2023 (Rp)	%	SDM	KET
	Persentase layanan bantuan sosial keagamaan		- Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluas, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	21.392.598.317	20.972.958.226	98.04%	4	
	Persentase hasil tindak lanjut koordinasi kegiatan bidang keagamaan, pemuda dan olahraga		- Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	4.137.404.825	3.422.672.460	82.95%	6	
	Persentase penyelesaian permasalahan terkait perekonomian dan pembangunan	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**					BAGIAN PEREKONOMIAN, ADM PEMBANGUNAN DAN SDA
			- Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	213.707.500	223.171.250	94%	3 Orang 2 PNS dan 1 PTT	
	Persentase BUMD yang berkinerja positif		- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	246.893.160	190.315.020	63.88%	3 Orang 1 PNS dan 2 PTT	
	Persentase UMKM yang terfasilitasi permodalan		- Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	74.586.909	126.616.528	88.40%		
	Persentase SKPD yang menyampaikan laporan progres pembangunan fisik		**Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**					BAGIAN PEREKONOMIAN, ADM PEMBANGUNAN DAN SDA
			- Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	45.760.600	45.177.252	98.73%	3 Orang 2 PNS dan 1 PTT	

H. Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Surat Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 7001.2.1/166-LHE AKIP/Insp/2023 Tanggal 27 Juni 2023 Perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) SKPD Tahun 2022 bahwa ada 4 (empat) komponen yang direkomendasikan untuk di tindaklanjuti, yaitu :

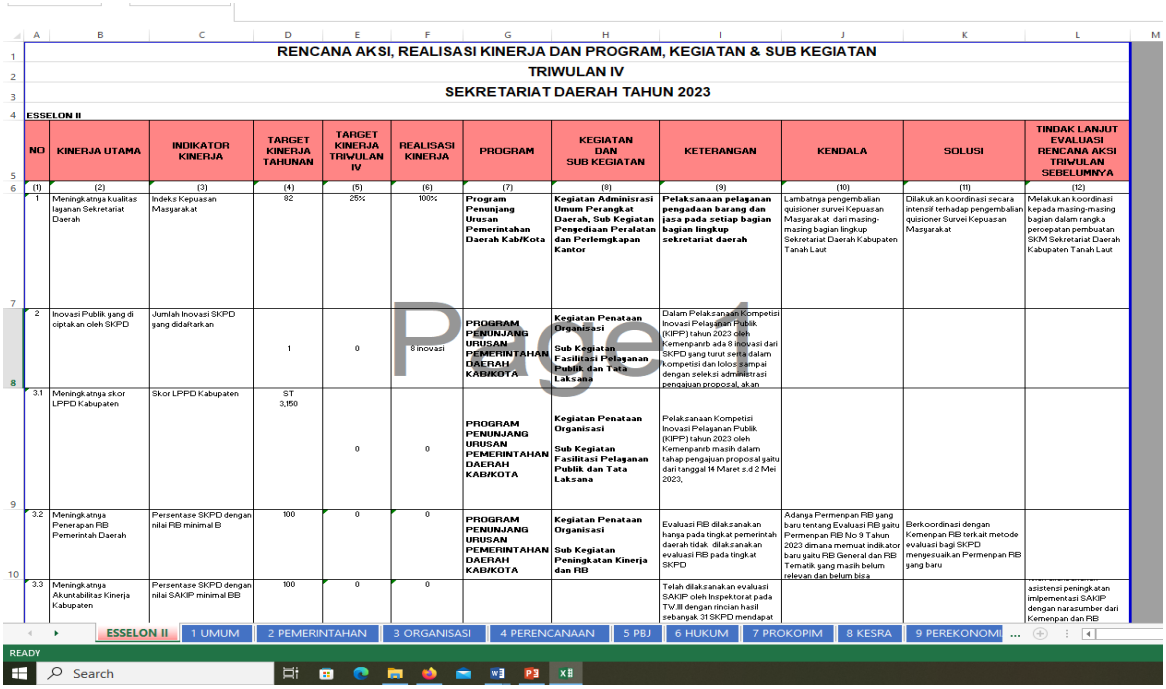
KOMPONEN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
PERENCANAAN KINERJA	Agar dokumen perencanaan kinerja dapat dipublikasikan pada website resmi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.	Dokumen Perencanaan Kinerja yaitu, Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Kerja dan Rencana Strategis (RENSTRA) telah dipublikasikan pada website resmi Sekretaris Daerah yaitu http://setda.tanahlautkab.go.id/administrator





KOMPONEN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
PENGUKURAN KINERJA	Agar kedepannya dapat mengimplementasikan monitoring secara berkala atas hasil pencapaian kinerja dan dilakukan berjenjang pada setiap bagian.	Kedepannya Implementasi SAKIP : 1. Dilakukan monitoring secara berkala dalam rangka pencapaian kinerja dengan cara berjenjang pada masing – masing Bagian Lingkup Sekretariat Daerah. 2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara Triwulan.

1. Telah dilaksanakan monev capaian kinerja secara triwulan melalui rapat monev dan disajikan dalam bentuk data Rencana Aksi, Realisasi Kinerja Dan Program, Kegiatan & Sub Kegiatan Kegiatan



RENCANA AKSI, REALISASI KINERJA DAN PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN
TRIWULAN IV
SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2023

ESSELON II

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUNAN	TARGET KINERJA TRIWULAN IV	REALISASI KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KETERANGAN	KENDALA	SOLUSI	TINDAK LANJUT EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN SEBELUMNYA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	82	25%	100%	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Pengedaan Peralatan dan Perlemgkapan Kantor**	**Pelaksanaan pelayanan pengadaan barang dan jasa pada setiap bagian bagian lingkup sekretariat daerah**	Lambatnya pengembalian quisioner survei Kepuasan Masyarakat dari masing-masing bagian lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut	Dilakukan koordinasi secara intensif terhadap pengembalian quisioner Survei Kepuasan Masyarakat	Melakukan koordinasi kepada masing-masing bagian dalam rangka percepatan pembuatan SKM Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut
2	Inovasi Publik yang di ciptakan oleh SKPD	Jumlah Inovasi SKPD yang didaftarkan	1	0	8 inovasi	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUKOTA**	**Kegiatan Penataan Organisasi** **Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana**	Dalam Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tahun 2023 oleh Kemenpanrb ada 8 inovasi dari SKPD yang turut serta dalam kompetisi dan lolos sampai dengan seleksi administrasi pengajuan proposal, akan			
3.1	Meningkatnya skor LPPD Kabupaten	Skor LPPD Kabupaten	ST 3,150	0	0	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUKOTA**	**Kegiatan Penataan Organisasi** **Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana**	Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tahun 2023 oleh Kemenpanrb masih dalam tahap pengajuan proposal yaitu dari tanggal 14 Maret s.d 2 Mei 2023,			
3.2	Meningkatnya Penerapan RB Pemerintah Daerah	Persentase SKPD dengan nilai RB minimal B	100	0	0	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUKOTA**	**Kegiatan Penataan Organisasi** **Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan RB**	Evaluasi RB dilaksanakan hanya pada tingkat pemerintah daerah tidak dilaksanakan evaluasi RB pada tingkat SKPD	Adanya Permenpan RB yang baru tentang Evaluasi RB yaitu Permenpan RB No 9 Tahun 2023 dimana memuat indikator baru yaitu RB General dan RB Tematik yang masih belum relevan dan belum bisa	Berkoordinasi dengan Kemenpan RB terkait metode evaluasi bagi SKPD menyesuaikan Permenpan RB yang baru	
3.3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Persentase SKPD dengan nilai SAKIP minimal BB	100	0	0			Telah dilaksanakan evaluasi SAKIP oleh Inspektorat pada TW.III dengan rincian hasil sebanyak 31 SKPD mendapat			asistensi peningkatan implementasi SAKIP dengan narasumber dari Kemenpan dan RB

ESSELON II | 1 UMUM | 2 PEMERINTAHAN | 3 ORGANISASI | 4 PERENCANAAN | 5 PBJ | 6 HUKUM | 7 PROKOPIM | 8 KESRA | 9 PEREKONOMI

READY

Search

2. Contoh rapat internal Tahun 2023 ini pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan A. Syairani No. 36 Telp.(0512)21003 Fax. (0512) 21300 Pelaihari 70814

Pelaihari, 02 Januari 2024

Nomor : 000.3 / 18 /BPBJ/2024
Lampiran : -
Perihal : Rapat Evaluasi dan Monitoring Kegiatan PBJ Tahun 2023

Kepada Yth.
Seluruh Kasubbag, Anggota Pokja dan Staf pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa
di-
Pelaihari

Dengan hormat,
Dalam rangka Melaksanakan rapat Evaluasi dan Monitoring kegiatan tahun 2023 dan persiapan kegiatan tahun 2024 pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa maka kami mengundang seluruh Kasubbag, anggota kelompok kerja dan staf pada Bagian Pengadaan barang/jasa untuk dapat berhadir pada rapat tersebut yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu/3 Januari 2024
Waktu : 09.00 Wita – Selesai
Tempat : Ruang Rapat Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

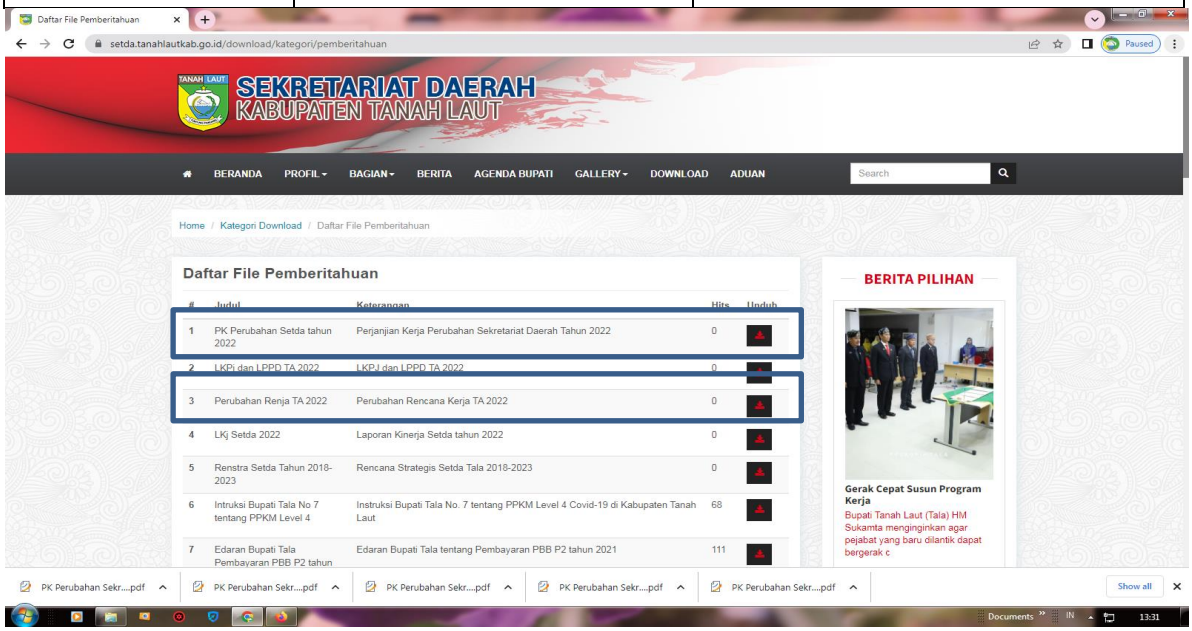
Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

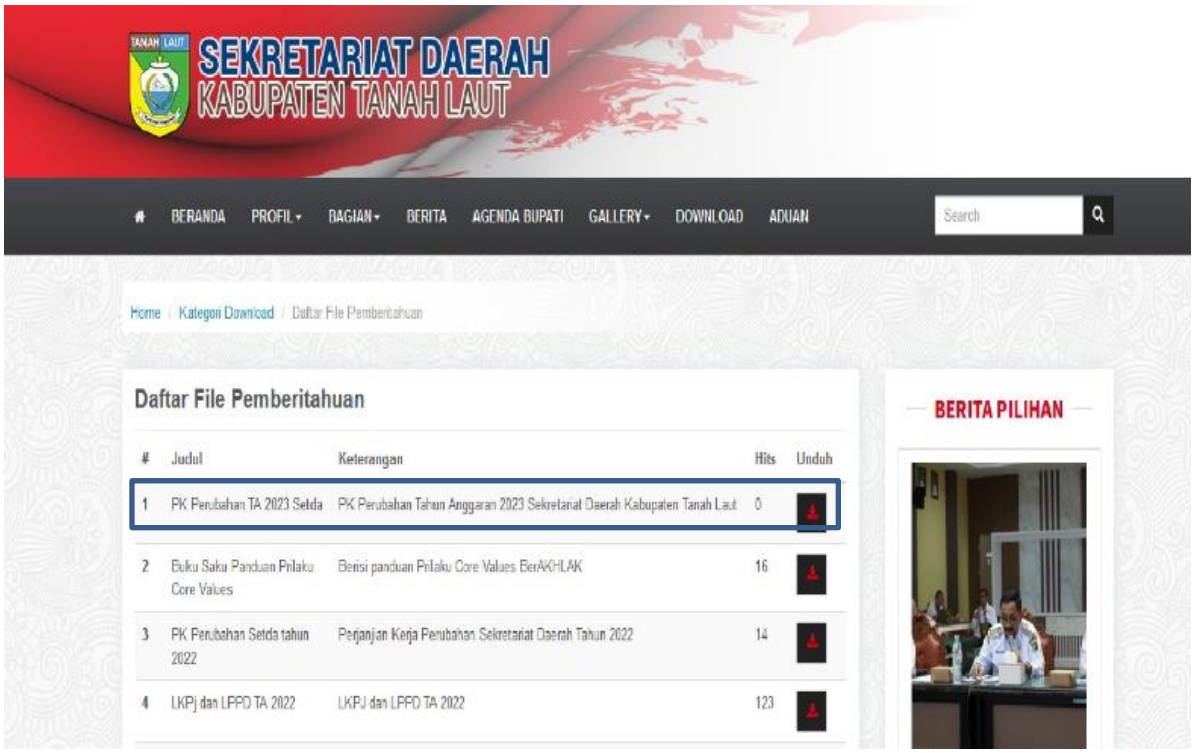
Kepala Bagian
Pengadaan Barang/Jasa

SETDA

YULIS SHAIRI, ST
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19780725 200803 1 001

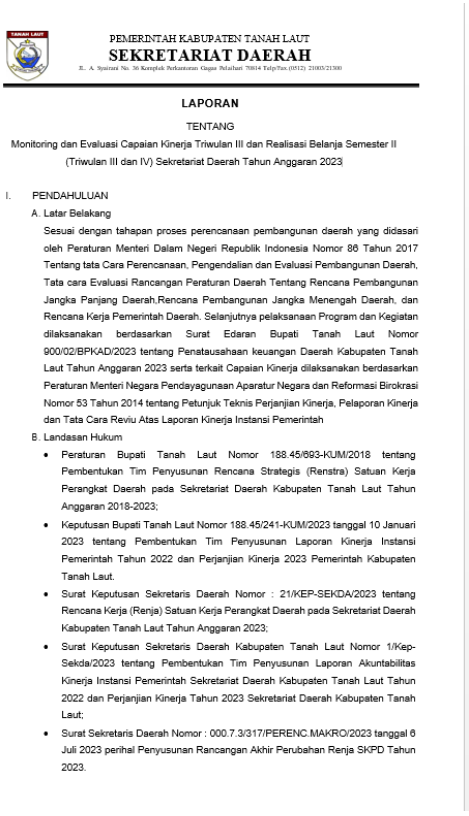
KOMPONEN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
PELAPORAN KINERJA	Agar laporan kinerja yang telah disusun dapat dipublikasikan pada website resmi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut	Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan pada website resmi Sekretaris Daerah yaitu http://setda.tanahlautkab.go.id/administrator





KOMPONEN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	Agar melakukan evaluasi kinerja internal pada masing-masing Bagian secara berjenjang sebagai bentuk pemantauan dan pengendalian atas capaian kinerja.	Melakukan evaluasi kinerja internal pada Bagian - bagian Lingkup Sekretariat Daerah secara berjenjang melalui monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara Triwulan kemudian hasil monitoring dan evaluasi tersebut di internalisasikan bersama Pimpinan.

1. Pada Tahun 2023 ini Bagian – bagian Lingkup Sekretariat Daerah Telah melakukan monev internal terhadap pelaksanaan IKUnya melalui rapat intern secara berkala, selanjutnya hasil rapat internal tersebut sebagai bahan rapat monev antar bagian Lingkup Sekretariat Daerah yang dipimpin oleh Pejabat Eeselon II. Kemudian hasil monev antar Bagian Lingkup Sekretariat Daerah dituangkan dalam bentuk Laporan Monev.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. A. Syairani No. 36 Kompleks Perkantoran Gagas Pelaihari 70814 Telp/Fax.(0512) 21003/21300

LAPORAN

TENTANG

Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan III dan Realisasi Belanja Semester II
(Triwulan III dan IV) Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2023

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan tahapan proses perencanaan pembangunan daerah yang didasari oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selanjutnya pelaksanaan Program dan Kegiatan dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Bupati Tanah Laut Nomor 900/02/BPKAD/2023 tentang Penatausahaan keuangan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 serta terkait Capaian Kinerja dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

B. Landasan Hukum

- Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/693-KUM/2018 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2018-2023;
- Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/241-KUM/2023 tanggal 10 Januari 2023 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja 2023 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
- Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 21/KEP-SEKDA/2023 tentang Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023;
- Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1/Kep-Sekda/2023 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- Surat Sekretaris Daerah Nomor : 000.7.3/317/PERENC.MAKRO/2023 tanggal 6 Juli 2023 perihal Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja SKPD Tahun 2023.



2. Laporan Monev Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Belanja Semester I (Triwulan I dan Triwulan II) Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2023

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. A. Syairani No. 36 Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814 Telp/Fax.(0512) 21003/21300

LAPORAN

TENTANG

Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Belanja Semester I (Triwulan I dan Triwulan II) Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2023

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan tahapan proses perencanaan pembangunan daerah yang didasari oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

B. Landasan Hukum

- Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/693-KUM/2018 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2018-2023;
- Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/241-KUM/2023 tanggal 10 Januari 2023 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja 2023 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
- Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 21/KEP-SEKDA/2023 tentang Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023;
- Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1/Kep-Sekda/2023 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- Surat Sekretaris Daerah Nomor : 000.7.3/317/PERENC.MAKRO/2023 tanggal 6 Juli 2023 perihal Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja SKPD Tahun 2023.
- Dokumen DPA Nomor : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023

C. Maksud dan Tujuan

Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Belanja Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2023 untuk mengetahui Realisasi Belanja Semester I (Triwulan I dan Triwulan II) Tahun Anggaran 2023.

I. Sistematika Penyajian

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Memaparkan tentang latar belakang penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut, menggambarkan maksud dan tujuan, dasar hukum, cascading kinerja, proses bisnis, tugas pokok fungsi dan struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut, aspek strategis organisasi, produk dan layanan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Memaparkan tentang Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut yang meliputi Visi, Misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama dan Instrumen Pendukung Capaan Kinerja..

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menyajikan tentang capaian kinerja organisasi (capaian IKU dan capaian Sasaran Strategis organisasi) dan akuntabilitas keuangan (ringkasan realisasi anggaran menurut program dan kegiatan Tahun 2022 dan Tahun 2023 serta ringkasan anggaran dan realisasi berdasarkan program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Menampilkan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi, strategi di masa mendatang untuk meningkatkan kinerja tahun berikutnya.

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Visi RPJMD

Visi merupakan suatu pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana Sekretariat Daerah bekerja, beraktualisasi dan berinovasi agar tetap eksis, kompatibel dan produktif. Jadi, Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang merupakan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Sekretariat Daerah.

Pengertian Visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai dan Misi adalah bagaimana Visi itu diwujudkan, kemudian berdasarkan Visi dan Misi tersebut kemudian dirumuskan Tujuan serta Sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta Indikator-indikatornya. Visi Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 – 2023 sekaligus menjadi Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 - 2023 adalah:

Terwujudnya Tanah Laut yang *"**BERINTERAKSI**"*

- ***Berkarya***
- ***Inovasi***
- ***Tertata***
- ***Religius***
- ***Aktual***
- ***Sinergi***

Visi tersebut menunjukkan adanya keinginan yang kuat dari segenap unsur aparatur pemerintah di Lingkungan Sekretariat Daerah sebagai motor penggerak penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tanah Laut.

Dengan demikian Sekretariat Daerah diharapkan mampu menampilkan dirinya sebagai motor penggerak, sebagai koordinator perumusan kebijakan pemerintah daerah, sehingga dapat bergerak cepat, penuh energi dan menghasilkan kebijakan yang akurat dan memberi daya dorong yang kuat bagi pembangunan daerah serta mampu memberi dorongan yang kuat bagi semua perangkat daerah agar senantiasa bertenaga, mampu menyesuaikan dengan perkembangan keadaan yang selalu bergerak maju menuju kemajuan masa depan.

Komitmen untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi oleh segenap aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut. Sebagai bentuk kesungguhan dalam mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut. Sekretariat Daerah menetapkan Misi sebagai gambaran aktivitas yang sudah seharusnya dilaksanakan. Dengan Misi maka akan terlihat secara jelas kebutuhan apa yang harus dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut, dan bagaimana cara memenuhinya.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Oleh karena itu, sebuah Visi belum dapat dikatakan sempurna tanpa adanya serangkaian Misi yang berfungsi untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Tanah Laut dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai Visi pembangunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023, maka dirumuskan Misi sebagai berikut :

BERKARYA : Makna kata “berkarya” lebih tinggi daripada kata “bekerja”; yaitu merujuk pada hasil kerja. Maknanya adalah bahwa selama periode 2018-2023, para pelaku pembangunan di Daerah Kabupaten Tanah Laut, secara bersama-sama, berkarya mewujudkan tujuan dasar dari pembangunan daerah, yaitu peningkatan taraf kesejahteraan rakyat.
Secara makro, indikasi dari adanya karya dalam peningkatan taraf kesejahteraan rakyat adalah meningkatnya laju pertumbuhan PDRB perkapita, yang diiringi dengan laju inflasi di Daerah yang semakin terkendali; tingkat ketimpangan pendapatan dan ketimpangan regional yang semakin menurun; rasio kesenjangan kemiskinan serta jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I yang semakin menurun; pembangunan manusia yang samakin baik; dan meningkatnya daya saing daerah;

INOVASI : Inovasi adalah solusi logis terhadap adanya tekanan keterbatasan keuangan daerah dan meningkatnya harapan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas. Karena itu, inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yang dilaksanakan

seluruh perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, harus semakin ditingkatkan dalam rangka percepatan peningkatan taraf kesejahteraan rakyat.

Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan, baik yang merupakan gagasan / ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi, yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam rangka inovasi tersebut, maka percepatan pembangunan inovasi pelayanan publik perlu ditingkatkan melalui penjaringan dan penumbuhan pengetahuan serta terobosan dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Selain itu, inovasi di tingkat kelompok-kelompok masyarakat, khususnya di industri kreatif, juga harus kembangkan sehingga lebih mampu mandiri dalam upaya peningkatan taraf kesejahteraannya.

TERTATA : Secara umum, makna “tertata” adalah *tertib administrasi dan tertib substansi*. Artinya, aspek administrasi dan aspek substansi diatur secara tertib dalam sebuah siklus atau proses perencanaan yang semakin berkualitas. Dengan demikian, kualitas perencanaan di perangkat daerah, terutama yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja harus semakin ditingkatkan secara berkesinambungan.

RELIGIUS : Pada aspek religius ini, peran sektor keagamaan harus semakin ditingkatkan untuk peningkatan produktivitas aparatur dan masyarakat. Aparatur sipil di tiap perangkat daerah harus menjadi teladan dan menginspirasi upaya peningkatan produktivitas pada semua lini kehidupan kemasyarakatan.

AKTUAL : Penekanan pada aspek aktual ini adalah bahwa pilihan kebijakan serta program dan kegiatan dari perangkat daerah harus relevan secara waktu, relevan secara lokasi, dan relevan dengan pihak yang dilayani, yaitu masyarakat di Daerah Kabupaten Tanah Laut.

SINERGI : Sinergi dimaksudkan untuk penguatan prinsip kegotong-royongan dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Ego sektoral dan ego bidang harus dihapus dan digantikan dengan integrasi, sinkronisasi,

dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

Upaya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi di tingkat perangkat daerah juga harus ditingkatkan melalui penjenjangan akuntabilitas kinerja sehingga dapat memberi kontribusi yang nyata pada percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

B. Misi RPJMD

1. ***Berkarya*** meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya
2. Menciptakan ***inovasi*** di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif
3. Membangun ***tata*** kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas ***religiusitas*** dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kehidupan masyarakat.
5. Membangun ***sinergitas*** yang baik antartingkat pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Visi, Misi Bupati/Wakil Bupati sekaligus menjadi Visi, Misi bagi SKPD, untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut mengemban Misi ke:

1. **Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya;**
2. **Menciptakan Inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif;**
3. **Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*);**

5. **Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.**

C. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang ingin dicapai atau dihasilkan atau dihasilkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) Tahun. Penetapan tujuan ini dapat menjadi sarana bagi Sekretariat

Daerah untuk secara cepat dan tepat mengetahui apa yang harus segera diwujudkan oleh segenap jajaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki.

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2023 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban secara tertulis Sekretaris Daerah kepada Bupati Tanah Laut atas capaian kinerja untuk indikator-indikator sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2023.

Lebih dari itu, perumusan tujuan juga diharapkan dapat dijadikan sarana bagi Bagian-bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut untuk melakukan pengukuran sejauh mana kegiatan yang dilakukan telah memberikan akses terhadap pencapaian Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut yang telah ditetapkan.

Adapun rumusan Tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2018 s/d 2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Bidang Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian, Asset Perlengkapan serta Umum dan Rumah Tangga;
2. Meningkatkan kualitas Pelayanan Bidang Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian, Asset Perlengkapan serta Umum dan Rumah Tangga;
3. Meningkatkan inovasi dalam Pelayanan Publik;
4. Meningkatkan Penyelenggaraan Kepemerintahan yang baik;
5. Meningkatnya Penerapaan tata kelola kepemerintahaan yang baik;
6. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Kerjasama Pemerintah Daerah serta administrasi kewilayahan;

7. Meningkatkan kualitas penyelenggaran pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi di Bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanaan Publik dan Tata Laksana, serta Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
8. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi di Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
9. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi di Bidang Pengelolaan pengadaan Barang/Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan secara elektronik dan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa;
10. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelaksanaan tugas perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi di Bidang Pembentukan Produk Hukum Pengaturan, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Pembentukan Pruduk Hukum Penetapan, Dokumentasi dan Informasi Hukum;
11. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelaksanaan tugas perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi di Bidang Protokol, Komunikasi Pimpinan dan Dokumentasi;
12. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelaksanaan tugas perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi di Bidang Bina Mental Spritual, Kesejahteraan social dan Budaya serta kesejahteraan masyarakat;
13. Meningkatkan sinergitas pengelolaan perekonomian dan investasi;
14. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelaksanaan tugas perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan wilayah di Bidang Pembinaan BUMD dan BLUD, Perekonomian dan Administrasi Pembangunan serta Sumber Daya Alam.

Sasaran Strategis yang telah dirumuskan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana sasaran Renstra sebanyak 40 (Empat Puluh) Sasaran adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 - 2023

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TUJUAN	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA					KET
						2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Bidang Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian, Asset Perlengkapan serta Umum dan Rumah Tangga	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah	BAIK (85)	Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	80	81	81.5	82	Sekretariat Daerah dan Bagian Umum
	Meningkatkan kualitas Pelayanan Bidang Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian, Asset Perlengkapan serta Umum dan Rumah Tangga	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah	100%	Meningkatnya kualitas layanan umum dan Rumah Tangga Pimpinan dengan baik	Persentase layanan Pimpinan/Bagian/ SKPD/ Masyarakat dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Umum
Menciptakan Inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif	Meningkatkan Inovasi dalam Pelayanan Publik	Persentase peningkatan Inovasi dalam Pelayanan Publik	100%	Inovasi publik yang diciptakan oleh SKPD	Jumlah inovasi SKPD yang didaftarkan	1	1	1	1	1	Sekretariat Daerah dan Bagian Organisasi

Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)	Meningkatkan Penyelenggaraan Kepemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	BAIK (75)	Meningkatnya skor LPPD Kabupaten	Skor LPPD Kabupaten	ST 3,060	ST 3,075	ST 3,100	ST 3,125	ST 3,150	Sekretariat Daerah dan Bagian Pemerintahan
				Meningkatnya Penerapan RB Pemerintah Daerah	Persentase SKPD dengan nilai RB minimal B	75	80	85	90	0	Sekretariat Daerah dan Bagian Organisasi
				Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Persentase SKPD dengan nilai SAKIP minimal BB	85	90	95	100	100	
	Meningkatnya Penerapan tata kelola kepemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	BB (85)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	80	82	82	83	83	Sekretariat Daerah dan Bagian Perencanaan dan Keuangan
					Nilai SPIP Sekretariat Daerah	3.5	3.5	3.6	3.6	3.7	
				Meningkatnya tata kelola kepemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Nilai RB Sekretariat Daerah	80	85	90	91	92	Sekretariat Daerah dan Bagian Umum
					Nilai ZI Sekretariat Daerah	80	82	83	84	85	
	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Kerjasama Pemerintah Daerah serta Administrasi Kewilayahan	Persentase kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Kerjasama Pemerintah Daerah serta administrasi kewilayahan	100%	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang berhasil di tindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Pemerintahan
					Persentase kegiatan Peringatan hari besar Nasional/Kabupaten yang diselenggarakan	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Pemerintahan
				Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Persentase Penyelesaian Pemasalahan pada Kegiatan Pemekaran Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Pemerintahan

				Meningkatnya Pemenuhan IKK SKPD	Persentase Pemenuhan IKK SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Pemerintahan
				Meningkatnya Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak ke Tiga	Persentase dokumen kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Pemerintahan
	Meningkatkan kualitas penyelenggaran pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi di Bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana, serta Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Persentase kualitas penyelenggaran pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi di Bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana, serta Kinerja dan Reformasi Birokrasi	100%	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase SKPD dengan nilai komponen pelaporan kinerja minimal 10	65%	70%	80%	90%	100%	Bagian Organisasi
				Meningkatnya nilai Area Perubahan RB SKPD	Persentase SKPD dengan Nilai Komponen Area Perubahan RB minimal 60	10%	20%	30%	40%	50%	Bagian Organisasi
				Meningkatnya Penataan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	Persentase Unit Pelayanan dengan nilai SKM Minimal 80	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Organisasi
					Persentase SKPD yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Organisasi

				Meningkatnya efektifitas kelembagaan analisa dan evaluasi jabatan	Persentase perangkat daerah dengan kelembagaan yang efektif	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Organisasi
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan, pemanatauan dan evaluasi di Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Persentase kualitas penyelenggaraan, pemanatauan dan evaluasi di Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	100%	Meningkatnya layanan administrasi bidang perencanaan	Persentase layanan administrasi bidang perencanaan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Perencanaan dan Keuangan
				Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja lingkup Sekretariat Daerah	Peresentase penyusunan pelaporan kinerja yang sesuai aturan	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Perencanaan dan Keuangan
				Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	80	82	82	83	83	Bagian Perencanaan dan Keuangan
					Nilai SPIP Sekretariat Daerah	3.5	3.5	3.6	3.6	3.7	Bagian Perencanaan dan Keuangan
				Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan sesuai aturan	-	-	-	100%	100%	Bagian Perencanaan dan Keuangan
	Meningkatkan kualitas Pelayanan Bidang Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian, Asset	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah	100%	Meningkatnya Pengelolaan Barang/Asset Lingkup Sekretariat Daerah Secara Tertib	Persentase layanan pada Bagian-Bagian lingkup Setda sarana prasarana/aset milik Sekretariat Daerah terkelola dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Umum

	Perlengkapan serta Umum dan Rumah Tangga			Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di bidang Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	Persentase Pelaksanaan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Umum
				Meningkatkan kualitas pengelolaan kepemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Nilai komponen area perubahan Reformasi Birokrasi lingkup Sekretariat Daerah	80	85	90	91	92-	Bagian Umum
					Nilai komponen area perubahan Zona Integritas lingkup Sekretariat Daerah	80	82	83	84	85	Bagian Umum
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi di Bidang Pengelolaan pengadaan Barang/Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan secara elektronik dan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Persentase kualitas penyelenggaraan pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi di Bidang Pengelolaan pengadaan Barang/Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan secara elektronik dan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	100%	Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa lingkup Kabupaten Tanah Laut secara elektrionik	Persentase Paket pengadaan yang terlayani dalam pengadaan/jasa sesuai standar dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
				Meningkatnya SKPD melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem LPSE	Persentase SKPD yang melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem LPSE	-	65%	75%	85%	100%	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
				Meningkatnya kompetensi SDM dalam proses PBJ yang berkualitas	Persentase SDM yang kompeten dalam Pengadaan Barang/jasa	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Pengadaan Barang/Jasa

			Meningkatnya efisiensi pagu Pengadaan Barang Jasa	Persentase efisiensi pagu Pengadaan Barang Jasa	-	-	100%	5%	100%	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi di Bidang Pembentukan Produk Hukum Pengaturan, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Pembentukan Pruduk Hukum Penetapan, Dokumentasi dan Informasi Hukum	Persentase kualitas penyelenggaraan pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi di Bidang Pembentukan Produk Hukum Pengaturan, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Pembentukan Pruduk Hukum Penetapan, Dokumentasi dan Informasi Hukum	100%	Meningkatnya Informasi Produk Hukum	Persentase Informasi Produk Hukum	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Hukum
			Meningkatnya Harmonisasi Produk Hukum	Persentase Produk hukum yang harmonis	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Hukum
			Tingkat Penanganan kasus/perkara hukum di lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase kasus/perkara hukum yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Hukum
			Nilai Pemenuhan Kepedulian HAM di Kabupaten Tanah Laut	Nilai Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM)	Nilai 75	Nilai 75	Nilai 75	Nilai 75	Nilai 76	Bagian Hukum
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi di Bidang Protokol, Komunikasi Pimpinan dan Dokumentasi	Persentase kualitas penyelenggaraan pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi di Bidang Protokol, Komunikasi Pimpinan dan Dokumentasi	100%	Meningkatnya layanan informasi penyelenggaraan pembangunan daerah dan komunikasi pimpinan, keprotokolan dan dokumentasi	Persentase penyebarluasan informasi/pemberitaan pembangunan pemerintah daerah yang bisa diakses masyarakat melalui media	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
				Persentase kegiatan dokumentasi KDH/WKDH yang terlayani	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

					Persentase kegiatan KDH/WKDH/SKPD/Tamu daerah yang terlayani keprotokolannya	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
					Persentase komunikasi pimpinan yang terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
					Persentase pengaduan masyarakat yang di tindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
	Meningkatkan kualiatas penyelenggaraan pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi di Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan sosial dan Budaya serta kesejahteraan masyarakat	Persentase kualiatas penyelenggaraan pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi di Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan sosial dan Budaya serta kesejahteraan masyarakat	100%	Meningkatnya pembinaan Lembaga sosial dan keagamaan	Persentase peningkatan Lembaga sosial dan keagamaan yang dibina	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Kesejahteraan Rakyat
				Meningkatnya layanan bantuan sosial keagamaan	Persentase layanan bantuan sosial keagamaan	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Kesejahteraan Rakyat
				Meningkatnya peran serta Organisasi/Lembaga Keagamaan/SKPD dalam Bidang Pemuda dan Olahraga	Persentase hasil tindak lanjut koordinasi kegiatan bidang keagamaan, pemuda dan olahraga	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Kesejahteraan Rakyat

Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan sinergitas pengelolaan perekonomian dan investasi	Persentase pengelolaan kebijakan perekonomian dan pembangunan	100%	Meningkatnya kebijakan perekonomian dan pembangunan	Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang diterapkan	100%	100%	100%	100%	100%	Sekda dan Kabag Perkonomian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan wilayah di Bidang Pembinaan BUMD dan BLUD, Perekonomian dan Administrasi Pembangunan serta Sumber Daya Alam	Persentase kualitas penyelenggaraan pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan wilayah di Bidang Pembinaan BUMD dan BLUD, Perekonomian dan Administrasi Pembangunan serta Sumber Daya Alam	100%	Meningkatnya Penyelesaian Permasalahna terkait Perekonomian dan Pembangunan Daerah	Persentase penyelesaian permasalahan terkait perekonomian dan pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Perkonomian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam
				Meningkatnya BUMD yang sehat dan berdayasaing	Persentase BUMD yang berkinerja positif	60%	75%	75%	75%	100%	Bagian Perkonomian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam
				Meningkatnya Pelaku UMKM yang terfasilitasi permodalan	Persentase UMKM yang terfasilitasi permodalan	60%	75%	75%	75%	100%	Bagian Perkonomian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam
				Meningkatnya kualitas manajemen data administrasi pembangunan yang proporsional	Persentase SKPD yang menyampaikan laporan progres pembangunan fisik	-	-	80%	80%	85%	Bagian Perkonomian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah. Untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dan target kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudkan komitmen penerimaan amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2023 yang telah disepakati baik oleh Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV dan JFT serta JFU/ Pelaksana Lingkup Sekretariat Daerah.

Untuk Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon II dalam hal ini Sekretaris Daerah dapat dilihat dibawah ini :

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan A. Syairani No. 36 Pelaihari Telp. (0512) 21003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2023
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. DAHNIAL KIFLI, M.AP

Jabatan : Sekretaris Daerah

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : SYAMSIR RAHMAN

Jabatan : Pj. Bupati Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 13 Oktober 2023

Pihak Kedua,

SYAMSIR RAHMAN

Pihak Pertama,

Drs. H. DAHNIAL KIFLI, M.AP
NIP. 19640425 198703 1 012

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan A. Syairani No. 36 Pelaihari Telp. (0512) 21003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2023
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
	1	2	3
1.	Meningkatnya Kualitass Layanan Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	82
2.	Inovasi publik yang diciptakan oleh SKPD	Jumlah inovasi SKPD yang didaftarkan	1
3.	Meningkatnya Skor LPPD Kabupaten	Skor LPPD Kabupaten	ST 3,150
4.	Meningkatnya Penerapan RB Pemerintah Daerah	Persentase SKPD dengan nilai RB minimal B	0
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Persentase SKPD dengan nilai SAKIP minimal BB	100
6.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	83
		Nilai SPIP Sekretariat Daerah	3,7
7.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Nilai RB Sekretariat Daerah	92
		Nilai ZI Sekretariat Daerah	85
8.	Meningkatnya kebijakan perekonomian dan pembangunan	Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang diterapkan	100%

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan A. Syairani No. 36 Pelaihari Telp. (0512) 21003

PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 35.862.518,-
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 22.676.428.057,-
		3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 30.000.000,-
		4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 6.423.530.835,-
		5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 7.498.771.543,-
		6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 2.741.278.645,-
		7. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp 848.690.096,-
		8. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Rp 2.700.500.000,-
		9. Penataan Organisasi	Rp 522.274.530,-
		10. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Rp 1.329.521.582,-
2.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1. Administrasi Tata Pemerintahan	Rp 1.244.194.611,-
		2. Pelaksanaan	Rp 34.804.336.890,-

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan A. Syairani No. 36 Pelaihari Telp. (0512) 21003

			Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
		3.	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Rp 2.229.556.766,-
		4.	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Rp 259.475.265,-
3.	Program Perekonomian dan Pembangunan	1.	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Rp 678.568.979,-
		2.	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Rp 45.760.600,-
		3.	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 1.392.152.439 ,-

Pelaihari, 13 Oktober 2023
Sekretaris Daerah,

Pj. Bupati Tanah Laut,

SYAMSIR RAHMAN

Drs. H. DAHNIAL KIFLI, M.AP
NIP. 19640425 198703 1 012

Sedangkan untuk Perjanjian Kinerja Eselon II Asisten, Eselon III Kepala Bagian, Eselon IV Kasubbag, JFT dan JFU/ Pelaksana lingkup Sekretariat Daerah (Data Terlampir).

E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Tanah Laut, sebagaimana yang dijabarkan dalam Sasaran Strategis maka untuk mencapai sasaran tersebut memerlukan dukungan anggaran yang dirincikan dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

No	PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN APBD MURNI (Rp)	ANGGARAN APBD PERUBAHAN (Rp)	REALISASI CAPAIAN (%)	PENANGGUNG JAWAB (BAGIAN)
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Kegiatan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				Perencanaan dan Keuangan dan Umum
		- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.749.891	20.862.989	15.696.200	Perencanaan dan Keuangan
		- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.999.529	14.999.529	12.064.700	Perencanaan dan Keuangan
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Perencanaan dan Keuangan
		- Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	22.961.218.512	22.661.218.512	20.183.402.971	Perencanaan dan Keuangan
		- Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	14.999.893	15.209.545	11.175.600	Perencanaan dan Keuangan
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Umum
		- Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	30.000.000	30.000.000	0	Umum
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				Umum
		- Penyediaan Komponen Instansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	61.704.905	86.705.585	82.066.500	Umum
		- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	166.514.628	1.299.159.669	1.215.531.386	Umum
		- Penyedia Peralatan Rumah Tangga	75.822.034	124.240.667	96.542.900	Umum

No	PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN APBD MURNI (Rp)	ANGGARAN APBD PERUBAHAN (Rp)	REALISASI CAPAIAN (%)	PENANGGUNG JAWAB (BAGIAN)
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
		- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan	43.454.423	67.624.914	60.410.990	Umum
		- Penyedia bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000	15.000.000	14.820.000	Umum
		- Fasilitas Kunjungan Tamu	6.480.000	16.200.000	6.275.000	Umum
		- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.314.600.000	4.814.600.000	4.457.108.602	Umum
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Umum
		- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.674.000.000	1.674.000.000	1.590.715.747	Umum
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	284.582.310	2.129.581.560	1.840.270.201	Umum
		- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.362.939.601	3.695.189.983	3.628.988.218	Umum
		- **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				Umum
		- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	246.896.500	329.793.000	326.865.589	Umum
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.149.740.000	1.746.620.000	1.746.410.598	Umum
		- Pemeliharaan peralatan mesin lainnya	241.812.064	306.654.064	304.924.250	Umum
		- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	279.826.560	358.211.581	357.851.077	Umum
		- **Kegiatan Administrasi Keuangan dan Oprasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**				Perencanaan dan Keuangan dan Umum
		- Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	817.592.612	710.310.279	670.757.480	Perencanaan dan Keuangan

No	PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN APBD MURNI (Rp)	ANGGARAN APBD PERUBAHAN (Rp)	REALISASI CAPAIAN (%)	PENANGGUNG JAWAB (BAGIAN)
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
		Penyedia Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	138.379.817	138.379.817	120.782.250	Umum
		- **Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**				Umum
		- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	631.990.000	789.940.000	681.221.000	Umum
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	419.990.000	419.990.000	343.384.000	Umum
		- Penyedia Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1.048.835.000	1.490.570.000	1.451.080.850	Umum
		- **Kegiatan Penataan Organisasi**				Organisasi
		- Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	102.427.697	102.472.697	95.815.300	Organisasi
		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	124.754.512	124.754.512	85.217.862	Organisasi
		- Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	295.047.321	295.047.321	254.588.847	Organisasi
		- **Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**				Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		- Fasilitas Keprotokolan	189.640.028	487.150.560	445.113.123	Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		Fasilitas Komunikasi Pimpinan	265.883.641	376.842.278	349.788.200	Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		- Pendokumentasian Tugas Pimpinan	205.515.838	465.528.744	422.330.100	Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		- **Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan**				Pemerintahan
		- Penataan Administrasi Pemerintahan	174.535.403	671.925.147	638.602.000	Pemerintahan
2	**PROGRAM PEMERITAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	216.916.270	270.501.270	217.838.271	Pemerintahan
		- Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	207.496.995	301.768.194	271.381.868	Pemerintahan
		- **Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah**				Pemerintahan
		- Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	149.928.665	259.475.265	238.789.422	Pemerintahan

No	PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN APBD MURNI (Rp)	ANGGARAN APBD PERUBAHAN (Rp)	REALISASI CAPAIAN (%)	PENANGGUNG JAWAB (BAGIAN)
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
		Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				Kesejahteraan Rakyat
		- Fasilitas Pengelolaan Bina Metal Spritual	9.217.255.530	9.285.373.530	8.921.864.464	Kesejahteraan Rakyat
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	21.392.598.317	21.392.598.317	20.972.958.226	Kesejahteraan Rakyat
		- Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	4.137.404.825	4.126.365.043	3.422.672.460	Kesejahteraan Rakyat
		- **Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Hukum**				Hukum
		- Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	584.439.643	902.546.592	**734.031.291**	Hukum
		Fasilitasi Bantuan Hukum	297.667.972	938.580.578	**577.948.224**	Hukum
		- Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	268.095.055	388.429.596	**313.830.296**	Hukum
		- **Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**				Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam
		- Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	246.893.160	297.915.910	**190.315.020**	Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam
3	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	Pengendalian dan distribusi perekonomian	74.586.909	143.226.359	**126.616.528**	Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam
		- Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	213.707.500	237.426.710	**223.171.250**	Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam
		- **Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**				Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam
		- Pengeloaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	45.760.600	45.760.600	**45.177.252**	Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam
		Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				Pengadaan Barang/Jasa

No	PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN APBD MURNI (Rp)	ANGGARAN APBD PERUBAHAN (Rp)	REALISASI CAPAIAN (%)	PENANGGUNG JAWAB (BAGIAN)
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
		- Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	649.706.599	670.026.599	**442.424.156**	Pengadaan Barang/Jasa
		Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	224.540.658	285.598.545	**279.597.500**	Pengadaan Barang/Jasa
		- Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	436.527.295	436.527.295	**362.200.978**	Pengadaan Barang/Jasa

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut merupakan bentuk pertanggungjawaban selama Tahun 2023 yang memuat realisasi kinerja dan capaian kinerja atas sasaran - sasaran kinerja yang diperjanjikan pada Tahun 2023. Selain itu, realisasi keuangan yang digunakan untuk mencapai target kinerja Tahun 2023.

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

1. Sasaran RPJMD

1.1 . Sasaran RPJMD akan dapat memberikan gambaran suatu ukuran keberhasilan instansi Pemerintah. Dimana Sasaran Sekretariat Daerah Tahun 2023 mengampu Misi Ke-1, Misi Ke-2, Misi Ke-3 dan Misi Ke-5 RPJMD sebagai berikut :

Tabel Sasaran RPJMD Sekretariat Daerah Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	Penanggung jawab/ Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Penerapan RB Pemerintah Daerah	Persentase SKPD dengan nilai RB minimal B	0	0	0	Sekretaris Daerah dan Kabag Organisasi
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Persentase SKPD dengan Nilai SAKIP Minimal BB	100	77.5	77.5%	Sekretaris Daerah dan Kabag Organisasi
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	82	89.98	109.75%	Sekretaris Daerah dan Kabag Umum
4	Inovasi Publik yang diciptakan oleh SKPD	Jumlah inovasi SKPD yang didaftarkan	1	8 inovasi	800%	Sekretaris Daerah dan Kabag Organisasi
5	Meningkatnya kebijakan perekonomian dan pembangunan	Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang diterapkan	100%	100%	100%	Sekretaris Daerah dan Kabag Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan SDA

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2023*

1. SASARAN Meningkatnya Penerapan RB Pemerintah Daerah

Indikator : Persentase SKPD dengan Nilai RB Minimal B

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	Penanggung jawab/ Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
MISI Ke-3 : Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*)						
1.	Meningkatnya Penerapan RB Pemerintah Daerah	Persentase SKPD dengan nilai RB minimal B	0	0	0	Sekretaris Daerah dan Kabag Organisasi

Sebagai salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional, reformasi birokrasi menjadi ujung tombak terciptanya *World Class Bureaucracy* yang menjadi Visi Reformasi Birokrasi dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi, yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis. Memasuki periode terakhir dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode 2020-2025 diharapkan mampu melakukan percepatan sehingga visi tersebut dapat terealisasikan. Percepatan yang dilakukan perlu dilakukan secara komprehensif sehingga *outcome* yang dihasilkan dapat lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan kementerian/lembaga/pemerintah daerah terkait.

Salah satu upaya percepatan tersebut diwujudkan dengan Evaluasi Reformasi Birokrasi. Evaluasi Reformasi Birokrasi perlu dilakukan dengan lebih berfokus terhadap hasil dibandingkan dengan proses. Hal ini dilakukan karena terdapat *gap* antara pelaksanaan reformasi birokrasi dengan hasil pembangunan. Di samping itu, perkembangan global beserta isu-isu di tingkat nasional dan daerah juga terus berkembang, sehingga diperlukan perbaikan kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi dan cara evaluasinya.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melakukan penyempurnaan dalam Evaluasi Reformasi Birokrasi, agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berdampak positif pada hasil pembangunan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Dengan diterbitkannya Permenpan dan RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, Evaluasi Reformasi Birokrasi dilaksanakan hanya pada Level Pemerintah Daerah/Pemerintah Kabupaten dan tidak dilaksanakan pada level Perangkat Daerah sehingga tidak tersedia lagi data Indeks Reformasi Birokrasi untuk level Perangkat Daerah.

2. SASARAN Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten

Indikator : Persentase SKPD dengan Nilai SAKIP Minimal BB

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	Penanggung jawab/ Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
MISI Ke-3 : Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*)						
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Persentase SKPD dengan Nilai SAKIP Minimal BB	100	77,5	77,5	Sekretaris Daerah dan Kabag Organisasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah berupaya maksimal dari tahun ke tahun dalam menerapkan SAKIP. Ini dapat dilihat dari terus meningkatnya SKPD dengan hasil evaluasi SAKIP minimal BB. Evaluasi SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Laut.

Rekapitulasi hasil evaluasi SAKIP SKPD Tahun 2023

oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Laut

Katagori	Jumlah SKPD	Persentase	Interprestasi
A	6	15	Memuaskan
BB	25	62,5	Sangat Baik
B	5	12,5	Baik
CC	2	5	Cukup (Memadai)
C	1	2,5	Kurang

D	**1**	**2,5**	**Sangat Kurang**

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Organisasi Tahun 2023*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa di Tahun 2023 masih terdapat 9 SKPD yang mendapatkan nilai di bawah BB, hal ini mengalami penurunan jika dibandingakn dengan tahun 2022 dimana seluruh SKPD atau sebesar 100% telah mendapatkan nilai SAKIP minimal BB atau dengan nilai di atas 70. Ringkasan evaluasi SAKIP Tahun 2022 sebagai berikut

Rekapitulasi hasil evaluasi SAKIP SKPD Tahun 2022
oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Laut

Katagori	Jumlah SKPD	Persentase	Interprestasi
A	6	15	**Memuaskan**
BB	34	85	**Sangat Baik**
B	0	0	**Baik**
CC	0	0	**Cukup (Memadai)**
C	0	0	**Kurang**
D	0	0	**Sangat Kurang**

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Organisasi Tahun 2023*

Di dalam RPJMD 2018-2023 Kabupaten Tanah Laut telah ditargetkan untuk NILAI SAKIP Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 adalah A (81), Tahun 2023 adalah tahun terakhir RPJMD Kabupaten Tanah Laut tetapi target juga masih belum tercapai dikarenakan pada Tahun 2023 Nilai SAKIP Kabupaten Tanah Laut masih pada kategori B (67,52). Ini merupakan tanggung jawab yang sangat besar bagi seluruh SKPD terutama bagi Tim SAKIP Kabupaten untuk merealisasikannya.

Indikator ini juga merupakan indikator Sekretaris Daerah, dimana Sekretariat Daerah merupakan fasilitator pelaksanaan SAKIP Kabupaten dan Sekretariat Tim SAKIP Kabupaten.

3. SASARAN Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat Daerah

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	Penanggung jawab/ Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
MISI Ke-1 : Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya						
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	82	89.98	109.75%	Sekretaris Daerah dan Kabag Umum

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah Data informasi tentang tingkat kepuasaan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Dengan tersedianya data penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat diharapkan hasilnya dapat bermanfaat sebagai :

1. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam upaya pemenuhan kinerja pelayanan.
2. Diketahuinya tingkat kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik.
3. Adanya data perbandingan antara harapan dan kebutuhan dengan pelayanan melalui informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.
4. Diketahuinya tingkat kepuasan pelayanan melalui hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik.
5. Diketahuinya kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik.

6. Sebagai sarana pengawasan bagi masyarakat terhadap kinerja pelayanan unit Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut pada tahun sebelumnya.
7. Diketahuinya Survey Kepuasan Masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada unit kerja yang telah melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Sekretariat Daerah dilaksanakan oleh Bagian-bagian Lingkup Sekretariat Daerah dengan responden menurut tugas dan fungsi Bagian tersebut, hasil Survey tersebut di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. IPKP Sekretariat Daerah Triwulan I

Nomor Responden	Nilai Unsur pelayanan									Nilai
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
Nilai Per Unsur	520	526	573	591	517	514	518	514	595	
NRR Per Unsur	3,44	3,48	3,79	3,91	3,42	3,40	3,43	3,40	3,94	
NRR Tertimbang Per Unsur	0,38	0,39	0,42	0,43	0,38	0,38	0,38	0,38	0,44	3,58
IKM Per Unsur	9,56	9,67	10,51	10,86	9,50	9,45	9,52	9,45	10,93	
IKM Unit Pelayanan										89,44

NOMOR RESPONDEN	NILAI UNSUR PELAYANAN									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
∑ Nilai Per Unsur	520	526	572	591	517	514	518	514	595	
NRR Per Unsur = Jlh Nilai Per Unsur = Jlh Kuisioner yg Terisi	3,44	3,48	3,79	3,91	3,42	3,40	3,43	3,40	3,94	
NRR tertimbang Per unsur = NRR Per Uns x 0, 111	0,38	0,39	0,42	0,43	0,38	0,38	0,38	0,38	0,44	**3,58**
IKM Per unsur	**9,56**	**9,67**	**10,51**	**10,86**	**9,50**	**9,45**	**9,52**	**9,45**	**10,93**	
IKM Unit Pelayanan										**89,44**

- U1 s.d. U 9 = Unsur-Unsur pelayanan
- NRR = Nilai rata-rata
- IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat
- *) = Jumlah NRR IKM tertimbang
- **) = Jumlah NRR Tertimbang x 170
- NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi
- NRR tertimbang per unsur = NRR per unsur x 0,111

U1	Persyaratan
U2	Prosedur
U3	Waktu Pelayanan
U4	Biaya/ Tarif
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
U6	Kompetensi Pelaksana
U7	Perilaku Pelaksana
U8	Maklumat Pelayanan
U9	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan

IKM UNIT PELAYANAN : 89,44

Mutu Pelayanan :

A (Sangat Baik) : 88,31 - 100,00
B (Baik) : 76,61 - 88,30
C (Kurang Baik) : 65,00 - 76,60
D (Tidak Baik) : 25,00 - 64,99

Kepala Bagian Umum,

LATIP KAMARUDIN, S.AP
Pembina (IV/a)
NIP. 19740705 199403 1 004

Link Kuisioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Triwulan I Tahun 2023: https://forms.gle/cZUiRLuDBy3qaK2R8

Atau scan BARCODE dibawah ini

Tabel. SKM Sekretariat Daerah Triwulan II

Nomor Responden	Nilai Unsur pelayanan									Nilai
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
Nilai Per Unsur	541	549	518	575	525	534	537	527	581	
NRR Per Unsur	3,58	3,64	3,43	3,81	3,48	3,54	3,56	3,49	3,85	
NRR Tertimbang Per Unsur	0,40	0,40	0,38	0,42	0,39	0,39	0,39	0,39	0,43	3,59
IKM Per Unsur	9,94	10,09	9,62	10,57	9,65	9,81	9,87	9,68	10,68	
IKM Unit Pelayanan										89,81



IKM UNIT PELAYANAN : 89,81

Kepala Bagian Umum,

LATIF KAMARUDIN, S.AP
Pembina (IV/a)
NIP. 19740705 199403 1 004

Link Kuisioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Triwulan II Tahun 2023 https://forms.gle/YTZAZizSbPTcJA28

Atau scan BARCODE dibawah ini

Tabel. SKM Sekretariat Daerah Triwulan III

Nomor Responden	Nilai Unsur pelayanan									Nilai
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
Nilai Per Unsur	549	542	541	583	539	549	542	551	595	
NRR Per Unsur	3,56	3,52	3,51	3,79	3,50	3,56	3,52	3,58	3,86	
NRR Tertimbang Per Unsur	0,40	0,39	0,39	0,42	0,39	0,40	0,39	0,40	0,43	3,60
IKM Per Unsur	9,89	9,77	9,75	10,51	9,71	9,89	9,77	9,93	10,72	
IKM Unit Pelayanan										89,94



IKM UNIT PELAYANAN : 89,94

Kepala Bagian Umum,

LATIF KAMARUDIN, S.AP
Pembina (IV/a)
NIP. 19740705 199403 1 004

Link Kuisioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Triwulan III Tahun 2023: https://forms.gle/7vVjtV2s4sj66v3X6

Atau scan BARCODE dibawah ini

Tabel. SKM Sekretariat Daerah Triwulan IV

Nomor Responden	Nilai Unsur pelayanan									Nilai
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
Nilai Per Unsur	543	551	540	601	547	545	556	542	606	
NRR Per Unsur	3,50	3,55	3,48	3,88	3,53	3,52	3,59	3,50	3,91	
NRR Tertimbang Per Unsur	0,39	0,39	0,39	0,43	0,39	0,39	0,40	0,39	0,43	3,60
IKM Per Unsur	9,72	9,86	9,67	10,67	9,79	9,76	9,95	9,70	10,85	
IKM Unit Pelayanan										90,07

NOMOR RESPONDEN	NILAI UNSUR PELAYANAN									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
∑ Nilai Per Unsur	543	551	540	601	547	545	556	542	606	
NRR Per Unsur = Jlh Nilai Per Unsur = Jlh Kuisioner yg Terisi	3,50	3,55	3,48	3,88	3,53	3,52	3,59	3,50	3,91	
NRR tertimbang Per unsur = NRR Per Uns x 0, 111	0,39	0,39	0,39	0,43	0,39	0,39	0,40	0,39	0,43	**3,60**
IKM Per unsur	**9,72**	**9,86**	**9,67**	**10,76**	**9,79**	**9,76**	**9,95**	**9,70**	**10,85**	
IKM Unit Pelayanan										**90,07**

- U1 s.d. U 9 = Unsur-Unsur pelayanan
- NRR = Nilai rata-rata
- IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat
- *) = Jumlah NRR IKM tertimbang
- **) = Jumlah NRR Tertimbang x 170
- NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi
- NRR tertimbang per unsur = NRR per unsur x 0,111

U1	Persyaratan
U2	Prosedur
U3	Waktu Pelayanan
U4	Biaya/ Tarif
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
U6	Kompetensi Pelaksana
U7	Perilaku Pelaksana
U8	Maklumat Pelayanan
U9	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan

IKM UNIT PELAYANAN : 90,07

Mutu Pelayanan :

A (Sangat Baik) : 88,31 - 100,00
B (Baik) : 76,61 - 88,30
C (Kurang Baik) : 65,00 - 76,60
D (Tidak Baik) : 25,00 - 64,99

Kepala Bagian Umum,

LATIP KAMARUDIN, S.AP
Pembina (IV/a)
NIP. 19740705 199403 1 004

Link Kuisioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Triwulan IV Tahun 2023: https://forms.gle/Pef5Yn9tPocWQ2j48

Atau scan BARCODE dibawah ini

Gambaran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 pada Triwulan I dengan nilai 89,44, Triwulan II dengan nilai 89,81, Triwulan III dengan Nilai 89,94 sedangkan Triwulan IV dengan nilai 90,07. Survei Kepuasan Masyarakat pada Triwulan I s.d IV masuk dalam kategori "**SANGAT BAIK".** Survei Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah Triwulan I s.d Triwulan IV sudah menggunak fitur *google formulir,* dimana link dari *google formulir* tersebut akan disebarkan kepada para responden. Hal ini dinilai lebih efektif dan efisien, karna responden dapat mengisi kuisioner lebih pleksibel dan hasil akan langsung terhubung dengan *google drive* sehingga dapat menghemat kertas.

4. SASARAN Inovasi publik yang diciptakan oleh SKPD

Indikator : Jumlah inovasi SKPD yang didaftarkan

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	Penanggung jawab/ Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
MISI Ke-2 : Menciptakan Inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif						
1	Inovasi publik yang diciptakan oleh SKPD	Jumlah inovasi SKPD yang didaftarkan	1	8	800%	Sekretaris Daerah dan Kabag Organisasi

Target kinerja inovasi yang didaftarkan untuk Tahun 2023 adalah 1 inovasi, dengan realisasi 8 inovasi yang diikutsertakan pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan yang lolos seleksi administrasi Sinovik Kemenpan RB Tahun 2023 ada 6 inovasi yang lolos seleksi administrasi yaitu Silakas, Detak, Simfoni, Sidika, PSC, dan Sosialita.

Tabel
Daftar Inovasi yang didaftarkan pada KIPP Tahun 2023

No	SKPD	Inovasi	Tahun Pembuatan	Keterangan
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Detak (Desa Tertib Administrasi Kependudukan)	2019	Layanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil ke desa-desa untuk memberikan layanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sehingga setiap warga desa tersebut memiliki dokumen kependudukan yang komplit untuk mewujudkan desa yang tertib administrasi kependudukan.
2	Dinas Kesehatan	PSC (Public Safety Center) 119 Tanah Laut	2019	Pelayanan ini mempermudah, mempercepat dan tidak menunda pelayanan kepada masyarakat, diantaranya strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan Jika dalam kasus gawat darurat sehingga tidak biasa datang ke Puskesmas, maka petugas medis datang kerumah. Yang dimana, untuk program ini masih harus dilengkapi dengan aplikasi dan regulasi agar masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas medis melalui smartphone datang ke rumah atau pelayanan kesehatan On Call.
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Silakas (Sistem Informasi Layanan Administrasi Kependudukan Via Smartphone)	2020	Layanan dokumen kependudukan melalui media digital berbasis android yang dapat didownload di playstore.

4	Bappeda	Integrasi dan Mekanisme Perencanaan Pembangunan di Lingkungan Pemkab Tanah Laut	2020	Inovasi Integrasi dan Mekanisme Perencanaan Pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut adalah bentuk inovasi dalam rangka mewujudkan perencanaan yang mengutamakan prioritas dan berdampak secara langsung ke masyarakat sesuai dengan program berorientasi fungsi dan manfaat karena itu perlu suatu orientasi skema perencanaan yang terstruktur untuk menjadi acuan dan arah bagi perencana di lingkungan Pemkab Tanah Laut.
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Simfoni (Sistem Informasi Layanan Online)	2020	Sistem Informasi Layanan Online (SIMFONI) dalah inovasi pelayanan administrasi kepegawaian secara online dalam mengurus usul dokumen kepegawaian seperti Kenaikan Pangkat, Pensiun, Cuti, Tugas Belajar, Iziin Belajar, Pencantuman Kelar, Pembuatan Karis/Karsu, Satya Lencana dan dokumen kepegawaian lainnya.
6	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Sidika (Sistem Informasi Dokumentasi Kepegawaian)	2020	Sistem Informasi Dokumentasi Kepegawaian (SIDIKA) merupakan sistem yang dapat digunakan untuk mengelola, menyimpan dan mengakses dokumen secara elektronik secara cepat dan tepat.
7	Sekretariat Daerah	Sistem Order Semua Instansi Lingkup Tanah Laut (Sosialita)	2020	Sistem Order Semua Instansi Lingkup Tanah Laut (SosiaLita) adalah e-marketplace produk inovasi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui UKPBJ Kabupaten Tanah Laut dan masuk kategori toko daring yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Aplikasi Sosialita ini bertujuan memudahkan dan menfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau jasa lainnya sampai dengan lima puluh juta rupiah yang dilakukan secara elektronik menggunakan aplikasi Sosialita untuk mewujudkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa daerah yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel serta mendorong dan mengoptimalkan peran serta UMKM lokal dalam pengadaan barang/jasa lingkup Tanah Laut.
8	Dinas P2KBP3A	Layanan Konseling Kepada Anak Bawah Umur Ingin Nikah (LAYAK KAWIN)	2021	Layanan konseling ini bertujuan untuk dapat mencegah atau mengurangi minat perkawinan dini. Selain itu konseling yang diberikan dapat membuka serta memberikan wawasan bagi calon pasangan perkawinan dini agar dapat berfikir kembali atau mematangkan mental/pemikiran sebelum kawin. Sehingga nantinya jika calon pasangan tetap memutuskan untuk kawin, dapat mengurangi resiko perceraian.

5. SASARAN Meningkatnya kebijakan perekonomian dan pembangunan

Indikator : Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang diterapkan

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	Penanggung jawab/ Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
MISI Ke-5 : Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat						
1	Meningkatnya kebijakan perekonomian dan pembangunan	Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang diterapkan	100%	100%	100%	Sekretaris Daerah dan Kabag Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan SDA

Pada akhir Tahun 2022, berdasarkan rilis data dari BPS Kalimantan Selatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Laut berhasil tumbuh 5,12% di tengah gelombang ketidakpastian perekonomian global, lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan Kalimantan Selatan sebesar 5,11%. Pada tahun 2023 diprediksi capaian pertumbuhan ekonomi tidak jauh dari target yang telah ditetapkan yaitu pada range 4,0 – 5,0%. Namun ada permasalahan lain yang harus disikapi dengan kebijakan dari Pemerintah daerah agar Perekonomian Daerah tetap tumbuh. Masih tingginya angka kredit bermasalah (NPL) program Gapura Karomah, kinerja BUMD yang belum semuanya sehat dan permasalahan bidang perekonomian lainnya perlu untuk disikapi dengan teliti, cepat, dan serius. Oleh karena itu perlu beberapa kebijakan yang dirancang untuk menjaga perekonomian tetap berjalan dengan program yang sudah ada.

Kebijakan yang dirancang oleh Pemerintah Daerah antara lain melakukan perubahan peraturan Bupati tentang pelaksanaan Gapura Karomah untuk pemindahan resiko kerugian, tindak lanjut rencana penambahan investasi Pemerintah Daerah Kepada BUMD PT. BPD Kalimantan Selatan, PT. BPR Tanah Laut dan PDAM Tanah Laut, evaluasi kinerja manajemen BUMD secara berkala, sosialisasi dalam rangka peningkatan penyaluran program permodalan berbiaya rendah (KUR dan UMi) dan kebijakan lainnya dalam rangka menjaga stabilitas harga pangan dalam rangka partisipasi menjaga tingkat inflasi daerah provinsi Kalimantan Selatan.

Selanjutnya disajikan Perbandingan Antara Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten/RPJMD dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Tahun 2023 sebagaimana tabel dibawah ini :

TANAH LAUT

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT DAERAH YANG SELARAS DENGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KABUPATEN/RPJMD

TAHUN 2023



SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

NO	IKU RPJMD/KABUPATEN		2023			IKU SEKRETARIAT DAERAH		2023			KETERANGAN
	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAP	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAP	
1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	87,33	109,16%	Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	82	89,99	109,75%	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Daerah dilaksanakan melalui fitur ***google formulir*** SKM. Survei dilakukan secara triwulan dan untuk tahun 2023 hasil SKM Sekretariat Daerah dalam kategori **SANGAT BAIK**. Pada tahun 2023 pelaksanaakn SKM berjalan optimal dilihat dari jumlah rresponden yang telah mencapai target.
2	Meningkatnya inovasi pelayanan publik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang didaftarkan	2	8	400%	Inovasi publik yang diciptakan oleh SKPD	Jumlah inovasi SKPD yang didaftarkan	1	8	800%	Inovasi yang didaftarkan pada lomba SINOVIK (Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik) adalah 2 inovasi yaitu SILAKAS dan DETAK. Dari 2 inovasi tersebut yang berhasil lolos administrasi adalah SILAKAS.
3	-	-				Meningkatnya skor LPPD Kabupaten	Skor LPPD Kabupaten	ST 3.150	Nilai belum terbit dari kemendagri	Nilai belum terbit dari kemendagri	Sehubungan dengan belum terbitnya Nilai LPPD Kabupaten Tanah Laut dari Kemendagri maka LPPD Kabupaten Tanah Laut tidak ada nilai
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dan Reformasi	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Daerah (Kategori)	-	-	-	Meningkatnya Penerapan RB Pemerintah Daerah	Persentase SKPD dengan nilai RB minimal B	-	-	-	Hasil evaluasi RB seluruh SKPD pada tahun 2022 adalah : 1. 8 SKPD dengan kategori AA; 2. 9 SKPD dengan kategori A;

	Pelayanan Publik										3. 12 SKPD dengan kategori BB; 4. Dan 12 SKPD dengan kategori B. Sehingga seluruh SKPD telah mendapatkan nilai RB minimal B.
5			A (81)	B (67,52)	83,36%	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Persentase SKPD dengan nilai SAKIP minimal BB	100%	77,5%	77,5%	Hasil evaluasi SAKIP seluruh SKPD pada tahun 2022 adalah : 1. 6 SKPD dengan kategori A; 2. 34 SKPD dengan kategori BB. Sehingga seluruh SKPD telah mendapatkan nilai SAKIP minimal BB.
6	-	-				Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	83	82	98.79%	Berdasarkan Surat Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 700.1.2.1/166-LHE AKIP/Insp/2023 hal Laporan Hasil Evaluasi AKIP, Nilai SAKIP Sekretariat Daerah Sebagai Berikut 1. Perencanaan Kinerja 24.6% dari Bobot 30% 2. Pengukuran Kinerja 24.6% dari Bobot 30% 3. Pelaporan Kinerja 12.3% dari Bobot 15% 4. Evaluasi Internal 20.5% dari Bobot 25% Nilai SAKIP Sekretariat Daerah yaitu 82 (98.79%) dalam artian tidak tercapai sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 83.

	-	-					Nilai SPIP Sekretariat Daerah	3.7	Masih dalam Tahap Baseline Maturitas SPIP	Masih dalam Tahap Baseline Maturitas SPIP	Untuk Tahun 2023 masih dalam Tahap 1. Pengsian Baseline SPIP Terintegrasi 2. Sosialisasi Asesor SKPD 3. Penginputan Data Awal terkait Tujuan dan Sasaran serta Program dan Kegiatan 4. Pengisian Kertas Kerja memalui Aplikasi SPIP Terintegrasi 5. Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi Sekretariat Daerah 6. Pendampingan Risk Registrasi Sekretarait Daerah Tahun 2023 oleh BPKP Perwakilan Prov. Kalsel dan Inspektorat Kab. Tanah Laut Dengan demikian Tahun 2023 belum diadakan penilaian Level Maturitas SPIP Terintegrasi terhadap SKPD
7	-	-				Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Nilai RB Sekretariat Daerah	92	-	-	Penilaian RB pada Tahun 2023 di fokuskan pada Sistem Penilaian Tematik, sehingga hanya beberapa SKPD yang melaksanakan Penilaian RB sesuai dengan Tema yang diampu SKPD tersebut.
	-	-					Nilai ZI Sekretariat Daerah	85	80.83	95.09%	Berdasarkan Surat Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 700.1.2.1/112/Insp/2023 perihal Laporan Hasil Evaluasi Pembangunan Zona Integritas, Nilai ZI Sekretariat Daerah, ada beberapa Komponen

											Pemenuhan yang belum Optimal yang masih dibawah 60% : 1. Komponen Pengunkit ➢ Penguatan Pengawasan 50.51% 2. Komponen Hasil ➢ Survey persepsi kualitas pelayanan publik 16,28% 3. Komponen Hasil Pencapaian Kinerja telah tercapai dengan nilai baik Dengan nilai ZI Sekretariat Daerah 80.83 ini berdasarkan hasil evaluasi Tim Penilai Nasional maka Sekretariat Daerah belum layak diusulkan untuk WBK.
8	Meningkatnya Kinerja unit usaha sektor unggulan daerah	Pertumbuhan sektor pertanian				Meningkatnya Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang diterapkan	100%	100%	100%	Dalam rangka mendukung pengembangan sektor unggulan daerah yaitu pertanian, Pemerintah Kab. Tanah Laut telah menginvestasikan dana sebesar 45 milyar untuk disalurkan kepada pelaku usaha dalam bentuk pinjaman modal tanpa bunga. Berdasarkan data capaian laporan realisasi penyaluran dana program Gapura karomah PT. BPR telah disalurkan pinjaman modal usaha tanpa bunga untuk sektor: 1. Pertanian sebesar 11,9 milyar rupiah atau 58,12% total dana yang disalurkan 2. Sektor Peternakan sebesar 5,7 milyar atau
		Pertumbuhan sektor industri olahan									
	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi									

											28,15% total dana yang disalurkan;dan 3. Sektor industri pengolahan 118 juta rupiah atau 0,58% total dana yang disalurkan 4. Selain program Gapura Karomah Pemkab Tanah Laut juga mendorong penyerapan realisasi KUR untuk sektor pertanian, hingga 22 Desember 2023 telah disalurkan KUR untuk sektor pertanian, perburuan dan kehutanan sebesar Rp 241,3 milyar rupiah

2. Eselon II

2.1 Eselon II (Sekretaris Daerah)

Dari target Indikator Kinerja Utama Eselon II (Sekretaris Daearah) yang telah selaras dengan **Sasaran RPJMD**, maka uraian dan analisa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 dapat di lihat pada tabel berikut :

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	82	89.98	109.75%
2	Inovasi publik yang diciptakan oleh SKPD	Jumlah inovasi SKPD yang didaftarkan	1	8 inovasi	800%
3	Meningkatnya skor LPPD Kabupaten	Skor LPPD Kabupaten	ST 3,150	Nilai belum terbit dari KEMENDAGRI	Nilai belum terbit dari KEMENDAGRI
4	Meningkatnya Penerapan RB Pemerintah Daerah	Persentase SKPD dengan nilai RB minimal B	0	0	0
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Persentase SKPD dengan nilai SAKIP minimal BB	100	77.5	77.5%
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	83	82	98.79%
		Nilai SPIP Sekretariat Daerah	3,7	Masih dalam tahap *Baseline* SPIP	Masih dalam tahap *Baseline* SPIP
7	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Nilai RB Sekretariat Daerah	92	Sekretariat Daerah tidak termasuk RB Tematik	Sekretariat Daerah tidak termasuk RB Tematik
		Nilai ZI Sekretariat Daerah	85	80.83	95.09%
8	Meningkatnya Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang diterapkan	100%	100%	100%
	Total				**213.52%**

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2023*

Selanjutnya untuk capaian Indokator Kinerja Utama (IKU) Eselon II (Sekretaris Daerah) selama 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018-2023 tersaji pada tabel di bawah ini :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ESELON II SEKRETARIAT DAERAH
SELAMA 5 (LIMA) TAHUN
TAHUN 2018-2023

TAHUN 2019

NO	IKU SEKRETARIAT DAERAH		2019			2020			2021			2022			2023			PENANGGUNG JAWAB/BAGIAN
	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAP	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	
1	Meningkatnya kualitas layanan Pemerintah Kabupaten	Skor LPPD Kabupaten	ST 3,060	*Masih dalam tahap penilaian*	*Masih dalam tahap penilaian*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIS DAERAH DAN KABAG TU DAN KEUANGAN
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Nilai SAKIP Kabupaten	BB 71,00	B 64,89	91,4%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIS DAERAH DAN KABAG ORGANISASI
3	Inovasi publik yang diciptakan oleh SKPD	Jumlah inovasi SKPD yang didaftarkan	1	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIS DAERAH DAN KABAG TU DAN KEUANGAN
5	Meningkatnya kualitas Pengadaan barang/jasa lingkup Kabupaten	Persentase SKPD yang melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui LPSE	100%	63%	63%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIS DAERAH DAN KABAG TU DAN KEUANGAN
6	Meningkatnya toleransi dan kepedulian sosial antar umat beragama	Persentase lembaga keagamaan yang aktif dalam pembinaan umat	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIS DAERAH DAN KABAG TU DAN KEUANGAN

NO	IKU SEKRETARIAT DAERAH		2019			2020			2021			2022			2023			PENANGGUNG JAWAB/BAGIAN
	SASARAN	INDIKATOR	T	R	C	TARGET	REALISASI	CAP	T	R	C	T	R	C	T	R	C	
1	Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	80	82.33	102.9%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIS DAERAH DAN KABAG TU DAN KEUANGAN
2	Inovasi publik yang diciptakan oleh SKPD	Jumlah inovasi SKPD yang didaftarkan	-	-	-	1	5	500%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIS DAERAH DAN KABAG ORGANISASI
3	Meningkatnya skor LPPD Kabupaten	Skor LPPD Kabupaten	-	-	-	ST 3.075	TAHAP EVALUASI	TAHAP EVALUASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIS DAERAH DAN KABAG TAPEM
4	Meningkatnya Penerapan RB Pemerintah Daerah	Persentase SKPD dengan nilai RB minimal B	-	-	-	80%	92.5%	97.37%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIS DAERAH DAN KABAG ORGANISASI
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Persentase SKPD dengan nilai SAKIP minimal BB	-	-	-	90	92.5	102.77 %-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIS DAERAH DAN KABAG ORGANISASI
6	Meningkatnya tata kelola kepemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Nilai RB Sekretariat Daerah	-	-	-	85	91.24	107%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIS DAERAH DAN KABAG TU DAN KEUANGAN
		Nilai ZI Sekretariat Daerah	-	-	-	82	84.64	103%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	-	-	-	82	84.35	102.7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Nilai SPIP Sekretariat Daerah	-	-	-	3.5	3.77	107.7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Meningkatnya kebijakan perekonomian dan pembangunan	Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang diterapkan	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIS DAERAH DAN KABAG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

TAHUN 2020

TAHUN 2021,2022 DAN 2023

NO	RPJMD		IKU SEKRETARIAT DAERAH		2019			2020			2021			2022			2023			PENANGGUNG JAWAB/BAGIAN
	SASARAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	T	R	C	T	R	C	TARGET	REALISASI	CAP	TARGET	REALISASI	CAP	TARGET	REALISASI	CAP	
1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	-	-	-	81	87.12	107.5 %	81.5	92,98	114%	82	89,98	109,75%	SEKRETARIS DAERAH DAN KABAG UMUM
2	Meningkatnya inovasi pelayanan publik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang didaftarkan	Inovasi publik yang diciptakan oleh SKPD	Jumlah inovasi SKPD yang didaftarkan	-	-	-	-	-	-	1	6	600%	1	10	1000 %	1	8 Inovasi	800%	SEKRETARIS DAERAH DAN KABAG ORGANISASI
3	-	-	Meningkatnya skor LPPD Kabupaten	Skor LPPD Kabupaten	-	-	-	-	-	-	ST 3.100	2,43	78,387%	ST 3.125	2,9275	93,68 %	ST 3.150	Nilai belum terbit dari Kemendagri	Nilai belum terbit dari Kemendagri	SEKRETARIS DAERAH DAN KABAG TAPEM
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dan Reformasi Pelayanan Publik	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Daerah (Kategori)	Meningkatnya Penerapan RB Pemerintah Daerah	Persentase SKPD dengan nilai RB minimal B	-	-	-	-	-	-	85%	70%	82.35 %	90	100	111,11%	0	0	0	SEKRETARIS DAERAH DAN KABAG ORGANISASI
5			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Persentase SKPD dengan nilai SAKIP minimal BB	-	-	-	-	-	-	95	65	68.42 %	100	100	100%	100	77,5	77,5	SEKRETARIS DAERAH DAN KABAG ORGANISASI
6	-	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-	82	86.81	105.86%	83	84.2	101.4 %	83	82	98,79 %	SEKRETARIS DAERAH DAN KABAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	-	-		Nilai SPIP Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-	3.5	TAHAP *BASELINE* SPIP	TAHAP *BASE*	3.6	Masih tahap Basiline SPIP	Masih tahap Basili	3.7	Masih dalam tahap	Masih dalam tahap Basili	SEKRETARIS DAERAH DAN KABAG

													LINE SPIP			ne SPIP		Basiline SPIP	ne SPIP	PERENCANAAN DAN KEUANGAN
7	-	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Nilai RB Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-	90	91.71	101.9 %	91	92.59	101.7 %	92	Sekretariat Daerah tidak termasuk RB Tematik	Sekretariat Daerah tidak termasuk RB Tematik	SEKRETARIS DAERAH DAN KABAG UMUM
	-	-		Nilai ZI Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-	83	84.64	101.9 %	84	87.74	104.4 %	85	80,83	95,09 %	SEKRETARIS DAERAH DAN KABAG UMUM
8	Meningkatnya Kinerja unit usaha sektor unggulan daerah	Pertumbuhan sektor pertanian	Meningkatnya Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang diterapkan	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	100%	SEKRETARIS DAERAH DAN KABAG PEREKONOMIAN, ADM PEMB DAN SDA
		Pertumbuhan sektor industri olahan																		
	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi																		

- **Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Eselon II Selama 5 (Lima) Tahun dari Tahun 2018-2023**

Sebagaimana tercantum dalam Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Tahun 2018-2023, bahwa capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) Eselon II dari Tahun 2018-2023 akan diuraikan sebagai berikut :

1. Pada Tahun 2019 Sekretariat Daerah mempunyai 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU), dari 5 (lima) Indikator tersebut hanya 2 (dua) indikator yang tercapai sesuai target, 1 (satu) indikator tidak terbit nilai SKOR dari Kemendagri, sedangkan 2 (dua) indikator tidak tercapai sebagaimana target yang telah ditentukan.
2. Pada Tahun 2020 Sekretariat Daerah Mempunyai 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) dari 10 (sepuluh) Indikator tersebut 9 (sembilan) indikator tercapai sesuai target, sedangkan 1 (satu) indikator tidak terbit nilai SKOR dari Kemendagri.
3. Pada Tahun 2021 Sekretariat Daerah Mempunyai 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) dari 10 (sepuluh) Indikator tersebut 6 (enam) indikator tercapai sesuai target, 3 (tiga) indikator tidak tercapai sesuai target sedangkan 1 (satu) indikator masih dalam tahap *Baseline SPIP*.
4. Pada Tahun 2022 Sekretariat Daerah Mempunyai 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) dari 10 (sepuluh) Indikator tersebut 8 (delapan) indikator tercapai sesuai target, 1 (satu) indikator tidak tercapai sesuai target sedangkan 1 (satu) indikator masih dalam tahap *Baseline SPIP*.
5. Pada Tahun 2023 Sekretariat Daerah Mempunyai 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) dari 10 (sepuluh) Indikator tersebut 3 (tiga) indikator tercapai sesuai target, 1 (satu) indikator masih dalam tahap evaluasi Kemendagri (LPPD), 1 (satu) indikator masih dalam tahap *Baseline SPIP*, 3 (tiga) indikator tidak tercapai sesuai target, 1 (satu) indikator tidak dilaksanakan penilaian karena Sekretariat Daerah tidak termasuk RB Tematik sedangkan 1 (satu) indikator tidak dilaksanakan karena tidak dilakukan evaluasi RB pada tingkat SKPD.

SASARAN 1 Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat Daerah

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	82	89.98	109.75%

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik memberikan amanat kepada seluruh penyelenggara pelayanan yang terstandarisasi dengan memenuhi komponen standar pelayanan. Sebuah instansi dalam pelayanan publik sangat tergantung dengan sejauh mana sumber daya manusia yang terdapat dalam instansi tersebut dapat memberikan konstribusi bagi perkembangan organisasi dalam memberikan pelayanan prima kepada publik. Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagai penyelenggara pelayanan publik terus berupaya mengikuti perkembangan dan berupaya selalu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan melakukan Survei Kepuasan Masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik dan untuk mengetahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik.

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 adalah sebagai berikut ;

NILAI SKM SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2022				NILAI SKM SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2023			
TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
87,74	88,26	92,80	92,98	89,44	89,81	89,94	90,07

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut secara umum dikatagorikan sangat baik. Pada Tahun 2023 kembali Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut melakukan Survei Kepuasan Masyarakat pada triwulan I s,d IV mendapatkan nilai dengan kategori **Sangat Baik**.

Kedepannya Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut selalu berupaya dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan evaluasi dan pembenahan terhadap apa yang menjadi kelemahan-kelemahan atas survei kepuasan masyarakat.

Dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut secara umum dapat berjalan dengan lancar, Adapun Kendala, solusi dan Rencana Aksi dapat dilihat pada table dibawah ini ;

Tabel : Kendala, Solusi dan Rencana Aksi Survei Kepuasan Masyarakat

No	Kendala	Solusi	Rencana Aksi
1	Kurang pahamnya masyarakat terhadap masksud dan tujuan dilakukannya Survei Kepuasan masyarakat	Perlunya pemberian pemahaman kepada masyarakat terkait maksud setiap pertanyaan dalam Survei Indeks Kepuasan Masyarakat	Petugas membantu dan mengarahkan tentang tata cara pengisian kuisioner
2	Masing-masing bagian di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut kurang respon terhadap pelaksanaan SKM	Memberikan pemahaman kepada bagian-bagian pentingnya maksud dan tujuan dilakukannya SKM	Melakukan koordinasi secara intens kepada masing-masing bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya kualitas layanan sekretariat daerah dengan indikator **Indeks Kepuasan Masyarakat dan dengan program** ditunjang dengan Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan pagu Rp. 6.423.530.835 terealisasi Rp.

5.932.755.378 dengan realisasi keuangan sebesar 92,36% dan dilaksanakan oleh 4 (empat) orang Sumber Daya Manusia. Kegiatan indikator ini dilaksanakan melalui koordinasi dengan bagian-bagian lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut serta survei secara langsung kepada masyarakat tanah laut menggunakan *google formulir.*

Untuk capaian kinerja terhadap IKU tersebut diatas adalah **109,75%** sedangkan untuk realisasi anggaranya sebesar **96,23%.** Dalam artian IKU ini telah dilaksanakan dengan efktif dan efisien dikarenakan capaian kinerjanya lebih besar daripada realisasi anggaran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI
109,75%	96,23%	13,52%

SASARAN 2 Inovasi publik yang diciptakan oleh SKPD

Indikator : Jumlah inovasi SKPD yang didaftarkan

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
1	2	3	4	5	6
2	Inovasi publik yang diciptakan oleh SKPD	Jumlah inovasi SKPD yang didaftarkan	1	8 inovasi	800%

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik, Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinil dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, tetapi dapat merupakan suatu pendekatan baru yang bersifat kontekstual dalam arti inovasi tidak terbatas dari tidak ada kemudian muncul gagasan dan praktik inovasi, tetapi dapat berupa inovasi hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi yang ada

Tujuan dari Inovasi Pelayanan Publik, yaitu:

1) Mendorong pembangunan inovasi pelayanan publik;
2) Mendorong pengembangan dan transfer inovasi pelayanan publik;

3) Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;dan
4) Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Berikut adalah perbandingan jumlah inovasi yang ada di Kabupaten Tanah Laut dari Tahun 2020-2023.

Tabel
Perbandingan Jumlah Inovasi dari Tahun 2020-2023

	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Inovasi SKPD	13	40	17	45

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Organisasi Tahun 2023*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan dari Tahun 2020 s.d 2023, yaitu dengan total jumlah inovasi 115 inovasi. Hal ini tidak terlepas dari komitmen Bupati Tanah Laut yang meminta kepada SKPD dan jajarannya agar terus dapat menciptakan inovasi-inovasi pada SKPD yang nantinya mempermudah dalam pelayanan publik.

Inovasi merupakan salah satu indikator sasaran dalam RPJMD dan penghargaan yang diterima adalah indikator tujuannya. Pada akhir tahun 2023, berdasarkan Keputusan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 795 Tahun 2023 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan BUMN Tahun 2023, Kabupaten Tanah Laut telah meraih predikat Sangat Baik (A-) dengan indeks 4.10. Sedangkan berdasarkan Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 418 Tahun 2023 tentang Hasil Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Tahun 2023, Kabupaten Tanah Laut memperoleh kategori A (opini kualitas tertinggi) dengan nilai kepatuhan 90,61 zona hijau.

Dari jumlah inovasi yang didaftarkan di Tahun 2023 pada KIPP (Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik) Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ada 6 (enam) Inovasi yang lolos sampai pada tahap seleksi administrasi yaitu : SIMFONI, SIDIKA, DETAK, SILAKAS, SOSIALITA, dan PSC119.

Pada tahun yang sama juga Kabupaten Tanah Laut mengadakan Lomba Inovasi Daerah Tahun 2023 yaitu Tanah Laut Innovation Awards yang diikuti oleh beberapa SKPD, yaitu:

No	SKPD	Nama Inovasi
1	Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut	Penilaian Kinerja Perangkat Daerah
2	Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut	Dandaman Tarus
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sistem Informasi Inovasi Daerah (SIID)
4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sistem Informasi Dokumentasi Kepegawaian (SIDIKA)
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sistem Informasi Layanan Online (SIMFONI)
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	SILAPOR - ORMAS
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sistem Pengumpulan Lengkap Data Capaian Kinerja (Tempeleng Tapaija)
8	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	YANDU SANAK KAWAN
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Simpel (Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan)
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelangi (Pelayanan Administrasi Kependudukan Terintegrasi)
11	Dinas Perhubungan	LAKATAN (Layanan Angkutan Tanah Laut)
12	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan	PROGRAM KIJANG MAS TALA ((Kolaborasi Layanan Penunjang Penyelesaian Masalah Bidang Tanah eks Transmigrasi di Wilayah Kabupaten Tanah Laut)
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	WA in de OCA
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	Penyelenggaraan Layanan dan Program Siaran melalui Live dan Streaming pada Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tanah Laut Radio Tuntung Pandang FM
15	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Kemudahan Penyaluran BBM Solar Bersubsidi untuk Nelayan Melalui Sub Penyalur
16	Dinas Pariwisata	Film TALA "When Love Calls From The Bottom Of Borneo"
17	Dinas Pariwisata	Program Gesit Wisata (Gerakan Siswa Cinta Wisata Tanah Laut)
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	DASAR TERANG (DATANGI SASARAN TERA DAN TERA ULANG)
19	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Sahabat Layanan Masyarakat (SALAM)
20	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Smart Office Smart Service (SOSS)
21	Dinas Pengendalian Penduduk , Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	LAYAK KAWIN (Layanan Konseling Kepada Anak Bawah Umur Ingin Nikah)
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	EFEKTIVITAS LAYANAN BERBANTUAN ONLINE SINGEL SUBMISSION DENGAN KUNJUNGAN (ES DEGAN)
23	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	(SiKoPI aDa) SISTEM INFORMASI KEOLAHRAGAAN DAN PELAPORAN INSAN OLAHRAGA DAERAH
24	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SIGABSUS (SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS)
25	Dinas Kesehatan	GERMAS (GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT)

26	Dinas Kesehatan	SIP OK (SURVEI INDIKATOR PHBS ONLINE OLEH KADER)
27	Dinas Kesehatan	SIMISTIK (SISTEM INFORMASI MANAJEMEN LOGISTIK)
28	Satpol PP dan Damkar	Sekretariat penyidik pegawai negeri sipil (PPNS)
29	Kecamatan Batu Ampar	SiIpat
30	Kecamatan Kintap	SUNATAN MASAL GRATIS
31	Kecamatan Takisung	Si-ALADIN (Sistem Aduan, Layanan Administrasi dan Informasi)
32	Kecamatan Panyipatan	KILAT (Kendaraan trantIb LAyanan cepaT)
33	Kecamatan Bumi Makmur	Pelaksanaan Inovasi Pelayanan melalui Sistem Informasi Cepat terlayani, Aman, Nyaman, Tertib, Inovatif dan Konsisten (SI CANTIK)
34	RSUD H. Boejasin	BISA (Boejasin Information System and Application)
35	PDAM TANAH LAUT	QGIS PTAM BERKAH BENUA (PERSERODA)
36	PDAM TANAH LAUT	ADUAN ONLINE PTAM BERKAH BANUA (PERSERODA)

Dari 36 inovasi yang ikut serta lalu diseleksi menjadi 10 besar, adapaun yang masuk 10 besar adalah: SIMFONI, SIMPEL, SIKOPI ADA, SOSS, SIGABSUS, SALAM, PELANGI, SIP OK, SI CANTIK, dan BISA.

Berdasarkan hasil seleksi lebih lanjut diputuskan 3 inovasi terbaik, yaitu: Juara pertama dari RSUD H. Boejasin (BISA), juara kedua Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (SOSS), dan juara ketiga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SIGABSUS).

Untuk tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Tanah Laut meraih juara 2 dalam lomba Kalsel Innovation Award, dengan nama inovasi KIJANG MAS TALA dari Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 400.10.11-6287 Tahun 2023 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2023, Kabupaten Tanah Laut meraih indeks 55,15 dengan predikat Inovatif.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berkomitmen akan terus meningkatkan inovasi-inovasi di segala sendi kehidupan terutama inovasi dalam hal pelayanan publik. Hal ini dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

1) Timbulnya kesadaran dari ASN untuk memberikan pelayanan yang lebih maksimal kepada masyarakat.
2) Menciptakan kemudahan-kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan.
3) Mempersingkat panjangnya birokrasi terutama dalam hal pelayanan publik

Rencana aksi ke depan yang akan dilaksanakan yaitu:

1) Setiap SKPD sudah membuat inovasi yang berkaitan dengan pelayanan publik yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanah Laut atau Keputusan Bupati Tanah Laut.

   Dengan adanya inovasi SKPD, hal ini menjadi salah satu indikator dalam penilaian kinerja perangkat daerah pada Tahun 2023, dimana ke depannya bagi SKPD yang telah memiliki inovasi maka akan dapat meningkatkan kinerja perangkat daerah itu sendiri dan akan mendapatkan *reward* oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut.

2) Melakukan pembinaan inovasi dalam kompetisi sehingga akan mendorong SKPD untuk memunculkan inovasinya lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar pelayanan yang diberikan lebih baik dan berkualitas.

3) Menginventarisir inovasi-inovasi yang ada di SKPD, inovasi pada SKPD mana saja yang sudah memasuki 2 tahun pengimplementasiannya untuk diikutsertakan pada ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setiap tahunnya.

Untuk mencapai sasaran **Inovasi publik yang diciptakan oleh SKPD** dengan **Jumlah inovasi SKPD yang didaftarkan** dengan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Penataan Organisasi Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana dengan pagu Rp. 124.754.512 terealisasi Rp. 85.217.862 dengan realisasi keuangan sebesar 86,31% dan dilaksanakan oleh 3 (tiga) orang Sumber Daya Manusia. Kegiatan Indikator ini dilaksanakan melalui pembinaan Pelayanan Publik dan Tata Laksana di lingkungan Pemeirntah Kabupaten Tanah Laut. Untuk capaian kinerja terhadap kedua IKU tersebut diatas adalah **100%** sedangkan untuk realisasi anggarannya sebesar **86,31%.** Dalam artian IKU ini telah berhasil dilaksanakan dengan efektif dan efisien dikarenakan capaian kinerjanya lebih besar daripada realisasi anggaran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI

800%	86,31%	713,69%

SASARAN 3.1 Meningkatnya Skor LPPD Kabupaten

Indikator : Skor LPPD Kabupaten

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
1	2	3	4	5	6
3.1	Meningkatnya skor LPPD Kabupaten	Skor LPPD Kabupaten	ST 3,150	Nilai Belum Terbit Dari KEMENDAGRI	Nilai Belum Terbit Dari KEMENDAGRI

Kegiatan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) berupa pelaksanaan rapat koordinasi yang dilaksanakan untuk pembentukan Tim Penyusun LPPD, sosialisasi penyusunan, hingga evaluasi yang dilaksanakan ke masing-masing SKPD. Rapat koordinasi terlaksana dengan baik dengan didukung oleh perhatian dan peran aktif dari seluruh stake holder dan SKPD terkait terutama untuk tingkat kehadiran yang tinggi di setiap rapat koordinasi walaupun terdapat beberapa kekurangan di kelengkapan dokumen serta validasi data yang dikumpulkan.

Program yang mendukung kegiatan ini adalah Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Kegiatan Administrasi Pemerintahan sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan anggaran sebesar Rp 301.768.194,- dan realisasi sebesar Rp 271.381.868,- (89,93%).

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1109 Tahun 2023 Tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2022 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2021, Kabupaten Tanah laut menempati Peringkat 190 dari 400 dengan nilai 2.43 **Kategori Rendah** dari target 3,100. Untuk capaian Nilai Laporan LPPD Tahun 2023 Berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah secara Nasional

Tahun 2023 berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Daerah Provinsi dan Kabupaten /Kota Tahun 2022 dengan Nilai 2,9275 **Kategori Sedang** dari target 3,150

Capaian Skor LPPD Kabupaten Tanah Laut dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel Skor LPPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 s/d 2023

NO	2021	2022	2023
	2.43	2.9275	Nilai Belum Terbit dari Kemendagri

Untuk kegiatan Penyelenggaraan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2023 mengalami penurunan dari Target yang di tentukan hal ini dikarenakan dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain :

- Bobot nilai IKK LPPD masih banyak yang capaiannya rendah karena realisasi capaian kinerja di masing-masing IKK dari SKPD yang rendah, kegiatannya tidak ada pelaksanaannya atau belum terakomodir.
- Kurangnya komitmen SKPD dalam menyajikan data yang *valid*.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Peningkatan kualitas pengumpulan data IKK LPPD dan evaluasi internal seluruh SKPD.
- Memprioritaskan perencanaan usulan kegiatan-kegiatan SKPD yang termasuk pada IKK LPPD untuk dianggarkan di SKPD terkait.
- Menerapkan *reward* dan *punishment* terhadap SKPD terkait penyusunan dan skor LPPD.

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Menghadirkan narasumber dari Kemendagri untuk sosialisasi LPPD kedepannya
- Memprioritaskan perencanaan usulan kegiatan-kegiatan SKPD yang termasuk pada IKK LPPD untuk dianggarkan di SKPD terkait.
- Menerapkan *reward* dan *punishment* terhadap SKPD terkait penyusunan dan skor LPPD.
- Untuk format LPPD SKPD disesuaikan dengan format Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bahwa Laporan Kinerja SKPD disusun menjadi satu dengan LPPD SKPD.

CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI
Masih dalam tahap evaluasi KEMENDAGRI	95,04%	-



Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Penyusunan LPPD SKPD Tahun 2023

SASARAN 3.2 Meningkatnya Penerapan RB Pemerintah Daerah

Indikator : Persentase SKPD dengan Nilai RB Minimal B

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
1	2	3	4	5	6
3.2	Meningkatnya Penerapan RB Pemerintah Daerah	Persentase SKPD dengan nilai RB minimal B	0	0	0

Tidak tersedia data untuk indikator Persentase SKPD dengan nilai RB minimal Cukup Baik dikarenakan tidak dilakukan evaluasi RB pada tingkat SKPD. Sedangkan untuk Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 RB adalah 12.

Meskipun penilaian pada tingkat SKPD tidak dilaksanakan, tetapi pembinaan RB ke SKPD tetap dilaksanakan, diantaranya telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
2. Penetapan Kepala Perangkat Daerah sebagai Role Model (teladan) dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi terutama dalam perubahan pola pikir dan budaya kerja.
3. Pelaksanaan Focus Grup Discusion (FGD) kepada seluruh Agen Perubahan dengan tujuan meningkatkan strategi implementasi Rencana Aksi Agen Perubahan serta

meningkatkan kualitas kemampuan dan integritas individu Agen Perubahan sehingga mampu melaksanakan perannya dengan baik dalam percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah. Setelah dilakukan bimbingan teknis seluruh Agen Perubahan menyusun Rencana Aksi Perubahan yang akan di implementasikan di seluruh SKPD masing-masing Agen Perubahan.



4. Penyusunan Rencana Aksi RB General dan Tematik berfokus pada hasil yang langsung berdampak kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain :

- Belum tertanamannya ke seluruh ASN budaya kerja organisasi yang berbudaya kinerja
- Kurang memahami dan kurangnya komitmen dari seluruh ASN terhadap penerapan Refromasi Birokrasi.
- Kurangnya peran Agen Perubahan sehingga belum bisa menjadi Role Model atau panutan dalam penerapan reformasi birokrasi di lingkungan pekerjaan sehari-hari.

Solusi/ upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/ hambatan tersebut adalah:

- Melibatkan seluruh aparatur Negara terutama Pimpinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk lebih berkomitmen dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi terutama pada perubahan pola pikir (*Mind Set*) dan budaya dalam bekerja agar lebih berbudaya kinerja dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat karena inti dari perubahan adalah manusia itu sendiri dalam hal ini adalah aparatur Negara.
- Optimalisasi internalisasi seluruh program Reformasi Birokrasi sampai dengan level organisasi terendah
- Mengoptimalkan seluruh sumberdaya yang dimiliki untuk membangun Kabupaten Tanah Laut.

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Pelaksanaan Peraturan Bupati Tanah Laut nomor 95 Tahun 2022 tentang Pedoman penilaian kinerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
- Optimalisasi internalisasi seluruh program Reformasi Birokrasi sampai dengan level organisasi terendah
- Dilaksanakan kembali bimbingan teknis kepada seluruh Role Model dan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi dalam rangka percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Tahun 2023, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota kegiatan penataan organisasi sub kegiatan peningkatan kinerja dan reformasi Birokrasi dengan Anggaran sebesar Rp 295.047.321 dan terealisasi sebesar Rp. 254.588.847 atau 86,29% dan didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 3 Orang yaitu Kepala Bagian Organisasi, Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi dan Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja.

Tabel Kegiatan Penunjang Kinerja Sub Kinerja dan Reformasi Birokrasi

SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	295.047.321	254.588.847	86,29

SASARAN 3.3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten

Indikator : Persentase SKPD dengan Nilai SAKIP Minimal BB

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
1	2	3	4	5	6
3.3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Persentase SKPD dengan nilai SAKIP minimal BB	100	77.5	77.5

Persentase SKPD dengan nilai SAKIP minimal BB terealisasi sebesar 77,5% (31 SKPD dari 40 SKPD) dari target 100% sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 77,5%. Mengalami penurunan sebesar 22,5 % jika dibandingkan dengan Tahun 2022 yaitu 100% (40 SKPD dari 40 SKPD).

Beberapa hal yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam peningkatan SAKIP di Tahun 2023 antara lain :

1. Asistensi peningkatan implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan Narasumber dari
2. Penyusunan Perjanjian Kinerja SKPD yang ditetapkan telah memuat penjabaran kinerja (*cascade down*) hingga level pelaksana.
3. Asistensi Laporan Kinerja seluruh SKPD.
4. Inspektorat Kabupaten melakukan reviu dan evaluasi SAKIP terhadap 40 SKPD dengan hasil sebagaimana tabel berikut :

JUMLAH SKPD	KATAGORI	PERSENTASE	INTERPRESTASI
6	A	15	Memuaskan
25	BB	65	Sangat Baik
5	B	12,5	Baik
2	CC	5	Cukup (Memadai)
1	C	2,5	Kurang
1	D	2,5	Sangat Kurang

Sumber: Inspektorat Kabupaten Tanah Laut

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa di Tahun 2023 terdapat 6 SKPD atau sebesar 15% dengan nilai SAKIP kategori A (memuaskan) dan 25 SKPD dengan nilai SAKIP BB (Sangat Baik) atau sebesar 65%, 5 SKPD dengan nilai SAKIP B (Baik), 2 SKPD dengan nilai SAKIP CC (Cukup), 1 SKPD dengan Nilai SAKIP C (Kurang) dan 1 SKPD dengan nilai SAKIP D (Sangat Kurang).

Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten dilakukan melalui bantuan aplikasi SAKUNTALA (Sistem AKuntabilitas Kinerja Tanah Laut) yang merupakan inovasi dari Inspektorat Kabupaten.

Berikut tabel data hasil evaluasi SAKIP seluruh SKPD Tahun 2023 masing-masing komponen.

Tabel 3.3.4
Rekapitulasi Nilasi SAKIP SKPD per komponen Tahun 2023 hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten

NO	NAMA SKPD	PERENCANAAN KINERJA	PENGUKURAN KINERJA	PELAPORAN KINERJA	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	NILAI	PREDIKAT
1	SEKRETARIAT DAERAH	24.60	24.60	12.30	20.50	82	A
2	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	27.00	24.00	10.80	20.00	81,8	A
3	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	24.60	24.60	11.85	20.50	81.55	A
4	DINAS KESEHATAN	24.60	26.10	11.55	19.25	81.5	A
5	INSPEKTORAT KABUPATEN	25.50	24.00	12.00	20.00	81.5	A
6	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	24.60	24.60	12.30	20.00	81.5	A
7	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	24.00	24.00	12.00	20.00	80	BB
8	DINAS PARIWISATA	23.70	25.50	11.40	19.25	79.85	BB
9	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (Utama dan Pendukung)	24.60	24.00	12.00	19.25	79.85	BB
10	SEKRETARIAT DPRD	24.60	23.10	11.10	20.50	79.3	BB
11	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	24.00	24.00	11.25	20.00	79.25	BB

12	BADAN PENDAPATAN DAERAH	24.00	24.00	12.00	19.25	79.25	BB
13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	24.60	23.10	11.85	19.25	78.05	BB
14	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	22.20	22.20	10.95	22.50	77.85	BB
15	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	24.00	22.50	11.25	20.00	77.75	BB
16	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	23.70	21.30	11.10	20.50	76.6	BB
17	KECAMATAN BATU AMPAR	22.50	24.00	10.05	20.00	76.55	BB
18	KECAMATAN PELAIHARI	23.10	22.50	11.55	19.25	76.4	BB
19	KECAMATAN TAMBANG ULANG	23.10	24.00	11.25	18.00	76.35	BB
20	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	22.20	22.50	11.55	19.25	75.5	BB
21	KECAMATAN TAKISUNG	24.60	22.50	12.00	16.25	75.35	BB
22	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	23.10	21.90	12.00	18.00	75	BB
23	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	24.60	22.50	12.00	15.75	74.85	BB
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	23.10	21.60	10.35	19.50	74.55	BB
25	DINAS SOSIAL	21.60	23.10	10.50	18.75	73.95	BB
26	KECAMATAN PANYIPATAN	22.20	24.00	12.00	15.50	73.7	BB
27	KECAMATAN BAJUIN	23.01	21.60	10.35	18.50	73.55	BB
28	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	24.00	23.10	10.95	15.00	73.05	BB
29	KECAMATAN JORONG	21.60	22.50	10.80	18.00	72.9	BB
30	DINAS PERHUBUNGAN	24.00	22.50	11.55	13.75	71.8	BB
31	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	19.80	21.30	10.65	18.50	70.25	BB
32	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	19.80	20.40	10.50	18.25	68.95	B
33	KECAMATAN BATI-BATI	20.10	20.70	9.75	16.75	67.3	B
34	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	20.10	19.80	8.10	14.50	62.5	B
35	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN	21.60	20.10	9.30	11.00	62	B

	PERDAGANGAN (Utama dan Pendukung)						
36	KECAMATAN KURAU	22.50	17.70	7.05	14.75	62	B
37	KECAMATAN KINTAP	21.00	13.80	7.80	13.00	55.6	CC
38	KECAMATAN BUMI MAKMUR	18.60	16.80	4.80	13.00	53.2	CC
39	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	16.50	4.80	4.80	12.50	38.6	C
40	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	7.50	3.60	1.50	5.25	17.85	D

Sumber: Inspektorat Kabupaten Tanah Laut

Pada Tahun 2023 telah dilaksanakan penilaian kinerja berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 95 Tahun 2022 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk memberikan reward dan punishment kepada SKPD agar dapat meningkatkan kinerja seluruh SKPD. Dari hasil penilaian tersebut, secara ringkas dapat dilihat pada table di bawah ini:

No	Jumlah Perangkat Daerah	Kategori	Predikat	Persentase
1	4	A	Sangat Baik	10%
2	5	BB	Baik	12,5%
3	15	B	Cukup Baik	37,5%
4	16	CC	Cukup	40%

Daftar 3 (tiga) Perangkat Daerah yang memiliki predikat penilaian kinerja terbaik, adalah sebagai berikut:

NO	PERANGKAT DAERAH	AKUMULASI PENILAIAN KINERJA	KATEGORI	PREDIKAT
1	Sekretariat Daerah	89	A	Sangat Baik
2	Dinas Komunikasi dan Infomatika	84	A	Sangat Baik
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	83	A	Sangat Baik

Untuk hasil penilaian kinerja Tahun 2023, tidak terdapat lagi SKPD dengan penilaian kinerja dengan predikat Buruk dan Sangat Buruk. Terdapat peningkatan komitmen seluruh SKPD terhadap kinerja masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka peningkatan kinerjanya.

Beberapa hal yang menjadi hambatan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam peningkatan SAKIP antara lain:

1. Kurangnya komitmen Pimpinan dan seluruh Aparatur SKPD dalam membangun sistem akuntabilitas kinerja.
2. Sasaran kinerja SKPD belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar dalam pemilihan program dan kegiatan sehingga masih terdapat program dan kegiatan yang kurang efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan dan sasaran.
3. Kualitas pengukuran kinerja SKPD belum sepenuhnya berorientasi kepada pencapaian kinerja program, masih ada pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
4. Masih kurangnya kualitas laporan kinerja SKPD, dimana masih banyak laporan kinerja yang mengungkapkan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, belum sepenuhnya menyajikan analisis pencapaian kinerja program serta belum mampu menyajikan analisis efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja.
5. Evaluasi atas program belum sepenuhnya mampu menampilkan efektivitas program yang diemban oleh setiap SKPD disebabkan belum berorientasi kepada kinerja program, dan hanya pelaksanaan program atau kegiatan serta penyerapan anggaran.
6. Masih kurangnya capaian kinerja Kabupaten dan SKPD dikarenakan masih kurangnya kualitas pengumpulan data kinerja, pengukuran kinerja secara triwulan dan evaluasi internal seluruh SKPD.

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalah/kendala dalam rangka peningkatan nilai SAKIP adalah :

1. Internalisasi BerAKhlak kepada seluruh Aparatur Sipil Negara agar bekerja lebih berorientasi kepada Capaian Kinerja yang menunjang Visi Misi Kabupaten.
2. Melakukan penyempurnaan pada keselarasan penjabaran kinerja *(Cascade Down)*, mulai dari level Kepala SKPD sampai dengan indikator kinerja level eselon III, eselon IV dan individu pegawai.
3. Melakukan reviu terhadap program dan kegiatan serta komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan dan sasaran. Hasil reviu ini harus dapat

memastikan bahwa anggaran memang dialokasikan hanya untuk pencapaian strategis pembangunan dan pemilihan program/kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran;

4. Meningkatkan pemahaman dan keterlibatan Pimpinan SKPD terhadap penerapan manajemen kinerja organisasi sehingga mampu meningkatkan pencapaian kinerjanya;
5. Memastikan kegiatan yang menunjang Indikator Kinerja Utama Kabupaten mendapatkan angaran yang sesuai dengan porsinya, sehingga dapat mencapai target indikatornya.
6. Meningkatkan kualitas pengukuran terhadap outcome dan output secara berkala untuk memastikan tercapainya kinerja (tujuan dan sasaran) organisasi;
7. Meningkatkan kualitas indikator kinerja sasaran strategis pada SKPD sehingga lebih berorientasi hasil dan relevan dengan sasaran yang dicapai;
8. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi secara tergintegritasi mulai dari perencanaan, penganggaran, informasi kinerja hingga pelaporan agar mampu meningkatkan penerapan manajemen kinerja sebagai sarana monitoring dan evaluasi secara berkala oleh Pimpinan, sehingga mampu meningkatkan efektivitas program kerja organisasi dalam pencapaian kinerjanya;
9. Meningkatkan penyajian informasi pelaporan kinerja SKPD yang menggambarkan pencapaian kinerja, efektivitas program dan efisiensi anggaran;
10. Mendorong APIP untuk meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap SKPD, sehingga menciptakan pemahaman yang merata antar SKPD, serta mendorong secara khusus kepada SKPD pengampu bidang perencanaan dan para penanggung jawab program untuk terus meningkatkan kualitas evaluasi program untuk mewujudkan efektivitas pencapaian sasaran dan efisiensi penggunaan anggaran;

Rencana Aksi yang akan dilakukan yaitu:

1. Melaksanakan asistensi peningkatan kualitas Laporan Kinerja SKPD dengan Kemenpan dan RB
2. Melaksanakan asistensi penyusunan Pohon Kinerja Kabupaten dan Pohon Kinerja SKPD sesuai dengan Permenpan 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja dengan narasumber Kemenpan dan RB.

3. Implementasi penggunaan aplikasi Siperjaka (Sistem Informasi Perjanjian Kinerja) yang menyajikan data perjanjian kinerja mulai dari eselon II sampai dengan JFT dan JFU sehingga dapat menggambarkan keselarasan kinerja dari eselon II hingga JFT dan JFU.

2. Mengintegrasikan seluruh sistem pengukuran kinerja individu dan organisasi.

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan indikator **Persentase SKPD dengan nilai SAKIP minimal BB** dengan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Penataan Organisasi Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birorasi dengan pagu Rp. 295.047.530 terealisasi Rp. 254.588.847 dengan realisasi keuangan sebesar 86,29% dan dilaksanakan oleh 3 (tiga) orang Sumber Daya Manusia. Kegiatan Indikator ini dilaksanakan melalui pembinaan implementasi SAKIP di lingkungan Pemeirntah Kabupaten Tanah Laut. Untuk capaian kinerja terhadap IKU tersebut diatas adalah **80%** sedangkan untuk realisasi anggarannya sebesar **86,29%.** Dalam artian IKU ini tidak mencapai target yang telah ditentukan dikarenakan kurangnya komitmen pimpinan dan seluruh ASN dalam implementasi SAKIP. Pelaporan merupakan tahap akhir dari seluruh tahapan pelaksanaan SAKIP, apabila kualitas perencanaan, pengukuran, dan evaluasi internal secara berkala belum maksimal maka akan berdampak pada kualitas pelaporan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI
80%	86,92%	0%

.





Dokumentasi Kegiatan Asistensi SAKIP seluruh SKPD bersama Kemenpan dan RB

SASARAN 3.4 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah

Indikator 1 : Nilai SAKIP Sekretariat Daerah

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
1	2	3	4	5	6
3.4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	83	82	98.79%

Indikator Sasaran ini merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah untuk mecapai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2018-2023. Dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah ini selaras dalam mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Tanah Laut.

Disamping Itu dalam melaksanakan IKU di atas Sektetariat Daerah telah menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 100.3.3.5/ 6/KEP-SEKDA/2023 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja 2024. Tim Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana dan menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Sekrtariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
b. Mengadakan rapat koordinasi antar anggota Tim dalam merumuskan Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
c. Menelaah dan memahami bahan yang telah disiapkan juga menganalisa data dalam Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
d. Mengoreksi dalam penyelesaian pembuatan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 dan Penjanjian Kinerja 2024 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
e. Mendiskusikan dengan Bagian-bagian sehubungan pencarian data tambahan dalam Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut; dan
f. Mengadakan perbaikan atau perubahan sehubungan penetapan Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Bahwa Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut tersebut melibatkan Pimpinan dengan susunan sebagai berikut :

1) Sekretaris Daerah sebagai Pengarah

2) Asisten Bidang Administrasi Umum sebagai Wakil Ketua

Dalam proses penyusunan Laporan Kinerja pimpinan selalu terlibat dan memberikan arahan terkait bahan atau data Laporan Kinerja (LKj) serta dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi Laporan Kinerja selalu melibatkan pimpinan.

Berdasarkan surat dari Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor: 700.1.2.1/166-LHE AKIP/Insp/2023, Perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) SKPD, Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 memperoleh nilai sebesar **82** dengan kategori **A (Memuaskan)**, sedangkan hasil evaluasi nilai SAKIP Sekretariat Daerah Tahun 2022 memperoleh nilai sebesar **84.2** dengan kategori **A (Memuaskan)**. Hasil penilaian SAKIP Sekretariat Daerah Tahun 2022 mengalami penurunan nilai dari tahun sebelumnya sebesar 2,65% hal ini dikarenakan perubahan sistem penilaian pada aplikasi SAKUNTALA yang dilaksanakan oleh Tim Penilai APIP Inspektorat Kabupaten Tanah Laut, dan perbandingan nilai tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel Hasil Penilaian SAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2022 dan Tahun 2023

NO	KOMPONEN	BOBOT	TAHUN 2022		TAHUN 2023	
			Y/T	NILAI	BOBOT	NILAI
A	PERENCANAAN KINERJA	30.00	30.00	24.99	30.00	24.6
B	PENGUKURAN KINERJA	30.00	30.00	24.99	30.00	24.6
C	PELAPORAN KINERJA	15.00	15.00	12.495	15.00	12.3
D	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25.00	25.00	21.675	25.00	20.5
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA		100.00	100.00	84.20	100.00	82

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2023*

Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi, pimpinan rapat menyampaikan hasil evaluasi Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Daerah Tahun 2023 dari Inspektorat Kabupaten Tanah Laut, dari hasil evaluasi tersebut ada beberapa catatan rekomendasi pada Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang harus ditindaklanjuti oleh Bagian pengampu IKU nya untuk peningkatan capaian kinerja.

Untuk Tahun 2023 ini Sekretariat Daerah melakukan perbandingan nilai Laporan Kinerja (LKj) dengan Sekretariat DPRD, dikarenakan antara Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD sama-sama melakukan tugas dan fungsi kesekretariatan.

Adapun perbandingan Nilai Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Daerah dengan Sekretariat DPRD Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DPRD
82 (A)	79.3 (BB)

Telah dilaksanakan asistensi berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor 000.8.6.3/0167/ORG Tanggal 19 Januari 2023 Hal Asistensi Pohon Kinerja, Laporan Kinerja (LKj) dan TLHE SAKIP SKPD dengan Kemenpan dan RB, dengan salah satu hasil rekomendasinya adalah membandingkan antara capaian kinerja dengan realisasi anggaran terhadap IKU Nilai SAKIP Sekretariat Daerah. Untuk capaian kinerja terhadap IKU Nilai SAKIP Sekretariat Daerah adalah 98.79% sedangkan untuk realisasi anggarannya sebesar 80.43%. Dalam artian IKU ini telah dilaksanakan dengan efektif dan efisien dikarenakan capaian kinerjanya lebih besar daripada realisasi anggaran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel ini :

CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI
98.79%	80.43%	18.36%

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain :

- Kurang optimalnya komitmen dan keterlibatan pimpinan dan sebagian pejabat struktural dalam kegiatan penyusunan Akuntabilitas Kinerja
- Belum memahami sepenuhnya sistem penialian pada SAKUNTALA
- Kurangnya kompetensi aparatur penyusun laporan terhadap kemampuan menganalisa

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Melibatkan pimpinan dalam monitoring dan evaluasi penyusunan laporan kinerja
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi per Triwulan terhadap laporan kinerja Bagian – Bagian lingkup Sekretariat Daerah setiap tahun.

- Peningkatan kompetensi aparatur dalam hal menganalisa masalah terkait penyusunan laporan kinerja

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Capaian kinerja lebih ditingkatkan untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang bermanfaat
- Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap dokumen Perjanjian Kinerja yang dapat dijadikan dasar untuk pemberikan *reward* dan *punishment*
- Peningkatan kompetensi aparatur penyusun laporan kinerja melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis serta FGD



Dokumentasi Kegiatan Monev Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Daerah Tahun 2022



Dokumentasi Kegiatan Desk Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023

Indikator 2 : Nilai SPIP Sekretariat Daerah

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
1	2	3	4	5	6
3.4	Meningkatnya Akuntabilitas Sekretariat Daerah	Nilai SPIP Sekretariat Daerah	3,7	Masih Tahap *Baseline* SPIP Terintegrasi	Masih Tahap *Baseline* SPIP Terintegrasi

Sebagaimana di amanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sekretariat Daerah telah menerapkan Peraturan Pemerintah tersebut dengan melaksanakan 5 (lima) Unsur SPIP yaitu:

1. **Lingkungan Pengendalian**

   Pimpinan dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan organisasi agar menimbulkan perilaku positif untuk mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat.

2. **Penilaian Risiko**

   Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi dengan melakukan identifikasi risiko dan analisis risiko.

3. **Kegiatan Pengendalian**

   Kegiatan ini membantu memastikan arahan pimpinan sudah dilaksanakan atau belum, dan kegiatan ini harus efektif dan efesien dalam pencapaian tujuan organisasi.

4. **Informasi dan Komunikasi**

   Informasi yang relevan dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan, informasi disajikan dalam bentuk komunikasi yang efektif dan saran dengan tepat waktu sehingga pimpinan dapat melaksanakan pengendalian dan tanggungjawabnya.

5. **Pemantauan Pengendalian Intern**

   Pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terpisah dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan dapat segera ditindaklanjuti.

Dalam melaksanakan Indikator ini Sektetariat Daerah telah menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4/Kep-Sekda/2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut, dengan tugas sebagai berikut :

1) Mengatur agenda kegiatan Satgas, menyempurnakan dan menjabarkannya kedalam kegiatan detail;
2) Menghadiri rapat dan pertemuan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
3) Melakukan Konsultasi dengan Inspektorat;
4) Melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam agenda kegiatan sesuai jadwal;
5) Membantu Ketua Satgas dalam koodinasi penyusunan rencana kerja;

6) Membantu Ketua Satgas dalam setiap kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); dan
7) Membantu Ketua Satgas dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas Satgas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
8) Meningkatkan pemahaman tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
9) Menyusun dan mengusulkan rencana kerja penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai dengan Bagian/Sub Bagian masing-masing ;
10) Menyusun instrument penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai dengan Bagian/Sub Bagian masing-masing; dan
11) Melakukan survey dan evaluasi penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Pengendalian intern Lingkup Sekretariat Daerah sudah terlaksana dengan tertib dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan terbukti dengan hasil penilaian Maturitas SPIP Sekretariat Daerah dari Itwil Kabupaten Tanah Laut dengan nilai 3,777 Tahun 2018, kemudian setelah dilakukan penilaian *Quality Assurance* dari Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan untuk Kabupaten Tanah Laut memperoleh nilai 3,16 dengan tingkat Maturitas level 3 sedangkan untuk Tahun 2023 masih dalam tahapan Kertas Kerja Penilaian *Baseline* Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.

Pada Tahun 2023 ini telah dilaksanakan Sosialisasi Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 94 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang dihadiri oleh seluruh pejabat Pengelola Perencanaan Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan narasumber dari BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan dan Inspektorat Kabupaten Tanah Laut pada Tanggal 21 November 2023





Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Peraturan Bupati Tentang SPIP Tahun 2023

Selanjutnya dilakukan pendampingan penyusunan Risk Register Sekretariat Daerah Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2023 dengan narasumber dari BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan dan Inspektorat Kabupaten Tanah Laut, serta dihadiri oleh seluruh penanggungjawab masing – masing bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut. Kemudian Dokumen Risk Register Sekretariat Daerah Tahun 2024 disampaikan ke Inspektorat Kabupaten Tanah Laut pada Tanggal 27 Desember 2023



Dokumen Risk Register Sekretariat Daerah Tahun 2024

SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 94 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko;

b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), diperlukan pedoman pengelolaan risiko yang dapat digunakan untuk mengelola risiko di lingkungan Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 94 Tahun 2023

Dalam Penyusunan Laporan SPIP Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut tersebut melibatkan Pimpinan dengan susunan sebagai berikut :

1. Sekretaris Daerah sebagai Penanggungjawab
2. Asisten Bidang Administrasi Umum sebagai Ketua

3. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sebagai Asesor SKPD

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain :

- Kurang optimalnya dalam menyusun uraian risiko antara sebab risiko dan dampak risiko
- Belum maksimalnya kegiatan evaluasi dan dokumentasi terhadap pelaksanaan unsur-unsur SPIP

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Meningkatkan pemahaman tentang unsur-unsur SPIP khususnya unsur penilaian Risiko
- Melakukan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Menerbitkan surat edaran tentang sanksi terhadap pelanggaran kepatuhan
- Adanya punishment bagi instansi yang terlambat menyampaikan dokumen Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan melalui pemotongan TPP sebesar 2,5%
- Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi
- SOP Kegiatan selaras dengan Peta Proses Bisnis Sekretariat Daerah

SASARAN 3.4 Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Daerah

Indikator 1 : Nilai RB Sekretariat Daerah

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
1	2	3	4	5	6
3.4	Meningkatnya tata kelola kepemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Nilai RB Sekretariat Daerah	92	Sekretariat Daerah tidak termasuk RB Tematik	Sekretariat Daerah tidak termasuk RB Tematik

Berdasarkan evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Sekretariat Daerah belum dapat diusulkan kepada Tim Penilai Nasional. Sehingga untuk tahun 2023 tidak dilakukan evaluasi untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya tata kelola kepemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah dengan **indikator Nilai RB Sekretariat Daerah** ditunjang dengan Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan kegiatan

Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan pagu Rp. 6.423.530.835 terealisasi Rp. 5.932.755.378 dengan realisasi keuangan sebesar 92,36% dan dilaksanakan oleh 7 (tujuh) orang Tim Pengarah dan 58 (lima puluh delapan) Tim Pelaksana. Kegiatan Indikator ini dilaksanakan melalui rapat-rapat koordinasi dengan bagian-bagian lingkup Sekretariat Daerah kabupaten Tanah Laut.

Untuk capaian kinerja terhadap IKU tersebut tidak terealisasi dikarenakan sekretariat daerah tidak termasuk RB tematik sedangkan realisasi anggaran sebesar 92.18%. Dalam artian IKU ini telah dilaksanakan belum efektif dan efisien. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI
-	92.18%	-

Indikator 2 : Nilai ZI Sekretariat Daerah

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
1	2	3	4	5	6
3.4	Meningkatnya tata kelola kepemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Nilai ZI Sekretariat Daerah	85	80.83	95.09%

Pembangunan Zona Integritas berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagai perubahan dari Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2019 dan Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM)

Tujuan utama dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM adalah untuk mencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan Surat Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor : 7001.2.1/112/Insp/2023 tanggal 30 Mei 2023 perihal Laporan Hasil Evaluasi Pembangunan Zona Integritas bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut mendapatkan nilai 80,83 .

Zona Integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajaranya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK/ dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui Reformasi Birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dari hasil evaluasi pembangunan Zona Integritas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut diperolah nilai sebai berikut :

Tabel Hasil Penilaian Zona Integritas pada Sekretariat Daerah Tahun 2023

NO	URAIAN	Bobot 2022	Hasil Penilaian 2022	%	Bobot 2023	Hasil Penilaian 2023	%
A	**KOMPONEN PENGUNGKIT**	**60%**	-	-	**60%**	**45,14%**	**27.07%**
I	**Komponen Pemenuhan**	**30%**	**-**	**-**	**30%**	**-**	-
1	Manjemen Perubahan	4%	3.17	79.17	4%	3,08	76,97
2	Penataan Tata Laksana	3.5%	2.29	65.48	3.5%	2,25	64,97
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	5%	3.98	79.66	5%	3,75	75,03
4	Penguatan Akuntabilitas	5%	4.48	96.88	5%	3,48	69,52
5	Penguatan Pengawasan	7.5%	5.68	75.69	7.5%	3,75	50,01
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5%	4.32	86.42	5%	3,35	67,00
	Total 1	**-**	**24.28**	**80.94**	**-**	**19,66**	**65,52**
II	**Komponen Reform**	**30%**	-	-	**30%**	-	-
1	Manjemen Perubahan	4%	4	100	4%	3,05	76,13
2	Penataan Tata Laksana	3.5%	3.5	100	3.5%	2,34	66,71
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	5%	4	80	5%	3,50	70
4	Penguatan Akuntabilitas	5%	4.64	92.82	5%	3,65	73,06
5	Penguatan Pengawasan	7.5%	7.5	100	7.5%	6,88	91,67
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5%	4.17	83.33	5%	4,18	83,50
	Total 2	**-**	**27.81**	**92.69**	**-**	**23,58**	**78,61**
III	**Komponen Hasil**	**40%**	-	-	**40%**	-	-
	Birokrasi yang bersih dan Akuntabel (22.50)	-	18.76	83.36	-	21,32	94,75
1	Survey Persepsi Anti Korupsi (0-4) (17.50%)	3.43%	15.01	85.69	-	3,73	16,32
2	Capaian Kinerja (A,B,C,D,E) (5%)	A	5		A	5,0	-
	Pelayanan Publik Yang Prima (17.50%)	-	-	-	-	16,28	93,00
1	Survey Persepsi Pelayanan Publik (0-4)	3.575%	15.64	89.38	-	3,72	16,28
	Total 3	**-**	**35.65**	**-**		**37,59%**	**93,98%**
B	**UNSUR INDIKATOR HASIL**	-	-	-	-	-	-

1	Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	-	-	-	-	-	-
1.1	Nilai Survey Persepsi Korupsi *(Survey External)*	-	-	-	-	-	-
1.2	Persentase Temuan hasil pemeriksaan (Internal dan Eksternal) yang di tindaklanjuti	-	-	-	-	-	-
2	Kualitas Pelayanan Publik	-	-	-	-	-	-
2.1	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan *(Survey Eksternal)*	-	-	-	-	-	-
TOTAL PENILAIAN		-	**87.74**	-	-	**80,83**	-

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Umum Tahun 2023*

Pelaksanaan Zona Integritas Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Penilaian Mandiri pada Tahun 2022 dengan nilai 87,45 sedangkan pada Tahun 2023 dengan nilai 80,83. Evaluasi terhadap pemenuhan dokumen dan kualitas pada komponen pengungkit dan reform terhadap 6 (enam) area dengan teknik kriteria *reference test* dengan cara menilai setiap komponen dengan kriteria dari masing-masing komponen yang telah ditetapkan, yang meliputi ;

1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Tatalaksana
3. Penataan Sistem Manajemen SDM
4. Penguatan Akuntabilitas
5. Penguatan Pengawasan
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Evaluasi terhadap pemenuhan dokumen'Unsur Komponen hasil" yang terdiri dari ;

a. Birokrasi Yang Bersih dan akuntabel dengan indikator
   - Survey Persepsi Anti Korupsi
   - Capaian Kinerja
b. Pelayanan Publik yang Prima dengan indikator ;
   - Survei persepsi pelayanan publik

Hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas akan dijadikan bahan evaluasi atas Pelaksanaan Zona Integritas, kemudian hasil tersebut juga untuk ;

a. Memperoleh informasi tentang pelaksanaan dan pencapaian target pembangunan zona integritas di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

b. Memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan pencapaian zona integritas di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut
c. Memberikan rekomendasi hasil evaluasi atas kelayakan untuk diusulkan ke Tim Penilai Pusat

Dalam melaksanakan Indikator Zona Integritas tersebut di atas ada beberapa kendala yang dihadapi antara lain :

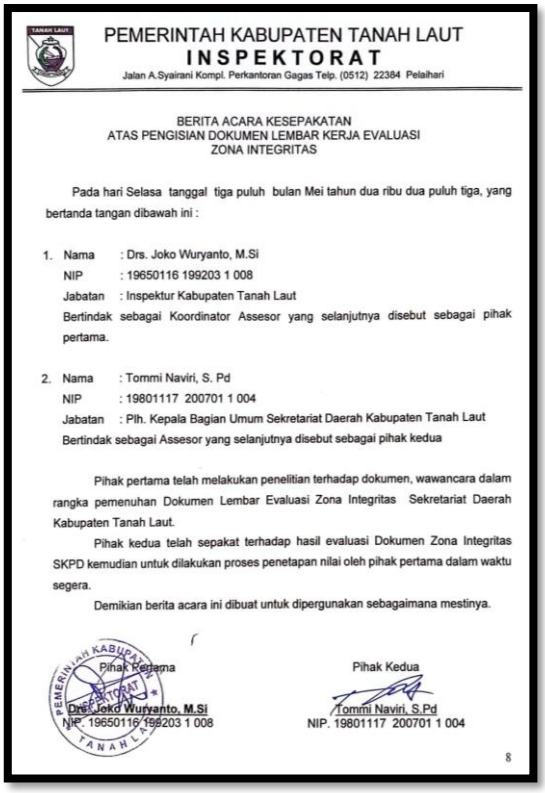
a. Kompetensi Sumber Daya Manusia kurang memadai
b. Lingkungan kerja belum sepenuhnya menunjang pelaksanaan Zona Integritas
c. Kurangnya Sosialisasi kepada seluruh PNS dan PTT Sekretariat Daerah bahwa Sekretariat Daerah termasuk menjadi SKPD yang dicanangkan sebagai Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
d. Belum pahamnya aparatur Sekretariat Daerah tentang program Zona Integritas itu sendiri.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia dalam memahami komponen area perubahan Zona Integritas
- Peningkatan Sarana dan Prasarana untuk menunjang pelaksanaan Zona Integritas
- Meningkatkan Sosialisasi Pelaksanaan Zona Integritas kepada seluruh ASN Sekretariat Daerah secara berkelanjutan.
- Melakukan evaluasi dan monitoring progres pemenuhan dokumen LKE Zona Integritas

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Monev dari Tim Pembangunan Zona Integritas dan Tim Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas dan pimpinan harus berperan aktif dalam melaksanakan monev
- Manajemen media sebagai sarana informasi dan komunikasi bagi masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik (*website* setda.tanahlautkab.go.id, *Facebook* @Prokopim Kab. Tanah Laut dan *Instagram* @prokopimtala, ukpbj.tanahlautkab.go.id, lpse.tanahlautkab.go.id).
- Meningkatkan koordinasi dengan Tim Pelaksana Pengembangan Zona Integritas lingkup Sekretariat Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
INSPEKTORAT
Jalan A.Syairani Kompl. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 22384 Pelaihari

BERITA ACARA KESEPAKATAN
ATAS PENGISIAN DOKUMEN LEMBAR KERJA EVALUASI
ZONA INTEGRITAS

Pada hari Selasa tanggal tiga puluh bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Drs. Joko Wuryanto, M.Si
   NIP : 19650116 199203 1 008
   Jabatan : Inspektur Kabupaten Tanah Laut
   Bertindak sebagai Koordinator Assesor yang selanjutnya disebut sebagai pihak pertama.

2. Nama : Tommi Naviri, S. Pd
   NIP : 19801117 200701 1 004
   Jabatan : Plh. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut
   Bertindak sebagai Assesor yang selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Pihak pertama telah melakukan penelitian terhadap dokumen, wawancara dalam rangka pemenuhan Dokumen Lembar Evaluasi Zona Integritas Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Pihak kedua telah sepakat terhadap hasil evaluasi Dokumen Zona Integritas SKPD kemudian untuk dilakukan proses penetapan nilai oleh pihak pertama dalam waktu segera.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama
Drs. Joko Wuryanto, M.Si
NIP. 19650116 199203 1 008

Pihak Kedua
Tommi Naviri, S.Pd
NIP. 19801117 200701 1 004

8

Dokumen Laporan Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas Sekretariat Daerah Oleh Inspektorat Tahun 2023

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya tata kelola kepemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah dangan Indikator **Nilai ZI Sekretariat Daerah** ditunjang dengan Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah serta kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan pagu Rp. 4.442.124.000 terealisasi Rp. 4.126.812.587 dengan realisasi keuangan sebesar 92,91% dan dilaksanakan oleh 15 (lima belas) orang Sumber Daya Manusia. Kegiatan Indikator ini dilaksanakan melalui rapat-rapat koordinasi dengan bagian-bagian lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut serta pelayanan kepada masyarakat.

Untuk capaian kinerja terhadap IKU tersebut diatas adalah **95,09%** sedangkan untuk realisasi anggaranya sebesar **92.91%.** Dalam artian IKU ini telah dilaksanakan dengan efektif dan efisien dikarenakan capaian kinerjanya lebih besar daripada realisasi anggaran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel beriku ini :

CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI
95,09%	92.91%	6.52%

SASARAN 4 Meningkatnya Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan

Indikator : Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang diterapkan

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
1	2	3	4	5	6
4	Meningkatnya kebijakan perekonomian dan pembangunan	Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang diterapkan	100%	100%	100%

Indikator Kinerja Utama Eselon II yang melekat pada Bagian Perekonomian Adm Pembangunan dan Sumber Daya Alam adalah Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang diterapkan. Pada Tahun 2023, semua kegiatan – kegiatan dalam rangka pelaksanaan kebijakan telah dilaksanakan 100%. Kebijakan yang telah ditindaklanjuti tersebut ada 5 (lima) yaitu:

1) Menerbitkan peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Program Gapura Karomah, dimana pola penyaluran dana investasi pemerintah adalah 40 : 60 dan pelimpahan semua resiko kredit macet kepada kepada PT. BPR
2) Pencairan tahap kelima dana investasi daerah pada program Gapura Karomah sebesar 10 Milyar Rupiah untuk disalurkan kepada para pelaku usaha mikro yang memenuhi kriteria berdasarkan ketentuan yang berlaku;
3) Menyusun kajian evaluasi penyaluran program Gapura Karomah selama 5 tahun untuk mengetahui dampak ekonomi bagi pelaku usaha yang menjadi debitur program Gapura karomah;
4) Menyusun kajian analisis investasi penambahan penyertaan modal kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dan penyertaan modal berupa asset kepada PT Air Minum Berkah Banua;
5) Tindak lanjut pengajuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penambahan investasi Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dan PT Air Minum Berkah Banua; dan

6) Optimalisasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kab. Tanah Laut untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok dan penting bagi masyarakat dalam rangka pengendalian inflasi.

Untuk melaksanakan penerapan kebijakan tersebut, adapun tahapan-tahapan kegiatan yang telah dilakukan di Bagian Perekonomian, Adm Pembangunan dan Sumber Daya Alam yaitu :

1) Menerbitkan peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Program Gapura Karomah, dimana pola penyaluran dana investasi pemerintah adalah 40 : 60 dan pelimpahan semua resiko kredit macet kepada kepada PT. BPR, maka langkah -langkah kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:
   a) Melaksanakan rapat koordinasi tim pelaksana investasi daerah dengan penasehat investasi dari pihak akademisi terkait pengembalian pola pengelolaan dana investasi.
   b) Menyusun draft Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 untuk mengembalikan pola pengelolaan dana investasi menjadi 40% disalurkan dan 60% untuk dikelola oleh PT. BPR Tanah Laut selaku Bank Penyalur dan pemindahan.
2) Pencairan tahap kelima dana investasi daerah pada program Gapura Karomah sebesar 10 Milyar Rupiah untuk disalurkan kepada para pelaku usaha mikro yang memenuhi kriteria berdasarkan ketentuan yang berlaku;, maka langkah -langkah kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain :
   a) Melaksanakan rapat - rapat koordinasi dan menyusun tahapan administrasi yang diperlukan dalam rangka pencairan dana ke PT. BPR Tala selaku pelaksana Program Gapura Karomah.
   b) Menyusun Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/ -KUM/2023 tentang Pelaksanaan Realisasi Investasi Daerah berupa Penempatan Penyaluran Dana Investasi kepada Bank Perkreditan Rakyat Tanah Laut Tahun Anggaran 2023.
3) Menyusun kajian evaluasi penyaluran program Gapura Karomah selama 5 tahun untuk mengetahui dampak ekonomi bagi pelaku usaha yang menjadi debitur program Gapura karomah, maka langkah -langkah kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

a) Melakukan rapat koordinasi dengan penasehat investasi yang akan melakukan kajian evaluasi dampak program Gapura Karomah bagi pelaku usaha yang menjadi debitur Gapura karomah;
b) Mengintruksikan kepada Bagian Perekonomian, Adm Pembangunan dan SDA agar memfasilitasi dan pendampingan penyusunan kajian Analisa evaluasi program Gapura Karomah.
c) Melaksanakan FGD kajian Evaluasi program Gapura Karomah.

4) Menyusun kajian analisis investasi penambahan penyertaan modal kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dan penyertaan modal berupa asset kepada PT Air Minum Berkah Banua, maka langkah -langkah kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain :
   a) Melakukan rapat - rapat koordinasi dengan pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dan PT. Air Minum Berkah Banua untuk dapat memberikan masukan yang positif dan gambaran bisnis kepada pihak legislatif.
   b) Mengintruksikan kepada Bagian Perekonomian, Adm Pembangunan dan SDA agar memfasilitasi dan pendampingan penyusunan kajian Analisa investasi kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dan PT Air Minum Berkah Banua.
5) Tindak lanjut pengajuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penambahan investasi Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dan PT Air Minum Berkah Banua, maka langkah - langkah kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:
   a) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak LPPM STIE Indonesia selaku penyusun Kajian analisis Investasi untuk mendapatkan masukan dan menjawab pertanyaan dari pansus Raperda Penyertaan Modal DPRD Tanah Laut;
   b) Mendampingi pihak legislatif melakukan kunjungan dalam rangka konsultasi dan kaji banding dalam rangka Penambahan Investasi Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dan PT. Air Minum Berkah Banua;
6) Optimalisasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kab. Tanah Laut untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok dan penting bagi masyarakat dalam rangka pengendalian inflasi, maka langkah - langkah kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

a) Melakukan rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah setiap akhir semester dan pada saat tertentu yang diperlukan untuk stabilisasi harga bahan pokok;
b) Melakukan monitoring ketersediaan bahan pokok di pasar oleh Pimpinan Daerah dan Forkopimda untuk memastikan ketersediaan bahan pokok dan monitoring harga pasar;
c) Monitoring pelaksanaan kegiatan pasar murah di tiap desa untuk memastikan ketersediaan bahan pokok kepada masyarakat;dan
d) Melakukan koordinasi dengan dinas teknis lingkup pertanian, peternakan dan ketahanan pangan terkait ketersediaan dan peningkatan produksi pangan daerah.
e) Menindaklanjuti arahan Menteri Dalam Negeri terkait pengendalian inflasi daerah

Secara keseluruhan, semua kebijakan dibidang Perekonomian yang dikeluarkan telah ditindaklanjuti dengan tujuan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Tanah Laut.

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain :

- Terlambatnya pencairan dana investasi kepada PT. BPR Tanah Laut, sehingga penyaluran kepada calon debitur menjadi terlambat;
- Terlambatnya penyusunan kajian analisis kelayakan investasi penyertaan modal kepada PT. BPD Kalimantan Selatan dan PT. Air Minum Berkah Banua membuat pengajuan dan pembahasan Ranperda penyertaan modal menjadi terlambat.
- Musim kemarau yang cukup Panjang akibat dampak elnino membuat hasil produksi pertanian menurun, sehingga harga beberapa komoditi pertanian sempat menagalami kenaikan.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Melakukan rapat dan monitoring secara berkala terkait penyaluran dana investasi progam Gapura Karomah .
- Mengintruksikan kepada Bagian Perekonomian, Adm Pembangunan dan SDA untuk melakukan percepatan penyusunan Kajian analisi investasi untuk mendukung Ranperda Penyertaan Modal.

- Melakukan koordinasi dengan SKPD teknis yang membidangi Tanaman pangan dan Hortikultura untuk melakukan percepatan penanaman sesuai dengan instruksi mendagri

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Menindaklanjuti hasil laporan penyaluran dana investasi program Gapura Karomah.
- Monitoring progress pembahasan dan Ranperda penyertaan modal kepada BUMD.
- Mengarahkan SKPD Teknis yang membidangi UMKM agar melakukan pendataan pelaku UMKM supaya Tanah Laut memiliki basis data UMKM.
- Monitoring dan evaluasi secara berkala terkait Perkembangan BUMD dan Perkembangan program Permodalan mikro.



Dokumentasi Kegiatan Rakor Pembinaan BUMD Tahun 2023



Dokumentasi Kegiatan Rakor TPID Tahun 2023



Dokumentasi Sidak Pasar Tahun 2023

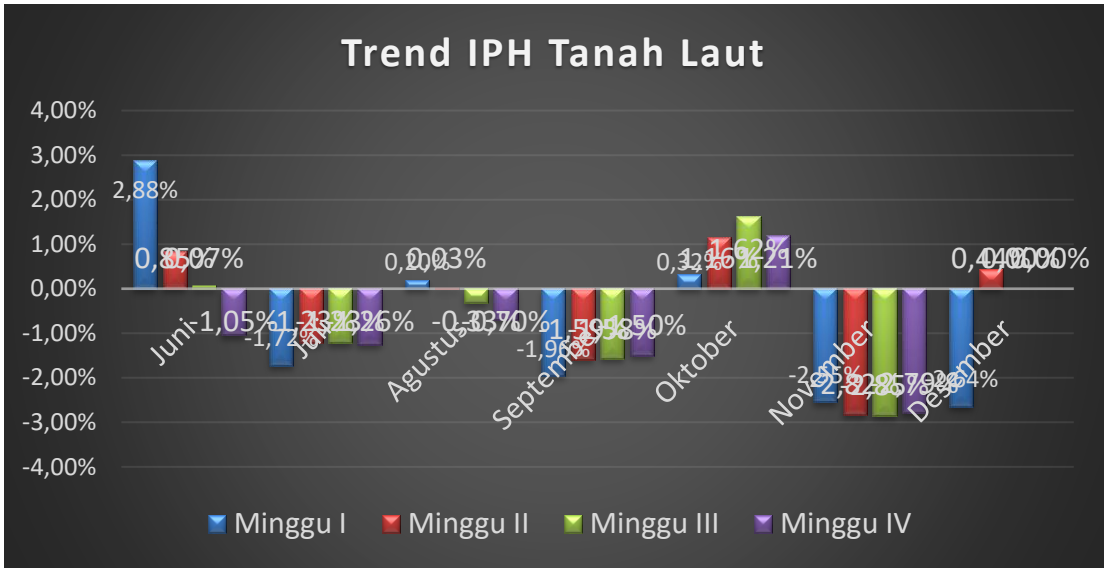
Adapun beberapa kebijakan yang dirancang oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menindaklanjuti permasalahan dibidang perekonomian khususnya tingginya angka kredit bermasalah (NPL) program Gapura Karomah, kinerja BUMD yang belum semuanya sehat dan permasalahan bidang perekonomian lainnya antara lain:

1. Mengeluarkan peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM INVESTASI DAERAH BERUPA PINJAMAN MODAL USAHA KEPADA USAHA MIKRO KECIL DI KABUPATEN TANAH LAUT (GAPURA KAROMAH). Hal ini dilakukan untuk pemindahan resiko kerugian Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dari debitur program gapura karomah yang mengalami gagal bayar;
2. Tindak lanjut rencana penambahan investasi Pemerintah Daerah Kepada BUMD PT. BPD Kalimantan Selatan. Pada anggaran perubahan tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Bagian Perkonomian, Adm Pembangunan dan SDA melaksanakan tahapan awal rencana investasi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan melakukan penyusunan kajian kelayakan investasi Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.
3. Melaksanakan kegiatan penyusunan kajian kelayakan investasi Pemerintah Daerah kepada PDAM Tanah Laut PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) untuk mendukung proses penyertaan modal pemerintah berupa asset.
4. Menyikapi kondisi manajemen dan keuangan PD. Baratala yang sedang tidak kondusif, pemerintah Kabupaten Tanah Laut memberikan saran kebijakan kepada pimpinan daerah untuk melakukan evaluasi kinerja/audit keuangan dan kinerja

terhadap manajemen BUMD PD. Baratala. Hasil pemeriksaan nantinya akan menjadi pertimbangan bagi kepala daerah untuk menentukan pejabat definitive untuk organ kepengurusan direksi PD. Baratala yang selama ini masih dijabat oleh Plt. Dirut.

5. Menyikapi permasalahan naiknya beberapa harga komoditi bahan pangan di masyarakat, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui TPID Kabupaten Tanah Laut melaksanakan kegiatan Pasar Murah di beberapa desa dan Kecamatan se Kabupaten Tanah Laut. Hal ini dilaksanakan dalam rangka menjaga daya beli masyarakat.
6. Konsisten melaksanakan sosialisasi dalam rangka peningkatan penyaluran program permodalan berbiaya rendah (KUR dan UMi) bagi pelaku UMKM dan bagi debitur Program gapura karomah yang naik kelas.

Berikut gambaran hasil pelaksanaan kebijakan bidang perekonomian dan pembanguan



Pada semester II tren IPH Kabupaten Tanah Laut selalu mengalami penurunan dan pada 2 bulan terakhir terjadi penurunan yang signifikan yaitu > -2%.

No.	Uraian	Total Modal Disetor (Penyertaan Modal)	TA.2023			TA. 2022		
			Target Dividen	REALISASI		Anggaran	Realisasi	
			(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	(Rp)	%
1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Bank Kalsel	110.374.367.703	11.394.000.000	11.394.363.814	100	10.425.528.033,00	10.425.528.033,00	100
2	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Bank BPR	4.600.000.000	461.308.674	461.308.674	100	106.005.337,00	106.005.337,00	100
3	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PD. Baratala	-	150.000.000	150.000.000	100	479.277.000,00	479.277.014,00	100
Jumlah			**12.005.308.674**	**12.005.672.488**	**100**	**11.010.810.370,00**	**11.010.810.384,00**	**100**

ADA 2 (DUA) BUMD YANG BELUM BERKONTRIBUSI PADA PENDAPATAN DAERAH, YAITU :

1. ***PTAM BERKAH BANUA***

yang bergerak di bidang air minum namun berorientasi pada pelayanan sosial Masyarakat (social oriented)

1. ***PT. TALA MANUNTUNG***

BUMD yang bergerak di bidang usaha kepelabuhanan, belum memiliki modal awal sebagai BUMD. Dalam masa kepemimpinan Pj Bupati BUMD yang sudah dibentuk tahun 2019 ini (Perda No. 13 tahun 2019) sudah diusulkan melalui Bapemperda dan masuk ke dalam Propemperda Tahun 2024 untuk selanjutnya berproses menjadi Raperda Penyertaan Modal sehingga BUMD ini dapat beroperasi mendukung kegiatan Pelabuhan Swarangan Jorong



Kabupaten Tanah Laut Termasuk Tiga Terbaik Dari Lima Nominatif Dengan Kategori Dukungan Program Dan Anggaran Yang Memprioritaskan Pemenuhan Air Minum Daerah Dan Program Nuwsp 25 Oktober 2023. Pemkab Tanah Laut selaku regulator penanggung jawab penyediaan air bersih (urusan wajib dasar) telah menunjukkan keseriusan yang kuat dalam upaya memenuhi

ketersediaan dan kemudahan akses air bersih untuk masyarakat maupun dunia usaha.

2.2 Eselon II (Staf Ahli)

Dalam melaksanakan tugasnya, secara administratif Staf Ahli dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah dengan Tugas, wewenang, dan kewajiban Staf Ahli diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati, selain itu Staf Ahli bertugas membantu Bupati terkait kebijakan - kebijakan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati pada BAB III Tugas dan Fungsi Pasal 4 adalah sebagai berikut :

1. Staf Ahli sebagaimana dimaksud Pasal 3 mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu- isu strategis kepada Bupati sesuai bidang :
   a) bidang pemerintahan, hukum dan politik memberikan rekomendasi mengenai pemerintahan, hukum dan politik;
   b) bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia memberikan rekomendasi mengenai kemasyarakatan dan sumber daya manusia;dan
   c) bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan memberikan rekomendasi mengenai pembangunan, ekonomi dan keuangan.
2. Untuk melaksanakan tugas Staf Ahli mempunyai fungsi :
   a) bidang pemerintahan, hukum dan politik memberikan rekomendasi mengenai pemerintahan, hukum dan politik;
   b) bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia memberikan rekomendasi mengenai kemasyarakatan dan sumber daya manusia;dan
   c) bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan memberikan rekomendasi mengenai pembangunan, ekonomi dan keuangan.

1) Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
1	Meningkatnya kualitas telaahan strategis Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	Jumlah telaahan strategis Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	12 Telaahan	12 Telaahan	100%
		Persentase rekomendasi isu-isu strategis yang disampaikan ke Bupati	100%	100%	100%

		Persentase pemenuhan penugasan khusus	100%	100%	100%
RATA-RATA CAPAIAN					**100%**

Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik bertugas membantu Bupati Tanah Laut terkait Isu - isu Strategis Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik dengan melaksanakan indikator kinerja :

1. Membuat Telaahan Staf dan alternatif pemecahan masalah, kajian Rumusan Kebijakan yang berkaitan dengan masalah Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Hukum dan Politik, dengan jumlah 12 telaahan staf selama 1 tahun.
2. Membuat rekomendasi terkait isu-isu strategis yang berkaitan dengan isu-isu permasalahan bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Hukum dan Politik, kemudian rekomendasi isu-isu strategis disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pengambil keputusan pimpinan.
3. Telah melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh Bupati dalam menangani permasalahan di bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Hukum dan Politik atau permasalahan lainnya.

Untuk Tahun 2023 capaian 3 (Tiga) Indikator Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik tercapai 100%.

Adapun uraian pelaksanaan indikator kinerja Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

NO	URUSAN	PELAKSANAAN KEBIJAKAN
1	Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	Menganalisa fakta, data dan informasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Hukum dan Politik sebagai bahan analisa kebijakan dan pengambilan keputusan Pimpinan.
		Memberikan masukan, telaahan dan kritisi serta pertimbangan di Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Hukum dan Politik kepada Bupati dalam mengeluarkan Kebijakan yang terkait dengan legalitas Hukum.
		Mengkaji dan mneganalisis masukan, saran tanggapan dan laporan masyaralkat serta media masa atas kebijakan Bupati di Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Hukum dan Politik.
		Melaksanakan Evaluasi masukan dan laporan dalam rangka menunjang efektifitas tugas Bupati di Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
		Memantau dan Mempelajari perkembangan Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Hukum dan Politik berdasarkan fakta, data dan informasi sebagai abahn analisa kebijakan dan pengambilan Keputusan Pimpinan

2) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
1	Meningkatnya kualitas telaahan strategis Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	Jumlah telaahan strategis Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	12 Telaahan	12 Telaahan	100%
		Persentase telaahan dan pertimbangan terkait aspirasi dari instansi pemerintah dan masyarakat	100%	100%	100%
		Persentase pemenuhan penugasan khusus	100%	100%	100%
RATA-RATA CAPAIAN					**100%**

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia bertugas membantu Bupati Tanah Laut terkait Isu - isu Strategis Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia dengan melaksanakan indikator kinerja

1. Membuat Telaahan Staf dan alternatif pemecahan masalah, kajian Rumusan Kebijakan yang berkaitan dengan masalah Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia dengan jumlah 12 telaahan staf selama 1 tahun.
2. Membuat rekomendasi terkait isu-isu strategis yang berkaitan dengan isu-isu permasalahan bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, kemudian rekomendasi isu-isu strategis disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pengambil keputusan pimpinan.
3. Telah melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh Bupati dalam menangani permasalahan di bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia atau permasalahan lainnya.

Untuk Tahun 2023 capaian 3 (Tiga) Indikator Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia tercapai 100%.

Adapun uraian pelaksanaan indikator kinerja Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

NO	URUSAN	PELAKSANAAN KEBIJAKAN
1	Bidang Kemasyarakatan dan SDM	Mengkaji atau menganalisa inovasi Daerah di Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Sebagai Bahan,saran dan masukan kepada Pimpinan.
		Melaksanakan Kerja Sama dengan kepala SKPD terkait rumusan kebijakan pendapat dan pertimbangan dalam bidang pembangunan ekonomi dan keuangan Daerah di Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia sebagai bahan pengambilan Keputusan Pimpinan.

		Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan terkait permasalahan Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
		Melaksanakan Monitoring situasi dan kondisi yang terjadi di masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kemasyarakatan dan SDM.
		Melaksanakan evaluasi masukan dan laporan dalam rangka menunjang efektifitas tugas Bupati di bidang Kemasyarakatan dan SDM.
		Menghimpun data fakta dan informasi pada saat penyusunan perencanaan sebagai bahan masukan kepada Pimpinan

3) Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
1	Meningkatnya kualitas telaahan strategis Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan	Jumlah telaahan strategis Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan	12 Telaahan	12 Telaahan	100%
		Persentase konseptual terhadap kebijakan Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan	100%	100%	100%
		Persentase pemenuhan penugasan khusus	100%	100%	100%
RATA-RATA CAPAIAN					100%

Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan bertugas membantu Bupati Tanah Laut terkait Isu - isu Strategis Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan dengan melaksanakan indikator kinerja

1. Membuat Telaahan Staf dan alternatif pemecahan masalah, kajian Rumusan Kebijakan yang berkaitan dengan masalah Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan dengan jumlah 12 telaahan staf selama 1 tahun.
2. Membuat rekomendasi terkait isu-isu strategis yang berkaitan dengan isu-isu permasalahan bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan, kemudian rekomendasi isu-isu strategis disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pengambil keputusan pimpinan.
3. Telah melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh Bupati dalam menangani permasalahan di bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan atau permasalahan lainnya.

Untuk Tahun 2023 capaian 3 (Tiga) Indikator Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan tercapai 100%.

Adapun uraian pelaksanaan indikator kinerja Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

NO	URUSAN	PELAKSANAAN KEBIJAKAN
1	Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan	Menganalisa fakta, data dan informasi Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan sebagai bahan analisa dan pengambilan keputusan pimpinan.
		Membuat telaahan staf dan alternatif pemecahan masalah pada Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan dalam perumusan kebijakan Pemerintah Daerah .
		Melaksanakan Pengkajian dan analisa permasalahan di bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan sesuasi dengan ketentuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
		Memantau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
		Melaksanakan evaluasi masukan dan laporan dalam rangka menunjang efektifitas tugas Bupati di bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan

2.3 Eselon II (Asisten Sekretaris Daerah)

1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat bertugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat.

Dalam rangka mewujudkan capaian target kinerja jangka menengah dari hasil capaian kinerja Kepala Bagian (Kepala Bagian Pemerintahan, Kepala Bagian Hukum, dan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat) yang berada dibawah koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, maka ditetapkanlah Target Kinerja dan Capaian Indikator Kinerjanya sebesar **102.59%** sebagaimana tersebut di bawah ini :

Perjanjian Kinerja dan Capaian Indikator Kinerja Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	CAPAIAN 2023
1	Meningkatnya Capaian Kinerja di Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Capaian Kinerja di Bidang Pemerintahan	100%	112.8%
		Persentase Capaian Kinerja di Bidang Hukum	100%	101.95%

		Persentase Capaian Kinerja di Bidang Pelayanan Kesejahteraan Rakyat	100%	93.04%
RATA-RATA CAPAIAN				**102.59%**

SASARAN 1 Meningkatnya Capaian Kinerja di Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat

Indikator 1 : Persentase Capaian Kinerja di Bidang Pemerintahan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	CAPAIAN 2023
1	Meningkatnya Capaian Kinerja di Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Capaian Kinerja di Bidang Pemerintahan	100%	112.8%

Indikator ini dicapai dengan melaksanakan perumusan :

1. kebijakan bidang pemerintahan, melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan urusan umum pemerintahan dan urusan Pemerintahan Daerah serta mengoordinasikan kebijakan di Bidang Pemerintahan dengan instansi vertikal.
2. Melaksanakan Monev secara intens terhadap pelaksanaan kegiatan Bagian Pemerintahan.
3. Memberikan masukan kepada Sekretaris Daerah terkait pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemerintahan. Untuk Tahun 2023 target indikator sasaran ini adalah 100% dan telah dilaksanakan dengan realisasi capaian kinerjanya 112.8%.

Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemerintahan yang di fasilitasi sebagaimana tersebut pada tabel dibawah ini :

NO	URUSAN	PELAKSANAAN KEBIJAKAN
1	Administrasi Pemerintahan	Rumusan Kebijakan dan Pengendalian Bidang Administrasi Pemerintahan
2	Kerjasama dan Otonomi Daerah	Rumusan Kebijakan dan Pengendalian Bidang Kerjasama dan Otonomi Daerah
3	Administrasi Kewilayahan	Rumusan dan Pengendalian Bidang Kewilayahan

Indikator 2 : Persentase Capaian Kinerja di Bidang Hukum

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	CAPAIAN 2023
1	Meningkatnya Capaian Kinerja di Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Capaian Kinerja di Bidang Hukum	100%	101.95%

Indikator ini dicapai dengan melaksanakan pembinaan, pengawasan dan mengevaluasi perumusan :

1. Produk hukum dan Daerah serta mengoordinasikan kebijakan di Bidang Hukum dengan instansi vertikal.
2. Melaksanakan Monev secara intens terhadap pelaksanaan kegiatan Bagian Hukum.
3. Memberikan masukan kepada Sekretaris Daerah terkait pelaksanaan kebijakan di Bidang Hukum. Untuk Tahun 2023 target indikator sasaran ini adalah 100% dan telah dilaksanakan dengan realisasi capaian kinerjanya 101.95%.

Pelaksanaan kebijakan di Bidang Administrasi Hukum yang di fasilitasi sebagaimana tersebut pada tabel dibawah ini :

NO	URUSAN	PELAKSANAAN KEBIJAKAN
1	Pembentukan Produk Hukum Pengaturan	1. Rumusan pra rancangan dan rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati 2. Rumusan kebijakan dan pengendalian pembentukan prodeuk hukum pengaturan
2	Bantuan Hukum dan HAM	1. Rumusan kebijakan dan pengendalian bantuan hukum dan pemantauan HAM 2. Rumusan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan bantuan hokum dan HAM
3	Pembentukan Produk Hukum Penetapan, Dokumentasi dan Informasi Hukum	1. Rumusan kebijakan dan pengendalian produk hukum penetapan, dokumentasi dan informasi hukum 2. Rumusan Keputusan Bupati, Keputusan Sekretaris Daerah, NPHD, Perjanjian Kerjasama dan MoU 3. Rumusan layanan informasi hukum dengan melaksanakan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum melalui website (JDIH)

Indikator 3 : Persentase Capaian Kinerja di Bidang Pelayanan Kesejahteraan Rakyat

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	CAPAIAN 2023
2	Meningkatnya Capaian Kinerja di Bidang Ekonomi, Pelayanan Barang/Jasa dan Pelayanan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Capaian Kinerja Bidang Pelayanan Kesejahteraan Rakyat	100%	93.04%

Indikator ini dicapai dengan :

1. melaksanakan pembinaan sosial kemasyarakatan dan kebudayaa, pembinaan bidang pendidikan dan agama, kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat serta melakukan pengawasan terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat. Melaksanakan
2. Monev secara intens terhadap pelaksanaan kegiatan Bagian Kesejahteraan Rakyat
3. Memberikan masukan kepada Sekretaris Daerah terkait pelaksanaan kebijakan di Bidang Kesejahteraan Rakyat. Untuk Tahun 2023 target indikator sasaran ini adalah 100% dan telah dilaksanakan dengan realisasi capaian kinerjanya 93.04%.

Pelaksanaan kebijakan di Bidang Kesejahteraan Rakyat yang di fasilitasi sebagaimana tersebut pada tabel dibawah ini :

NO	URUSAN	PELAKSANAAN KEBIJAKAN
1	Bina Mental dan Spiritual	1. Rumusan kebijakan dan pengendalian bidang bina mental dan spiritual
2	Kesejahteraan Masyarakat	1. Rumusan Kebijakan dan Pengendalian Bidang Kesejahteraan Masyarakat
3	Kesejahteraan Sosial dan Budaya	1. Rumusan Kebijakan dan Pengendalian Bidang Kesejahteraan sosial dan Budaya

2) Asisten Perekonomi dan Pembangunan

Asisten Perekonomian dan Pembangunan bertugas membantu Sekretaris Daerah untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, mengoordinasikan, merumuskan sasaran, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan pemerintahan melalui Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam dan Bagian Pengadaan Barang/Jasa.

Dalam rangka mewujudkan capaian target kinerja jangka menengah dari hasil capaian kinerja Kepala Bagian (Kepala Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan SDA serta Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa) yang berada dibawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan, maka ditetapkanlah Target Kinerja dan Capaian Indikator Kinerjanya sebesar **115.12%** sebagaimana tersebut di bawah ini :

Perjanjian Kinerja dan Capaian Indikator Kinerja Asisten Perekonomian dan Pembangunan Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	CAPAIAN 2023
2	Meningkatnya Capaian Kinerja di Bidang Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam dan Pengadaan Barang/Jasa	Persentase Capaian Kinerja di Bidang Perekonomian dan Pembangunan dan Sumber Daya Alam	100%	98.25%
		Persentase Capaian Kinerja di Bidang Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	100%	132%
RATA-RATA CAPAIAN				**115.12%**

SASARAN 2 Meningkatnya Capaian Kinerja di Bidang Perekonomian Pembanguan dan SDA dan Pengadaan Barang/Jasa

Indikator 1 : Persentase Capaian Kinerja di Bidang Perekonomian Pembanguan dan SDA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	CAPAIAN 2023
2	Meningkatnya Capaian Kinerja di Bidang Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam dan Pengadaan Barang/Jasa	Persentase Capaian Kinerja di Bidang Perekonomian dan Pembangunan dan Sumber Daya Alam	100%	98.25%

Indikator ini dicapai dengan :

1. melaksanakan monev perekonomian pembangunan, merumuskan kebijakan pengembangan potensi perekonomian, dan bina badan usaha milik perusahaan Daerah serta melakukan pengawasan terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam.
2. Memberikan masukan kepada Sekretaris Daerah terkait pelaksanaan kebijakan di Bidang Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam. Untuk Tahun 2023 target indikator sasaran ini adalah

100% dan telah dilaksanakan dengan realisasi capaian kinerjanya 98.25%.

Pelaksanaan kebijakan di Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam yang di fasilitasi sebagaimana tersebut pada tabel dibawah ini :

NO	URUSAN	PELAKSANAAN KEBIJAKAN
1	Perekonomian	Rumusan Kebijakan dan Pengendalian di Bidang Perekonomian
2	Bina Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Rumusan Kebijakan dan Pengendalian di Bidang Pembinaan BUMD dan BLUD
3	Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Rumusan Kebijakan dan Pengendalian di Bidang Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam

Indikator 2 : Persetase Capaian Kinerja di Bidang Pelayanan Barang/Jasa

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	CAPAIAN 2023
2	Meningkatnya Capaian Kinerja di Bidang Perekonomian Pembangunan dan SDA dan Pengadaan Barang/Jasa	Persentase Capaian Kinerja di Bidang Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	100%	132%

Indikator ini dicapai dengan :

1. Melaksanakan rumusan kebijakan pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa serta melakukan pengawasan terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa.
2. Melaksanakan Monev secara intens terhadap pelaksanaan kegiatan Bagian Pengadaan Barang/jasa
3. Memberikan masukan kepada Sekretaris Daerah terkait pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengadaan Barang/Jasa. Untuk Tahun 2023 target indikator sasaran ini 132%.

Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pelayanan Barang/Jasa yang di fasilitasi sebagaimana tersebut pada tabel dibawah ini :

NO	URUSAN	PELAKSANAAN KEBIJAKAN
1	Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Rumusan Kebijakan dan Pengendalian di Bidang Pengadaan Barang/Jasa

NO	URUSAN	PELAKSANAAN KEBIJAKAN
2	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Rumusan Kebijakan dan Pengendalian di Bidang Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
3	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Rumusan Kebijakan dan Pengendalian di Bidang Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa

3) Asisten Administrasi Umum

Asisten Bidang Administrasi Umum bertugas membantu Sekretaris Daerah untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, mengoordinasikan, merumuskan sasaran, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan pemerintahan melalui Bagian Umum, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Bagian Organisasi dan Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Dalam rangka mewujudkan capaian target kinerja jangka menengah dari hasil capaian kinerja Kepala Bagian (Kepala Bagian Umum, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Kepala Bagian Organisasi dan Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan) yang berada dibawah koordinasi Asisten Administrasi Umum, maka ditetapkanlah Target Kinerja dan Capaian Indikator Kinerjanya sebesar **94,62%** sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Perjanjian Kinerja dan Capaian Indikator Kinerja Asisten Bidang Administrasi Umum sesuai Target dan Realisasi Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	CAPAIAN 2023
3	Meningkatnya Capaian Kinerja di Bidang Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Organisasi dan Perencanaan dan Keuangan	Persentase Capaian Kinerja di Bidang Umum	100%	98.77%
		Persentase Capaian Kinerja di Bidang Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100%	85%
		Persentase Capaian Kinerja di Bidang Organisasi	100%	95%
		Persentase Capaian Kinerja di Bidang Perencanaan dan Keuangan	100%	99.70%
RATA-RATA CAPAIAN				**94,62%**

SASARAN 2 Meningkatnya Capaian Kinerja di Bidang Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Organisasi dan Perencanaan dan Keuangan

Indikator 1 : Persentase Capaian Kinerja di Bidang Umum

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	CAPAIAN 2023
3	Meningkatnya Capaian Kinerja di Bidang Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Organisasi dan Perencanaan dan Keuangan	Persentase Capaian Kinerja di Bidang Umum	100%	98.77%

Indikator ini dicapai dengan :

1. Melaksanakan pembinaan penyusunan perencanaan urusan umum, dan perlengkapan, urusan rumah tangga dan penataan asset melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal di Bidang Pelayanan Umum.
2. Melaksanakan Monev secara intens terhadap pelaksanaan kegiatan Bagian Umum
3. Memberikan masukan kepada Sekretaris Daerah terkait pelaksanaan kebijakan di Bidang pelayanan Umum. Untuk Tahun 2023 target indikator sasaran ini adalah 100% dan telah dilaksanakan dengan realisasi capaian kinerjanya 98.77%

Pelaksanaan kebijakan di Bidang Umum yang di fasilitasi sebagaimana tersebut pada tabel dibawah ini :

NO	URUSAN	PELAKSANAAN KEBIJAKAN
1	Umum dan Rumah Tangga	Rumusan Kebijakan dan Pengendalian di Bidang Umum dan Rumah Tangga
2	Aset dan Perlengkapan	Rumusan Kebijakan dan Pengendalian di Bidang Penataan Aset dan Perlengkapan Kantor
3	Tata Usaha Pimpinan,Staff Ahli dan Kepegawaian	Rumusan Kebijakan dan Pengendalian di Bidang Tata Usaha dan Kepegawaian

Indikator 2 : Persentase Capaian Kinerja di Bidang Protokol dan Komunikasi Pimpinan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	CAPAIAN 2023
3	Meningkatnya Capaian Kinerja di Bidang Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Organisasi dan Perencanaan dan Keuangan	Persentase Capaian Kinerja di Bidang Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100%	85%

Indikator ini dicapai dengan :

1. Melaksanakan pembinaan terkait penyelenggaraan di Bidang Protokol dan Komunikasi Pimpinan melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal terkait kegiatan Bidang Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
2. Melaksanakan Monev secara intens terhadap pelaksanaan kegiatan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
3. Memberikan masukan kepada Sekretaris Daerah terkait pelaksanaan kebijakan di Bidang Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Untuk Tahun 2023 target indikator sasaran ini adalah 100% dan telah dilaksanakan dengan realisasi capaian kinerjanya 85%.

Pelaksanaan kebijakan di Bidang Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang di fasilitasi sebagaimana tersebut pada tabel dibawah ini :

NO	URUSAN	PELAKSANAAN KEBIJAKAN
1	Dokumentasi Pimpinan	Rumusan Kebijakan dan Pengendalian di Bidang Dokumentasi Pimpinan
2	Komunikasi Pimpinan	Rumusan Kebijakan dan Pengendalian di Bidang Komunikasi Pimpinan
3	Protokol	Rumusan Kebijakan dan Pengendalian di Bidang Protokoler Pimpinan

Indikator 3 : Persentase Capaian Kinerja di Bidang Organisasi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	CAPAIAN 2023
3	Meningkatnya Capaian Kinerja di Bidang Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Organisasi dan Perencanaan dan Keuangan	Persentase Capaian Kinerja di Bidang Organisasi	100%	95%

Indikator ini dicapai dengan :

1. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi penataan organisasi perangkat daerah, peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan aparatur dan akuntabilitas kinerja.
2. Melaksanakan Monev secara intens terhadap pelaksanaan kegiatan Bagian Organisasi
3. Memberikan masukan kepada Sekretaris Daerah terkait pelaksanaan kebijakan di Bidang Organisasi. Untuk Tahun 2023 target indikator

sasaran ini adalah 100% dan telah dilaksanakan dengan realisasi capaian kinerjanya 95%.

Pelaksanaan kebijakan di Bidang Organisasi yang di fasilitasi sebagaimana tersebut pada tabel dibawah ini :

NO	URUSAN	PELAKSANAAN KEBIJAKAN
1	Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1. Rumusan Kebijakan dan Pengendalian di Bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan 2. Rumusan data beban kerja menjadi formasi jabatan 3. Rumusan bahan standar kompetensi jabatan 4. Rumusan bahan evaluasi jabatan untuk menentukan kelas dan nilai jabatan
2	Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1. Rumusan Kebijakan dan Pengendalian di Bidang Pelayanan Publik dan Tata Laksana 2. Rumusan data standarisasi pedoman kerja 3. Pemantauan dan evaluasi penerapan pengaturan kerja 4. Rumusan bahan pengukuran indeks kepuasan masyarakat 5. Rumusan bahan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik
3	Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1. Rumusan Kebijakan dan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 2. Rumusan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemberdayaan aparatur dan akuntabilitas kinerja 3. Rumusan data pemberdayaan aparatur meliputi pengawasan melekat dan penerapan budaya kerja 4. Rumusan Bahan analisis indikator kinerja dalam rencana strategis dan RPJMD 5. Rumusan laporan pelaksanaan kegiatan pengukuran kinerja 6. Rumusan bahan pelaksanaan dan Laporan Penerapan Reformasi Birokrasi

Indikator 4 : Persentase Capaian Kinerja di Bidang Perencanaan dan Keuangan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	CAPAIAN 2023
4	Meningkatnya Capaian Kinerja di Bidang Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Organisasi dan Perencanaan dan Keuangan	Persentase Capaian Kinerja di Bidang Perencanaan dan Keuangan	100%	99.70%

Indikator ini dicapai dengan :

1. Melaksanakan pembinaan, penyusunan perencanaan di Bidang Perencanaan dan Keuangan menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan oleh di Bidang Perencanaan dan Keuangan.

2. Melaksanakan Monev secara intens terhadap pelaksanaan kegiatan Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Memberikan masukan kepada Sekretaris Daerah terkait pelaksanaan kebijakan di Bidang Perencanaan dan Keuangan. Untuk Tahun 2023 target indikator sasaran ini adalah 100% dan telah dilaksanakan dengan realisasi capaian kinerjanya 99.70%

Pelaksanaan kebijakan di Bidang Perencanaan dan Keuangan yang di fasilitasi sebagaimana tersebut pada tabel dibawah ini :

NO	URUSAN	PELAKSANAAN KEBIJAKAN
1	Keuangan	1. Pembentukan Tim Rekonsiliasi Keuangan Triwulan 2. Rumusan dan Penatausahaan secara keseluruhan anggaran pendapatan dan belanja Daerah 3. Koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan kas 4. Rumusan Penyampaian SPT Tahunan orang pribadi ASN Sekretariat Daerah 5. Rumusan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
2	Perencanaan	1. Rumusan Renja Sekretariat Daerah 2. Rumusan RKA Sekretariat Daerah 3. Rumusan Maturitas SPIP Terintegrasi Sekretariat Daerah 4. Rumusan Manajemen Risiko Sekretariat Daerah 5. Rumusan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah
3	Pelaporan	1. Rumusan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah 2. Rumusan LPPD Sekretariat Daerah 3. Rumusan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah

3. Eselon III (Kepala Bagian) dan Eselon IV (Kasubbag)

Berdasarkan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 untuk Sekretariat Daerah mengemban Misi Bupati sebagaimana termuat di dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut, sehubungan hal tersebut

Maka analisa capaian sasaran strategi diuraikan berdasarkan Misi Bupati Tanah Laut dengan uraian sebagai berikut :

Analisa Capaian Sasaran Strategis

Kepala Bagian Umum

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya kualitas layanan umum dan Rumah Tangga Pimpinan dengan baik	Persentase layanan Pimpinan/Bagian/ SKPD/ Masyarakat dengan baik	100%	100%	100%	Bagian Umum Mengampu Misi ke-3 "***Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)"***
2	Meningkatnya Pengelolaan Barang/Asset Lingkup Sekretariat Daerah Secara Tertib	Persentase layanan pada bagian-bagian Lingkup Setda sarana prasarana/ aset milik Setda terkelola dengan baik	100%	100%	100%	
3	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kebijakan,Pemantauan dan Evalusi dibidang Tata Usaha Pimpinan, Staff Ahli dan Kepegawaian	Persentase Pelaksanaan Kebijakan, Pemantauan dan Evalusi di Bidang Tata Usaha Pimpinan, Staff Ahli dan Kepegawaian	100%	100%	100%	
4	Meningkatkan kualitas pengelolaan kepemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Nilai Komponen area perubahan Reformasi Birokrasi lingkup Sekretariat Daerah	92	Sekretariat Daerah tidak termasuk RB Tematik	Sekretariat Daerah tidak termasuk RB Tematik	
		Nilai Komponen area perubahan Zona Integritas lingkup Sekretariat Daerah	85	80.83	95.09%	
ESELON IV						
1	Melaksanakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana/aset Sekretariat Daerah	Jumlah sarana dan prasarana/aset milik Setda yang terpelihara dan terkelola dengan baik	614 Jenis	**614 Jenis**	**100%**	Kasubbag Umum dan Rumah Tangga
2	Melaksanakan Pelayanan Urusan Pimpinan/Bagian/SKPD/ dan Masyarakat	Jumlah layanan Pimpinan/Bagian/SKPD dan Masyarakat terlayani dengan baik	70.822 Ok	70822 Ok	100%	Kasubbag Umum dan Rumah Tangga
3	Melaksanakan Pelayanan bidang transportasi, konsumsi dan gedung pertemuan di Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah layanan transportasi, konsumsi dan gedung pertemuan di Lingkup Sekretariat Daerah terlayani dengan baik	70.822 Ok	70.822 Ok	100%	Kasubbag Umum dan Rumah Tangga

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	Melaksanakan pengadaan aset di Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah aset yang didistribusikan di Lingkup Sekretariat Daerah	91 Jenis	91Jenis	100%	Kasubbag Asset dan Perlengkapan
5	Melaksanakan Pengelolaan, Pencatatan Aset dan Penghapusan aset di Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah aset Sekretariat Daerah yang terkelola dan tercatat dengan baik	2.468 Jenis	2468 Jenis	100%	Kasubbag Asset dan Perlengkapan
6	Melaksanakan Rumusan Analisa Kebutuhan Barang di Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah dokumen analisa kebutuhan barang berupa rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) sesuai standar dan kebutuhan di lingkup Sekretariat Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	100%	Kasubbag Asset dan Perlengkapan
7	Memberikan Pelayanan Surat Menyurat lingkup SKPD dan Setda sesuai SOP	Jumlah SKPD/Bagian Lingkup Setda yang terlayani admnistrasi surat menyurat	40 SKPD dan 9 Bagian	40 SKPD dan 9 Bagian	100%	Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
8	Memberikan pelayanan Administrasi Kepegawaian lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah Administrasi kepegawaian lingkup Sekretariat Daerah yang terselesaikan	260 Kali	260Kali	100%	Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
9	Memberikan pelayanan Administrasi Pimpinan lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah pelayanan Administrasi Pimpinan Daerah (KDH/WKDH/SEKDA)	250 Kali	250 kali	100%	Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
10	Pengeloalaan dan penyimpanan arsip Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah arsip yang terkelola sesuai SOP	3.600 Surat	3.772 surat	107%	Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
11	Melaksanakan Reformasi Birokrasi dilingkup Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen area perubahan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	103 Dokumen	126 Dokumen	100%	Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
12	Melaksanakan Zona Integritas di Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen area perubahan Zona IntegritasSekretariat Daerah	90 Dokumen	90 Dokumen	100%	Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian

Berikut disajikan Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis Bagian Umum terhadap capaian tahun sebelumnya

Tabel Capaian Indikator Sasaran Strategis Bagian Umum
terhadap capaian Tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Tahun 2023		
			2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase layanan Pimpinan/Bagian/ SKPD/ Masyarakat dengan baik	%	80%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase layanan pada bagian-bagian Lingkup Setda sarana prasarana/ aset milik Setda terkelola dengan baik	%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Pelaksanaan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Tata Usaha Pimpinan, Staff Ahli dan Kepegawaian	%	100	100%	100%	100%	100%
4	Nilai Komponen area perubahan Reformasi Birokrasi lingkup Sekretariat Daerah	Nilai	91,71	92.59	92	Sekretariat Daerah tidak termasuk RB Tematik	Sekretariat Daerah tidak termasuk RB Tematik
5	Nilai Komponen area perubahan Zona Integritas lingkup Sekretariat Daerah	Nilai	87,45	87.74	85	80.83	95.09%
	Rata-Rata Capaian						**98.77%**

❖ **Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dengan Target Kinerja**

Capaian kinerja bagian umum dari lima indikator adalah **100%** dengan rincian sebagai berikut :

1. Persentase layanan Pimpinan/Bagian/ SKPD/ Masyarakat dengan baik dengan capaian komponen layanan pimpinan dan Bagian-Bagian dengan realisasi sebesar 100% dari target 100%.
2. Persentase layanan pada bagian-bagian Lingkup Sekretariat Daerah terkait sarana prasarana/ aset milik Sekretariat Daerah terkelola dengan baik dengan capaian komponen layanan pencatatan aset dan pendistribusian dengan realisasi sebesar 100% dari target 100%.
3. Persentase pelayanan kebijakan, pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian sebesar 100% dari target 100%
4. Nilai komponen area perubahan reformasi birokrasi sekretariat daerah tanah laut Tahun 2023 pada sekretariat Daerah tidak termasuk dalam RB tematik.

5. Nilai komponen area perubahan zona integritas Sekretariat daerah Tahun 2023 dari hasil PMPMZI diperolah nilai 80.83 dari target yang ditetapkan 85 dengan persentasi pencapaian 95.09%.

❖ **Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dengan Tahun Sebelumnya**

1. Persentase layanan Pimpinan/Bagian/SKPD/Masyarakat dengan baik dengan capaian pada Tahun 2022 100% sedangkan Tahun 2023 100%.
2. Persentase layanan pada bagian-bagian Lingkup Sekretariat Daerah terkait sarana prasarana/aset milik Sekretariat Daerah terkelola dengan baik pada Tahun 2023 100% masih sama dari Tahun 2022 100%.
3. Persentase pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian Tahun 2022 100% sedangkan tahun 2023 100% atau masih sama dari tahun sebelumnya.
4. Persentase komponen area perubahan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Tahun 2023 tidak ada nilai dikarenakan Sekretariat Daerah tidak termasuk dalam RB Tematik.
5. Persentase komponen area perubahan zona integritas Sekretariat daerah Tahun 2023 dari hasil PMPMZI diperolah nilai 80.83 sedangkan pada Tahun 2022 diperoleh nilai 87.74 atau mengalami penurunan sebesar 6.91.

❖ **Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Eselon III Selama 5 (Lima) Tahun (2018-2022)**

1. Persentase layanan pada bagian-bagian Lingkup Sekretariat Daerah terkait sarana prasarana/aset milik Sekretariat Daerah terkelola dengan baik dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 selalu mengalami kenaikan dari setiap tahunnya hanya pada Tahun 2021 yang terjadi penurunan dikarenakan adanya kasus Covid 19.
2. Persentase layanan pada bagian-bagian Lingkup Sekretariat Daerah terkait sarana prasarana/aset milik Sekretariat Daerah terkelola dengan baik dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 selalu mengalami kenaikan.
3. Persentase pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian hanya ada pada Tahun 2021 dan dari Tahun 2021 sampai Tahun 2022 mengalami selalu mengalami kenaikan dari Tahun 2021 sebesar 100% , Tahun 2022 sebesar 104% atau mengalami kenaikan sebesar 4% dari tahun sebelumnya sedangkan tahun 2023 sebesar 100%

4. Persentase komponen area perubahan reformasi birokrasi Sekretariat Daerah, untuk nilai RB Tahun 2021 sebesar 91.71 sedangkan nilai RB Tahun 2022 sebesar 92.59 atau mengalami kenaikan sebesar 0.88, sedangkan tahun 2023 tidak ada nilai dikarenakan Sekretariat Daerah tidak termasuk dalam RB Tematik
5. Persentase komponen area perubahan zona integritas Sekretariat Daerah, untuk Tahun 2021 nilai ZI adalah 87.45 sedangkan Tahun 2022 nilai ZI adalah 87.74 atau mengalami kenaikan sebesar 0.29 dari tahun sebelumnya dan tahun 2023 dengan nilai 80.83 atau mengalami penurunan sebesar 6.91

❖ **Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Eselon III Selama 5 (Lima) Tahun (2018-2023)**

NO	IKU ESELON III		2019			2020			2021			2022			2023			PENANGGUNG JAWAB/BAGIAN
	SASARAN	INDIKATOR	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	
	Meningkatnya kualitas layanan umum dan Rumah Tangga Pimpinan dengan baik	Persentase layanan Pimpinan/Bagian/ SKPD/ Masyarakat dengan baik	100%	86,83 %	86,38 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Bagian Umum**
	Meningkatnya Pengelolaan Barang/Asset Lingkup Sekretariat Daerah Secara Tertib	Persentase layanan pada bagian-bagian Lingkup Setda terkait sarana prasarana/ aset milik Setda terkelola dengan baik	100%	61,3 %	61,3 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Bagian Umum**
	Meningkatnya kualitas layanan umum dan Rumah Tangga Pimpinan dengan baik	Persentase layanan Pimpinan/Bagian/ SKPD/ Masyarakat dengan baik	-	-	-	100%	86,83%	86,83 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Bagian Umum**
	Meningkatnya Pengelolaan Barang/Asset Lingkup Sekretariat Daerah Secara Tertib	Persentase layanan pada bagian-bagian Lingkup Setda terkait sarana prasarana/ aset milik Setda terkelola dengan baik	-	-	-	100%	92,57%	92,57 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Bagian Umum**
	Meningkatnya kualitas layanan umum dan Rumah Tangga Pimpinan	Persentase layanan Pimpinan/Bagian/ SKPD/ Masyarakat dengan baik	-	-	-	-	-	-	100%	80%	80%	-	-	-	-	-	-	**Bagian Umum**

	dengan baik																
	Meningkatnya Pengelolaan Barang/Asset Lingkup Sekretariat Daerah Secara Tertib	Persentase layanan pada bagian-bagian Lingkup Setda sarana prasarana/ aset milik Setda terkelola dengan baik	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	**Bagian Umum**
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kebijakan,Pemantauan dan Evalusi dibidang Tata Usaha Pimpinan, Staff Ahli dan Kepegawaian	Persentase Pelaksanaan Kebijakan, Pemantauan dan Evalusi di Bidang Tata Usaha Pimpinan, Staff Ahli dan Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	**Bagian Umum**
	Meningkatkan kualitas pengelolaan kepemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Nilai Komponen area perubahan Reformasi Birokrasi lingkup Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-	90	91,71	101.90%	-	-	-	-	-	-	**Bagian Umum**
		Nilai Komponen area perubahan Zona Integritas lingkup Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-	83	87,45	105.40%	-	-	-	-	-	-	**Bagian Umum**
	Meningkatnya kualitas layanan umum dan Rumah Tangga Pimpinan dengan baik	Persentase layanan Pimpinan/Bagian/ SKPD/ Masyarakat dengan baik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	**Bagian Umum**

	Meningkatnya Pengelolaan Barang/Asset Lingkup Sekretariat Daerah Secara Tertib	Persentase layanan pada bagian-bagian Lingkup Setda sarana prasarana/ aset milik Setda terkelola dengan baik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**Bagian Umum**
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kebijakan,Pemantauan dan Evalusi dibidang Tata Usaha Pimpinan, Staff Ahli dan Kepegawaian	Persentase Pelaksanaan Kebijakan, Pemantauan dan Evalusi di Bidang Tata Usaha Pimpinan, Staff Ahli dan Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**Bagian Umum**
	Meningkatkan kualitas pengelolaan kepemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Nilai Komponen area perubahan Reformasi Birokrasi lingkup Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91	92.59	101.70%	92	Sekretariat Daerah tidak termasuk RB Tematik	Sekretariat Daerah tidak termasuk RB Tematik	**Bagian Umum**
		Nilai Komponen area perubahan Zona Integritas lingkup Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	87.4	104.40%	85	80.83	95.09%	**Bagian Umum**

❖ **Analisa Peningkatan dan Penurunan Kinerja**

SASARAN 1 Meningkatnya Kualitas Layanan Umum dan Rumah Tangga Pimpinan dengan Baik

Indikator : Persentase Layanan Pimpinan/Bagian/SKPD/Masyarakat dengan Baik

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya kualitas layanan umum dan Rumah Tangga Pimpinan dengan baik	Persentase layanan Pimpinan/Bagian/ SKPD/ Masyarakat dengan baik	100%	100%	100%	Bagian Umum Mengampu Misi ke-3 "***Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)"***

Indikator ini dilaksanakan melalui Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sub kegiatan penyelenggaraan rapat rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp 4.814.600.000,- pada Tahun 2023 dengan serapan anggaran sebesar Rp 4.457.108.602,- atau 92,57%, dan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dengan pagu anggaran Rp 358.211.581 pada Tahun 2023 dengan serapan anggaran sebesar Rp 357.851.077 atau 99,90%,. Dari indikator di atas dapat di jelaskan bahwa rata rata target kinerja dapat dicapai karena berjalan sebanding dengan serapan anggaran dari sub kegiatan yang menjadi indikator dari kinerja utama, dari dua sub kegiatan pengampu rata rata capaian kinerjanya adalah 96.235%

Dalam melaksanakan indikator tersebut diatas, menghadapi beberapa kendala antara lain :

- Kurang tertibnya usulan RKBU dari Bagian-Bagian sehingga mengakibatkan kurang terakomodir kebutuhan di setiap Bagian.
- Kurangnya kesadaran dalam memelihara asset daerah.

Solusi yang dilakukan dalam mencapai indikator ini adalah :

- Memberikan batasan atau tengang waktu dalam membuat RKBU dari bagian-bagian yang diusulkan ke Bagian Umum.
- Perlu adanya sanksi terhadap kelalaian penggunaan asset daerah.

Rencana aksi perbaikan yang akan dilakukan kedepannya adalah :

- Membuat Nota Dinas mengenai batasan usulan RKBU.
- Membuat Nota Dinas tentang penggunaan asset daerah.



Foto Kegiatan Penghapusan BMD di TPA Bakunci Pelaihari

SASARAN 2 Meningkatnya Pengelolaan Barang/Asset Lingkup Sekretariat Daerah Secara Tertib

Indikator : Persentase Layanan Pada Bagian-Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Terkait Sarana Prasarana/ Aset Milik Sekretariat Daerah Terkelola Dengan Baik

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
2	Meningkatnya Pengelolaan Barang/Asset Lingkup Sekretariat Daerah Secara Tertib	Persentase layanan pada bagian-bagian Lingkup Setda sarana prasarana/ aset milik Setda terkelola dengan baik	100%	100%	100%	Bagian Umum Mengampu Misi ke-3 "***Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)"***

Peningkatan indikator ini ditunjang dengan kegiatan administrasi umum perangkat daerah sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp 86.705.585 dengan serapan anggaran sebesar Rp 82.066.500 atau 94,65%. Sub kegiatan peyediaan peralatan rumah tangga dengan pagu anggaran sebesar Rp 124.240.667 dengan serapan anggaran sebesar Rp 96.542.900 atau 77.71%. Sub Kegiatan fasilitasi kunjungan tamu dengan pagu anggaran sebesar Rp. 16.200.000 dengan serapan anggaran Rp. 6.275.000 atau 38.73% Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah sub kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.129.581.560 dengan serapan anggaran sebesar Rp. 1.840.270.201 atau 86.41%, sub kegiatan peyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.695.189.983 dengan serapan sebesar Rp. 3.628.988.218 atau 98.21%. Kegaiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 329.793.000 dengan serapan angaran Rp. 326.865.589 atau 99.11% sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.746.620.000 dengan serapan anggaran sebesar Rp. 1.746.410.598 atau 99.99%, sub kegiatan pemeliharaan peralatan mesin lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 306.654.064 serapan anggaran Rp. 304.924.250 atau 99.44% sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan

lainnya dengan pagu anggaran Rp. 358.211.581 serapan Rp. 357.851.077 atau 99.90% Dari indikator di atas dapat di jelaskan bahwa rata rata target kinerja dapat dicapai karena berjalan sebanding dengan serapan anggaran sub kegiatan yang menjadi indikator dari kinerja utama, dari sembilan sub kegiatan pengampu rata rata capaian kinerjanya adalah 88.23%

Indikator tersebut diatas, terdapat beberapa kendala antara lain :

- Jumlah asset yang tidak ditemukan sebanyak 99 buah
- Pencatatan asset yang belum tertib

Solusi yang dilakukan dalam mencapai indikator ini adalah :

- Melakukan penelusuran terhadap asset yang tidak ditemukan
- Menertibkan pencatatan asset

Rencana aksi perbaikan yang akan dilakukan kedepannya adalah :

- Membuat berita acara penelusuran asset yang tidak ditemukan dan diusulkan untuk dihapus atau hibah.
- Membuat berita acara serah terima barang.

SASARAN 3 Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Tata Usaha Pimpinan, Staff Ahli dan Kepegawaian

Indikator : Persentase Pelaksanaan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Tata Usaha Pimpinan, Staff Ahli dan Kepegawaian

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
3	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kebijakan,Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Tata Usaha Pimpinan, Staff Ahli dan Kepegawaian	Persentase Pelaksanaan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Tata Usaha Pimpinan, Staff Ahli dan Kepegawaian	100%	100%	100%	Bagian Umum Mengampu Misi ke-3 "***Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)"***

Pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evauasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian ditunjang dengan kegiatan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian

dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 138.379.817 dengan serapan anggaran Rp 120.782.250 atau 87.28%. kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah Sub Kegiatan pemulangan pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas dengan Anggaran sebesar Rp. 30.000.000 dengan realisasi Rp 0 atau 0%. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah sub kegiatan pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan dengan pagu anggaran Rp. 15.000.000 serapan anggaran Rp. 14.820.000 atau 98.80% sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD pagu anggaran Rp. 4.814.600.000 serapan anggaran Rp. 4.457.108.602 atau 92.57% sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor pagu anggaran Rp. 1.299.159.669 serapan anggaran Rp. 1.215.531.386 atau 93.56%. Untuk Sub Kegiatan pemulangan pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas dengan pagu anggaran 30.000.000 tetapi tidak terealisasi dikarenakan tidak adanya pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas pada Tahun 2023. Dari indikator di atas dapat di jelaskan bahwa rata rata target kinerja dapat dicapai karena berjalan sebanding dengan serapan anggaran sub kegiatan yang menjadi indikator dari kinerja utama, dari lima sub kegiatan pengampu rata rata capaian kinerjanya adalah 74.44%

Dalam pencapaian Indikator tersebut diatas, terdapat beberapa kendala antara lain : Pelaksanaan kegiatan tersebut belum dapat dilaksaanakan secara maksimal karena pada Tahun 2023 input sirup pengadaan baju dinas untuk pimpinan dapat dilaksanakan tepat waktu sehingga mempercepat proses pengadaan tersebut, sedangkan untuk sub kegiatan pegawai yang meninggal tidak terealisasi karena tidak ada ASN yang meninggal dunia di luar daerah saat bertugas.

Pada indikator kegiatan di atas belum terdapat solusi dikarenakan tidak ada kendala yang ada dalam pelaksanaannya sehingga semua sudah berjalan sebagaimana aturan dalam pelaksanaannya untuk pengadaan pakaian dinas yang terlaksana sesuai dengan kebutuhan pimpinan sedangkan kegiatan lainnya seperti pemulangan jenazah pegawai yang meninggal tidak dapat terlaksana.





Pengadaan baju PDH dan PDU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah



Pengadaan baju PDH dan PDU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta PJ Bupati Tanah Laut

SASARAN 4 Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Kepemerintahan yang baik Lingkup Sekretariat Daerah

Indikator 1 : Peningkatan komponen area perubahan Reformasi Birokrasi Lingkup Sekretariat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
4	Meningkatkan kualitas pengelolaan kepemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Nilai Komponen area perubahan Reformasi Birokrasi lingkup Sekretariat Daerah	92	Sekretariat Daerah tidak termasuk RB Tematik	Sekretariat Daerah tidak termasuk RB Tematik	Bagian Umum Mengampu Misi ke-3 "***Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)"***

Pelaksanaan peningkatan komponen area perubahan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut dari target yang ditetapkan 92 berdasarkan penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh TPI Sekretariat Daerah tidak termasuk dalam reformasi birokrasi tematik sehingga tidak mendapatkan nilai dari target yang telah ditetapkan, tetapi kedepannya Sekretariat Daerah tetap terus berupaya meningkatkan pemenuhan dokumen-dokumen LKE Reformasi Birokrasi dan Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Indikator 2 : Peningkatan komponen area perubahan Zona Integritas Lingkup Sekretariat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
4	Meningkatkan kualitas pengelolaan kepemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Nilai Komponen area perubahan Zona Integritas lingkup Sekretariat Daerah	85	80.83	95.09%	Bagian Umum Mengampu Misi ke-3 "***Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)"***

Pelaksanaan Zona Integritas Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Penilaian Mandiri pada Tahun 2023 dengan nilai 80,83 dari target yang ditetapkan 85 dengan prosentasi 95,09%.

Sekretariat Daerah juga diusulkan menjadi WBK akan tetapi nilai yang diperoleh dari hasil penilaian Kemenpan dan RB masih belum memenuhi target, sehingga saat ini belum mendapatkan WBK. Dalam Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas tersebut di atas ada beberapa kendala yang dihadapi antara lain :

a. Kompetensi Sumber Daya Manusia kurang memadai
b. Lingkungan kerja belum sepenuhnya menunjang pelaksanaan Zona Integritas
c. Kurangnya Sosialisasi kepada seluruh PNS dan PTT Sekretariat Daerah bahwa Sekretariat Daerah termasuk menjadi SKPD yang dicanangkan sebagai Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi
d. Belum pahamnya aparatur Sekretariat Daerah tentang program Zona Integritas itu sendiri.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia dalam memahami komponen area perubahan Zona Integritas
- Peningkatan Sarana dan Prasarana untuk menunjang pelaksanaan Zona Integritas
- Meningkatkan Sosialisasi Pelaksanaan Zona Integritas kepada seluruh ASN Sekretariat Daerah secara berkelanjutan.

  Melakukan evaluasi dan monitoring progres pemenuhan dokumen LKE Zona Integritas.

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Banyak melakukan sosialiasi untuk memahami komponen area perubahan Zona Integritas
- Pembuatan Sarana dan Prasarana untuk menunjang pelaksanaan Zona Integritas
- Meningkatkan Sosialisasi Pelaksanaan Zona Integritas kepada seluruh ASN Sekretariat Daerah secara berkelanjutan.





Foto foto kegiatan rapat rapat peningkatan kinerja PTT Setda

6. Analisa Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia

1. Untuk mencapai sasaran layanan Pimpinan/Bagian/SKPD/Masyarakat dengan baik ditunjang oleh 3 orang Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu Kepala Bagian Umum, Kasubbag Umum dan Rumah Tangga dan pelaksana Bagian Umum dan Dengan ditunjang Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sub kegiatan penyelenggaraan rapat rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp 4.814.600.000,- pada Tahun 2023 dengan serapan anggaran sebesar Rp 4.457.108.602,- atau 92,57%, dan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dengan pagu anggaran Rp 358.211.581 pada Tahun 2023 dengan serapan anggaran sebesar Rp 357.851.077 atau 99,90%,

CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI
100%	**96.23%**	**3.77%**

2. Untuk mencapai sasaran persentase layanan pada Bagian-Bagian Lingkup Sekretariat Daerah terkait sarana prasarana/aset milik Sekretariat Daerah terkelola dengan baik ditunjang oleh 3 orang Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu Kepala Bagian Umum, Kasubbag Asset dan Perlengkapan dan pelaksana Bagian Umum,

dan di tunjang dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota kegiatan administrasi umum perangkat daerah sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp 86.705.585 dengan serapan anggaran sebesar Rp 82.066.500 atau 94,65%. Sub kegiatan peyediaan peralatan rumah tangga dengan pagu anggaran sebesar Rp 124.240.667 dengan serapan anggaran sebesar Rp 96.542.900 atau 77.71%. Sub Kegiatan fasilitasi kunjungan tamu dengan pagu anggaran sebesar Rp. 16.200.000 dengan serapan anggaran Rp. 6.275.000 atau 38.73% Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah sub kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.129.581.560 dengan serapan anggaran sebesar Rp. 1.840.270.201 atau 86.41%, sub kegiatan peyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.695.189.983 dengan serapan sebesar Rp. 3.628.988.218 atau 98.21%. Kegaiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 329.793.000 dengan serapan angaran Rp. 326.865.589 atau 99.11% sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.746.620.000 dengan serapan anggaran sebesar Rp. 1.746.410.598 atau 99.99%, sub kegiatan pemeliharaan peralatan mesin lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 306.654.064 serapan anggaran Rp. 304.924.250 atau 99.44% sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dengan pagu anggaran Rp. 358.211.581 serapan Rp. 357.851.077 atau 99.90%

CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI
100%	**88.23%**	**11.77%**

3. Untuk mencapai sasaran persentase layanan kebijakan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli, dan kepegawaian ditunjang oleh 3 orang yaitu kepala bagian umum, kasubag TU pimpinan dan staf ahli dan pelaksana bagian

umum, dan di tunjang dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota kegiatan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 138.379.817 dengan serapan anggaran Rp 120.782.250 atau 87.28%. kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah Sub Kegiatan pemulangan pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas dengan Anggaran sebesar Rp. 30.000.000 dengan realisasi Rp 0 atau 0%. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah sub kegiatan pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan dengan pagu anggaran Rp. 15.000.000 serapan anggaran Rp. 14.820.000 atau 98.80% sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD pagu anggaran Rp. 4.814.600.000 serapan anggaran Rp. 4.457.108.602 atau 92.57% sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor pagu anggaran Rp. 1.299.159.669 serapan anggaran Rp. 1.215.531.386 atau 93.56%

CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI
100%	**74.44%**	**25.56%**

4. Untuk mencapai peningkatan komponen area perubahan reformasi birokrasi lingkup sekretariat daerah ditunjang oleh 3 orang yaitu kepala bagian umum, kasubag TU pimpinan dan staf ahli dan pelaksana bagian umum, dan di tunjang dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan pagu anggaran Rp. 67.624.914 serapan anggaran Rp. 60.410.990 atau 89.33%

CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI
100%	**89.33%**	**10.67%**

5. Untuk mencapai peningkatan komponen area perubahan zona integritas lingkup sekretariat daerah ditunjang oleh 3 orang yaitu kepala Bagian Umum, kasubag TU

pimpinan dan staf ahli dan pelaksana Bagian Umum, dan di tunjang dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan peyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pagu anggaran Rp. 1.674.000.000 serapan anggaran Rp. 1.590.715.747 atau 95.02% kegiatan fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah Sub Kegiatan Penyediaan peyediaan kebutuhan rumah tangga kepala daerah pagu anggaran Rp. 789.940.000 serapan anggaran Rp. 681.221.000 atau 86.24%, Sub Kegiatan peyediaan kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah pagu anggaran Rp. 419.990.000 serapan anggaran Rp. 343.384 atau 81,76% Sub Kegiatan penyediaan kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah pagu anggaran Rp. 1.490.570.000 serapan anggaran Rp. 1.451.080.850 atau 97,35%.

CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI
100%	**90.09%**	**9.91%**

Tabel Indikator Kinerja dan Realisasi Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2023 (Rp)	%	SDM	KET
1	Persentase layanan Pimpinan/ Bagian/ SKPD/ Masyarakat dengan baik	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA KABUPATEN/ KOTA**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**					
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.814.600.000	4.457.108.602	92.60%	3 Orang	
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
			- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	358.211.281	346.788.077	96.81%	3 Orang	
2	Persentase layanan pada bagian-bagian Lingkup Setda sarana prasarana/ aset milik Setda terkelola dengan baik		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**					
			- Sub Kegiatan Peyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bagunan Kantor	86.709.585	82.066.500	94.65%	3 Orang	
			- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	124.240.667	96.542.900	77.71%	3 Orang	
			- Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	16.200.000	6.275.000	38.73%	3 Orang	
			Kegiatan Peyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
			- Sub Kegiatan Peyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.129.581.560	1.840.270.201	81.72%	3 Orang	
			- Sub Kegiatan Peyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.695.189.983	3.628.988.218	90.13%	3 Orang	
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
			- Sub Kegiatan Peyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	329.793.000	326.865.589	99.11%	3 Orang	
			- Sub Kegiatan Peyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan	1.746.620.000	1.746.410.598	99.99%	3 Orang	

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2023 (Rp)	%	SDM	KET
			Dinas Operasional Atau Lapangan					
			- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	306.654.064	299.024.250	97.51%	3 Orang	
			- Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	358.211.581	346.788.077	96.81%	3 Orang	
3	Persentase Pelaksanaan Kebijakan, Pemantauan dan Evalusai di Bidang Tata Usaha Pimpina, Staff Ahli dan Kepegawaian		**Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**					
			Penyedia Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	138.379.817	120.782.250	87.28%	3 Orang	
			Kegiatan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat daerah					
			- Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam melaksanakan tugas	30.000.000	0	0	3 Orang	
			Kegiatan Adminstrasi Umum Perangkat daerah					
			- Sub Kegiatan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang Undangan	15.000.000	14.820.000	98.80%	3 Orang	
			- Sub Kegiatan Peyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.814.600.000	4.458.108.602	92.60%	3 Orang	
			- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.299.159.669	1.173.556.386	90.33%	3 Orang	
4	Nilai Komponen area perubahan Reformasi Birokrasi lingkup Sekretariat Daerah		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**					
5	Nilai Komponen area perubahan Zona Integritas lingkup Sekretariat Daerah		Sub Kegiatan Peyediaan barang cetakan dan Penggandaan	67.624.914	60.410.990	89.33%	3 Orang	
			Kegiatan Peyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
			Sub Kegiatan Peyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.674.000.000	1.590.715.747	95.02%	3 Orang	

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2023 (Rp)	%	SDM	KET
			Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah					
			- Sub Kegiatan Peyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	789.940.000	681.221.000	86.24%	3 Orang	
			- Sub Kegiatan Peyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	419.990.000	343.384.000	81.76%	3 Orang	
			- Penyedia Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1.490.570.000	1.451.080.850	97.35%	3 Orang	

❖ **Analisa Capaian Kinerja Kepala Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga :**

Untuk capaian Indikator sasaran pada Kasubbag Umum dan Rumah Tangga dilaksanakan melalui kegiatan fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah dengan pagu Rp 2.700.500.000 terealisasi Rp 2.475.685.850 dengan realisasi keuangan sebesar 91.68% dengan dukungan SDM sebanyak 3 (tiga) orang, dan terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu:

- Sub Kegiatan penyediaan kebutuhan rumah tangga kepala daerah dengan pagu Rp 789.940.000 terealisasi Rp 681.221.000 dengan realisasi keuangan sebesar 86.24%;
- Sub Kegiatan penyediaan kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah dengan pagu Rp 419.990.000 terealisasi Rp 343.384.000 dengan realisasi keuangan sebesar 81.76%;
- Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah dengan pagu Rp 1.490.570.000 terealisasi Rp 1.451.080.850 dengan realisasi keuangan sebesar 97.35%;

Tabel Indikator Kinerja dan Realisasi Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia
Kepala Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2023 (Rp)	%	SDM	KET
1	Jumlah sarana dan prasarana/aset milik Setda yang terpelihara dan terkelola dengan baik	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA KABUPATEN/ KOTA**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**					
2	Jumlah layanan Pimpinan/Bagian/SKPD dan Masyarakat terlayani dengan baik		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	67.624.914	60.410.990	89.33	3 orang	
3	Jumlah layanan transportasi, konsumsi dan gedung pertemuan di Lingkup Sekretariat Daerah terlayani dengan baik		**Kegiatan Fasilitasi Kerumah Tangga Setda**					

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2023 (Rp)	%	SDM	KET
			- Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	789.940.000	681.221.000	86.24%	3 orang	
			- Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	419.990.000	343.384.000	81.76%	3 orang	
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					
			- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.299.159.669	1.173.556.386	90.33%	3 orang	
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
			- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.674.000.000	1.590.715.747	95.02%	3 orang	

Capaian Sasaran dan Indikator Kepala Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga dapat dilihat pada analisa sebagai berikut :

Tabel Sasaran dan Indikator Kepala Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Melaksanakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana/aset Sekretariat Daerah	Jumlah sarana dan prasarana/aset milik Setda yang terpelihara dan terkelola dengan baik	614 Jenis	**614 Jenis**	**100%**	Kasubbag Umum dan Rumah Tangga
2	Melaksanakan Pelayanan Urusan Pimpinan/Bagian/SKPD/ dan Masyarakat	Jumlah layanan Pimpinan/Bagian/SKPD dan Masyarakat terlayani dengan baik	70.822 Ok	70822 Ok	100%	Kasubbag Umum dan Rumah Tangga
3	Melaksanakan Pelayanan bidang transportasi, konsumsi dan gedung pertemuan di Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah layanan transportasi, konsumsi dan gedung pertemuan di Lingkup Sekretariat Daerah terlayani dengan baik	70.822 Ok	70.822 Ok	100%	Kasubbag Umum dan Rumah Tangga

SASARAN 1 Melaksanakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana/Aset Sekretariat Daerah

Indikator : Jumlah Sarana Dan Prasarana/Aset Milik Sekretariat Daerah yang Terpelihara dan Terkelola dengan Baik

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Melaksanakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana/aset Sekretariat Daerah	Jumlah sarana dan prasarana/aset milik Setda yang terpelihara dan terkelola dengan baik	614 Jenis	614 Jenis	100%	Kasubbag Umum dan Rumah Tangga

Indikator ini dilaksanakan melalui sub kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp 2.741.278.645 dengan serapan anggaran sebesar Rp 2.719.088.514 atau 99.19%. sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp 358.211.581 dengan serapan anggaran sebesar Rp 346.788.077 atau 96.81%.

SASARAN 2 Melaksanakan Pelayanan Urusan Pimpinan/Bagian/SKPD/ dan Masyarakat

Indikator : Jumlah Layanan Pimpinan/Bagian/ SKPD dan Masyarakat Terlayani dengan Baik

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Melaksanakan Pelayanan Urusan Pimpinan/Bagian/SKPD/ dan Masyarakat	Jumlah layanan Pimpinan/Bagian/SKPD dan Masyarakat terlayani dengan baik	70.822 Ok	70822 Ok	100%	Kasubbag Umum dan Rumah Tangga

Indikator ini dilaksanakan melalui kegiatan fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp 2.700.500.000 serapan anggaran sebesar 2.475.685.850 atau 91.68% dengan disukung tiga sub kegiatan yaitu sub kegiatan penyediaan kebutuhan rumah tangga kepala daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp 789.940.000 dengan serapan anggaran sebesar Rp 681.221.000 atau 86.24%, sub kegiatan penyediaan kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp 419.990.000 dengan serapan anggaran sebesar Rp 343.384.000 atau 81.76% dan sub kegiatan penyediaan kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.490.570.000 dengan serapan anggaran sebesar Rp 1.451.080.850 atau 97.35%.

SASARAN 3 Melaksanakan Pelayanan Bidang Transportasi, Konsumsi dan Gedung Pertemuan Di Lingkup Sekretariat Daerah

Indikator : Jumlah Layanan Transportasi, Konsumsi dan Gedung Pertemuan Di Lingkup Sekretariat Daerah Terlayani dengan Baik

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Melaksanakan Pelayanan bidang transportasi, konsumsi dan gedung pertemuan di Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah layanan transportasi, konsumsi dan gedung pertemuan di Lingkup Sekretariat Daerah terlayani dengan baik	70.822 Ok	70.822 Ok	100%	Kasubbag Umum dan Rumah Tangga

Peningkatan indikator ini dilakukan dengan menyediakan jasa sewa gedung dan layanan penyewaan bus untuk masyarakat umum dan pimpinan. Dalam hal ini dapat

kami jelaskan bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut memiliki beberapa gedung atau aula yang dapat dimanfaatkan atau disewa oleh Masyarakat/SKPD ataupun dari Lembaga Organisasi lainnya berupa :

1) Gedung Balairung Tuntung Pandang
2) Gedung Sarantang Saruntung
3) Aula Rapat Ruang Barakat Lantai dua Sekretariat Daerah
4) Aula Rapat Lantai tiga Sekretariat Daerah

Yang mana gedung dan aula tersebut sering digunakan untuk acara cara resmi seperti pelantikan para pejabat di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Selain gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut juga memiliki 4 buah armada bus yang dapat di sewa oleh Masyarakat ataupun SKPD dengan tarif yang terjangkau karena tarif di atur dengan Peraturan Daerah yang mana dana akan masuk ke Kas Daerah. Untuk Tahun 2023 pada sekretariat daerah telah ditetapkan pagu anggaran pendapatan sebesar Rp 110.000.000 dan dari target tersebut terlah tercapai melalui jasa sewa gedung dan armada bus sebesar Rp. 117.000.000.

❖ **Analisa Capaian Kinerja Kepala Sub Bagian Asset dan Perlengkapan**

Melaksanakan pengelolaaan, pencatatan aset dan penghapusan aset di Lingkup Sekretariat Daerah dan jumlah aset yang terkelola dan tercatat dengan baik, maka untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui kegiatan administrasi umum perangkat daerah dengan anggaran sebesar Rp 6.423.530.835 realisasi sebesar Rp 5.397.540.044 atau 84.03%, kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan anggaran Rp 7.498.771.543 realisasi sebesar Rp 6.673.700.383 atau 89.00% dan kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan Anggaran sebesar Rp 2.741.278.645 dan terealisasi sebesar Rp 2.719.088.514 atau 99.19%.

Tabel Indikator Kinerja dan Realisasi Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia

Kepala Sub Bagian Asset dan Perlengkapan

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2023 (Rp)	%	SDM	KET
1	Jumlah aset yang didistribusikan di Lingkup Sekretariat Daerah	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA KABUPATEN/ KOTA**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**					
2	Jumlah aset Sekretariat Daerah yang terkelola dan tercatat dengan baik		- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	86.705.585	82.066.500	94.65%	3 orang	
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
			- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.129.581.560	1.773.758.501	83.29%	3 orang	
			- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.695.189.983	3.335.222.043	90.26%	3 orang	
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
			- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	329.793.000	326.865.589	99.11%	3 orang	

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2023 (Rp)	%	SDM	KET
			- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	1.746.620.000	1.746.410.598	99.99%	3 orang	
			- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	306.654.064	299.024.250	97.51%	3 orang	
			- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	358.211.581	346.788.077	96.81	3 orang	

Capaian Sasaran dan Indikator Kepala Sub Bagian Asset dan Perlengkapan dapat dilihat pada analisa sebagai berikut :

Tabel Sasaran dan Indikator Kepala Sub Bagian Asset dan Perlengkapan

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
1	Melaksanakan pengadaan aset di Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah aset yang didistribusikan di Lingkup Sekretariat Daerah	91 Jenis	91Jenis	100%	Kasubbag Asset dan Perlengkapan
2	Melaksanakan Pengelolaan, Pencatatan Aset dan Penghapusan aset di Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah aset Sekretariat Daerah yang terkelola dan tercatat dengan baik	2.468 Jenis	2468 Jenis	100%	Kasubbag Asset dan Perlengkapan
3	Melaksanakan Rumusan Analisa Kebutuhan Barang di Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah dokumen analisa kebutuhan barang berupa rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) sesuai standar dan kebutuhan di lingkup Sekretariat Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	100%	Kasubbag Asset dan Perlengkapan

SASARAN 1 Melaksanakan Pengadaan Aset di Lingkup Sekretariat Daerah

Indikator : Jumlah Aset Yang di Distribusikan di Lingkup Sekretariat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
1	Melaksanakan pengadaan aset di Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah aset yang didistribusikan di Lingkup Sekretariat Daerah	91 Jenis	91Jenis	100%	Kasubbag Asset dan Perlengkapan

Indikator ini dilaksanakan melalui sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.299.159.669 dengan serapan anggaran sebesar Rp 1.173.556.386 atau 90.33%. Pada sub kegiatan ini dilaksanakan pengadaan barang dan perlengkapan kantor seperti pengadaan komputer, printer dan alat alat penunjang kegiatan kantor lainnya dimana bukan hanya

pengadaaannya saja yang di catat dalam SIMDA BMD tetapi juga pendistribusiannya juga tercatat di laman berita acara serah terima barang, serta pencatatan keadaan barang baik yang rusak berat, ringan atau pun keadaan baik. Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan pagu anggaran sebesar Rp 67.624.914 dengan serapan sebesar Rp 60.410.990 atau 89.33% pada sub kegiatan ini dilakukan cetak dokumen laporan BMD baik belanja modal, belanja habis pakai, serta belanja pemeliharaan.

Berikut disajikan daftar barang yang dimusnahkan dan dihapus pencatatannya dari aset Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut

Daftar BMD yang Dilakukan Pemusnahan

(Lampiran Tabel KIB)

Peralatan dan Mesin

No	Kode Barang	Jenis Barang/Nama Barang	Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pembelian	Pabrik	Rangka	Nomor Mesin	Polisi	BPKB	Asal Usul	Harga Perolehan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	02.03.02.03.004	perkakas bengkel service lainnya (dst)	1	-	-	Besi	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	567.000,00	Dongkrak buaya Kendaraan Dinas jabatan/RB
2	02.03.02.03.004	perkakas bengkel service lainnya (dst)	2	-	-	Besi	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	567.000,00	Dongkrak buaya Kendaraan Dinas jabatan/BRB
3	02.03.02.03.004	perkakas bengkel service lainnya (dst)	3	-	-	Besi	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	567.000,00	Dongkrak buaya Kendaraan Dinas jabatan/BRB
4	02.03.02.03.004	perkakas bengkel service lainnya (dst)	4	-	-	Besi	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	567.000,00	Dongkrak buaya Kendaraan Dinas jabatan/BRB
5	02.03.02.03.004	perkakas bengkel service lainnya (dst)	5	-	-	Besi	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	567.000,00	Dongkrak buaya Kendaraan Dinas jabatan/BRB
6	02.03.02.03.004	perkakas bengkel service lainnya (dst)	6	-	-	Besi	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	567.000,00	Dongkrak buaya Kendaraan Dinas jabatan/BRB
7	02.03.02.03.004	perkakas bengkel service lainnya (dst)	7	-	-	Besi	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	567.000,00	Dongkrak buaya Kendaraan Dinas jabatan/BRB
8	02.03.02.03.004	perkakas bengkel service lainnya (dst)	8	-	-	Besi	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	567.000,00	Dongkrak buaya Kendaraan Dinas jabatan/BRB
9	02.03.02.03.004	perkakas bengkel service lainnya (dst)	9	-	-	Besi	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	567.000,00	Dongkrak buaya Kendaraan Dinas jabatan/BRB
10	02.03.02.03.004	perkakas bengkel service lainnya (dst)	10	-	-	Besi	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	567.000,00	Dongkrak buaya Kendaraan Dinas jabatan/RB
11	02.06.02.01.006	Handy Talky (HT)	7	-	-	camp	2009	-	-	-	-	-	Pembelian	1.450.000,00	"Handy Talkie - Informasi
12	02.06.02.01.006	Handy Talky (HT)	8	-	-	camp	2009	-	-	-	-	-	Pembelian	1.450.000,00	

No	Kode Barang	Jenis Barang/Nama Barang	Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pembelian	Pabrik	Rangka	Nomor Mesin	Polisi	BPKB	Asal Usul	Harga Perolehan (Rp)	Ket
13	02.06.02.01.006	Handy Talky (HT)	9	-	-	camp	2009	-	-	-	-	-	Pembelian	1.450.000,00	
14	02.06.02.01.006	Handy Talky (HT)	18	-	-	camp	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	1.554.166,67	/RB"
15	02.06.02.01.006	Handy Talky (HT)	19	-	-	camp	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	1.554.166,67	"Handy Talkie - Informasi
16	02.06.02.01.006	Handy Talky (HT)	20	-	-	camp	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	1.554.166,67	
17	02.06.02.01.006	Handy Talky (HT)	21	-	-	camp	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	1.554.166,67	
18	02.06.02.01.006	Handy Talky (HT)	22	-	-	camp	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	1.554.166,66	/RB"
19	02.06.02.01.006	Handy Talky (HT)	23	-	-	camp	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	1.554.166,67	"Handy Talkie - Informasi
20	02.06.03.47.002	Genset	3	-	-	camp	2007	-	-	-	-	-	Pembelian	50.800.000,00	
													Jumlah	70.145.000,01	

SASARAN 2 Melaksanakan Pengelolaan, Pencatatan Aset dan Penghapusan Aset di Lingkup Sekretariat daerah

Indikator : Jumlah Aset Sekretariat Daerah Yang Terkelola dan Tercatat Dengan Baik

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
2	Melaksanakan Pengelolaan, Pencatatan Aset dan Penghapusan aset di Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah aset Sekretariat Daerah yang terkelola dan tercatat dengan baik	2.468 Jenis	2468 Jenis	100%	Kasubbag Asset dan Perlengkapan

Untuk melaksanakan indikator ini dilakukan sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan pagu anggaran sebesar Rp 67.624.914 dengan serapan sebesar Rp 60.410.990 atau 89.33%. Kegiatan dilaksanakan berupa pencetakan kartu kendali barang, laporan RKBMD tahunan dan penjilidannya, serta pencetakan kartu invetaris barang.

SASARAN 3 Melaksanakan Rumusan Analisa Kebutuhan Barang di Lingkup Sekretariat Daerah

Indikator : Jumlah dokumen analisa kebutuhan barang berupa rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) sesuai standar dan kebutuhan di lingkup Sekretariat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
3	Melaksanakan Rumusan Analisa Kebutuhan Barang di Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah dokumen analisa kebutuhan barang berupa rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) sesuai standar dan kebutuhan di lingkup Sekretariat Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	100%	Kasubbag Asset dan Perlengkapan

Untuk melaksanakan indikator ini dilakukan pada sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.299.159.669 dengan serapan anggaran sebesar Rp 1.173.556.386 atau 90.33%. indikantor ini dilaksanakan dengan kegiatan pengadaan Alat tulis kantor dal lain lainnya yang mana tiap bagian akan mengajukan RKBMD barang sesuai dengan kubutuhannya.

❖ **Analisa Capaian Kinerja Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staff Ahli dan Kepegawaian**

Melaksanakan pengelolaaan, pencatatan dan pengelolaan arsip, pelayanan administrasi dan kepegawaian pimpinan, melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di lingkup Sekretariat Daerah, maka untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp 30.000.000 dan terealisasi sebesar Rp.0 atau 0%, kegiatan administrasi umum perangkat daerah dengan pagu anggaran Rp 6.423.530.835 realisasi anggaran sebesar Rp 5.397.540.044 atau 84.03% dan kegiatan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp 138.379.817 realisasi anggaran Rp 120.782.250 atau 87.28%

Tabel Indikator Kinerja dan Realisasi Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia
Kepala Sub Bagian Asset dan Perlengkapan

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2023 (Rp)	%	SDM	KET
1	Jumlah SKPD/ Bagian lingkup Setda yang terlayani administrasi surat menyurat	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA KABUPATEN/ KOTA**	**Kegiatan Administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah**					
2	Jumlah administrasi kepegawaian lingkup Sekretariat Daerah yang terselesaikan		- Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya KDH / WKDH	138.379.817	120.782.250	87.28%	3 orang	
3	Jumlah pelayanan administrasi Pimpinan Daerah (KDH/WKDH/SEKDA)		**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**					
4	Jumlah arsip yang terkelola sesuai SOP		- Sub Kegiatan Pemulangan Pegawai Yang Meninggal Dalam Melaksanakan Tugas	**30.000.000**	0	0	3 orang	
5	Jumlah Dokumen area perubahan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**					
6	Jumlah Dokumen Area Perubahan Zona Integritas Lingkup Sekretariat Daerah		- Sub Kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000	14.820.000	98.80%	3 orang	
			- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.814.600.000	4.458.108.602	92.60%	3 orang	
			- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.299.159.669	1.173.556.386	90.33%	3 orang	

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2023 (Rp)	%	SDM	KET

Capaian Sasaran dan Indikator Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian dapat dilihat pada analisa sebagai berikut :

Tabel Sasaran dan Indikator Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Memberikan Pelayanan Surat Menyurat lingkup SKPD dan Setda sesuai SOP	Jumlah SKPD/Bagian Lingkup Setda yang terlayani admnistrasi surat menyurat	40 SKPD dan 9 Bagian	40 SKPD dan 9 Bagian	100%	Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
2	Memberikan pelayanan Administrasi Kepegawaian lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah Administrasi kepegawaian lingkup Sekretariat Daerah yang terselesaikan	260 Kali	260Kali	100%	Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
3	Memberikan pelayanan Administrasi Pimpinan lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah pelayanan Administrasi Pimpinan Daerah (KDH/WKDH/SEKDA)	250 Kali	250 kali	100%	Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
4	Pengeloalaan dan penyimpanan arsip Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah arsip yang terkelola sesuai SOP	3.600 Surat	3.600 surat	100%	Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
5	Melaksanakan Reformasi Birokrasi dilingkup Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen area perubahan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	103 Dokumen	103 Dokumen	100%	Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
6	Melaksanakan Zona Integritas di Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen area perubahan Zona IntegritasSekretariat Daerah	90 Dokumen	90 Dokumen	100%	Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian

Untuk memberikan pelayanan surat menyurat lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah laut di dukungan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan pagu anggaran Rp 1.299.159.669 dengan realisasi sebesar Rp 1.173.556.386 dengan persentasi 90.33%. Sedangkan pelaksanaan pengelolaan arsip di dukung dengan sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan pagu anggaran Rp 67.624.914 dengan serapan sebesar Rp 58.790.990 atau 86.94%.

Adapun kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dan pelayanan administrasi penyimpanan arsip adalah sebagai berikut ;

a. Belum lengkapnya sarana dan prasarana pendukung arsiparis
b. Belum adanya anggaran khusus untuk mendukung pengelolaan arsip

Sedangkan untuk mengatasi atas kendala tersebut adalah ;

a. Menganggarkan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pengelolaan Arsip

b. Menganggarkan alokasi biaya khusus untuk pengelolaan arsip dilingkup Sekretariat Daerah

SASARAN 1 Memberikan Pelayanan Surat Menyurat lingkup Sekretariat Daerah sesuai SOP

Indikator : Jumlah SKPD/Bagian Lingkup Sekretariat Daerah yang terlayani admnistrasi surat menyurat

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
1	Memberikan Pelayanan Surat Menyurat lingkup SKPD dan Setda sesuai SOP	Jumlah SKPD/Bagian Lingkup Setda yang terlayani admnistrasi surat menyurat	40 SKPD dan 9 Bagian	40 SKPD dan 9 Bagian	100%	Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian

Untuk melaksanakan indikator ini dilakukan sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.299.159.669 dengan serapan anggaran sebesar Rp 1.173.556.386 atau 90.33%. pelaksanaan indikator ini dilakukan dengan kegiatan pelayanan administrasi surat menyurat dengan mengadakan alat tulis kantor dan barang penggandaan surat menyurat

SASARAN 2 Memberikan pelayanan Administrasi Kepegawaian lingkup Sekretariat Daerah

Indikator : Jumlah Administrasi Kepegawaian lingkup Sekretariat Daerah yang terselesaikan

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
2	Memberikan pelayanan Administrasi Kepegawaian lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah Administrasi kepegawaian lingkup Sekretariat Daerah yang terselesaikan	260 Kali	260Kali	100%	Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian

Untuk melaksanakan indikator ini dilakukan sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.299.159.669 dengan serapan anggaran sebesar Rp 1.173.556.386 atau 90.33%. pelaksanaan indikator ini dilakukan dengan kegiatan pelayanan administrasi surat menyurat dengan mengadakan alat tulis kantor dan barang penggandaan surat menyurat.

SASARAN 3 Memberikan pelayanan Administrasi Pimpinan lingkup Sekretariat Daerah

Indikator : Persentase pelayanan Administrasi Pimpinan Daerah (KDH/WKDH/SEKDA)

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
3	Memberikan pelayanan Administrasi Pimpinan lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah pelayanan Administrasi Pimpinan Daerah (KDH/WKDH/SEKDA)	250 Kali	250 kali	100%	Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian

Untuk melaksanakan indikator ini dilakukan sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.299.159.669 dengan serapan anggaran sebesar Rp 1.173.556.386 atau 90.33%. pelaksanaan indikator ini dilakukan dengan kegiatan pelayanan administrasi surat menyurat dengan mengadakan alat tulis kantor dan barang penggandaan surat menyurat

SASARAN 4 Pengeloalaan dan penyimpanan arsip Lingkup Sekretariat Daerah

Indikator : Persentase arsip yang terkelola sesuai SOP

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
4	Pengeloalaan dan penyimpanan arsip Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah arsip yang terkelola sesuai SOP	3.600 Surat	3.600 surat	100%	Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian

Untuk melaksanakan indikator ini dilakukan sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.299.159.669 dengan serapan anggaran sebesar Rp 1.173.556.386 atau 90.33%. tetapi untuk pegelolaan Arsip sendiri tidak ada anggaran khusus. pelaksanaan indikator ini dilakukan dengan kegiatan pelayanan administrasi surat menyurat dengan mengadakan alat tulis kantor dan barang penggandaan surat menyurat.

SASARAN 5 Melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkup Sekretariat Daerah

Indikator : Jumlah Dokumen area perubahan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
5	Melaksanakan Reformasi Birokrasi dilingkup Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen area perubahan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	103 Dokumen	103 Dokumen	100%	Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian

Untuk melaksanakan indikator ini dilakukan sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.299.159.669 dengan serapan anggaran sebesar Rp 1.173.556.386 atau 90.33%. Pelaksanaan indikator ini dilakukan dengan kegiatan pengisian LKE Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah dengan 8 (delapan) Area Perubahan.

SASARAN 6 Melaksanakan Zona Integritas di Lingkup Sekretariat Daerah

Indikator : Jumlah Dokumen area perubahan Zona Integritas Sekretariat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
6	Melaksanakan Zona Integritas di Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen area perubahan Zona IntegritasSekretariat Daerah	90 Dokumen	90 Dokumen	100%	Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian

Untuk melaksanakan indikator ini dilakukan sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.299.159.669 dengan serapan anggaran sebesar Rp 1.173.556.386 atau 90.33%. Pelaksanaan indikator ini dilakukan dengan kegiatan pengisian LKE Zona Integritas Sekretariat Daerah dengan 6 (enam) Area Perubahan.

Analisa Capaian Sasaran Strategis

Kepala Bagian Pemerintahan

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang berhasil di tindaklanjuti	100%	83.67%	83.67%	Bagian Pemerintahan Mengampu Misi ke- 3 : "*Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (**Good Governance**)*"
		Persentase kegiatan peringatan hari besar Nasional/ Kabupaten yang diselenggarakan	100%	100%	100%	
2	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Persentase Penyelesaian Permasalahan pada Kegiatan Pemekaran Kecamatan	100%	100%	100%	
3	Meningkatnya Pemenuhan IKK SKPD	Persentase Pemenuhan IKK SKPD	100%	100%	100%	
4	Meningkatnya Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak ke tiga	Persentase Dokumen Kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil ditindaklanjuti	100%	208%	208%	

Berikut disajikan Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis Bagian Pemerintahan terhadap capaian tahun sebelumnya.

Tabel Capaian Indikator Sasaran Strategis
Bagian Pemerintahan Terhadap Capaian Tahun Sebelumnya

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		TAHUN 2023		
			2021	2022	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang berhasil di tindaklanjuti	**%**	76,5%	76%	100%	83.67%	83.67%
2	Persentase kegiatan peringatan hari besar Nasional/Kabupaten yang diselenggarakan	**%**	100%	100%	100%	100%	100%

3	Persentase Penyelesaian Permasalahan pada Kegiatan Pemekaran Kecamatan	**%**	100%	**-**	100%	100%	100%
4	Persentase Pemenuhan IKK SKPD	**%**	100%	95%	100%	100%	100%
5	Persentase Dokumen Kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil ditindaklanjuti	%	208%	100%	100%	208%	208%
	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						**118.3%**

1. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dengan Target Kinerja

Rata-rata capaian kinerja Bagian Pemerintahan dari ke lima indikator adalah **118.3%,** dengan rincian sebagai berikut:

1. Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang berhasil di tindaklanjuti sebesar 83.67% dari target 100%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerjanya adalah 83.67%.
2. Persentase kegiatan peringatan Hari Besar Nasional/Kabupaten yang diselenggarakan sebesar 100% dari target 100%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerjanya adalah 100%.
3. Persentase Penyelesaian Permasalahan pada Kegiatan Pemekaran Kecamatan dengan target sebesar 100% dan tercapaian 100%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerjanya adalah 100%.sedangkan rakor camat dari 100% tercapai
4. Persentase Pemenuhan IKK SKPD/ SKPD sebesar 100% dari target 100%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerjanya adalah 100%.
5. Persentase Dokumen Kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil ditindaklanjuti sebesar 208% dari target 100%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerjanya adalah 208%.

2. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

1. Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang berhasil di tindaklanjuti Tahun 2023 adalah 83,67% mengalami peningkatan sebesar 7.67% dari Tahun 2022 dengan capaian sebesar 76%.
2. Persentase kegiatan tata batas antar daerah yang berhasil ditindaklanjuti pada Tahun 2023 tidak ada target dan capaian akan tetapi penyelesaian permasalahan pada kegiatan pemekaran kecamatan dengan target sebesar 100% dan capaian di Tahun 2023 adalah 100%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerjanya adalah 100%.
3. Persentase Penyelesaian Permasalahan pada Kegiatan Pemekaran Kecamatan adalah 100% sama dengan Tahun 2022 yang juga sebesar 100%.
4. Persentase Pemenuhan IKK SKPD Tahun 2023 adalah 100% dari 126 IKK Outcome sementera ada 2 (dua) IKK yang diklasifikasikan tidak oke oleh Tim Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD) sehingga menjadi 124 IKK dengan presentasi 100% angka peningkatan 5% dari Tahun 2022 dengan capaian sebesar 95%.
5. Persentase Dokumen Kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil ditindaklanjuti Tahun 2023 adalah 208% melampaui target dikarenakan di karenakan terdapat peningkatan yang signifikan terkait penyusunan Dokumen Kerjasama di SKPD karena realisasi kegiatan di Anggaran Perubahan maupun kebijakan-kebijakan yang ditetapkan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

❖ **Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Eselon III Selama 5 (Lima) Tahun (2018-2023)**

NO	IKU ESELON III		2019			2020			2021			2022			2023			PENANGGUNG JAWAB/BAGIAN
	SASARAN	INDIKATOR	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	
	Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan Umum, otonomi daerah dan kerjasama Pemerintah Daerah	Persentase Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang berhasil ditindaklanjuti	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Bagian Tapem**
		Jumlah Pemenuhan IKK	623	623	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Bagian Tapem**
		Jumlah permasalahan pada kegiatan tata batas antar daerah yang berhasil ditindaklanjuti	2	2	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Bagian Tapem**
		Jumlah dokumen kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil ditindaklanjuti	3	3	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Bagian Tapem**
	Meningkatnya Kesadaran masyarakat terhadap nilai budaya bangsa	Jumlah pelaksanaan hari besar Nasional/Kabupaten	2	2	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Bagian Tapem**

	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang berhasil di tindaklanjuti	-	-	-	100%	82%	82%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Bagian Tata Pemerintahan**
		Persentase kegiatan peringatan hari besar Nasional/Kabupaten yang diselenggarakan	-	-	-	100%	70%	70%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Bagian Tata Pemerintahan**
	Meningkatnya Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Persentase kegiatan tata batas antar daerah yang berhasil ditindaklanjuti	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Bagian Tata Pemerintahan**
		Persentase fasilitasi pelaksanaan pilkada (Presiden/Gubernur / Bupati)	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Bagian Tata Pemerintahan**
	Meningkatnya Pemenuhan IKK SKPD	Persentase Pemenuhan IKK SKPD/ SKPD	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Bagian Tata Pemerintahan**
	Meningkatnya Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak ke tiga	Persentase Dokumen Kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil ditindaklanjuti	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Bagian Tata Pemerintahan**

	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang berhasil di tindaklanjuti	-	-	-	-	-	-	100%	76,5 %	76,5 %	100%	75%	75%	100%	83.67 %	83.67%	**Bagian Pemerintahan**
		Persentase kegiatan peringatan hari besar Nasional/ Kabupaten yang diselenggarakan	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	**Bagian Pemerintahan**
	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Persentase Penyelesaian Permasalahan pada Kegiatan Pemekaran Kecamatan	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100 %	**Bagian Pemerintahan**
	Meningkatnya Pemenuhan IKK SKPD	Persentase Pemenuhan IKK SKPD	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	95%	95%	100%	100%	100 %	**Bagian Pemerintahan**
	Meningkatnya Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak ke tiga	Persentase Dokumen Kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil ditindaklanjuti	-	-	-	-	-	-	100%	416%	416%	100%	100%	100%	100%	208%	208 %	**Bagian Pemerintahan**

3. Analisa Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Sasaran 1 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Indikator : Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang berhasil di tindaklanjuti

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang berhasil di tindaklanjuti	100%	83.67%	83.67%	Bagian Pemerintahan Mengampu Misi ke- 3 : "*Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik* (***Good Governance***)"

Untuk mendukung tercapainya indikator Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang berhasil di tindaklanjuti telah dilaksanakan melalui Program Pemeritahan Dan Kesejahteraan Rakyat Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp 671.925147,00 dan terealisasi sebesar Rp 638.602.000,00 atau 95,04%.

Bahwa untuk mendukung tercapainya indikator Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang berhasil di tindaklanjuti telah dilaksanakan kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi (*Coffee Morning*) peringatan hari besar Nasional dan hari jadi daerah terlaksana dengan baik.

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain:

- Penentuan jadwal kegiatan Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah (C*offee Morning*) yang menyesuaikan jadwal pimpinan.
- Kehadiran Kepala SKPD yang diwakilkan oleh Sekretaris atau Kepala Bidang atau bahkan Kepala Seksi / Sub coordinator.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Mengkoordinasikan jadwal kegiatan yang sudah di agendakan agar tidak saling berbenturan, sehingga dapat dilaksanakan dengan tidak mengganggu agenda lainnya.

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah

- Mensinkronkan jadwal kegiatan rapat Koordinasi Pemerintah Daerah (*Coffee Morning*) agar tidak terbentur dengan jadwal agenda pimpinan.





Rapat Pejabat Pemerintah Daerah (Coffee Morning)

Indikator 2 : Persentase kegiatan peringatan hari besar Nasional/Kabupaten yang diselenggarakan

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase kegiatan peringatan hari besar Nasional/Kabupaten yang diselenggarakan	100%	100%	100%	Bagian Pemerintahan Mengampu Misi ke- 3 : "*Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik* (***Good Governance***)"

Untuk mendukung tercapainya indikator Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang berhasil di tindaklanjuti telah dilaksanakan melalui Program

Pemeritahan Dan Kesejahteraan Rakyat Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp 671.925.147,00 dan terealisasi sebesar Rp 638.602.000,00 atau 95,04%.

Bahwa untuk mendukung tercapainya indikator Persentase kegiatan peringatan hari besar Nasional/Kabupaten yang diselenggarakan telah dilaksanakan kegiatan diantaranya Rapat-Rapat Koordinasi dan membentuk Panitia Pelaksanaan hari besar tersebut. Persentase capaian pada Tahun 2023 sebesar 100% sama dengan Tahun 2022 dengan capaian sebesar 100%. Hal ini dikarenakan koordinasi SKPD dan dukungan seluruh stake holder di Kabupaten Tanah Laut terkait pelaksanaan kegiatan hari-hari besar Nasional/Kabupaten yaitu Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Jadi Ke-58 Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 terlaksana dengan baik sehingga penyelenggaraan kegiatan dapat terealisasi sebesar 100%.

Hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran ini adalah :

- Terbenturnya jadwal agenda kegiatan Pejabat Provinsi Kalimantan Selatan yang di undang khususnya pada Hari Jadi Kabupaten Tanah Laut

Solusi/ upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/ hambatan tersebut adalah:

- Meningkatkan Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
- Secepatnya/lebih awal mengkoordinasikan terkait jadwal agenda kegiatan Pejabat Provinsi Kalimantan Selatan yang di undang pada Hari Jadi Kabupaten Tanah Laut.

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Lebih cepat mengkoordinasikan dalam menyinkronkan jadwal agenda kegiatan Pejabat Provinsi Kalimantan Selatan yang akan di undang pada Hari Jadi Kabupaten Tanah Laut.







Penyelenggaraan Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Jadi Ke-58 Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023

SASARAN 2 Meningkatnya Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Indikator 1 : Persentase kegiatan tata batas antar daerah yang berhasil ditindaklanjuti

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
2	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Persentase Penyelesaian Permasalahan pada Kegiatan Pemekaran Kecamatan	100%	100%	100%	Bagian Pemerintahan Mengampu Misi ke- 3 : "*Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik* ***(Good Governance)***"

Bahwa untuk mendukung tercapainya Indikator Persentase penyelesaian permasalahan pada kegiatan pemekaran kecamatan dengan target sebesar 100% dan capaian di Tahun 2023 adalah 100%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerjanya adalah 100% sedangkan kegiatan tata batas antar daerah yang berhasil ditindaklanjuti pada Tahun 2023 tidak sepenuhnya terlaksana dikarenakan terdapat perubahan nomenklatur.

Bahwa untuk mendukung Indikator Sasaran Persentase penyelesaian permasalahan pada kegiatan pemekaran kecamatan yang berhasil ditindaklanjuti telah dilaksanakan kegiatan:

- Pembentukan Tim Pembinaan Kecamatan
- Pembentukan Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) Kabupaten Tanah Laut
- Pengecekan batas desa pemekaran dilapangan dengan berkoordinasi dengan Camat, Kepala Desa dan instansi/SKPD terkait.
- Melaksanakan rapat koordinasi Kecamatan.
- Melaksanakan rapat koordinasi terkait pemekaran kecamatan.
- Melakukan inventarisasi data-data dukung yang diperlukan untuk Penyelesaian dokumen-dokumen dalam rangka pemekaran Kecamatan

Hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran ini adalah:

- Adanya permasalahan dilapangan diantaranya perbedaan persepsi penentuan titik batas desa pemekaran kecamatan.
- Pengumpulan data dukung pemekaran kecamatan untuk Penyelesaian dokumen-dokumen yang diperlukan

Solusi/ upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/ hambatan tersebut adalah:

- Mempertemukan Kepala Desa dan Camat yang berbatasan serta instansi terkait agar segera mendapat putusan titik segmen batas yang di sepakati.
- Melaksanakan rapat koordinasi rutin seluruh camat dan SKPD terkait.
- Mengoptimalkan kinerja Tim Batas Desa dan SKPD terkait inventarisasi data-data dukung yang diperlukan untuk Penyelesaian dokumen-dokumen dalam rangka pemekaran Kecamatan

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Meningkatkan koordinasi dengan Tim Batas Desa untuk penyelesaian dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka pemekaran kecamatan
- Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kementerian Dalam Negeri.





Rapat koordinasi Tim PBD Kabupaten Tanah Laut

SASARAN 3 Meningkatnya Pemenuhan IKK SKPD

Indikator : Persentase Pemenuhan IKK SKPD

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
3	Meningkatnya Pemenuhan IKK SKPD	Persentase Pemenuhan IKK SKPD	100%	100%	100%	Bagian Pemerintahan Mengampu Misi ke- 3 : "*Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik* (***Good Governance***)"

Untuk mendukung tercapainya indikator Persentase Pemenuhan IKK SKPD/ SKPD telah dilaksanakan melalui Program Pemeritahan Dan Kesejahteraan Rakyat telah dilaksanakan kegiatan:

- Tim Penyusun LPPD Kabupaten Tanah Laut melaksanakan sosialisasi penyusunan Dokumen LPPD Kabupaten Tanah Laut sekaligus penyampaian format pengisian Data Dukung IKK LPPD Kabupaten Tanah Laut
- Melakukan pengumpulan Data Dukung IKK LPPD KabupatenTanah Laut yang terdiri dari IKK Outcome yang berjumlah 123 IKK melalui e-LPPD KAbupaten Tanah Laut. berdasarkan hasil review Tim Review dari Inspektorat Kabupaten di Aplikasi SILPPD Tahun 2021 terdapat 2 (dua) IKK yang mendapat kategori “Tidak OK”, sehingga dari 123 IKK Outcome terdapat 121 IKK yg mendapat kategori “OK”.
- Melakukan verifikasi dan validasi Data Dukung IKK LPPD 2 Tahun “OK”.
- Penyampaian permintaan review IKK LPPD di SILPPD ke Inspektorat Kabupaten Tanah Laut atau Tim Review Kabupaten / APIP .

Berikut disajikan Pelaporan IKK Outcome LPPD Tahun 2023 untuk TA 2022 Kabupaten Tanah Laut.

No. IKK	IKK Outcome	Rumus	PEMDA			APIP	
			Capaian	Keterangan	Diperbarui	Status	Keterangan
1.a.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD = 10361. Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = 12328	84,04445		2023-07-29 12:26:09	OK	
1.a.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar = 35907. Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = 39394	91,1484		2023-07-29 12:29:42	OK	
1.a.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama = 12572. Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = 20105	62,53171		2023-07-29 12:32:20	OK	
1.a.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan = 336. Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kab/kota yang bersangkutan = 386	87,04663		2023-02-28 15:26:06	OK	

1.b.1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan = 482. Jumlah Penduduk di kabupaten/kota = 358090	1,34603	Sudah dilakukan perubahan	2023-07-31 13:48:22	OK	
1.b.2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi = 3. Jumlah RS di kabupaten/kota = 4	75	Sudah dilakukan perubahan sesuai rekomendasi timda.	2023-07-31 14:08:34	OK	
1.b.3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan = 5559. Jumlah ibu hamil di kabupaten/kota = 6821	81,49831		2023-01-20 20:30:13	OK	
1.b.4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan = 5939. Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota = 6511	91,21487		2023-01-20 20:32:04	OK	
1.b.5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 5927. Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota = 6201	95,58136		2023-01-20 20:33:41	OK	
1.b.6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 26381. Jumlah balita di kabupaten/kota = 31155	84,67662		2023-01-20 20:34:15	OK	
1.b.7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 51537. Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota = 51987	99,1344		2023-01-20 20:35:02	OK	
1.b.8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 119997. Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota = 218115	55,01547		2023-01-20 20:39:20	OK	

1.b.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 21122. Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di kabupaten/kota = 37832	55,83104		2023-01-20 20:40:02	OK	
1.b.10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 15264. Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota = 22619	67,48309		2023-01-20 20:40:43	OK	
1.b.11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 4411. Jumlah penderita DM di kabupaten/kota = 4411	100	Sudah dilakukan perubahan sesuai rekomendasi timda.	2023-07-31 14:08:47	OK	
1.b.12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 437. Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota = 492	88,82114		2023-01-28 09:41:46	OK	
1.b.13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 2205. Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota = 5701	38,67743		2023-01-28 09:43:48	OK	
1.b.14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar = 3974. Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota = 7973	49,84322		2023-01-28 09:47:13	OK	

1.c.1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) = 297.061. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) = 2225.668	13,34705		2023-01-20 10:38:44	OK	
1.c.2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota 	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (m) = 88.349. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten/kota (m) = 192.414	45,9161		2023-01-20 10:39:39	OK	
1.c.3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha) di tahun eksisting = 17503. luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota = 22620	77,37843		2023-02-28 15:33:06	OK	
1.c.4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota. = 62238. Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut. = 86569	71,8941		2023-03-27 17:30:41	OK	

1.c.5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD = 63585. Jumlah rumah di Kabupaten A = 86569	73,45008		2023-03-21 16:21:10	OK	
1.c.6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Jumlah pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang sesuai peruntukannya = 137. Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku = 137	100	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Sudah diubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung	2023-02-06 19:11:20	OK	
1.c.7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap = 1342.21. Jumlah total panjang jalan kabupaten/kota = 1826.633	73,48	* Panjang jalan kewenangan provinsi yang mantap datanya 0 karena kewenangan provinsi * Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten/kota = Sesuai SK Nomor : 188.45/491-KUM/2015	2023-02-28 15:36:31	OK	
1.c.8.1	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabu/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analis = 422. Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analis di wilayah Kabupaten/Kota = 3104	13,59536		2023-03-28 09:59:55	OK	
1.c.8.2	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa terjadi kecelakaan konstruksi = 180. Jumlah total proyek yang menjadi	100		2023-02-28 15:38:31	OK	

		kewenangan pengawasannya = 180					
1.d.1	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota 	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n = 0. Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n = 1	0	Sudah dilakukan perubahan sesuai rekomendasi timda.	2023-07-31 14:09:06	OK	
1.d.2	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni = 0. Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan = 1	0	NIHIL	2023-07-27 19:47:36	OK	
1.d.3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) = 112.26. Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha = 1478.49	7,592882		2023-03-24 13:56:01	OK	
1.d.4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni = 4616. Jumlah total unit rumah kabupaten/kota = 103646	4,453621		2023-03-01 18:09:49	OK	

1.d.5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU = 1192. Jumlah unit rumah kab/kota = 103646	1,150069		2023-03-01 18:11:25	OK	
1.e.1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani = 102. Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk = 102	100	Sanksi yang diterapkan berupa surat pernyataan, Sanksi Pidana (Denda)	2023-02-27 22:05:59	OK	
1.e.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan = 1. Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi = 1	100	Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketenteraman Umum dan Ketertiban Masyarakat	2023-01-28 10:09:26	OK	
1.e.3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana = 358170. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan = 358170	100	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	2023-07-11 10:09:10	OK	
1.e.4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana = 71. Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana = 71	100	Pelatihan Penanganan Bencana yang diadakan di Rumah Sakit Borneo Citra Medika, Kelurahan Angsau	2023-07-11 10:20:13	OK	
1.e.5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana = 3216. Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana = 3216	100	Jumlah warga yang memperoleh leyanan penyelamatan dan evakuasi	2023-01-28 10:20:18	OK	

1.e.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota dalam tingk = 79. Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota = 79	100	Untuk Kab. Tanah Laut Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan belum berbentuk Dinas, masih berupa bidang damkar sehingga masih ikut di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Tanah Laut sehingga belum bisa maksimal dalam melaksanakan tugas-tugas	2023-07-11 09:51:14	OK	
1.e.7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	51,16	jumlah total waktu tanggapan seluruh kejadian 4.042 menit / 79 kejadian hasil respon 51.16 menit/kejadian	2023-02-27 22:01:54	OK	

1.f.1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemisyang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti = 3198. Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis = 17031	18,77752	yang terpenuhi kebutuhan dasarnya : Jumlah penyandang disabilitas terlantar = 287 orang. Anak Terlantar = 18 orang Lansia Terlantar = 2833 orang Gepeng = 60 orang Jumlah = 3198 orang. Populasi : Disabilitas Terlantar = 13.880 orang Anak Terl	2023-02-06 19:17:02	OK	
1.f.2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran = 8202. Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota = 8202	100	jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran 8202 jiwa populasi korban bencana alam dan sosial yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabup	2023-02-28 15:52:27	OK	

2.a.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD = 36. Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota = 36	100		2023-02-28 13:53:38	OK	Telah divalidasi
2.a.2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi = 304. Jumlah tenaga kerja keseluruhan = 176458	0,172279		2023-02-28 13:57:15	OK	Telah divalidasi
2.a.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) = 11053370000. Jumlah tenaga kerja = 184133	6002927		2023-07-31 09:46:42	OK	Telah divalidasi
2.a.4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak = 36. Jumlah Perusahaan = 330	10,90909		2023-01-28 11:06:11	OK	Telah divalidasi
2.a.5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota 	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan = 119. Jumlah pencaker yang terdaftar = 889	13,38583		2023-01-28 13:54:27	OK	Telah divalidasi

2.g.1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja operasi dan modal APBD = 8947145810. Jumlah seluruh belanja operasi dan modal APBD = 268335448124	3,334314	Indikator Kinerja Kunci Hasil PPPA	2023-07-11 12:39:11	OK	Sudah mneyajikan data sesuai dokumen dalam LKPJ, LPPD, Dokumen surat keterangan dari Kepala SKPD P2KBP3A yang berisi perhitungan Anggaran Rensposif Gender (ARG) dengan melampirkan dokumen realisasi anggaran SKPD P2KBP3A
2.g.2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi = 36. Jumlah anak korban kekerasan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun) = 105893	0,033997	Indikator Kinerja Kunci Hasil PPPA	2023-07-11 12:37:44	OK	
2.g.3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan = 13. Jumlah penduduk perempuan = 176020	7,385524	Indikator Kinerja Kunci Hasil PPPA	2023-07-29 09:36:45	OK	

2.h.1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota = 78638. Jumlah target cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota yang ditetapkan = 33947	231,6493	Angka Sangat Sementara Kebutuhan dan Ketersediaan Pangan Perkomoditi (Ton) berupa Beras	2023-01-28 14:18:10	OK	
2.i.1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) = 12522.597. seluruh luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) = 12522.597	100		2023-02-28 21:31:50	OK	
2.i.2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum = 1826.63. Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum = 1342.15	136,0973		2023-03-28 11:58:07	OK	
2.i.3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) = 12522.597. Luas tanah di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan = 12522.597	100		2023-02-28 21:33:25	OK	
2.i.4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha; = 0. Jumlah penerima tanah obyek landreform = 1	0	Sudah dilakukan perubahan sesuai rekomendasi timda.	2023-07-31 14:09:21	OK	
2.i.5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah = 12522.597.	100		2023-02-28 21:37:02	OK	

		Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan = 12522.597					
2.i.6	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani = 3. Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan = 3	100	pada 2022 terjadi peningkatan realisasi dari target tahunan	2023-03-28 11:44:24	OK	
2.j.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota		67,78	Indeks Kualitas Air (55.38) Indeks Kualitas Udara (92.10) Indeks Tutupan Hutan (44.08)	2023-07-11 12:55:26	OK	
2.j.2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Jumlah Total Vol sampah yang dapat ditangani = 27025.33. Jumlah seluruh Total vol timbunan sampah tahun berjalan kabupaten/kota = 51807.37	52,16503		2023-01-28 14:45:02	OK	
2.j.3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kab/Kota = 0. usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan = 1	0	NIHIL	2023-07-28 06:46:14	OK	
2.k.1.1	Perekaman KTP elektronik	Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP = 250150. Jumlah penduduk 17 tahun ke atas = 251664	99,3984		2023-03-16 08:01:09	OK	
2.k.1.2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA = 55888. Jumlah anak usia 0-17 tahun = 104490	53,48646		2023-01-28 15:02:05	OK	

2.k.1.3	Kepemilikan akta kelahiran	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir = 106662. Jumlah anak usia 0-18 tahun = 108203	98,57583		2023-01-28 15:02:42	OK	
2.k.1.4	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama = 2. Jumlah PD = 40	5	Dari 40 OPD ada 9 yang sudah melaksanakan PKS dan baru 2 OPD yang bisa memanfaatkan data kependudukan, sedangkan 7 OPD masih menunggu verifikasi Kemendagri Melalui Ditjen Administrasi Kependudukan.	2023-07-11 09:58:59	OK	
2.l.1	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun = 0. Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n) = 1	0		2023-07-27 19:53:30	TDI	sudah tidak ada desa dengan status tertinggal
2.l.2	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun = 8. Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n) = 23	34,78261		2023-02-21 19:33:58	OK	
2.m.1	TFR (Angka Kelahiran Total)		2,12	TFR	2023-02-06 19:41:01	OK	Sudah menyajikan data TFR (angka kelahiran total) dalam tabel Fertilitas pendudk

							kabupaten Tanah Laut
2.m.2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modern = 44861. Jumlah Pasangan Usia Subur = 59161	75,82867	Indikator Kinerja Kunci Hasil Pengendalian Penduduk dan KB	2023-07-11 12:41:17	OK	
2.m.3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani = 6930. Jumlah Pasangan Usia Subur = 59161	11,7138	Indikator Kinerja Kunci Hasil Pengendalian Penduduk dan KB	2023-02-06 19:42:18	OK	
2.n.1	Rasio konektivitas kabupaten/kota		0,98		2023-01-28 15:15:25	OK	
2.n.2	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota		0,17		2023-01-28 15:15:58	OK	
2.o.1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo = 31. Jumlah PD = 40	77,5		2023-01-28 15:19:23	OK	
2.o.2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi 	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi = 8. Jumlah Layanan Publik = 8	100		2023-01-28 15:19:55	OK	

2.o.3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota 	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota = 4977. Jumlah penduduk = 358090	1,389874		2023-07-29 08:54:39	OK	
2.p.1	Meningkatnya Koperasi yangberkualitas 	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset = 23. Jumlah seluruh koperasi aktif = 163	14,11043		2023-03-28 18:30:08	OK	
2.p.2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha 	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha = 24. Jumlah usaha mikro keseluruhan = 34868	0,068831	Data UKM yang bermitra dengan Sarinah Bandara Syamsudinoor Banjarmasin dan Indomaret tahun 2021 dan 2022	2023-03-28 18:28:26	OK	
2.q	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota 	(Jumlah investasi tahun n-jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten/kota = 649203100000. Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota = 773620960000	83,91747	Data yang disajikan Realisasi Investasi sd. TW III Tahun 2022	2023-01-28 15:31:58	OK	

2.r.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kab/kota = 53. Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota = 84088	0,063029		2023-02-27 15:47:32	OK	
2.r.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota = 32. jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota = 84088	0,038055		2023-02-27 15:47:50	OK	
2.r.3	Peningkatan prestasi olahraga		30		2023-02-27 15:49:24	OK	
2.s.1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah = 40. jumlah PD = 40	100		2023-01-28 15:40:20	OK	
2.s.2	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah = 40. jumlah PD = 40	100		2023-01-28 15:40:41	OK	

2.t	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi = 436. Jumlah area penilaian = 645	67,5969		2023-02-21 14:44:53	OK	
2.u	Terlestarikannya Cagar Budaya 	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan = 16. Jumlah cagar budaya yang terdata = 16	100		2023-03-01 18:13:26	OK	
2.v.1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat		72,54		2023-01-28 15:45:32	OK	
2.v.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		57,73		2023-01-28 15:45:54	OK	
2.w.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009) 		100	Realiasasi IKK bidang Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022	2023-07-11 12:51:54	OK	
2.w.2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat		100		2023-07-11 12:52:25	OK	

3.a	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP) 	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota = 66466. Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang ditetapkan = 65031	102,2066		2023-07-29 08:51:42	OK	data update terakhir one data KKP adalah tahun 2021
3.b.1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan 	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) = 6. Jumlah wisatawan tahun n-1 = 2	300	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara di Tahun 2022 sebanyak 8 Orang berasal dari 4 Negara yaitu Negara Amerika, Belanda, Australia, China	2023-02-21 14:52:52	OK	
3.b.2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota 	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) = 386207. Jumlah wisatawan tahun n-1 = 193671	199,414	Data jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 melebihi dari target yang ditetapkan oleh Dinas Pariwisata dimana target sebanyak 295.000 orang dan realisasi dilapangan mencapai 579.878 orang (196,57%).	2023-03-01 18:16:33	OK	
3.b.3	Tingkat hunian akomodasi 	Jumlah kamar yang terjual = 6815. Jumlah kamar yang tersedia = 77015	8,848926	Jumlah kamar yang tersedia : 211 x 365 hari = 77.015	2023-03-24 22:47:37	OK	

3.b.4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku 	Total Nilai kontribusi sektor pariwisata pada PDRB = 957349000. Total PDRB Berlaku = 19019180000000	0,005034	PDRB berlaku x 1 Milyar	2023-03-24 23:15:20	OK	
3.b.5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Total realiasi PAD dari sektor pariwisata = 957349000. Total realisasi PAD = 186771932319.27	0,512577	Realisasi PAD Tahun 2022 >100%	2023-07-29 09:08:46	OK	
3.c.1	Produktivitas pertanian per hektar per tahunProduktivitas pertanian per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun = 268205. luas panen = 52975	506,286		2023-03-28 11:55:51	OK	
3.c.2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menularPersentase kasus zoonosis kab/ kota 	Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) = -618. Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) = 4010	-15,41147		2023-01-29 05:49:54	OK	
3.d			0	Kewenangan urusan kehutanan berada di Provinsi	2023-03-30 09:53:03	OK	Bukan Kewenangan Kabupaten
3.e	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota 	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin = 0. Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi = 1	0	Kewenangan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral berada di Provinsi	2023-07-27 19:54:41	TDI	Bukan kewenangan Kabupaten

3.f.1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) 	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan = 1498. Jumlah pelaku usaha di wilayah Kab/Kota = 37412	4,004063	Data didapat dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP sesuai dengan ketentuan sekarang diterbitkan menggunakan aplikasi Sistem Online Single Submission Risk - Based Approach (OSS-RBA) dan data tersebut Diskopdag tidak dapat mengaksesnya.	2023-02-06 19:46:55	OK	
3.f.2	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi = 16036.1. RDKK = 16298.35	98,39094	Tidak mencapai 100 % karena 3 % sisa alokasi pupuk yang belum terdistribusikan.	2023-01-29 05:52:12	OK	
3.f.3	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan = 1076. jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota = 1597	67,37633	Realisasi UTTP bertanda tera sah yang berlaku pada tahun 2022 sebanyak 1076 unit dari 1000 unit yang ditargetkan atau sebesar 107,6%. Namun jika dibandingkan dengan data potensi UTTP yang ada yang ada di Kabupaten Tanah Laut hanya sebesar 67,38	2023-01-29 05:53:41	OK	

3.g.1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	(Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n– Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1) = 1261. Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1 = 3458	36,46617	((4719-3458)/3458)*100%=36%	2023-03-28 10:24:47	OK	
3.g.2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP		100		2023-01-29 06:10:26	OK	Telah divalidasi
3.g.3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = 16. Jumlah izin yang dikeluarkan = 16	100		2023-01-29 06:11:06	OK	Telah divalidasi
3.g.4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait 	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = 16. Jumlah izin yang dikeluarkan = 16	100		2023-01-29 06:11:38	OK	Telah divalidasi

3.g.5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = 16. Jumlah izin yang dikeluarkan = 16	100		2023-01-29 06:11:59	OK	Telah divalidasi
3.g.6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini		100		2023-01-29 06:12:47	OK	Telah divalidasi
3.h			0	Kewenangan urusan transmigrasi berada di Provinsi	2023-03-30 09:53:31	OK	Bukan kewenangan Kabupaten
4.a.1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan = 304218659964. Jumlah APBD = 1821565866670.2	16,70094		2023-03-27 18:07:59	OK	Trima Kasih
4.a.2	Rasio PAD	Jumlah PAD = 178621868704.85. Jumlah Pendapatan pada APBD = 2120551129071.9	8,42337		2023-02-27 21:40:22	OK	

4.a.3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		3,338		2023-01-29 06:20:23	TIDAK OK	tidak sesuai definisi operational
4.a.4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		3	Hasil laporan atas penjaminan kualitas penilaian Kapabilitas APIP di Inspektorat Tanah Laut Tahun 2022 belum tersedia.	2023-01-29 06:21:32	OK	
4.a.5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures) 	Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures = 1218066057708. jumlah belanja APBD = 1821565866670	66,86917		2023-02-27 21:42:34	OK	
4.a.6	Opini Laporan Keuangan		9		2023-02-27 21:43:00	OK	trima kasih data dukung sudah diperbaharui
4.b.1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama 	jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n = 0. jumlah kontrak keseluruhan tahun n = 1601	0		2023-02-01 08:36:51	OK	

4.b.2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif = 1601. Jumlah seluruh pengadaan = 4446	36,0099		2023-02-01 08:37:58	OK	
4.b.3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan 	Jumlah nilai belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan = 88364113696818. total belanja operasi dan modal = 1.5361267530302E+14	57,52397		2023-02-01 08:39:06	OK	
4.b.4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n) - Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) = 1122290265344. Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) = 0	0	Data diambil dari aplikasi SISWAS P3DN yang mana untuk Pemda Kab.Tanah Laut di kelola oleh inspektorat. Jumlah nilai PBJ yang menggunakan PDN dan terhimpun pad aplikasi SISWAS P3DN tersedia pada bulan Maret tahun 2022. Untuk data tahun 2021 belum ada.	2023-03-15 09:35:35	OK	

4.c.1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) 	Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas = 1173. Jumlah seluruh pegawai = 1704	68,83803		2023-07-11 12:49:14	OK	
4.c.2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) 	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) = 349. seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) = 1704	20,48122		2023-01-29 06:28:22	OK	
4.c.3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) 	Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi = 179. seluruh jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) = 349	51,2894		2023-01-29 06:28:57	OK	
4.d.1	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Realisasi Belanja = 1821565866670. Total Belanja APBD = 2122153778445	14,16429		2023-07-24 18:03:58	OK	

4.d.2	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD 	Total PAD dalam realisasi = 178621868704. Total PAD dalam APBD = 178390127793	0,129907		2023-07-24 18:07:05	OK	
4.d.3	Manajemen Aset 		100	daftar asset tetap YA manual menyusun adftar asset TIDAK invebtarisasi asset tahunan TIDAK nilai asset tercantum dalam laporan anggaran YA	2023-01-29 06:36:47	OK	
4.d.4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya 	Nilai realisasi SiLPA = 224080549201. total belanja anggaran tahun sebelumnya = 1881305839322.4	11,9109		2023-07-29 09:46:07	OK	
4.e.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units) 	Realisasi Belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda = 2787251000. Anggaran belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda = 2881153600	96,7408		2023-02-21 15:08:07	OK	

4.e.2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information) 	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda = 99. total jumlah dokumen yang telah dirinci = 99	100		2023-01-29 06:39:17	TIDAK OK	

Dari Tabel di atas dapat dilihat IKK LPPD Kabupaten Tanah Laut masing-masing urusan dari total IKK Outcome yang berjumlah 123 IKK sudah terpenuhi beserta data dukung IKK LPPD dengan penilaian dari APIP (Tim Review dari Inspektorat Kabupaten Tanah Laut) dengan Status “OK” berjumlah 191 IKK dan Status “Tidak OK” berjumlah 2 IKK dan status TDI 2 Sehingga persentase pemenuhan IKK adalah sebesar 100%. Sedangkan untuk skor Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) LPPD Tahun 2023 untuk Tahun Anggaran 2023 LPPD Kabupaten Tanah Laut masih dalam tahap evaluasi dari KEMENDAGRI.

Hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran ini adalah :

- Capaian IKK masing-masing urusan masih rendah dan bahkan nihil karena realisasi kegiatan untuk memenuhi capaian IKK dari SKPD belum memenuhi target atau bahkan kegiatannya belum/tidak dilaksanakan
- Kurangnya komitmen SKPD dalam menyajikan data yang *valid*
- Keterlambatan SKPD dalam menginput capaian dan data dukung IKK LPPD
- Kurangnya komitmen SKPD dalam merencanakan penganggaran prioritas kegiatan yang mendukung pemenuhan target capaian IKK LPPD

Solusi/ upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/ hambatan tersebut adalah:

- Peningkatan kompetensi aparatur yaitu kemampuan analisis para Tim Penyusun LPPD
- Peningkatan kualitas pengumpulan data IKK LPPD dan evaluasi internal seluruh SKPD
- Mengoptimalkan e-LPPD untuk memudahkan dan mempercepat pengisian capaian dan data dukung IKK LPPD
- Adanya *reward* dan *punishment* terhadap SKPD terkait penyusunan dan pemenuhan capaian IKK LPPD
- Menyampaikan surat kepada APIP untuk melakukan reviu terhadap dokumen LPPD SKPD

Rencana Aksi :

- Mengadakan sosialisasi penyusunan LPPD dengan narasumber dari Tim EPPD Provinsi dan Pusat
- Mengajukan kepada pimpinan usulan *reward* dan *punishment* terhadap SKPD terkait penyusunan dan pemenuhan capaian IKK LPPD
- Adanya penilaian terhadap LPPD SKPD layaknya seperti SPIP, Reformasi Birokrasi, Zona Integritas dan SAKIP





Pelaksanaan Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Penyampaian IKK LPPD secara Desk SKPD

SASARAN 4 Meningkatnya Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak ke tiga

Indikator : Persentase Dokumen Kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil ditindaklanjuti

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
4	Meningkatnya Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak ke tiga	Persentase Dokumen Kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar	100%	208%	208%	Bagian Pemerintahan Mengampu Misi ke- 3 : "*Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik* (***Good Governance***)"

		Negeri yang berhasil ditindaklanjuti				

Persentase Dokumen Kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil ditindaklanjuti pada Tahun 2023 adalah 208%. Dokumen Kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil ditindaklanjuti di Tahun 2023 sebanyak 52 Dokumen dari Target 25 Dokumen.

DAFTAR KERJASAMA DAERAH TAHUN 2023

I. NOTA KESEPAKATAN

NO.	PERIHAL	NOMOR DAN TANGAL	MASA BERLAKU
1	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut dan Kementerian tentang Pelayanan Terintegrasi Berbasis Teknologi Informasi	100.2.2/01/NK-PEMTALA/2023 69/KK.17.II-6/PW.02/03/2023 27 Februari 2023	3 (tiga) tahun
2	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan KSOP Kelas I Banjarmasin tentang Gerai Penerbitan Gross Akta Pendaftaran Kapal Nelayan dengan ukuran samoai 30 GT (Tiga Puluh Gross Tonnage)	100.2.2/03/NK-PEMTALA/2023 AL.519/01/01/KSOP.BJM/2023 02 Oktober 2023	1 (satu) tahun
3	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan UPP Kelas III Kintap tentang Gerai Penerbitan Pas Besar Permanen untuk Kapal Penangkap Ikan dengan ukuran samoai 30 GT (Tiga Puluh Gross Tonnage)	100.2.2/04/NK-PEMTALA/2023 AL.519/08/03/2023 02 Oktober 2023	1 (satu) tahun
4	Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Tenga Kerja Bukan Penerima Upah Kategori Rentan dan Masyarakat Miskin Ekstrem di Kabupaten Tanah Laut.	100.2.2/06/NK-PEMTALA/2023 MOU/01/122023 13 Desember 2023	5(lima) tahun

5	Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Banjarmasin tentang Optimalisasi Program Jaminan Sosil Kesehatan Nasional	100.2.2/07/NK-PEMTALA/2023 853/KTR/VIII-04/1223 27 Desember 2023	5(lima)tahun
	TOTAL		**5 Dokumen**

II. KESEPAKATAN BERSAMA

NO.	PERIHAL	NOMOR DAN TANGAL	MASA BERLAKU
1	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan tentang Pengembangan Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik di Kalimantan Selatan	03/KSB-PEMOTDA/ 2022 100.2.2/02/KSB-PEMTALA/2023 07 Februari 2023	5 (lima) tahun
2	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan Kerjasama dalam bidang Penelitian dan Kajian Pembangunan Berkelanjutan	100.2.2/03/KSB-PEMTALA/ 2023 079/UN8/KS/2023 27 Februari 2023	3 (tiga) tahun
3	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten dan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Tanah Laut.	100.2.2/04/KSB-PEMTALA/2023 44a/C/YPKHK-LKBHuWK/V/2023 4 Mei 2023	2 (dua) tahun
4	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten dan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Tanah Laut tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Tanah Laut.	100.2.2/05/KSB-PEMTALA/2023 03/PBH-Pelaihari/2023 4 Mei 2023	2 (dua) tahun
5	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten dan PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanah Laut tentang Pelaksana Realisasi Investasi Daerah berupa Penempatan Penyaluran Dana Investasi Program Gapura Karomah	100.2.2/06/KSB-PEMTALA/2023 134.1/PT.BPR-TALA/VI/2023 2 Juni 2023	5 (lima) tahun

6	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten dan Universitas Gadjah Mada tentang Pemberian Bantuan Pendidikan, Penelitian serta Pengabdian kepada Masyarakat	100.2.2/07/KSB-PEMTALA/2023 10726/UN.1/Dit.KRG/HK.08.00/2023 15 September 2023	2(dua) tahun
7	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan PT. Jasaraharja Putera tentang Asuransi Pelayanan Umum di Kabupaten Tanah Laut	100.2.2/08/KSB-PEMTALA/2023 P/002/KS/XI/2023 01 November 2023	5 (lima) tahun
8	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan STAN tentang Sinergi dalam bidang Kajian Kebijakan, Pendampingan, Pelatihan dan Pengembangan Perpajakan di Kabupaten Tanah Laut	100.2.2/09/KSB-PEMTALA/2023 PRJ-265/PKN/2023 14 November 2023	5 (lima) tahun
9	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten dan STAI AL FALAH Banjarbaru tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Keagamaan dan Pengabdian Masyarakat di Kabupaten Tanah Laut	100.2.2/10/KSB-PEMTALA/2023 274/STA/C.5/XI/2023 20 November 2023	5 (lima) tahun
TOTAL			**9 Dokumen**

III. PERJANJIAN KERJASAMA

NO.	PERIHAL	NOMOR DAN TANGAL	MASA BERLAKU
1	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan Bank KalSel tentang Penempatan Dana Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada Bank KalSel Cabang Pelaihari	100.2.2/01/PKS-PEMTALA/2023 01/PKS/UMP-PLH/2023 02 Januari 2023	Sejak Penandatanganan s.d dicairkannya seluruh deposito
2	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tentang Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) di Lingkungan Pemkab. Tanah Laut Tahun Anggaran 2023	100.2.2/02/PKS-PEMTALA/2023 20/PKS-PEMOTDA/2023 06 Januari 2023	Sejak Penandatanganan s.d 31 Desember 2023

3	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tentang Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) di Lingkungan Pemkab. Tanah Laut Tahun Anggaran 2023	100.2.2/03/PKS-PEMTALA/2023 21/PKS-PEMOTDA/2023 06 Januari 2023	Sejak Penandatanganan s.d 31 Desember 2023
4	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tentang Penyelenggaraan Orientasi Pegawai Pemerintah degan Perjanjian Kinerja di Lingkungan Pemkab. Tanah Laut Tahun Anggaran 2023	100.2.2/04/PKS-PEMTALA/2023 22/PKS-PEMOTDA/2023 06 Januari 2023	Sejak Penandatanganan s.d 31 Desember 2023
5	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan Media Online Kreatif tentang Perpanjangan Tahunan Aplikasi Radio Fantastic.	100.2.2/05/PKS-PEMTALA/2023 01.23/MOK/I/2023 10 Januari 2023	1 (satu) tahun
6	Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan Universitas Lambung Mangkurat tentang Penysunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2045 dan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2045	100.2.2/06/PKS-PEMTALA/2023 139/UN8/KS/2023 27 Februari 2023	2 (dua) tahun
7	Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan PT. BPD KalSel (Perseroda) tentang Kerjasama di Bidang Pelaksanaan Aplikasi E-Retribusi Pemakaian Berupa Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi di DPUPRP Kabupaten Tanah Laut	100.2.2/07/PKS-PEMTALA/2023 06/PKS/UMP-PLH/KC/2023 18 April 2023	2(dua) tahun

8	Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan PT. BPD KalSel (Perseroda) tentang Penerimaan Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar Pemerintah Daerah secara Elektronik di Kabupaten Tanah Laut	100.2.2/08/PKS-PEMTALA/2023 07/PKS/UMP-PLH/KC/2023 18 April 2023	3 (tiga) tahun
9	Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin Fakultas Psikologi tentang Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi (Assesment) bagi Peserta Seleksi Terbuka Pengisian JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	100.2.2/09/PKS-PEMTALA/2023 219/UM-BJM/FPSi/S.1/V/2023 04 Mei 2023	Sejak Penandatanganan s.d terbitnya laporan hasil assesment
10	Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tentang Penyelenggaraan Pelatihan dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut	100.2.2/10/PKS-PEMTALA/2023 04 Mei 2023	-
11	Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanah Laut tentang Penyaluran Dana yang ditempatkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanah Laut dan Pengembalian Dana Investasi Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berupa Pinjaman Modal Usaha (GAPURA KAROMAH)	100.2.2/11/PKS-PEMTALA/2023 137.1/PT.BPR-TALA/VI/2023 05 Juni 2023	5 (lima) tahun
12	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Badan Kesbangpol) dan LPPM Universitas Muhammadiyah Banjarmasin tentang Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, Publikasi dan Pengabdian kepada Masyarakat di Kabupaten Tanah Laut	100.2.2/12/PKS-PEMTALA/2023 235/UMB-LP2M/T.1/VII/2023 06 Juli 2023	2 (dua) tahun

13	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Dinas Dukcapil) dan LPPM Universitas Muhammadiyah Banjarmasin tentang Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, Publikasi dan Pengabdian kepada Masyarakat di Kabupaten Tanah Laut	100.2.2/13/PKS-PEMTALA/2023 235/UMB-LP2M/T.1/VII/2023 06 Juli 2023	2(dua) tahun
14	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Dinas Sosial) dan LPPM Universitas Muhammadiyah Banjarmasin tentang Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, Publikasi dan Pengabdian kepada Masyarakat di Kabupaten Tanah Laut	100.2.2/14/PKS-PEMTALA/2023 235/UMB-LP2M/T.1/VII/2023 06 Juli 2023	2(dua) tahun
15	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (DP2KBP3A) dan LPPM Universitas Muhammadiyah Banjarmasin tentang Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, Publikasi dan Pengabdian kepada Masyarakat di Kabupaten Tanah Laut	100.2.2/15/PKS-PEMTALA/2023 235/UMB-LP2M/T.1/VII/2023 06 Juli 2023	2(dua)tahun
16	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (DPMD) dan LPPM Universitas Muhammadiyah Banjarmasin tentang Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, Publikasi dan Pengabdian kepada Masyarakat di Kabupaten Tanah Laut	100.2.2/16/PKS-PEMTALA/2023 235/UMB-LP2M/T.1/VII/2023 06 Juli 2023	2(dua)tahun

17	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Bappeda) dan LPPM Universitas Muhammadiyah Banjarmasin tentang Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, Publikasi dan Pengabdian kepada Masyarakat di Kabupaten Tanah Laut	100.2.2/17/PKS-PEMTALA/2023 235/UMB-LP2M/T.1/VII/2023 06 Juli 2023	2(dua)tahun
18	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan Balai Sertifikasi Elektronik tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik di Pemerintah Kabupten Tanah Laut	100.2.2/19/PKS-PEMTALA/2023 25 September 2023	4(empat)tahun
19	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan Politeknik Negeri Tanah Laut tentang Penyusunan kajian Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah Kabupaten Tanah Laut	100.2.2/20/PKS-PEMTALA/2023 1001/PL40/KS/2023 16 Oktober 2023	2(dua)tahun
20	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan UNISKA Muhammad Arsyad Al Banjari tentang Penyusunan Kajian Perekonomian Masyarakat	100.2.2/21/PKS-PEMTALA/2023 454/UNISKA-LP2M/X/2023 16 Oktober 2023	5 (lima) tahun

21	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada tentang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah	100.2.2/22/PKS-PEMTALA/2023 10182/UN1/FEB/KIAA/DL/2023 16 Oktober 2023	2(dua)tahun
22	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan LPPM Universitas Lambung Mangkurat tentang Kajian Potensi Kawasan Hutan	100.2.2/23/PKS-PEMTALA/2023 610/UN8/KS/2023 16 Oktober 2023	2 (dua) tahun
23	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan LPPM STIE Indonesia Banjarmasin tentang Penyusunan Kajian Evaluasi Program Gapura Karomah dan Penyusunan Kajian Dokumen/ Analisa dan Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah kepada BUMD bid. Keuangan PT. BPD KalSel	100.2.2/24/PKS-PEMTALA/2023 028/STIEI/PKS/X/2023 20 Oktober 2023	40 (hari) kalender
24	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (BKPSDM) dan LPPM Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin tentang Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Keuangan Daerah	100.2.2/25/PKS-PEMTALA/2023 670/UN8/KS/2023 26 Oktober 2023	3 (hari) kalender

25	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan PT. Jasaraharja Putera tentang Asuransi Pelayanan Umum terhadap Pengunjung Objek Wisata di Kabupaten Tanah Laut	100.2.2/26/PKS-PEMTALA/2023 P/001/KS/XI/2023 01 November 2023	5 (lima) tahun
26	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan PT. Jasaraharja Putera tentang Asuransi Pelayanan Umum terhadap Pengunjung Kolam Renang Tirta Kenanga Kabupaten Tanah Laut	100.2.2/27/PKS-PEMTALA/2023 P/003/KS/XI/2023 03 November 2023	5 (lima) tahun
27	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan Pusat Kajian Penataan Ruang (PKPR) Universitas Muhammadiyah Banjarmasin tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Tanah Laut	100.2.2/28/PKS-PEMTALA/2023 042/PKPR-UMB/K.2/XI/2023 03 November 2023	Sejak Penandatanganan s.d 20 Desember 2023
28	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan Politeknik Keuangan Negara STAN tentang Penyelenggaraan Pelatihan Diklat Peniai Objek PBB P2 di Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023	100.2.2/29/PKS-PEMTALA/2023 PRJ-266/PKN/2023 14 November 2023	Sejak tanggal ditandatangani s.d berakhirnya Pelatihan Diklat Penilai Objek PBB P2.

29	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan PT.Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (PERSERODA) tentang Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah Secara Online Kabupaten Tanah Laut	100.2.2/30/PKS-PEMTALA/2023 32/PKS/UMP-PLH/2023 14 November 2023	3 (tiga) tahun
30	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten dan STAI AL FALAH Banjarbaru tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Keagamaan dan Pengabdian Masyarakat di Kabupaten Tanah Laut	100.2.2/31/PKS-PEMTALA/2023 275/STA/C.5/XI/2023 20 November 2023	3 (tiga) tahun
31	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten dan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut tentang Pemanfaatan Zona Nilai Tanah untuk PBB, Perkotaan, Perdesaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah serta Pembaruan dan Pembuatan Peta Zona Tanah	100.2.2/32/PKS-PEMTALA/2023 2090/100-63.01/XI/2023 20 November 2023	2 (dua) tahun
32	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut Rehabilitasi Pecandu Narkoba dan Pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Pasca Rawat Inap (Pasien Transit) bagi Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu Melalui Dana Sub Kegiatan Pengolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	100.2.2/33/PKS-PEMTALA/2023 440/PKS/036/RSJ/2023 20 November 2023	1 (satu) tahun

33	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga Kalimantan Selatan tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Tanah Laut	100.2.2/34/PKS-PEMTALA/2023 155/C/YPKHK-LKBHuWK/XI/2023 20 November 2023	2 (dua) tahun
34	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Tanah Laut tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Tanah Laut	100.2.2/35/PKS-PEMTALA/2023 06/PBH-PELAIHARI/ 2023 20 November 2023	2 (dua) tahun
35	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan LPPM STIE Indonesia Banjarmasin tentang Penyusunan Dokumen Kajian/Analisa dan Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Kepada PT. Air Minum Berkah Banua (PERSERODA)	100.2.2/36/PKS-PEMTALA/2023 030 /STIEI/PKS/XI/2023 20 November 2023	30 (tiga puluh) hari kalender
36	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada tentang Pemberian Bantuan Pendidikan, Penelitian serta Pengabdian kepada masyarakat	100.2.2/37/PKS-PEMTALA/2023 5401/UN1/FKG/KS/DN/2023 20 November 2023	4 (empat) tahun

37	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan LPPM Universitas Lambung Mangkurat tentang Pelaksanaan Penilaian Kompetensi (Asesmen) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023	100.2.2/38/PKS-PEMTALA/2023 816/UN8/KS/2023 11 Desember 2023	3 (tiga) bulan
TOTAL			**37 Dokumen**

TOTAL KESELURUHAN : 52 Dokumen

Kegiatan Kerja Sama Daerah Kabupaten Tanah Lut telah terdokumentasikan sebanyak 52 Dokumen terdiri dari:

1.5 (lima) Dokumen Nota Kesepakatan

2.9 (Sembilan) Dokumen Kesepakatan Bersama dan

3.37 (tiga puluh Tujuh) Perjanjian Kerja Sama

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain:

- Kurangnya koordinasi SKPD terkait mengenai rencana awal penyusunan Dokumen Kerjasama Daerah
- Penyusunan Dokumen Kerjasama yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Melaksanakan koordinasi dengan SKPD yang akan melakukan penyusunan Dokumen Kerjasama Daerah mengenai teknis penyusunan Dokumen Kerjasama
- Menyampaikan Standar Operasional Prosedur terkait penyusunan Dokumen Kerjasama Daerah
- Penetapan Peraturan Daerah terkait Kerjasama Daerah

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah

- Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait rencana kegiatan-kegiatan penyusunan Dokumen Kerjasama Daerah yang akan direalisasikan di tahun anggaran berjalan maupun anggaran tahun berikutnya.
- Menyampaikan SOP dan peraturan-peraturan terkait penyusunan Dokumen Kerjasama Daerah agar SKPD dapat lebih awal menyampaikan *draft* dokumen Kerja Sama Daerah sehingga Bagian Pemerintahan dapat memfasilitasi kegiatan secara maksimal.



Rapat Koordinasi Fasilitasi Penyusunan dan Penandatanganan Dokumen Kerja Sama Daerah

❖ **Analisa Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia**

1) Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dengan **indikator Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang berhasil di tindaklanjuti** di tunjang dengan Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan dengan pagu Rp. 671.925147,00 dan terealisasi sebesar Rp 638.602.000,00 atau 95,04% dan dilaksanakan oleh 4 (empat) orang SDM.

   Untuk capaian kinerja terhadap IKU tersebut diatas adalah **83.73%** sedangkan realisasi anggaranya sebesar **95.04%** dikarenakan kegiatan Rapat Koordinasi Pimpinan SKPD *(Coffee Morning)* tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan target, hal ini dilihat dari besarnya realisasi anggaran dan capaian kinerja yang dilaksanakan, lebih jelas dalam table Berikut ini:

CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI
83.73%	95.04%	-

2) Untuk mencapai sasaran Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan Umum dengan indikator Persentase kegiatan peringatan hari besar Nasional/Kabupaten yang diselenggarakan di tunjang dengan Program Pemeritahan Dan Kesejahteraan Rakyat Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan dengan pagu Rp 671.925.147,00 dan terealisasi sebesar Rp 638.602.000,00 atau 95,04% dan dilaksanakan oleh 4 (empat) orang SDM.

   Untuk capaian kinerja terhadap IKU tersebut diatas kegiatan yang dilaksanakan berupa Pelaksanaan peringatan hari-hari besar Nasional dan Kabupaten terselenggara dengan baik dan lancar hal ini dikarenakan perencanaan yang sudah terjadwal dan terkomunikasi dengan baik sehingga dalam artian IKU ini telah berhasil dilaksanakan dengan efektif dan efisien sehingga capaian kinerjanya lebih besar daripada realisasi anggarannya.untuk lebih jelasnya terlihat dalam tabel berikut:

CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI
100%	95,04%	4,96%

3) Untuk mencapai Sasaran Meningkatnya Persentase Penyelesaian Permasalahan pada Kegiatan Pemekaran Kecamatan pada tahun 2023 terdapat di Kegiatan Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan dengan Sasaran Strategis / Kinerja Utama yaitu Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan dengan indikator Persentase penyelesaian permasalahan pada kegiatan pemekaran kecamatan di tunjang dengan Program Pemeritahan Dan Kesejahteraan Rakyat Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan dengan pagu Rp 270.501.270,00 terealisasi Rp217.838.271,00 dengan realisasi keuangan sebesar 80,53% dan dilaksanakan oleh 3 (tiga) orang SDM.

Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan program kerja yang sudah di rencanakan melalui rapat koordiasi dengan lingkup kecamatan dan kelurahan serta desa juga dengan pihak pihak yang ada terjadi permasalahan terkait kewilayahan atau batas-batas wilayah yang bersengketa. Selain itu juga ada usulan terkait dengan pemekaran kecamatan yang dalam hal ini sudah mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Nomor 100.2.4/5336/BAK 5 Oktober Tahun 2023 serta Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan selatan Nomor 100.2.4/02006/PEM.OTDA Pembentukan Kecamatan Taruna Makmur Kabupaten Tanah Laut. Dalam capaian IKU telah berhasil dilaksanakan dengan efektif dan efesien hal ini dapat dilihat dari capaian kinerjanya realisasi anggaran dapat terserap dengan optimal, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut :

CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI
100%	80,53%	19,47%

4) Meningkatnya Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan indikator Persentase kegiatan Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Pemenuhan IKK SKPD dengan indikator Persentase Pemenuhan IKK ditunjang dengan Program Pemeritahan Dan Kesejahteraan Rakyat Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daearah dengan pagu Rp 301.768149,00 terealisasi Rp 271.381.868,00 dengan realisasi keuangan sebesar 89,93% dan dilaksanakan oleh 4 (Empat) orang SDM.

Untuk kegiatan penyelenggaraan Otonomi daerah dilaksanakan berdasarkan capaian-capaian melalui kegiatan asistensi LPPD,Workshop LPPD, LKPj, evaluasi SPM, Rapat-rapat Koordiasi Lingkup sekretariat dan Perangkat daerah dalam rangka penyusunan laporan daerah daalam penyelenggaraan Pemerintah daerah kabupaten Tanah Laut .

Untuk capaian Kinerja terhadap IKU telah berhasil dilaksanakan dengan efektif dan efisien hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja yang tergambar jelas dalam tabel berikut ini:

CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI

100%	89.93%	10.07%

5) Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak ke tiga dengan indikator persentase Dokumen Kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil ditindaklanjuti di tunjang dengan Program Pemeritahan Dan Kesejahteraan Rakyat Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri dengan pagu Rp. 259.475.265,00 terealisasi Rp 238.789.422,00 dengan realisasi keuangan sebesar 92,03% dan dilaksanakan oleh 4 (empat) orang SDM.

   Untuk kegiatan Kerjasama dengan presentase kualitas pelaksanaan telah sesuai dengan program dan telah di tindaklanjuti melebihi dari target yang di rencanakan hal ini merupakan capaian kinerja yang efektif dan efisien dalam artian IKU yang dilaksanakan berdampak pada capaian kinerja yang lebih besar daripada realisasi Anggaran nya, lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI
208%	92,03%	115.97%

Dalam mencapai sasaran, Bagian Pemerintahan memiliki 1 (satu) Program dengan 4 (empat) Kegiatan dengan rincian anggaran dan realisasi sebagai berikut :

Tabel Indikator Kinerja dan Realisasi Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2023 (Rp)	%	SDM	KET
1	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang berhasil di tindaklanjuti	**PROGRAM PEMERITAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan**					
2	Persentase kegiatan peringatan hari besar Nasional/Kabupaten yang diselenggarakan		Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	671.925.147	638.602.000	95,04%	-Kabag.Pemerintahan - Analis Kebijakan Muda --Pengadministrasi pemerintahan Umum -PTT 1(Satu orang)	
3	Persentase Penyelesaian Permasalahan pada Kegiatan Pemekaran Kecamatan		**Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan**					
			Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	270.501.270	217.838.271	80.53%	-Kebag Pemerintahan -Sub Koordiantor Administrasi Kewilayahan -PTT 1 (satu orang)	
4	Persentase Pemenuhan IKK SKPD		**Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan**					
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	301.768.194	271.381.868	89.93%	-Kabag Pemerintahan - Sub Koordinators Kerjasama dan Otonomi Daerah - Analis Pemerintahan Umum dan Otonomi daerah -PTT 1 (satu orang)	
5	Persentase Dokumen Kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil ditindaklanjuti		**Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah**					
			Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	259.475.265	238.789.422	92.03%	-Kabag Pemerintahan -Sub Koordinator Kerjasama dan Otonomi Daerah -Pengelola Kerjasama dan Investasi -PTT 1 (satu orang)	

Analisa Capaian Sasaran Strategis

Kepala Bagian Organisasi

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase SKPD dengan nilai komponen pelaporan kinerja minimal 10	100%	80%	80%	Bagian Organisasi Mengampu Misi ke- 3 *"Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (**Good Governance**)"*
2	Meningkatnya Nilai Area Perubahan RB SKPD	Persentase SKPD dengan Nilai Komponen Area Perubahan RB minimal 60	50%	0	0	
3	Meningkatnya Penataan Ketatalaksanaan dan pelayanan publik	Persentase unit pelayanan dengan nilai SKM minimal 80	100%	100%	100%	
		Persentase SKPD yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	100%	100%	
4	Meningkatnya efektifitas kelembagaan analisa dan evaluasi jabatan	Persentase Perangkat daerah dengan kelembagaan yang efektif	100%	100%	100%	

Berikut disajikan Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis Bagian Organisasi terhadap capaian tahun sebelumnya

Tabel Capaian Indikator Sasaran Strategis
Bagian Organisasi terhadap capaian tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Tahun 2023		
			2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase SKPD dengan nilai komponen pelaporan kinerja minimal 10	%	65%	97,5%	100%	80%	80%
2	Persentase SKPD dengan Nilai Komponen Area Perubahan RB minimal 60	%	70%	100%	50%	0	0
3	Persentase unit pelayanan dengan nilai SKM minimal 80	%	92,5	100%	100%	100%	100%
4	Persentase SKPD yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)	%	100%	95%	100%	100%	100%
5	Persentase Perangkat daerah dengan kelembagaan yang efektif	%	100%	90%	100%	100%	100%
	Rata – Rata Capaian						**95%**

** : data sementara BPS Kabupaten Tanah Laut*

❖ **Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dengan Target Kinerja**

Rata-rata capaian kinerja Bagian Organisasi dari ke lima indikator adalah **95%,** dengan rincian sebagai berikut :

1) Persentase SKPD dengan nilai komponen pelaporan kinerja minimal 10 terealisasi sebesar 80% dari target 100%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerjanya adalah 80%.
2) Tidak tersedia data Persentase SKPD dengan Nilai Komponen Area Perubahan RB minimal 60.
3) Persentase unit pelayanan dengan nilai SKM minimal 80 terealisasi sebesar 100% dari target 100%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerjanya adalah 100%.
4) Persentase SKPD yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) terealisasi sebesar 100% dari target 100%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerjanya adalah 100%.

5) Persentase Perangkat daerah dengan kelembagaan yang efektif terealisasi sebesar 100% dari target 100%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerjanya adalah 100%.

❖ **Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dengan Tahun Sebelumnya**

1) Persentase SKPD dengan nilai komponen pelaporan kinerja minimal 10, Tahun 2023 adalah sebesar 80%, mengalami penurunan sebesar 17,5% dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 97,5%.
2) Persentase SKPD dengan Nilai Komponen Area Perubahan RB minimal 60, untuk Tahun 2023 tidak dilakukan lagi evaluasi pada tingkat SKPD karena diundangkannya Permenpan RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang EValuasi Reformasi Birokrasi yang mana evaluasi Reformasi Birokrasi dilaksanakan hanya pada tingkat Pemerintah Daerah.
3) Persentase unit pelayanan dengan nilai SKM minimal 80 Tahun 2023 adalah 100%, persentasenya mengalami kenaikan dari Tahun 2022 sebesar 95%.
4) Persentase SKPD yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) tahun 2023 adalah 100% sama dengan Tahun 2022 yang juga sebesar 100%.
5) Persentase Perangkat daerah dengan kelembagaan yang efektif tahun 2023 adalah 100%, hasil ini sama dengan Tahun sebelumnya sebesar 100%.

❖ **Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Eselon III Selama 5 (Lima) Tahun (2018-2023)**

NO	IKU ESELON III		2019			2020			2021			2022			2023			PENANGGUNG JAWAB/BAGIAN
	SASARAN	INDIKATOR	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase SKPD dengan nilai komponen pelaporan kinerja minimal 10	65%	62,5 %	96,15 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Bagian Organisasi**
	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Persentase SKPD dengan nilai RB minimal cukup	10%	12,5 %	125%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Bagian Organisasi**
		Persentase SKPD dengan budaya kerja baik	10%	5%	50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Bagian Organisasi**
	Meningkatnya Penataan Ketatalaksanaan dan pelayanan publik	Persentase unit pelayanan dengan nilai SKM minimal 80	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Bagian Organisasi**
		Persentase SKPD yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Bagian Organisasi**
	Meningkatnya efektifitas kelembagaan analisa dan evaluasi jabatan	Persentase Perangkat daerah dengan kelembagaan yang efektif	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Bagian Organisasi**
		Persentase Analisa dan evaluasi jabatan sesuai proporsinya	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Bagian Organisasi**

	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase SKPD dengan nilai komponen pelaporan kinerja minimal 10	-	-	-	70%	92,5%	132,5 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Bagian Organisasi**
	Meningkatnya Nilai Area Perubahan RB SKPD	Nilai Komponen Area Perubahan RB SKPD	-	-	-	70	55	78.57 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Bagian Organisasi**
		Persentase SKPD dengan budaya kerja baik	-	-	-	15%	17,5%	116,67%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Bagian Organisasi**
	Meningkatnya Penataan Ketatalaksanaan dan pelayanan publik	Persentase unit pelayanan dengan nilai SKM minimal 80	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Bagian Organisasi**
		Persentase SKPD yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)	-	-	-	100%	95%	95%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Bagian Organisasi**
	Meningkatnya efektifitas kelembagaan analisa dan evaluasi jabatan	Persentase Perangkat daerah dengan kelembagaan yang efektif	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Bagian Organisasi**
		Persentase Analisa dan evauasi jabatan sesuai proporsinya	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Bagian Organisasi**
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Persentase SKPD dengan nilai komponen	-	-	-	-	-	-	80%	65%	81,25 %	90%	97,5 %	108,33%	100%	80%	80%	**Bagian Organisasi**

	Instansi Pemerintah	pelaporan kinerja minimal 10															
	Meningkatnya Nilai Area Perubahan RB SKPD	Persentase SKPD dengan Nilai Komponen Area Perubahan RB minimal 60	-	-	-	-	-	-	30%	70%	233,33%	40%	100%	250%	50%	0	0	**Bagian Organisasi**
	Meningkatnya Penataan Ketatalaksanaan dan pelayanan publik	Persentase unit pelayanan dengan nilai SKM minimal 80	-	-	-	-	-	-	100%	92,5	92,5 %	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	**Bagian Organisasi**
		Persentase SKPD yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	95%	95%	100%	100%	100 %	**Bagian Organisasi**
	Meningkatnya efektifitas kelembagaan analisa dan evaluasi jabatan	Persentase Perangkat daerah dengan kelembagaan yang efektif	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	90%	90%	100%	100%	100 %	**Bagian Organisasi**

❖ **Analisa Peningkatan dan Penurunan Kinerja**

SASARAN 1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Indikator Persentase SKPD dengan Nilai Komponen Pelaporan Kinerja Minimal 10

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase SKPD dengan nilai komponen pelaporan kinerja minimal 10	100%	80%	80%	Bagian Organisasi Mengampu Misi ke- 3 *"Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (**Good Governance**)"*

Untuk mendukung tercapainya indikator Persentase SKPD dengan nilai komponen pelaporan kinerja minimal 10 telah dilaksanakan kegiatan :

1) Melaksanakan pendampingan penyusunan kinerja Perangkat Daerah.
2) Melaksanakan analisa Laporan Kinerja seluruh SKPD.
3) Melaksanakan asistensi terhadap laporan kinerja 40 SKPD yang dilaksanakan pada pada bulan Februari Tahun 2023 di Ruang Kerja Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Berikut disajikan nilai hasil Evaluasi SAKIP seluruh SKPD pada komponen Pelaporan Kinerja di Lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2023.

Hasil Evaluasi SAKIP seluruh SKDP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023

NO	NAMA SKPD	PELAPORAN KINERJA
1	Sekretariat Daerah	12.30
2	BPKAD	12.30
3	Inspektorat	12.00
4	DPMPTSP	12.00
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12.00
6	Badan Pendapatan Daerah	12.00
7	Kec. Takisung	12.00
8	DP2KBP3A	12.00
9	DPRKPLH	12.00
10	Kec. Panyipatan	12.00

11	Dinas Ketenagakerjaan	11.85
12	Dinas Komunikasi dan Informasi	11.85
13	Dinas Kesehatan	11.55
14	Kec. Pelaihari	11.55
15	DPMD	11.55
16	Dinas Perhubungan	11.55
17	Dinas Pariwisata	11.40
18	Dinas Pertanian, Holtikultura dan Perkebunan	11.25
19	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	11.25
20	Kec. Tambang Ulang	11.25
21	Sekretariat DPRD	11.10
22	DPUPRP	11.10
23	BKPSDM	10.95
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10.95
25	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	10.80
26	Kec. Jorong	10.80
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10.65
28	Dinas Sosial	10.50
29	Satpol PP	10.50
30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10.35
31	Kec. Bajuin	10.35
32	Kec. Batu Ampar	10.05
33	Kec. Bati-bati	9.75
34	Dinas Koperasi dan Perdagangan	9.30
35	BPBD	8.10
36	Kec. Kintap	7.80
37	Kec. Kurau	7.05
38	Kec. Bumi Makmur	4.80
39	DKPP	4.80
40	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.50

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk komponen pelaporan kinerja, ada 32 SKPD dengan nilai di atas 10 dan 8 SKPD dengan nilai di bawah 10 atau sebesar 80%. Hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran ini adalah:

- Kurangnya komitmen dan keterlibatan pimpinan dan seluruh pejabat struktural dalam kegiatan Akuntabilitas Kinerja.
- Kurang selarasnya dokumen AKIP Karena laporan kinerja disusun berdasarkan dokumen perencanaan.

- Belum dimanfaatkannya informasi kinerja pada laporan kinerja dalam pelaksanaan manajemen kinerja pada periode berikutnya.
- Tidak seluruh SKPD memperbaiki hasil koreksi terhadap Laporan Kinerja (LKj) masing-masing.

Solusi/ upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/ hambatan tersebut adalah:

- Peningkatan kompetensi aparatur yaitu kemampuan analisis analisis para penanggungajawab program serta tim penyusun Laporan kinerja
- Tetap dilaksanakan asistensi terhadap laporan kinerja seluruh SKPD.
- Peningkatan kualitas pengumpulan data kinerja, pengukuran kinerja secara triwulan dan evaluasi internal seluruh SKPD.
- Pemanfaatan informasi kinerja pada laporan kinerja dalam pelaksanaan manajemen kinerja pada periode berikutnya.
- Terus dilakukan kegiatan penilaian kinerja Perangkat Daerah sebagai bentuk reward dan punishment terhadap kinerja organisasi.

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Terus memberikan reward dan punishment kepada SKPD sesuai dengan nilai beberapa indikator salah satunya adalah Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diperoleh sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 95 Tahun 2022.
- Melaksanakan asistensi peningkatan kualitas Laporan Kinerja (LKj) SKPD dengan narasumber dari Kemenpan dan RB sehingga bisa diketahui kekurangan-kekurangan secara detail dalam LKj SKPD.
- Mengintegrasikan seluruh sistem pengukuran kinerja individu dan organisasi.

Tahun 2023, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota kegiatan penataan organisasi sub kegiatan peningkatan kinerja dan reformasi Birokrasi dengan Anggaran sebesar Rp 295.047.321 dan terealisasi sebesar Rp 254.588.847 atau 86,29% dan didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 3 Orang yaitu Kepala Bagian Organisasi, Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi dan Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja.





Dokumentasi Kegiatan Asistensi Laporan Kinerja (LKj) SAKIP SKPD

SASARAN 2 Meningkatnya Nilai Area Perubahan RB SKPD

Indikator 1 : Persentase SKPD dengan Nilai Komponen Area Perubahan RB minimal 60

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
2	Meningkatnya Nilai Area Perubahan RB SKPD	Persentase SKPD dengan Nilai Komponen Area Perubahan RB minimal 60	50%	0	0	Bagian Organisasi Mengampu Misi ke- 3 *"Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (**Good Governance**)"*

Tidak tersedia data Nilai Komponen Area Perubahan RB minimal 60 dikarenakan pada Tahun 2023 tidak dilaksanakan evaluasi RB pada tingkat SKPD. Evaluasi hanya dilakukan pada tingkat Pemerintah Daerah. Hal ini dikarenakan diundangkannya Peraturan Menteri Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Peraturan Menteri Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Meskipun tidak dilakukan evaluasi RB, namun pembinaan RB pada SKPD tetap dilaksanakan salah satunya dengan dilaksanakannya FGD Agen Perubahan dengan focus diskusi pada peningkatan strategi pencapaian rencana aksi Agen Perubahan serta peningkatan kapasitas SDM Agen Perubahan dalam rangka peningkatan Peran Agen dalam menjadi Katalis Perubahan pada SKPD masing-masing.





Dokumentasi Kegiatan FGD Agen Perubahan Tahun 2023

Tahun 2023, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota kegiatan penataan organisasi sub kegiatan peningkatan kinerja dan reformasi Birokrasi dengan Anggaran sebesar Rp 295.047.321 dan terealisasi sebesar Rp 254.588.847 atau 86,29% dan didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 3 Orang yaitu Kepala Bagian Organisasi, Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi dan Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja.

SASARAN 3 Meningkatnya Penataan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik

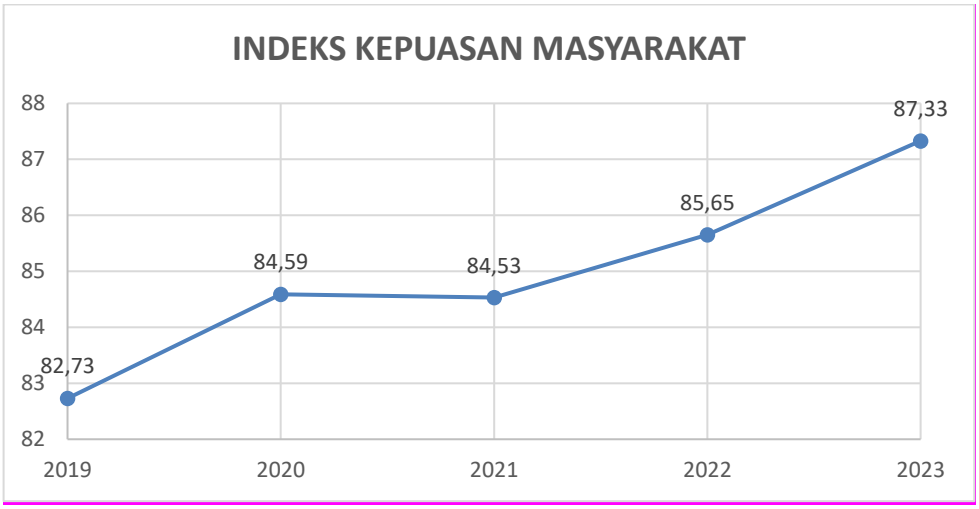
Indikator 1 : Persentase Unit Pelayanan dengan Nilai SKM Minimal 80

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
3	Meningkatnya Penataan Ketatalaksanaan dan pelayanan publik	Persentase unit pelayanan dengan nilai SKM minimal 80	100%	100%	100%	Bagian Organisasi Mengampu Misi ke- 3 *"Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (**Good Governance**)"*

Realisasi indikator SKM di tahun 2023 adalah **87,33 (Baik),** telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 80 (Baik) dengan tingkat capaian 109,16%. mengalami kenaikan 1,68 poin jika dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu **85,65** (Baik).

Secara umum kualitas pelayanan pada SKPD/unit pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2023 dipersepsikan **"BAIK"** oleh masyarakat penggunanya. Hal ini dapat dilihat dari indeks kepuasan masyarakat yang diperoleh yaitu 87,33 (Kategori B = Baik) berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat di seluruh SKPD. Terjadi kenaikan dibandingkan tahun 2022 yaitu 84,53 (Kategori B = Baik). Dari tahun 2018 indeks kepuasan masyarakat sudah berkategori Baik, peningkatan indeks kepuasan masyarakat dari tahun ke tahun dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik
SKM Kabupaten Tanah Laut 2019 – 2023



Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

Pada Tahun 2023 nilai SKM Kabupaten Tanah Laut sebesar 87,33 dengan kategori "**BAIK**". Rata-rata persentase nilai SKM masing-masing SKPD bisa dikatakan Baik, karena nilai interval yang didapat oleh masing-masing SKPD antara 76,61-88,30.

Pada Tahun 2023 ada 15 SKPD yang kategori nilai SKM nya kategori "**SANGAT BAIK**" yaitu Sekretariat Daerah (89,63), Inspektorat (89,44), Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (95,16), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (91,93), Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (91,75), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (92,19), Dinas Kominfo (89,00), Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (95,92), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (89,49), Dinas P2KBP3A (90,84), Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (90,26), Kecamatan Bati-Bati (92,25), Kecamatan Bajuin (88,45), Kecamatan Kintap (88,89), dan Kecamatan Tambang Ulang (90,59).

Ada beberapa SKPD/Unit Pelayanan yang unsur pelayanannya dianggap paling memuaskan oleh responden dan mencapai angka 4,00, yang terdapat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Kesbangpol, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Tenaga

Kerja dan Perindustrian, Kecamatan Takisung, Kecamatan Bajuin, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Jorong, Kecamatan Kintap, Kecamatan Kurau, Kecamatan Bumi Makmur, dan Kecamatan Panyipatan.

Sedangkan unsur pelayanan yang kurang memuaskan dengan angka dibawah 3,00 terdapat pada Sekretariat DPRD dan UPT. Terminal Dinas Perhubungan.

Untuk Tahun 2023, pelaksanaan SKM pada seluruh SKPD dilakukan setiap triwulan dengan mengisi link yang sudah disediakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut yaitu ***https://bit.ly/SKM_Triwulan*** dimana untuk pengisian setiap triwulan pada akhir link yang ada tulisan Triwulan ditambahkan angka 1 sampai dengan 4 sesuai dengan survei yang dilakukan pada triwulan berapa. Sedangkan laporan hasil survei kepuasan masyarakat Kabupaten Tanah Laut semester 1 telah dilaporkan kepada Kementerian PANRB pada bulan Oktober 2023, untuk semester 2 Kementerian PANRB mendorong Pemerintah Daerah agar dapat menyampaikan pula laporan hasil survei kepuasan Masyarakat untuk semester 2.

Tabel
Rekapitulasi Survey Kepuasan Masyarakat 2020-2023

REKAPITULASI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)					
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT					
No	**Nama Satuan Kerja**	**Nilai IKM 2020**	**Nilai IKM 2021**	**Nilai IKM 2022**	**Nilai IKM 2023**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Sekretariat Daerah	81.99	86,73	88,00	89,63
2	Sekretariat DPRD	82.75	82,76	81,81	86,39
3	Inspektorat	80.07	83,14	83,69	89,44
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	79.75	79,81	81,09	82,42
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	89.32	83,80	85,78	95,16
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	93.24	94,16	94,02	91,93
7	Badan Pendapatan Daerah	88.76	81,07	81,81	83,90

8	Badan Kesbangpol	79.34	85,98	86,98	87,39
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	82.81	83,82	82,42	88,10
10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	94.22	83,64	94,22	82,54
11	Dinas Kesehatan	83.53	83,69	83,24	86,64
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	77.39	77,39	80,38	85,88
13	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	87.95	88,04	91,33	91,75
14	Dinas Sosial	89.88	87,11	91,48	84,58
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	82.28	82,06	84,56	86,80
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	85.41	89,28	91,34	92,19
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	81.50	80,20	87,10	89,00
18	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	95.26	95,72	87,90	95,92
19	Dinas Pariwisata	80.67	81,10	79,31	88,17
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	83.69	83,16	84,69	87,81
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	87.68	89,54	89,51	89,49
22	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	97.08	88,97	89,05	90,84
23	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	79.95	79,06	80,97	83,02
24	Dinas Perhubungan	-	-	-	
	UPT Terminal	85.86	83,01	-	82,87

	UPT Pelabuhan dan Penyeberangan	88.76	80,06	82,19	86,36
	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	81.46	82,19	82,38	83,20
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	86.14	85,64	85,07	82,97
26	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	80.59	83,01	80,67	82,72
27	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	83.22	83,52	85,01	84,47
28	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	81.59	87,72	89,61	90,26
29	Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar	89.52	89,97	83,31	86,02
30	Kecamatan Pelaihari	81.90	81,92	87,86	87,42
31	Kecamatan Takisung	82.10	82,30	82,34	84,14
32	Kecamatan Panyipatan	82.00	88,80	84,73	84,47
33	Kecamatan Bajuin	81.33	83,64	88,09	88,45
34	Kecamatan Jorong	80.76	80,87	79,65	85,11
35	Kecamatan Kintap	81.85	81,85	85,69	88,89
36	Kecamatan Batu Ampar	80.14	87,01	87,19	84,50
37	Kecamatan Tambang Ulang	80.10	80,26	80,27	90,59
38	Kecamatan Bati-Bati	79.33	81,13	87,78	92,25
39	Kecamatan Kurau	85.31	85,48	86,28	86,61
40	Kecamatan Bumi Makmur	96.40	91,44	91,75	87,48
	Total Nilai IKM	**84.59**	**84.53**	**85,65**	**87,33**

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

Kepuasan terhadap layanan yang telah diberikan salah satunya dikarenakan adanya kegiatan **Manunggal Tuntung Pandang yaitu kegiatan bermalam di desa untuk Bupati dan seluruh jajaran** dan Perangkat Daerah. Pada saat manunggal tuntung pandang dilaksanakan, SKPD pemberi layanan misalnya Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, DPMPTSP, DP2KBP3A memberikan layanan kepada seluruh masyarakat. Hal ini juga mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat tanpa mereka harus datang langsung ke Kantor SKPD pemberi layanan.

Rekomendasi :

- Perlu upaya untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah ada, dengan melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten terutama mempertahankan kejelasan dan kepastian petugas pelayanan serta kenyamanan lingkungan.
- Meningkatkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab petugas melalui pemberian pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan etos kerja atau motivasi petugas dan menetapkan standardisasi internal mengenai sikap layanan serta disiplin kerja.
- Diperlukan upaya untuk meningkatkan kemudahan pelanggan dalam mengajukan keluhan melalui pembentukan satuan kerja yang berfungsi menerima dan memproses keluhan pelanggan serta menyediakan media yang mudah diakses oleh pelanggan seperti saluran telepon bebas pulsa, sms, email, dan atau kotak saran.
- Diperlukan upaya untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap petugas dalam memberikan pelayanan. Hal-hal yang dapat dilakukan adalah: (1) memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi petugas, (2) memberikan informasi secara komunikatif kepada pelanggan.
- Perlu pemberian penghargaan terhadap pegawai yang berprestasi dan terus memotivasi untuk mendapatkan prestasi di masa yang akan datang serta mempertimbangkan kesejahteraan petugas pelayanan dalam bentuk insentif khusus.
- Kegiatan penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat dapat terus dilaksanakan sebagai salah satu cara untuk mempertahankan kualitas pelayanan publik dengan membandingkan Survei Kepuasan Masyarakat terdahulu secara berkala, survei bisa dilakukan secara periodik (3 sampai dengan 6 bulan sekali atau sekurang-kurangnya 1 tahun sekali) secara berkelanjutan, sehingga dapat dilakukan perubahan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain :

- Masih ada beberapa SKPD yang kualitas pelayanannya kurang baik

- Keterlambatan SKPD dalam menyampaikan laporan penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat pada SKPDnya sehingga menghambat dalam penyusanan Laporan SKM Kabupaten.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Perlu upaya untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah ada, dengan melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten terutama mempertahankan kejelasan dan kepastian petugas pelayanan serta kenyamanan lingkungan.
- Perlu upaya peningkatan kualitas pelayanan yang masih kurang baik, agar tingkat kepuasan masyarakat terhadap kesesuaian biaya pelayanan pada SKPD/Unit pelayanan dapat lebih baik lagi dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat.
- Meningkatkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab petugas melalui pemberian pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan etos kerja atau motivasi petugas dan menetapkan standarisasi internal mengenai sikap layanan serta disiplin kerja.
- Diperlukan upaya untuk meningkatkan kemudahan pelanggan dalam mengajukan keluhan melalui pembentukan satuan kerja yang berfungsi menerima dan memproses keluhan pelanggan serta menyediakan media yang mudah diakses oleh pelanggan seperti saluran telepon bebas pulsa, sms, email, dan atau kotak saran.
- Diperlukan upaya untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap petugas dalam memberikan pelayanan. Hal-hal yang dapat dilakukan adalah: (1) memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi petugas, (2) memberikan informasi secara komunikatif kepada pelanggan.
- Perlu pemberian penghargaan terhadap pegawai yang berprestasi dan terus memotivasi untuk mendapatkan prestasi di masa yang akan datang serta mempertimbangkan kesejahteraan petugas pelayanan dalam bentuk insentif khusus.
- Kegiatan penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat dapat terus dilaksanakan sebagai salah satu cara untuk mempertahankan kualitas pelayanan publik dengan membandingkan Survei Kepuasan Masyarakat terdahulu secara berkala, Dimana sejak tahun 2022 survei kepuasan masyarakat dilakukan per triwulan, sehingga dapat dilakukan perubahan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Rencana aksi

- Survei Kepuasan Masyarakat di SKPD dilakukan berkelanjutan secara berkala, sejak tahun 2022 telah dilaksanakan per triwulan. Jadi SKPD menyampaikan laporan hasil survei kepuasan masyarakat ke bagian organisasi per triwulan. Untuk laporan pelaksanaan hasil survei kepuasan masyarakat Kabupaten Tanah Laut semester 1 tahun 2023 telah disampaikan ke Kementerian PANRB sesuai dengan batas akhir yang ditentukan. Ke depannya Kementerian PANRB mendorong seluruh Pemerintah Daerah Kab/Kota untuk dapat melaporkan hasil survei kepuasan Masyarakat semester 2.
- Pemberian *reward* and *punishment* terhadap SKPD dengan predikat terburuk dan terbaik telah diberikan atas prestasi kinerja yang dihasilkan oleh SKPD.

Indikator 2 : Persentase SKPD Yang Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
4	Meningkatnya Penataan Ketatalaksanaan dan pelayanan publik	Persentase SKPD yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	100%	100%	Bagian Organisasi Mengampu Misi ke- 3 *"Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (**Good Governance**)"*

Untuk capaian SKPD yang memiliki SOP Tahun 2023 adalah sebesar 100%, persentasenya sama dengan Tahun 2022 yaitu 100%.

Dari beberapa SKPD yang sudah memiliki SOP, ada beberapa SKPD telah melakukan revisi terhadap SOPnya masing-masing menyesuaikan dengan PERDA SOTK Nomor 6 Tahun 2016. Akan tetapi berdasarkan hasil inventarisasi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dikatakan bahwa data Peraturan Bupati/Walikota se Kalimantan Selatan dari tahun 2015 s.d 2021 ditemukan penetapan Standar Pelayanan Prosedur (SOP) dengan Peraturan Bupati/Walikota. Sehingga penetapan SOP dianggap tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (8), Pasal 7 ayat (2), Pasal 13, Pasal 20 ayat (3) Permendagri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hal tersebut, untuk tahun 2023 bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut akan melakukan inventarisir ulang sekaligus melakukan evaluasi terhadap SOP yang ada pada SKPD se Kabupaten Tanah Laut.

Kedepannya diharapkan SOP yang ada pada setiap SKPD telah sesuai dengan Permendagri Nomor 52 Tahun 2011 sehingga bisa dirangkum dalam 1 Keputusan Bupati Tanah Laut.

Adapun program/kegiatan yang mendukung kegiatan ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota/Kegiatan Penataan Organisasi/Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp.124.754.512,- dengan realisasi sebesar Rp.85.217.862,- (68,31%).

Untuk serapan anggaran sdh melebihi 50% dari pagu yang ada.

SASARAN 4 Meningkatnya Efektifitas Kelembagaan Analisa dan Evaluasi Jabatan

Indikator Persentase Perangakat Daerah dengan Kelembagaan yang Efektif

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
4	Meningkatnya efektifitas kelembagaan analisa dan evaluasi jabatan	Persentase Perangkat daerah dengan kelembagaan yang efektif	100%	100%	100%	Bagian Organisasi Mengampu Misi ke- 3 *"Membangun tata kelola pemerintahan yang baik* ***(Good Governance)***

Persentase Perangkat daerah dengan kelembagaan yang efektif tahun 2023 adalah 100%.

Pada tahun 2023 terhadap Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dilakukan evaluasi kelembagaan, yang berdampak pada diadakan perubahan dan penyesuaian SOTK karena telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dari 40 (empat puluh) SKPD yang ada, sebanyak 13 (tiga belas) SKPD yang mengalami perubahan baik nomenklatur maupun besaran struktur organisasinya.

Tabel

PERUBAHAN KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

No	SKPD	Keterangan
1	Inspektorat	Berubah nomenklatur pada Jabatan Administrator
2	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Berubah nomenklatur pada Jabatan Administrator
3	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	Berubah nomenklatur SKPD dan pada Jabatan Administrator
4	Dinas Sosial	Penambahan pada Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas
5	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Penambahan pada Jabatan Pengawas
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	Berubah nomenklatur SKPD dan penambahan Jabatan Pengawas
7	Dinas Pariwisata	Penambahan pada Jabatan Pengawas
8	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Berubah nomenklatur SKPD
9	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Penambahan pada Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas
10	Badan Perencanaan Pembangunan Dearah	Berubah nomenklatur SKPD dan pada Jabatan Administrator
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Penambahan pada Jabatan Administrator

No	SKPD	Keterangan
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Perubahan nomenklatur pada Jabatan Administrator dan penambahan Jabatan Pengawas
13	Badan Pendapatan Daerah	Penambahan pada Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas

Perubahan dan penyesuaian pada 13 (tiga belas) SKPD sebagai mengalami perubahan SOTK yang tercantum dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja. Perubahan dan penyesuaian dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan kinerja dan efektifitas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, sehingga 40 (empat puluh) SKPD yang ada telah dilakukan evaluasi dan memiliki kelembagaan yang efektif.

Kegiatan Penataan Organisasi Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan dengan anggaran sebesar Rp. *102.472.697*,- dan realisasinya sebesar Rp. *95.875.300*,- atau 93.56%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk menunjang kegiatan Tim kegiatan di bidang kelembagaan Tahun anggaran 2023 dan Belanja Barang Jasa, seperti ATK, cetak, narasumber serta makanan dan minuman kegiatan. Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2023 berupa :

1. Rapat Tim Kerja:
   a. Ekspose tentang usulan perubahan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja oleh SKPD;
   b. Ekpose tentang usulan pembentukan UPTD Balai Alat Mesin Pertanian oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut;
   c. Rapat Tim membahas rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
   d. Rapat Tim membahas penyusunan Peraturan Bupati tentang Pedoman Koordinasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
   e. Rapat Tim membahas tentang Pemberian Tambahan Penghasilan ASN.

2. Melaksanakan *workshop* Penyusunan Uraian Tugas, Analisis Jabatan, dan Analisis Beban Kerja untuk seluruh SKPD;
3. Melaksanakan pembentukan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peta Jabatan;
4. Melaksanakan pembentukan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelas Jabatan;
5. Melaksanakan pembentukan Peraturan Bupati tentang SOTK Perangkat Daerah;
6. Melaksanakan pengusulan penyesuaian jabatan pelaksana.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel Realisasi Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Anjab

NO	PERBUP	TENTANG
1	Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2023	Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2022 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
2	Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 28 Tahun 2023	Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Tanah Laut
3	Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 29 Tahun 2023	Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Inspektorat Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Tanah Laut
4	Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 35 Tahun 2023	Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut
5	Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 71 Tahun 2023	Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
6	Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 89 Tahun 2023	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2022 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
7	Surat Bupati Tanah Laut Nomor 000.8.2/1554/Org tanggal 09 Juni 2023	Permohonan Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan
8	Surat Menteri PANRB Nomor B/7077/M.SM.01.00/2023 tanggal 06 September 2023	Persetujuan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur dan Pranata SDM Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
9	Surat Bupati Tanah Laut Nomor 800.1.1/2883/Org tanggal 7 November 2023	Permohonan Penetapan Kebutuhan JF

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas terdapat beberapa kendala antara lain :

- Dalam hal pelaksanaan penataan dan penyusunan produk hukum kelembagaan tidak serta merta hanya dilaksanakan oleh Bagian Organisasi dan SKPD sebagai

pihak yang mengusulkan perubahan kelembagaan. Ada peran Pembinaan Penataan Perangkat Daerah kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah. Sehingga dalam penetapan produk hukum yang menaungi perubahan kelembagaan perlu lebih dahulu dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur, dan berproses sesuai Standar Operasional Prosedur yang berlaku. Sehingga beberapa kondisi perubahan yang dilaksanakan tidak dapat langsung dilaksanakan.

- Terdapat kendala pada penyesuaian alur penandatanagan peraturan kepala daerah. Berdasarkan tata cara penandatangan rancangan peraturan kepala daerah oleh Penjabat (Pj.) Bupati pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, bahwa Pj. Bupati mempunyai tugas dan wewenang melakukan penandatanganan rancangan peraturan kepala daerah (ranperkada) setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Solusi dan rencana aksi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Melakukan komunikasi dan koordinasi lebih intens dengan pihak terkait, dan menjaga hubungan kerjasama yang baik terutama dengan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah.



Foto Kegiatan Workshop Penyusunan Uraian Tugas, Analisis Jabatan, dan Analisis Beban Kerja



Foto Rapat Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Tahun 2022, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota kegiatan penataan organisasi sub kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan dengan Anggaran sebesar Rp 117.226.852 dan terealisasi sebesar Rp 78.260.873 atau 66,76% dan didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 3 Orang yaitu Kepala Bagian Organisasi, Analis Jabatan Sub Koordinator Kelembagaan dan Analis Jabatan.

❖ **Analisa Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia**

Dalam mencapai sasaran bagian organisasi memiliki Program Pembinaan, Pengembangan, Penataan Kelembagaan, Penataan Ketatalaksanaan, Penataan Aparatur dan Analisa Formasi Jabatan dengan pagu Rp 522.274.530,00 terealisasi Rp 435.682.009 dengan capaian realisasi keuangan sebesar 83,42%, dengan rincian sebagai berikut:

1) Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan indikator **Persentase SKPD dengan nilai komponen pelaporan kinerja minimal 10** dan dengan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Penataan Organisasi Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birorasi dengan pagu Rp. 295.047.530 terealisasi Rp. 254.588.847 dengan realisasi keuangan sebesar 86,29% dan dilaksanakan oleh 3 (tiga) orang Sumber Daya Manusia. Kegiatan Indikator ini dilaksanakan melalui pembinaan implementasi SAKIP di lingkungan Pemeirntah Kabupaten Tanah Laut. Untuk capaian kinerja terhadap IKU tersebut diatas adalah **80%** sedangkan untuk realisasi anggarannya sebesar **86,29%.** Dalam artian IKU ini tidak mencapai target yang telah ditentukan dikarenakan kurangnya komitmen pimpinan dan seluruh ASN dalam implementasi SAKIP. Pelaporan merupakan tahap akhir dari seluruh tahapan pelaksanaan SAKIP, apabila kualitas perencanaan, pengukuran, dan evaluasi internal secara berkala belum maksimal maka akan berdampak pada kualitas pelaporan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI
80%	86,92%	0%

2) Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Penataan Ketatalaksanaan dan pelayanan publik dengan **Persentase unit pelayanan dengan nilai SKM minimal 80** dan **Persentase SKPD yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)** dan dengan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Penataan Organisasi Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana dengan pagu Rp. 124.754.512 terealisasi Rp. 85.217.862 dengan realisasi keuangan sebesar 86,31% dan dilaksanakan oleh 3 (tiga) orang Sumber Daya Manusia. Kegiatan Indikator ini dilaksanakan melalui pembinaan Pelayanan Publik dan Tata Laksana di lingkungan Pemeirntah Kabupaten Tanah Laut. Untuk capaian kinerja terhadap kedua IKU tersebut diatas adalah **100%** sedangkan untuk realisasi anggarannya sebesar **86,31%.** Dalam artian IKU ini telah berhasil dilaksanakan dengan efektif dan efisien dikarenakan capaian kinerjanya lebih besar daripada realisasi anggaran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI
100%	86,31%	13,69%

3) Untuk mencapai sasaran Meningkatnya efektifitas kelembagaan, analisa dan evaluasi jabatan dengan **Persentase perangkat daerah dengan kelembagan yang efektif** dengan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Penataan Organisasi Sub Kegiatan Pengelolaan kelembagaan dan Analisis Jabatan dengan pagu Rp. 102.472.697 terealisasi Rp. 95.875.300 dengan realisasi keuangan sebesar 93,56% dan dilaksanakan oleh 3 (tiga) orang Sumber Daya Manusia. Kegiatan Indikator ini dilaksanakan melalui pembinaan kelembagaan dan analisis jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut diantaranya, rapat-rapat kelembagaan, perubahan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan-Peraturan turunan terhadap Peraturan Daerah tersebut. Untuk capaian kinerja terhadap IKU tersebut diatas adalah **100%** sedangkan untuk realisasi anggarannya sebesar **953,56%.** Dalam artian IKU ini telah berhasil

dilaksanakan dengan efektif dan efisien dikarenakan capaian kinerjanya lebih besar daripada realisasi anggaran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI
100%	93,56%	6,44%

Tabel Indikator Kinerja dan Realisasi Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2023 (Rp)	%	SDM	KET
1	Persentase SKPD dengan nilai komponen pelaporan kinerja minimal 10	**PROGRAM PEMERITAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Kegiatan Penataan Organisasi**					
2	Nilai Komponen Area Perubahan RB SKPD		Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	295.047.321	254.588.847	86.29%	3 Orang	
3	Persentase unit pelayanan dengan nilai SKM minimal 80		**Kegiatan Penataan Organisasi**					
4	Persentase SKPD yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)		Sub Kegiatan Fasilitasi pelayanan publik dan tatalaksana	124.754.512	85.217.862	886.31%	2 Orang	
5	Persentase Perangkat daerah dengan kelembagaan yang efektif		**Kegiatan Penataan Organisasi**					
			Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	102.472.697	95.875.300	93.56%	2 Orang	

Analisa Capaian Sasaran Strategis

Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya layanan administrasi bidang perencanaan	Persentase layanan administrasi bidang perencanaan	100%	100%	100%	Bagian Perencanaan dan Keuangan Mengampu Misi ke- 3 *"Membangun tata kelola pemerintahan yang baik* ***(Good Governance)****"*
2	Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja lingkup Sekretariat Daerah	Persentase penyusunan pelaporan kinerja yang sesuai aturan	100%	100%	100%	
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	83	82	98.79%	
		Nilai SPIP Sekretariat Daerah	3.7	Masih Tahap *Baseline SPIP* Terintegrasi	Masih Tahap *Baseline SPIP* Terintegrasi	
4	Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan sesuai aturan	100%	100%	100%	

Berikut disajikan Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis Bagian Perencanaan dan Keuangan terhadap capaian tahun sebelumnya :

Tabel Capaian Indikator Sasaran Strategis Bagian Perencanaan dan Keuangan terhadap capaian tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Tahun 2023		
			2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase layanan administrasi Bidang Perencanaan	%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Peresentase penyusunan pelaporan kinerja yang sesuai aturan	%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Nilai	86.81	84.2	83	82	98.79%
4	Nilai SPIP Sekretariat Daerah	Level	Tahap *Baseline* SPIP	Masih Tahap *Baseline SPIP* Terintegrasi	3,7	Masih Tahap *Baseline SPIP* Terintegrasi	Masih Tahap *Baseline SPIP* Terintegrasi
5	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan sesuai aturan	%	-	100%	100%	100%	100%
	Rata – Rata Capaian					-	99.70%

1. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dengan Target Kinerja

Capaian kinerja Bagian Perencanaan dan Keuangan ada 5 (lima) indikator adalah **99.70%** dengan rincian sebagai berikut :

1) Persentase layanan administrasi Bidang Perencanaan, Tahun 2023 realisasi indikator ini sebesar 100% dengan target 100% dengan demikian indikator ini terlaksana 100% dengan menyiapkan bahan - bahan Renja APBD Murni dan APBD Perubahan, Penyusunan Konsep Perjanjian Kinerja (PK) Eselon II, Eselon III, Eselon IV, JFT, dan JFU serta Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah.
2) Persentase penyusunan pelaporan kinerja yang sesuai aturan, Tahun 2023 realisasi indikator ini sebesar 100% dengan target 100% dengan demikian indikator ini terlaksana 100% dengan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Daerah Tahun 2023, Penyusunan LPPD Sekretariat Daerah Tahun 2023 dan Penyusunan Laporan SPIP Sekretariat Daerah Tahun 2023.
3) Nilai SAKIP Sekretariat Daerah, untuk Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023 telah dievaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Laut yang tertuang dalam Surat Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor : 700.1.2.1/166-LHE AKIP/Insp/2023 Tanggal 27 Juni 2023 Hal Laporan Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan nilai 82 dari target 83.
4) Nilai SPIP Sekretariat Daerah untuk Tahun 2023 target nilai SPIP Sekretariat Daerah dengan nilai 3,7, sedangkan untuk Tahun 2023 masih dalam tahap penilaian Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi, Penyusunan Risk Register Sekretariat Daerah Tahun 2023 dengan pendampingan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dan Inspektorat Kabupaten Tanah Laut serta Upload Kertas Kerja Komponen SPIP yaitu Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses serta Pencapaian Tujuan.
5) Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan sesuai aturan Tahun 2023 memiliki target kinerja 100% dan indikator ini tercapai 100%. Kegiatan Penatausahaan Keuangan telah dilaksanakan melalui Anggaran Belanja, Penerimaan Pendapatan, Inventarisasi, Laporan Keuangan Akhir Tahun Sekretariat Daerah Tahun 2023 serta Laporan Barang Milik Daerah (BMD) Sekretariat Daerah Tahun 2023.

2. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dengan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Sebelumnya

1) Persentase layanan administrasi Bidang Perencanaan realisasi untuk Tahun 2023 sebesar 100%, untuk Tahun 2022 tercapai 100%, sehingga capaian targetnya sama 100%.
2) Persentase kualitas penyusunan pelaporan kinerja yang sesuai aturan realisasi untuk Tahun 2023 sebesar 100%, untuk Tahun 2022 tercapai 100%, sehingga capaian targetnya sama 100%.
3) Nilai SAKIP Sekretariat Daerah realisasi untuk Tahun 2023 telah tercapai yaitu 82 (MEMUASKAN), sedangkan untuk realiasi nilai SAKIP Sekretariat Daerah Tahun 2022 dengan nilai 84.2 (MEMUASKAN).
4) Nilai SPIP Sekretariat Daerah, untuk Tahun 2022 masih dalam tahap penilaian *Baseline* Maturitas SPIP Terintegrasi dari BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. Maturitas SPIP Sekretariat Daerah telah di Level "3" setelah dilakukan penilaian *Quality Assurance* dari Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2018, sedangkan untuk Tahun 2023 telah dilaksanakan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi dan Pendampingan Penyusunan Risk Register Sekretariat Daerah Tahun 2023 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.
5) Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan sesuai aturan Tahun 2023 dengan target 100% serta tercapai 100% sedangkan untuk Tahun 2022 tercapai 100%, sehingga capaian targetnya sama 100%.

3. **Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Eselon III Selama 5 (Lima) Tahun dari Tahun 2018-2023**

Sebagaimana tercantum dalam Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Tahun 2018-2023, bahwa capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) Eselon III dari Tahun 2018-2023 akan diuraikan sebagai berikut :

1. Pada Tahun 2019 Bagian TU dan Keuangan mempunyai 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), dari target 100% dengan realisasi 100%, dalam artian kedua Indikator Kinerja tersebut tercapai 100%
2. Pada Tahun 2020 Bagian TU dan Keuangan mempunyai 5 (lima) Indikator Kinerja, yang mana ada salah satu Indikator Kinerja yang tidak tercapai dari target yang sudah ditetapkan yaitu Indikator Kinerja **"Persentase Bagi**

3. **an dengan nilai IKM Minimal Baik”**, hal ini dikarenakan tidak seluruh Bagian melakukan Survei Kepuasan secara maksimal sedangkan untuk 4 (empat) Indikator Kinerja lainnya telah tercapai melebihi target yang telah ditetapkan
4. Pada Tahun 2021 Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai 4 (empat) Indikator Kinerja, 3 (tiga) Indikator Kinerja telah tercapai melebihi target yang telah ditetapkan, namun ada satu Indikator Kinerja yang belum dilaksanakan yaitu Indikator Kinerja **“Nilai SPIP Sekretariat Daerah”.** Dalam hal ini belum dilaksanakan lagi Penilaian Maturitas SPIP setelah Tahun 2018, dan baru dilaksanakan pada tahap Maturitas *Baseline* SPIP Terintegrasi oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dan Inspektorat Kabupaten Tanah Laut.
5. Pada Tahun 2022 Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai 5 (lima) Indikator Kinerja, untuk 3 (Tiga) Indikator Kinerja tercapai 100%, untuk indikator Nilai SAKIP Sekretariat Daerah tercapai 101.4%, dan untuk indikator Nilai SPIP Sekretariat Daerah masih dalam tahap Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi.
6. Untuk Indikator Kinerja SPIP Sekretariat Daerah telah melakukan Input Data Awal dalam bentuk dokumen Excel dan Input data ke dalam Kertas Kerja Penilaian Penetapan Tujuan, Penilaian Struktur dan Proses, dan Penilaian Pencapaian Tujuan.
7. Pada Tahun 2023 Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai 5 (lima) Indikator Kinerja dengan masing-masing target yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum di dalam Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2018-2023. Untuk 3 (Tiga) Indikator Kinerja tercapai 100%, untuk indikator Nilai SAKIP Sekretariat Daerah tercapai 98.79%, dan untuk indikator Nilai SPIP Sekretariat Daerah masih dalam tahap Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi.
8. Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Selama 5 (Lima) Tahun dari Tahun 2018-2022 dan Target Kinerja Tahun 2018-2023 dapat dilihati dari tabel dibawah ini :

4. **Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Eselon III Selama 5 (Lima) Tahun (2018-2023)**

NO	IKU ESELON III		2019			2020			2021			2022			2023			PENANGGUNG JAWAB/BAGIAN
	SASARAN	INDIKATOR	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	
1	Meningkatnya layanan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan	Persentase pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan Pimpinan/Bagian lingkup Sekretariat Daerah	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Bagian TU dan Keuangan**
2	Meningkatnya kualitas pelaporan lingkup Sekretariat Daerah	Persentase peningkatan mutu penyusunan pelaporan/kinerja yang tepat waktu sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Bagian TU dan Keuangan**
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan layanan Sekretariat Daerah	Persentase Bagian dengan nilai IKM Minimal Baik	-	-	-	100%	82.33%	82.33 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Bagian Tata Usaha dan Keuangan**
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan Kepemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Peningkatan komponen Area Perubahan RB Sekretariat Daerah	-	-	-	85	91.24	107.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Bagian Tata Usaha dan Keuangan**
		Peningkatan komponen Area Perubahan ZI Sekretariat Daerah	-	-	-	82	84.65	103.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Bagian Tata Usaha dan Keuangan**
		Peningkatan komponen SAKIP Sekretariat Daerah	-	-	-	82	84.35	102.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Bagian Tata Usaha dan Keuangan**
		Peningkatan unsur SPIP	-	-	-	3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Bagian Tata Usaha dan Keuangan**

		Sekretariat Daerah															
	Meningkatnya layanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan	Persentase pelayanan Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Pimpinan/ Bagian lingkup Sekrtariat Daerah	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Bagian Tata Usaha dan Keuangan**
1	Meningkatnya layanan administrasi bidang perencanaan dan keuangan	Persentase layanan administrasi bidang perencanaan dan keuangan tepat waktu	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	**Bagian Perencanaan dan Keuangan**
2	Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja dan keuangan lingkup Sekretariat Daerah	Persentase kualitas penyusunan pelaporan kinerja dan keuangan yang sesuai aturan	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	**Bagian Perencanaan dan Keuangan**
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-	82	86,81	105,86%	-	-	-	-	-	-	**Bagian Perencanaan dan Keuangan**
		Nilai SPIP Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-	3.6	Tahap *Baseline* SPIP	Tahap *Baseline* SPIP	-	-	-	-	-	-	**Bagian Perencanaan dan Keuangan**
1	Meningkatnya layanan administrasi bidang Perencanaan	Persentase layanan administrasi bidang perencanaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**Bagian Perencanaan dan Keuangan**
2	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Lingkup	Persentase kualitas penyusunan pelaporan kinerja yang sesuai aturan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**Bagian Perencanaan dan Keuangan**

	Sekretariat Daerah																
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	84.2	101.44 %	83	82	98.79%	**Bagian Perencanaan dan Keuangan**
		Nilai SPIP Setda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6	Masih tahap *Baseline SPIP* Terintegrasi	Masih tahap *Baseline SPIP* Terintegrasi	3.7	Masih tahap *Baseline SPIP* Terintegrasi	Masih tahap *Baseline SPIP* Terintegrasi	**Bagian Perencanaan dan Keuangan**
4	Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan sesuai aturan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**Bagian Perencanaan dan Keuangan**

5. Analisa Peningkatan dan Penurunan Kinerja Kepala Bagian

SASARAN 1 Meningkatnya Layanan Administrasi Bidang Perencanaan

Indikator : Persentase Layanaan Administrasi Bidang Perencanaan

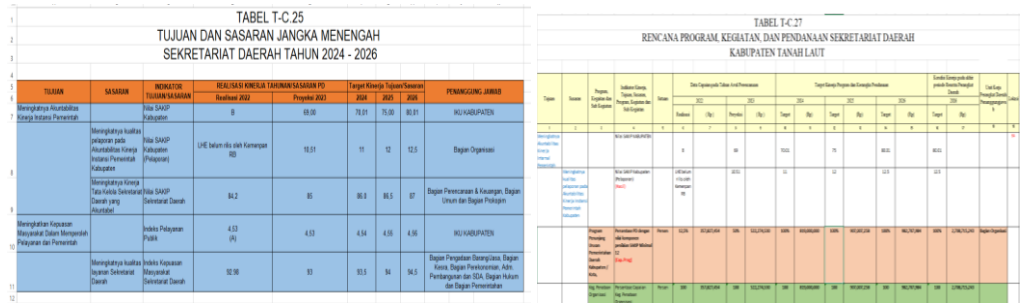
NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya layanan administrasi bidang perencanaan	Persentase layanan administrasi bidang perencanaan	100%	100%	100%	Bagian Perencanaan dan Keuangan Mengampu Misi ke- 3 "*Membangun tata kelola pemerintahan yang baik* ***(Good Governance)***"

Pada Tahun Anggaran 2023 ini pelaksanaan Indikator Kinerja Layanan Administrasi Bidang Perencanaan meliputi :

1. Rencana Strategis Sekretariat Daerah
   - Penyusunan awal Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2024-2026 berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Surat Edaran Bupati Tanah Laut Nomor 050.13/3282/Bappeda/2022 Tentang Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026, dengan melaksanakan penyusunan :
     a) Capaian Kinerja Renstra Sekretariat Daerah (Tabel T-C.23)
     b) Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah (Tabel T- C.24)
     c) Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Tahun 2024 – 2026 (Tabel T-C.25)
     d) Strategi Dan Arah Kebijakan Sekretariat Daerah (Tabel T-C. 26)
     e) Rencana Program, Kegiatan, Dan Pendanaan Sekretariat Daerah (Tabel T-C.27)
     f) Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran Rpd (Tabel T-C.28)
     g) Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah (Tabel T-B.35)

Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2024 – 2026 ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 – 2026 dan data Rancangan Awal Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut telah disampaikan ke Bappeda pada Tanggal 30 Desember 2022.

- Berdasarkan Surat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor 050.13/725/Perenc,Makro/2023 Perihal Desk Renstra SKPD Tahun 2024 – 2026 tanggal 6 Januari 2023 dilaksanakan desk Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2024 – 2026 dalam rangka penyelarasan antara Renstra SKPD dengan RPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 – 2026, dengan menitikberatkan pada Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Tahun 2024 – 2026 (Tabel T-C.25) dan Rencana Program, Kegiatan, Dan Pendanaan Sekretariat Daerah (Tabel T-C.27).



TABEL T-C.25
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2024 - 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	REALISASI KINERJA TAHUNAN/SASARAN PD		Target Kinerja Tujuan/Sasaran			PENANGGUNG JAWAB
			Realisasi 2022	Proyeksi 2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Nilai SAKIP Kabupaten	B	69,00	70,01	75,00	80,01	IKU KABUPATEN
	Meningkatnya kualitas pelaporan pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten	Nilai SAKIP Kabupaten (Pelaporan)	LHE belum rilis oleh Kemenpan RB	10,01	11	12	12,5	Bagian Organisasi
	Meningkatnya Kinerja Tata Kelola Sekretariat Daerah yang Akuntabel	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	84,2	85	86,0	86,5	87	Bagian Perencanaan & Keuangan, Bagian Umum dan Bagian Prokopim
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Dalam Mengelolah Pelayanan dan Pemerintah		Indeks Pelayanan Publik	4,53 (A)	4,53	4,54	4,55	4,56	IKU KABUPATEN
	Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah	92,96	93	93,5	94	94,5	Bagian Pengadaan Barang/Jasa, Bagian Kesra, Bagian Perekonomian, Adm. Pembangunan dan SDA, Bagian Hukum dan Bagian Pemerintahan

TABEL T-C.27
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

Data Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2024 – 2026 setelah Verifikasi oleh Tim RPD Kabupaten Tanah Laut

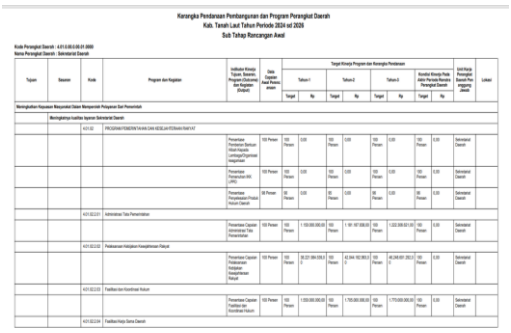


Kegiatan Desk Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2024 – 2026 dengan Tim RPD Kabupaten Tanah Laut

- Selanjutnya berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor 000.7.3/99/Perenc.Makro/2023 Perihal Penginputan Renstra SKPD Periode 2024-2026 dan Rancangan Awal Renja SKPD 2024, Sekretariat

Daerah telah melakukan penginputan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2024 – 2026 ke dalam aplikasi SIPD RI .





Hasil Input Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2024-2026 ke dalam SIPD RI

- Menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Tanah Laut Nomor 050.13/3282/Bappeda/2022 Tentang Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) Tahun 2024-2026, Sekretariat Daerah telah menyusun Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Tahun 2024-2026 dengan memuat :
  - BAB I Pendahuluan
  - BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
  - BAB III Permasalahan dan Isu – isu Strategis Perangkat Daerah
  - BAB IV Tujuan dan Sasaran
  - BAB V Strategi dan Arah Kebijakan
  - BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
  - BAB VII Kinerja Penyelenggaraan dan Bidang Urusan
  - BAB VIII Penutup



- Selanjutnya dilaksanakan Ekspose Hasil Reviu Renstra PD Tahun 2024-2026 oleh Inspektorat berdasarkan Surat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor 000.7.2/185/Perenc,Makro/2023 pada Tanggal 10 April 2023, dengan hasil reviu pada Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Tahun 2024 – 2026 agar menambahkan predikat Nilai SAKIP Kabupaten yaitu untuk nilai 70.01 (B), nilai 75 (BB), dan nilai 80.01 (A).



Dokumentasi Kegiatan Reviu Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2024 – 2026

- Kegiatan paparan hasil Reviu Renstra PD Tahun 2024-2026 dari Inspektorat, yang dipimpin oleh Pejabat Eselon II dan dihadiri oleh Pejabat Eselon III dan Penanggungjawab/Kepala Sub Bagian – bagian Lingkup Sekretariat Daerah berdasarkan surat Sekretaris Daerah Nomor 900/1423/V/Perenc. & Keu Tanggal 23 Mei 2023.



Dokumentasi Kegiatan Rapat Paparan hasil Reviu Renstra PD Tahun 2024-2026

Hasil dari Reviu Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2024-2026 disajikan pada tabel dibawah ini :

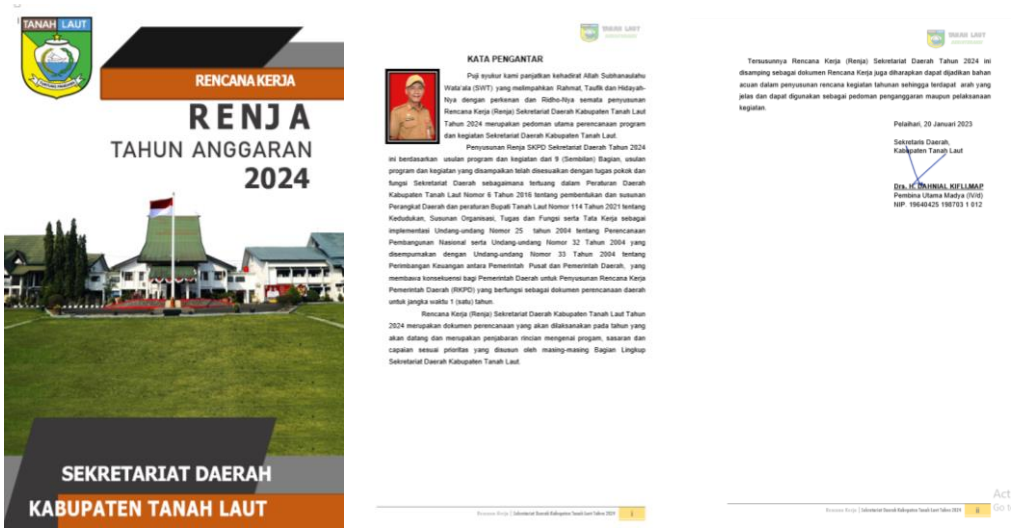
TABEL T-C.25
TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024 - 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SEBELUM					SESUDAH					PENANGGUNG JAWAB
			REALISASI KINERJA TAHUNAN/SASARAN PD		Target Kinerja Tujuan/Sasaran			REALISASI KINERJA TAHUNAN/SASARAN PD					
			Realisasi 2022	Proyeksi 2023	2024	2025	2026	Realisasi 2022	Proyeksi 2023	2024	2025	2026	
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Nilai SAKIP Kabupaten	B	69,00	70,01	75,00	80,01	B	69,00	70,01 (B)	75,00 (BB)	80,01 (A)	IKU KABUPATEN
	Meningkatnya kualitas pelaporan pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten	Nilai SAKIP Kabupaten (Pelaporan)	LHE belum rilis oleh Kemenpan RB	10,51	11	12	12,5	LHE belum rilis oleh Kemenpan RB	10,51	11	12	12,5	Bagian Organisasi
	Meningkatnya Kinerja Tata Kelola Sekretariat Daerah yang Akuntabel	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	84,2	85	86.0	86,5	87	84,2	85	86.0	86,5	87	Bagian Perencanaan & Keuangan, Bagian Umum dan Bagian Prokopim
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Dalam Memperoleh Pelayanan dari Pemerintah		Indeks Pelayanan Publik	4,53 (A)	4,53	4,54	4,55	4,56	4,53 (A)	4,53	4,54	4,55	4,56	IKU KABUPATEN
	Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah	90.44	93	93,5	94	94,5	90.44	93	93,5	94	94,5	Bagian Pengadaan Barang/Jasa, Bagian Kesra, Bagian Perekonomian, Adm. Pembangunan dan SDA, Bagian Hukum dan Bagian Pemerintahan

2. Rencana Kerja (Renja) APBD Murni Tahun Anggaran 2024

- Penyusunan awal Rancangan Rencana Kerja (Renja) APBD Murni Tahun Anggaran 2024, berdasarkan Surat Edaran Bupati Tanah Laut Nomor 050.13/048/Bappeda/2023 Tentang Penyusunan Rancangan Awal Renja SKPD Tahun 2024. Proses penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah dimulai dari Bagian-bagian melakukan penyusunan rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan Indikator Kinerjanya. Kemudian rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut dihimpun dan diformalkan dalam bentuk Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2024, selanjutnya disampaikan ke Tim RKPD BAPPEDA.



Dokumen Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) APBD Murni Sekretariat DaerahTahun Anggaran 2024

- Dilanjutkan dengan pembuatan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Tahun 2024



SK Sekretaris Daerah Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Tahun 2024

- Berdasarkan Surat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor 050.13/68/Perenc.Makro/2023 Perihal Verifikasi Rancangan Awal Renja SKPD Tahun 2024 dilaksanakan verifikasi oleh Tim RKPD Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 1 Februari 2023 dan dihadiri oleh seluruh pejabat Eselon III dan Eselon IV Lingkup Sekretariat Daerah.

REKAP ANGGARAN PER BAGIAN (PPAS)

LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH UNTUK USULAN RANCANGAN AWAL TAHUN ANGGARAN 2024

NO	B A G I A N	PROG 2024	KEG 2024	SUB KEGIATAN 2024	PAGU 2023	PAGU USULAN RANWAL 2024 (Sebelum Verif) @ SIPD	PAGU USULAN RANWAL 2024 (Setelah Verif Kegiatan) @ SIPD	PAGU 2024 Hasil Verif TAPD	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(12)
1	PERENCANAAN DAN KEUANGAN	1	3	5	23,824,560,437.00	26,216,692,209.00	26,311,892,236.00		Gaji + Tunj. ASN 111 Orang Gaji Pj. KDH + Tunj. Opr 1 Orang
2	U M U M	1	7	31	13,192,567,842.00	43,710,000,000.00	42,454,800,000.00		Gaji Non ASN 145 Orang, Belanja Kendaraan Dinas, Gedung
3	O R G A N I S A S I	1	1	3	522,274,530.00	819,000,000.00	819,000,000.00		-
4	PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	1	1	3	661,039,507.00	2,975,000,000.00	2,975,000,000.00		-
5	P E M E R I N T A H A N	1	2	4	748,876,333.00	1,315,000,000.00	1,415,000,000.00		-
6	KESEJAHTERAAN RAKYAT	1	1	3	34,747,258,672.00	38,221,984,540.00	38,221,984,540.00		Hibah 115 Organisasi + Honor Guru
7	H U K U M	1	1	3	1,150,202,670.00	1,550,000,000.00	2,050,000,000.00		-
8	PEREKONOMIAN, ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN SUMBER DAYA ALAM	1	2	4	580,948,169.00	669,625,000.00	819,625,000.00		-
9	PENGADAAN BARANG/JASA	1	1	3	1,310,774,552.00	2,200,000,000.00	2,900,000,000.00		Penyesuaian Server LPSE beserta pendukungnya
	TOTAL				**76,738,502,712.00**	**117,677,301,749.00**	**117,967,301,776.00**	-	
		3	**18**	**59**					

Page 1

Rekap Pagu Usulan Ranwal Renja Sekretaiat Daerah Tahun 2024 sebelum dan sesudah Verifikasi





Dokumentasi Kegiatan Verifikasi Rancangan Renja Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2024

- Terkait kegiatan Verifikasi terhadap pengisian Rencana Umum Pengadaan (RUP) SKPD Kabupaten Tanah Laut yang dilaksanakan pada tanggal 2 s.d 3 Maret 2023 dengan berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor 000.3/0624/BPBJ Tanggal 23 Februari 2023 Perihal Undangan Kegiatan Verifikasi RUP. Kegiatan ini dalam rangka memastikan

penginputan RUP sudah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dan diikuti oleh petugas penginpiutan RUP pada setiap SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah laut.



Dokumentasi Kegiatan Verifikasi RUP

- Kegiatan Penyusunan Buku Standar Satuan harga Barang dan Jasa tahun Anggaran 2024 serta membahas langkah-langkah usulan SSH pada SIPD RI yang dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2023 berdasarkan Surat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 032/280/BPKAD/2023 Perihal Sosialisasi Draf Awal SSH TA. 2024.

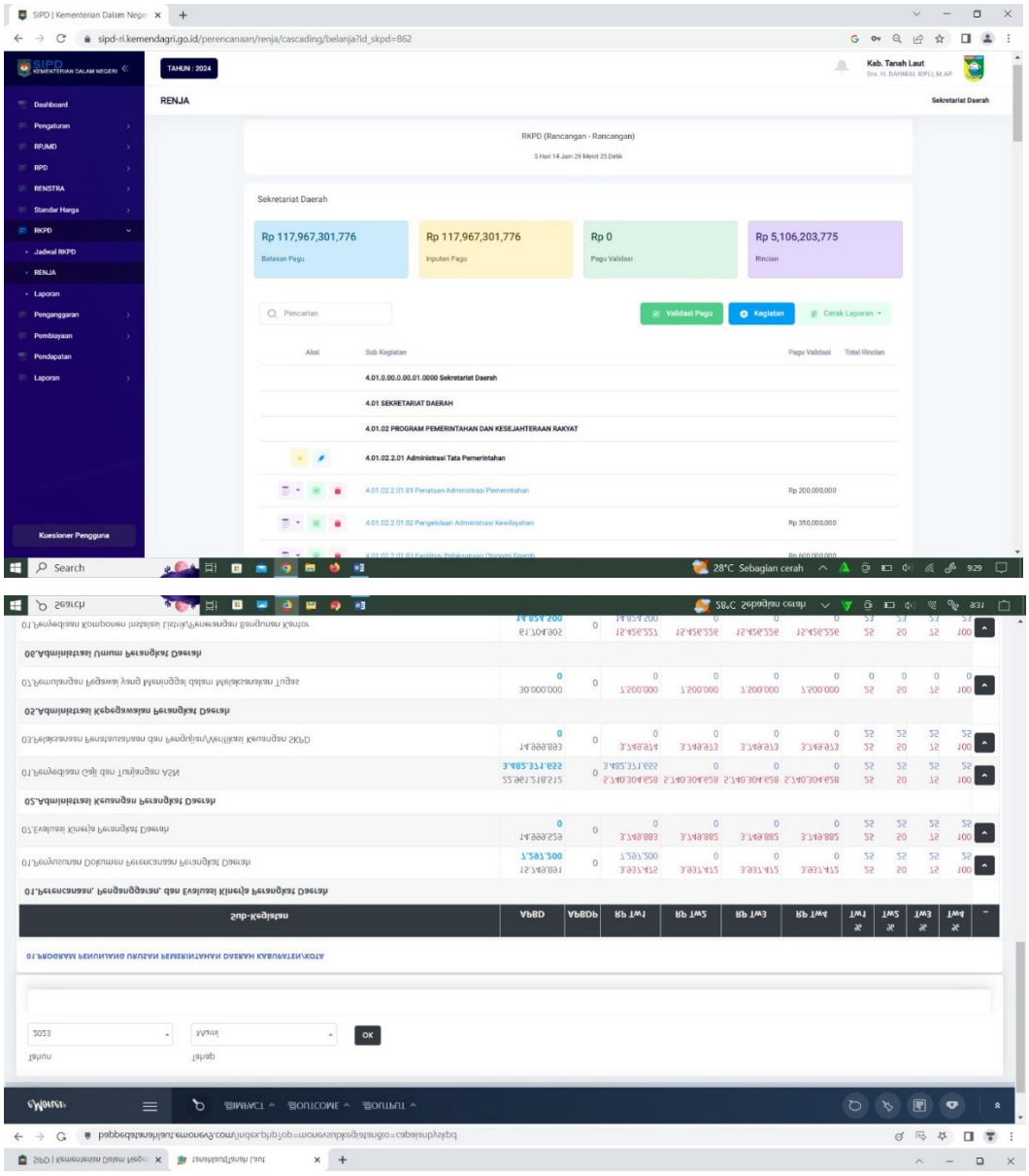


Dokumentasi Kegiatan Penyusunan Buku Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024

- Penginputan Pra-RKA Rancangan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 kedalam SIPD RI mulai tanggal 05 s.d 11 April 2023 berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor 000.7.2.4/0942/Perenc. Makro/2023 tanggal 4 April 2023 Perihal Rancangan Renja SKPD, dengan memperhatikan :
  a. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rancangan Renja SKPD menyesuaikan dengan Rancangan awal Renja SKPD yang telah diverifikasi oleh Tim RKPD Kabupaten Tanah Laut.
  b. Perhitungan Belanja Pegawai agar dihitung berdasarkan realisasi Belanja Pegawai Tahun 3034 dan menaikkan sebesar 2,5%.

Perhitungan Belanja Pegawai meliputi Gaji ASN yang dibayarkan 14 kali serta Tunjangan Kinerja yang dibayarkan 13 kali.

c. Belanja rutin Alat Tulis Kantor, Kertas dan Bahan Komputer dianggarkan secara terpusat di Sekretariat SKPD, kecuali untuk kegiatan yang menghasilkan dokumen dan ATK unutk kegiatan pelatihan/sosilaisasi/bimtek.



Dokumentasi Hasil Input Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 kedalam SIPD RI

- Kegiatan Rapat Penyusunan Rancangan Akhir Renja SKPD Tahun 2024 berdasarkan Surat Bupati Tanah Laut Nomor 000.7.3/1417/Bappeda/2023 Tanggal 22 Mei 2023 yang dilaksanakan pada Tanggal 24 Mei 2023 dan dihadiri oleh Pejabat Eselon II, Eselon III.

Penanggungjawab dan Kepala Sub Bagian dengan membahas penyampaian besaran Pagu anggaran Bagian – bagian lingkup Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2024.



Dokumentasi Kegiatan Rapat Penyusunan Rancangan Akhir Renja SKPD Tahun 2024

- Rapat kerja dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tanah Laut sesuai surat Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut Nomor 100.1.4.4/718/DPRD/2023 Tanggal 13 Juli 2023 Hal Rapat Kerja Badan Anggaran. Rapat Kerja tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah sebagai Pimpinan SKPD dan diikuti oleh seluruh Pejabat Eselon III dan Eselon IV lingkup Sekretariat Daerah dalam rangka Pembahasan KUA- PPAS Sekretariat Daerah Tahun 2024.



Dokumentasi Kegiatan Raker dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tanah Laut terkait Rancangan Renja Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2024

- Penyusunan RKA APBD Murni Tahun Anggaran 2024, berdasarkan Surat Edaran Bupati Tanah Laut Nomor 900/2371/BPKAD tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Daerah Tahun Anggaran 2024, menindaklanjuti Surat Edaran tersebut maka Bagian-bagian lingkup Sekretariat Daerah diminta menyusun RKA masing-masing Bagian sesuai dengan pedoman tersebut diatas.



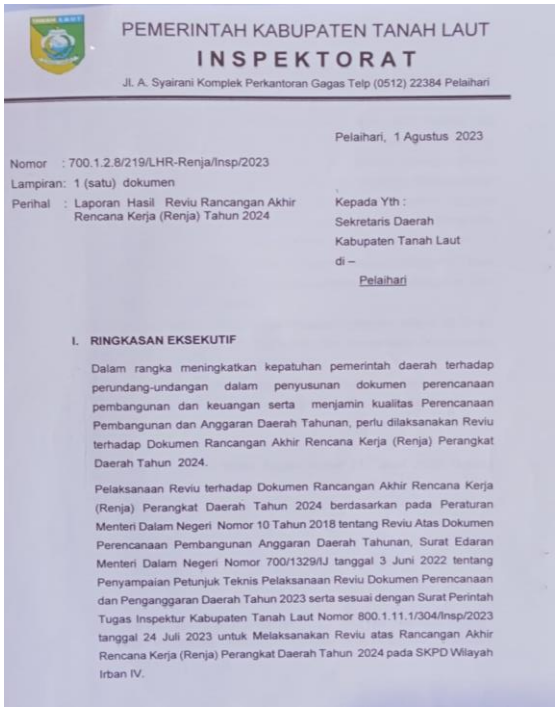
Dokumentasi Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024

- Kemudian dilanjutkan Reviu Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 dengan Tim APIP Inspektorat Kabupaten Tanah Laut.



Dokumentasi Kegiatan Reviu dengan Tim APIP Inspektorat Kabupaten

- Hasil Reviu Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 tertuang dalam Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhir Renja Sekretariat Daerah sebagaimana berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
INSPEKTORAT
Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Telp (0512) 22384 Pelaihari

Pelaihari, 1 Agustus 2023

Nomor : 700.1.2.8/219/LHR-Renja/Insp/2023
Lampiran: 1 (satu) dokumen
Perihal : Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

Kepada Yth :
Sekretaris Daerah
Kabupaten Tanah Laut
di –
Pelaihari

I. RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan pemerintah daerah terhadap perundang-undangan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan serta menjamin kualitas Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan, perlu dilaksanakan Reviu terhadap Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024.

Pelaksanaan Reviu terhadap Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Anggaran Daerah Tahunan, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/1329/IJ tanggal 3 Juni 2022 tentang Penyampaian Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah Tahun 2023 serta sesuai dengan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 800.1.11.1/304/Insp/2023 tanggal 24 Juli 2023 untuk Melaksanakan Reviu atas Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 pada SKPD Wilayah Irban IV.

- Sehubungan dengan Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 100.1.4.4/1035/DPRD/2023 Tanggal 04 Oktober 2023 Hal Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tanah Laut, maka Sekretariat Daerah melaksanakan Rapat Internal terkait Persiapan Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tanah Laut untuk pembahasan PPAS Tahun 2024, rapat ini dipimpin oleh Pejabat Eselon II dan dihadiri oleh Pejabat Eselon III dan Eselon IV/Penanggungjawab Tupoksi.





Dokumentasi Kegiatan Persiapan Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tanah Laut

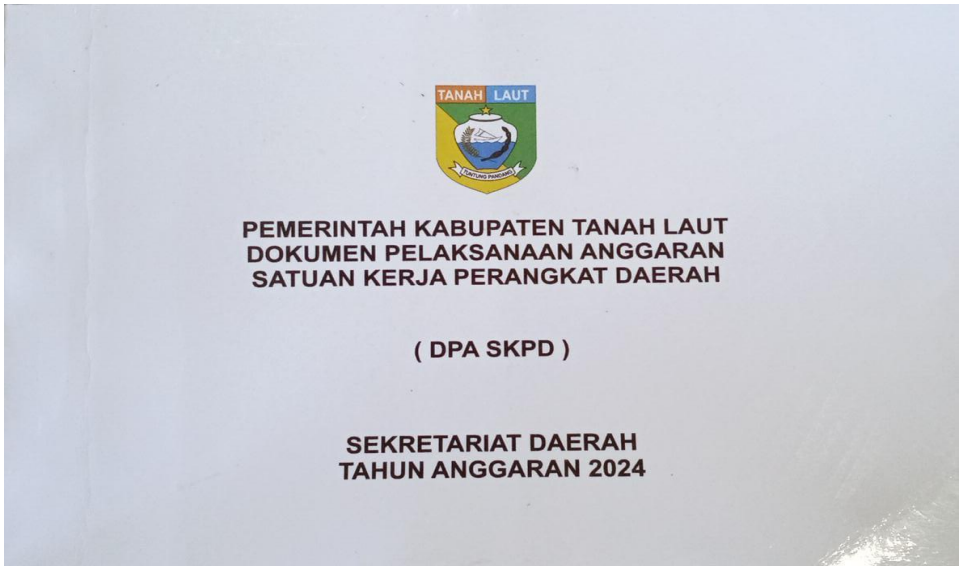
- Kegiatan Rapat Kerja Badan Anggaran dalam rangka pembasahan Raperda Kabupaten Tanah Laut tentang APBD Tahun Anggaran 2024

dengan TAPD yang dilaksanakan pada Tanggal 23 Oktober 2023 di Hotel FUGO Banjarmasin.



Dokumentasi Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPRD Tahun Anggaran 2024

- Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang APBD 2024 LD NO 5 Tgl 28 Desember 2023 dan Peraturan Bupati Tanah Laut Tentang Penjabaran APBD 2024 Nomor 119, BD No. 119, tgl 28 Desember 2023, maka diterbitkanlah DPA Sekretariat Daerah Tahun 2024 Nomor DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024, Tanggal DPA 02 Januari 2024.

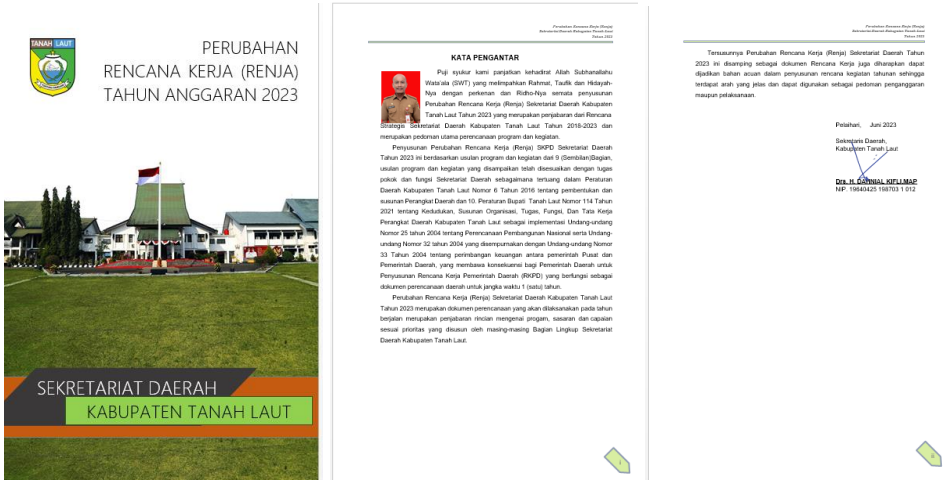


Dokumen DPA Sekretariat Daerah TA 2024

3. Rencana Kerja (Renja) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 adalah :

- Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023, berdasarkan Surat Bupati Tanah Laut Nomor 000.7.3/1523/Perenc Makro/2022 Tanggal 6 Juni 2023 perihal Perubahan Renja SKPD Tahun 2023. Proses penyusunan Rancangan Rencana

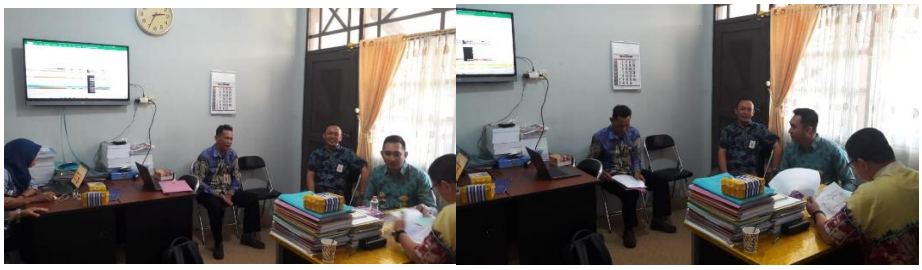
Kerja (Renja) Perubahan Sekretariat Daerah dimulai dari bagian-bagian melakukan rumusan program kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan Indikator Kinerjanya. Kemudian rumusan program kegiatan dan sub kegiatan tersebut dihimpun dan diformalkan dalam bentuk Dokumen Rencana Kerja APBD Perubahan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2023, selanjutnya disampaikan ke Tim RKPD BAPPEDA.



Dokumen Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023

- Verifikasi Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Tahun 2023 oleh Tim RKPD BAPPEDA berdasarkan Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Dearah Nomor 000.7.3/300/Perenc Makro/2023 Tanggal 20 Juni 2023, Hal Verifikasi Perubahan Renja SKPD Tahun 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2023 dan dihadiri oleh seluruh pejabat Eselon III dan Eselon IV/Penanggungjawab Tupoksi Sekretariat Daerah dengan pembahasan :

1. Urgensi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terkait Prioritas Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2023 yang sifatnya wajib
2. Penyesuaian target Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan Penyesuaian Pagu Anggaran.



Dokumentasi Kegiatan Verifikasi Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2023

- Sosialisasi Pemutakhiran Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 yang dilaksanakan pada Tanggal 23 Juni 2023 berdasarkan Surat Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Nomor 000.7.3/270/Perenc.Makro/2023 Tanggal 23 Juni 2023 dan dihadiri oleh Pejabat Perencanaan SKPD.



Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Pemutakhiran Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021

- Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tanah Laut terkait Pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 170/635/DPRD Tanggal 7 Juni 2023 yang dilaksanakan pada Tanggal 14 Juni 2023 dan dihadiri oleh Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV dan JFT/JFU dengan permintaan penjelasan terkait capaian belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan yang masih 0% dan capaian belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan dibawah 50%.





Dokumentasi Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022

- Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor 000.7.3/317/Perenc.Makro/2023 Tanggal 6 Juli 2023 Perihal Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja SKPD Tahun 2023, maka dilaksanakan Rapat Intern Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut yang dipimpin oleh Asisten Administrasi Umum dan dihadiri oleh Pejabat Eselon II dan Eselon IV pada Tanggal 10 Juli 2023. Agenda rapat Penyampaian Pagu Anggaran Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2023



Dokumentasi Kegiatan Rapat Intern Pembahasan Pagu Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2023 Lingkup Sekretariat Dareah Kabupaten Tanah Laut

- Rapat kerja dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tanah Laut sesuai Surat Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut Nomor 100.1.4.4/809/DPRD/2023 Tanggal 7 Agustus 2023 Perihal Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tanah Laut terkait pembahasan KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2023 yang dilaksanakan pada Tangal 11 Agustus 2023. Rapat Kerja tersebut dihadiri oleh Sekretaris

Daerah sebagai Pimpinan SKPD dan diikuti oleh seluruh Pejabat Eselon III dan Eselon IV/Penanggungjawab Tupoksi lingkup Sekretariat Daerah.



Dokumentasi Kegiatan Raker Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2023

- Berdasarkan Surat Edaran Bupati Tanah Laut Nomor 900/2125/BPKAD Tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (PRKA-SKPD)/Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (PRKA – SKPD) Tahun Anggaran 2023, dilaksanakan Asistensi RKA Tanggal 30 Agustus 2023 di Aula BPKAD dan dihadiri oleh seluruh PPTK Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.



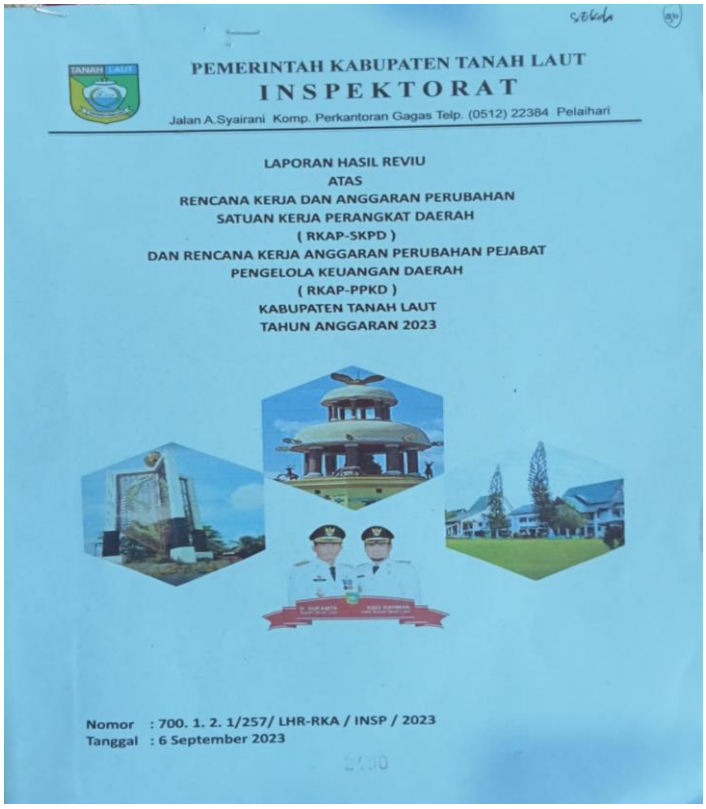
Dokumentasi Kegiatan Rapat Pembahasan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2023 di BPKAD

- Dilanjutkan pembahasan dan Reviu rumusan Program Kegiatan dan Sub kegiatan Perubahan Renja TA 2023 oleh Tim APIP di Ruang Kerja Irban IV Inspektorat Kabupaten.



Dokumentasi Kegiatan Reviu Perubahan Renja Sekretariat Daerah TA 2023

- Hasil Reviu rumusan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Renja Sekretariat Daerah TA 2023 tertuang dalam Laporan Hasil Reviu sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
INSPEKTORAT
Jalan A.Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 22384 Pelaihari

LAPORAN HASIL REVIU
ATAS
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RKAP-SKPD)
DAN RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN PEJABAT
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
(RKAP-PPKD)
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN 2023

Nomor : 700. 1. 2. 1/257/ LHR-RKA / INSP / 2023
Tanggal : 6 September 2023

- Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2023 Nomor. DPPA/B.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023 Tanggal 13 Oktober 2023.



Dokumen DPPA Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2023

3. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Daerah Tahun 2023

- Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Eselon II, Eselon III dan Eselon IV, JFU dan JFT berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor 065/0233/ORG Tanggal 24 Januari 2023 Perihal Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Nota Dinas Nomor 900/07/II/Perenc & Keu/2023 Tanggal 15 Februari Tahun 2023 Perihal Permohonan Tanda Tangan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Pejabat Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum (Pelaksana) Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut. Dalam Perjanjian Kinerja (PK) tersebut memuat Indikator Kinerja dan Target yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) pada masing-masing Bagian Lingkup Sekretariat Daerah.




PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
SEKRETARIAT DAERAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. DAHNIAL KIFLI, M.AP
Jabatan : Sekretaris Daerah
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : H. SUKAMTA
Jabatan : Bupati Tanah Laut
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, Januari 2023

Pihak Kedua,

H. SUKAMTA

Pihak Pertama,

Drs. H. DAHNIAL KIFLI, M.AP
NIP. 19640425 198703 1 012

Dokumentasi Perjanjian Kinerja (PK) PNS Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2023

- Selanjutnya ceremonial penandatangan Perjanjian Kinerja (PK) Pejabat Eselon II Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, dalam kegiatan ceremonial ini dilakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) bagi seluruh Pejabat Eselon II Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang disaksikan oleh Bupati Tanah Laut selaku Pimpinan Kepala SKPD pada tanggal 27 Februari 2023. Untuk Sekretariat Daerah penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) Eselon II tersebut diwakili oleh Sekretaris Daerah selaku Kepala SKPD.



Dokumentasi Penandatangan Perjanjian Kinerja (PK) Eselon II Sekretaris Daerah Tahun 2023

- Penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Daerah Tahun 2023 untuk Eselon II, Eselon III, Eselon IV, JFT dan JFU Lingkup Sekretariat Daerah berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor 000.7.3/1482/V/Perenc & Keu.



Dokumentasi Penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Daerah Tahun 2023

Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 untuk Eselon II, Eselon III, Eselon IV, JFT dan JFU Lingkup Sekretariat Daerah berdasarkan Nota Dinas Nomor 900/28/X/Perenc & Keu/2023 Tanggal 30 Oktober 2023 Perihal Permohonan Penandatanganan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional Tertentu Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor 000.7.3/3152/Perenc. Makro/2023 Tanggal 30 November 2023 Perihal Undangan *Focus Group Discussion* (FGD) Penyusunan Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2045.



Dokumentasi Kegiatan FGD Penyusunan RPJPD kabupaten Tanah laut

Sedangkan untuk pelayanan administrasi perencanaan dilaksanakan melalui :

1. Menyiapkan bahan - bahan Renja APBD Murni dan APBD Perubahan (RKA dan Pagu KUA-PPAS) baik saat rapat kerja dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tanah Laut maupun saat pembahasan dengan Tim RKPD BAPPEDA dan Tim TAPD BPKAD serta Tim APIP Inspektorat Kabupaten.
2. Menyusun konsep Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Daerah untuk Eselon II, Eselon III, Eselon IV, JFU dan JFT.
3. Menyusun konsep Indikator Kinerja (IKU) dan Pohon Kinerja Sekretariat Daerah untuk Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV.

Pelaksanaan Penyusunan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2023 dapat dilihat pada matriks dibawah ini :

MATRIKS PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA

SEKRETARIAT DAERAH

NO	URAIAN	TANGGAL PELAKSANAAN	KETERANGAN
RENSTRA TAHUN 2024 - 2026			
1	Berdasarkan Surat Edaran Bupati Tanah Laut Nomor 050.13/3282/Bappeda/2022 Tentang Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026	30 Desember 2022	Penyusunan TC.23 TC.24 TC.25 TC.26 TC.27 TC.28 dan TB.35
2	Berdasarkan Surat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor 050.13/725/Perenc,Makro/2023 Perihal Desk Renstra SKPD Tahun 2024-2026	6 Januari 2023	Desk Renstra Setda terkait penyusunan TC.25 dan TC.27
3	Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor 000.7.3/99/Perenc.Makro/2023 Perihal Penginputan Renstra SKPD Periode 2024-2026 dan Rancangan Awal Renja SKPD 2024	24 Februari 2023	Penginputan Renstra Tahun 2024-2026
4	Berdasarkan Surat Edaran Bupati Tanah Laut Nomor 050.13/3282/Bappeda/2022 Tentang Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026	30 Maret 2023	Penyusunan Dokumen Rancangan Renstra Sekretariat Daerah 2024-2026
5	Berdasarkan Surat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor 000.7.2/185/Perenc,Makro/2023 Tanggal 10 April 2023 Perihal Ekspose Hasil Reviu Renstra PD oleh Inspektorat	10 April 2023	Ekspose Hasil Reviu Renstra PD oleh Inspektorat
6	Berdasarkan surat Sekretaris Daerah Nomor 900/1423/V/Perenc. & Keu	23 Mei 2023	Paparan hasil Reviu Renstra PD Tahun 2024-2026 oleh Inspektorat, yang dipimpin oleh Pejabat Eselon II dan dihadiri oleh Pejabat Eselon III dan Penanggungjawab/Kepala Sub Bagian – bagian Lingkup Sekretariat Daerah
RENJA MURNI TAHUN 2024			
1	Berdasarkan Surat Edaran Bupati Tanah Laut Nomor 050.13/048/Bappeda/2023 Tentang Penyusunan Rancangan Awal Renja SKPD Tahun 2024	Disampaikan 20 Januari 2023	Penyusunan Rancangan awal Renja Setda Tahun 2024
2	SK Sekretaris Daerah Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024	23 Januari 2023	SK Renja Setda Tahun 2024
3	Berdasarkan Surat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor 050.13/68/Perenc.Makro/2023 Perihal Verifikasi Rancangan Awal Renja SKPD Tahun 2024	1 Februari 2023	Desk Verifikasi Ranwal Renja Setda Tahun 2024

4	Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor 000.3/0624/BPBJ Tanggal 23 Februari 2023	2 s.d 3 Maret 2023	Kegiatan Verifikasi RUP
5	Surat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 032/280/BPKAD/2023	6 Maret 2023	Sosialisasi Draf Awal SSH TA. 2024
6	Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor 000.7.3/99/Perenc.Makro/2023 Perihal Penginputan Renstra SKPD Periode 2024-2026 dan Rancangan Awal Renja SKPD 2024	28 Februari 2023	Penginputan Rancangan Awal Renja 2024 ke dalam SIPD RI
7	Surat Sekretaris Daerah Nomor 000.7.2.4/0942/Perenc. Makro/2023 tanggal 4 April 2023 Perihal Rancangan Renja SKPD	05 s.d 11 April 2023	Penginputan Pra-RKA Rancangan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 kedalam SIPD RI
8	Berdasarkan Surat Bupati Tanah Laut Nomor 000.7.3/1417/Bappeda/2023 Tanggal 22 Mei 2023	24 Mei 2023	Rapat Penyusunan Rancangan Akhir Renja SKPD Tahun 2024
9	Surat Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut Nomor 100.1.4.4/718/DPRD/2023	13 Juli 2023	Rapat Kerja Badan Anggaran
10	Penyusunan RKA APBD Murni Tahun Anggaran 2024, berdasarkan Surat Edaran Bupati Tanah Laut Nomor 900/2371/BPKAD tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024		Penyusunan RKA di BPKAD
11	Reviu dengan Tim APIP Inspektorat Kabupaten	25 September 2023	Reviu RKA
10	Sehubungan dengan Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 100.1.4.4/1035/DPRD/2023 Tanggal 04 Oktober 2023 Hal Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tanah Laut	12 Oktober 2023	Sekretariat Daerah melaksanakan Rapat Internal terkait Persiapan Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tanah Laut yang dipimpin oleh Pejabat Eselon II dan dihadiri oleh Pejabat Eselon III dan Eselon IV
RENJA PERUBAHAN TAHUN 2023			
1	Surat Bupati Tanah Laut Nomor 000.7.3/1523/Perenc Makro/2022	6 Juni 2023	Perubahan Renja SKPD Tahun 2023
2	Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Dearah Nomor 000.7.3/300/Perenc Makro/2023 Tanggal 20 Juni 2023	22 Juni 2023	Verifikasi Perubahan Renja SKPD Tahun 2023
3	Surat Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Nomor 000.7.3/270/Perenc.Makro/2023	23 Juni 2023	Sosialisasi Pemutakhiran Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021
4	Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 170/635/DPRD Tanggal 7 Juni 2023	14 Juni 2023	Pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022
5	Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor 000.7.3/317/Perenc.Makro/2023 Tanggal 6 Juli 2023	10 Juli 2023	Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja SKPD Tahun 2023
6	Surat Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut Nomor 100.1.4.4/809/DPRD/2023 Tanggal 7 Agustus 2023	11 Agustus 2023	Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tanah Laut terkait KUA-PPAS Tahun Anggaran 2023

7	Berdasarkan Surat Edaran Bupati Tanah Laut Nomor 900/2125/BPKAD Tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (PRKA-SKPD)/Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (PRKA – SKPD) Tahun Anggaran 2023	30 Agustus 2023	Rapat Pembasahan Perubahan Renja Tahun Anggaran 2023
8	Riviu rumusan Program Kegiatan dan Sub kegiatan Renja oleh Tim APIP di Ruang Kerja Irban IV	31 Agustus 2023	Riviu terhadap beberapa Program Kegiatan dan Sub Kegiatan khususnya Bagian Prokopim, Umum, Hukum, dan Pemerintahan
9	Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2023 Nomor. DPPA/B.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023 Tanggal 13 Oktober 2023.	13 Oktober 2023	Terbitnya DPPA Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2023

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain:

- Kurangnya kemampuan melakukan proyeksi kegiatan secara efektif
- Pedoman atau regulasi Penyusunan Rancangan Perencanaan Awal Kegiatan cenderung belum tervalidasi sampai ke sub kegiatan yang ada di SKPD.
- Pelaksanaan pada SIPD sering terkendala akibat gangguan server

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Perlu penetapan pedoman atau regulasi dalam penyusunan Rancangan perencanaan awal sesuai dengan aturan terbaru.
- Sistem pada SIPD agar lebih disempurnakan lagi
- Komunikasi yang intens dengan Tim Kinerja Sekretariat Daerah melalui *Whatsapp Group*
- Melakukan koordinasi secara intens terkait penyusunan perencanaan dari Bagian-Bagian lingkup Sekretariat Daerah

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Selalu melaksanakan kegiatan perencanaan sesuai dengan SOP
- Meningkatkan kompetensi para petugas penyusun perencanaan secara berkala
- Bimtek tentang teknik penyusunan perencanaan dengan BAPPENAS

SASARAN 2 Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Lingkup Sekretariat Daerah

Indikator 1 : Persentase Kualitas Penyusunan Pelaporan Kinerja yang sesuai Aturan

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
2	Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja lingkup Sekretariat Daerah	Persentase kualitas penyusunan pelaporan kinerja yang sesuai aturan	100%	100%	100%	Bagian Perencanaan dan Keuangan Mengampu Misi ke- 3 "*Membangun tata kelola pemerintahan yang baik* ***(Good Governance)**"*

Indikator ini dilaksanakan dengan mengevaluasi bahan penyusunan Laporan Kinerja yaitu :

1. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023 dengan melaksanakan :
   - Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi dan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Triwulan I pada Tanggal 6 April 2022.



- Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi dan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Triwulan II pada Tanggal 06 Juli 2023



- Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi dan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Triwulan III pada Tanggal 22 Desember 2022.



- Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi dan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Triwulan IV pada Tanggal 5 Januari 2024



- Sehubungan dengan akan berakhirnya Realisasi Pelaksanaan Kegiatan untuk Triwulan III Tahun Anggaran 2023 maka dilaksanakan rapat internal berdasarkan Surat Sekretaris Dareah Nomor 900.1.3.3/2141/VIII/Perenc. &Keu dilaksanakan pada Tanggal 25 Agustus 2023 yang di Pimpin oleh Pejabat Eselon II dan dihadiri oleh Seluruh Pejabat Eselon III, Eselon IV dan JFT/JFU.



Dokumentasi kegiatan Rapat Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

2. Penyusunan LPPD Tahun 2022

   Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor 100.1.7/2934/PEM/2023 Tanggal 13 November 2023 Hal Workshop Persiapan Penyusunan LPPD Tahun 2024 untuk Tahun Anggaran 2023 dan Evaluasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD

Tahun 2023 Berdasarkan LPPD tahun 2023 yang dilaksanakan pada Tanggal 22 s.d 25 November 2023 di Hotel Yuan Garden Pasar Baru,Jakarta Pusat.





Dokumentasi Kegiatan Workshop LPPD

Setelah dilaksanakannya Workshop LPPD Tahun 2023 dengan Kemendagri, selanjutnya disusun Dokumen LPPD Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :



3. Laporan SPIP Tahun 2023

Sekretariat Daerah, sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya menyelenggarakan SPIP. Agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu, diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah dalam rangka mengamankan upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Selanjutnya pelaksanaan SPIP Lingkup Sekretariat Daerah dituangkan dalam bentuk laporan SPIP Sekretariat Daerah untuk Semester I dan Semester II Tahun 2023 sebagaimana berikut :



Dalam rangka penyusunan Risk Register SKPD Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut dilakukan pendampingan Penyusunan Risk Register SKPD oleh BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan dan Inspektorat

Kabupaten Tanah Laut yang dilaksanakan pada Tanggal 19 Desember 2023 di Aula Inspektorat Kabupaten Tanah Laut.



Kegiatan Desk Risk Register SKPD dengan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan



Dokumen Risk Register Sekretariat Daerah Tahun 2023 setelah Desk/Pendampingan oleh BPKP Provinsi Kalimantan Selatan.

4. Laporan Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa

   Berdasarkan Surat Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 700.1.2.8/306/INSP/2023 Tanggal 15 Maret 2023 Perihal Permintaan Data Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Triwulan I Tahun Anggaran 2023 bahwa semua SKPD diminta untuk menyampaikan hal tersebut diatas melalui SIERA PA/PBJ BPKP dan di upload pada Link Google Drive yang tersedia. Laporan Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Triwulan I Tahun Anggaran 2023 untuk Sekretariat Daerah sebagai berikut :



Dokumen PA PBJ Sekretraiat Daerah Tahun 2023

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas terdapat beberapa kendala antara lain :

- Belum optimal melakukan reviu kinerja internal secara berkala untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan kinerja serta solusi yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik.
- Beberapa Bagian-Bagian Lingkup Sekretariat Daerah tidak menyampaikan data capaian kinerja secara tepat waktu

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Melakukan reviu kinerja internal secara berkala
- Intensitas informasi melalui *WhatsApp Grup* “Tim Kinerja”.

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan kedepannya adalah :

- Melakukan monev secara berkala dan berkelanjutan
- Menyampaikan surat permintaan data kinerja dengan mencantumkan batas waktu

SASARAN 3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD

Indikator 1 : Nilai SAKIP Sekretariat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	83	82	98.79%	Bagian Perencanaan dan Keuangan Mengampu Misi ke- 3 "*Membangun tata kelola pemerintahan yang baik* ***(Good Governance)***"

Pelaksanaan IKU Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD diawali dengan :

- Pelaksanaan Asistensi Peningkatan Implementasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi dengan Kemenpan dan RB berdasarkan Surat Bupati Tanah Laut Nomor 000.8.6.3/2937/ORG Tanggal 13 November 2023, Kegiatan Asistensi ini dipimpin langsung oleh Pj. Bupati Tanah laut dan dihadiri oleh seluruh Kepala SKPD Lingkup Kabupaten Tanah Laut, dengan narasumber dari Kemenpan dan RB.



Dokumentasi Kegiatan Asistensi Implementasi SAKIP dan RB

- Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Daerah Tahun 2023 berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor : 000.8.3/3200/ORG Tanggal: 4 Desember 2023 Hal Penyampaian Laporan Kinerja (LKj) SKPD.
- Dilanjutkan rapat intern dengan Tim Kinerja Sekretariat Daerah pada tanggal 9 Januari 2024 dengan agenda rapat :

1. Monitoring dan Evaluasi Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Daerah Tahun 2022.

2. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Daerah Tahun 2023.



- Dokumen Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Daerah Tahun 2023 telah disampaikan ke Bagian Organisasi pada tanggal 02 Februari 2024.
- Pada tanggal 3 Januari 2024 disampaikan realisasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah yang selaras dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten/RPJMD, dengan tabel perbandingan sebagai berikut :



- Telah dilaksanakan asistensi berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor 000.8.6.3/0167/ORG Tanggal 19 Januari 2024 Hal Asistensi Pohon Kinerja, Laporan Kinerja (LKj) dan TLHE SAKIP SKPD dengan Kemenpan dan RB, dengan hasil rekomendasi sebagai berikut :

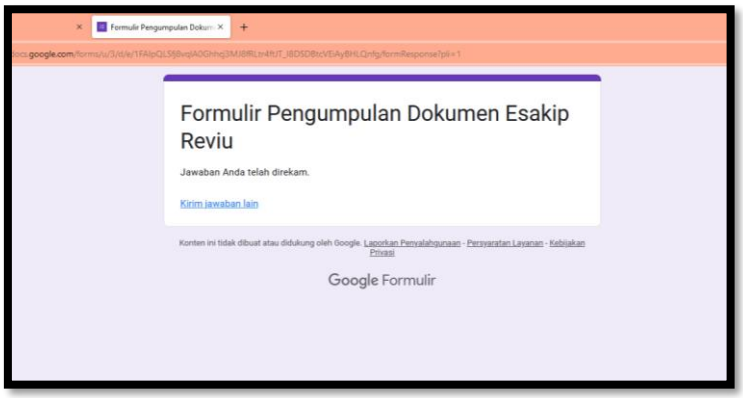
No	Catatan Hasil Asistensi	Tindak Lanjut Asistensi	BAB (Halaman)	Bagian
1	Agar ditambahkan analisa terkait efektifitas dan efisiensi antara capaian kinerja dengan realisasi anggaran pada analisa Eselon II dan Eselon III	Telah ditambahkan analisa terkait efektifitas dan efisiensi antara capaian kinerja dengan realisasi anggaran pada analisa Eselon II dan Eselon III	BAB III AKUNTABILITAS ESELON II **(106)**	Bagian Perencanaan dan Keuangan
		Telah dibuat tabel efektifitas dan efisiensi antara capaian kinerja dengan realisasi anggaran Eselon II dan Eselon III	BAB III AKUNTABILITAS **(485)**	Bagian Perencanaan dan Keuangan
	Agar ditambahkan analisa terkait kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja	Telah ditambahkan analisa terkait kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja pada analisa BAB III AKUNTABILITAS Bagian – bagian Lingkup Sekretariat Daerah	BAB III AKUNTABILITAS	Seluruh Bagian Lingkup Sekretariat Daerah
	Agar upload Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 pada website resmi Sekretariat Daerah	Telah di upload Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 pada website resmi Sekretariat Daerah	http://setda.tanahlautkab.go.id/administrator	Bagian Prokopim dan Perencanaan dan Keuangan
	Agar menambahkan dokumen Monitoring dan Evaluasi Semester I Tahun 2023 Bagian PBj	Telah ditambahkan dokumen Monitoring dan Evaluasi Semester I Tahun 2023 Bagian PBj	SAKUNTALA	Bagian PBJ
	Agar menambahkan dokumen Monitoring dan Evaluasi Semester I Sekretariat Daerah Tahun 2023	Telah ditambahkan dokumen Monitoring dan Evaluasi Semester I Sekretariat Daerah Tahun 2023	SAKUNTALA	Bagian Perencanaan dan Keuangan



Dokumentasi Kegiatan Asistensi Laporan Kinerja (LKj)

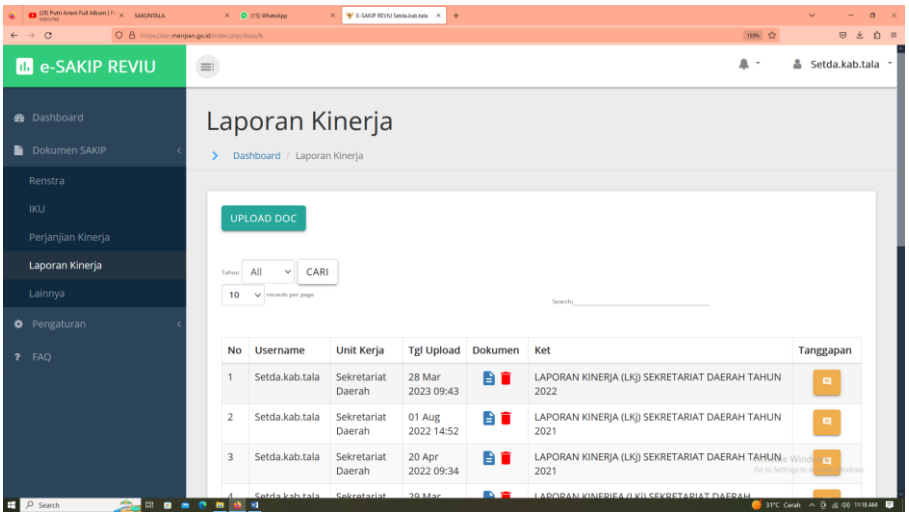
Sekretariat Daerah Tahun 2023

- Upload Dokumen SAKIP Sekretariat Daerah Tahun 2022 https://bit.ly/DokumenESAKIPREVIU2022 berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor 000.8.6.3/0542/ORG Tanggal 22 Februari 2023 Perihal Persiapan Upload Dokumen SAKIP pada ESR Menpan dan RB Tanggal 1 Maret 2023.



Upload Dokumen LKj Pertama ke Google Form

- Permintaan Data Dukung dan Matriks Tindak Lanjut unutk Evaluasi RB dan AKIP Sekretariat Daerah Tahun 2023 berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor 000.8.6.3/0542/ORG Tanggal 22 Februari 2023 melalui aplikasi e-SAKIP Review paling lambat Tanggal 10 Maret 2023.



Upload Dokumen Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022 ke ESR Menpan RB

- Pengisian data Aplikasi Penilaian AKIP Secara Mandiri berdasarkan Surat Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 700.1.1.3/514/Insp/2023 Tanggal 23 Mei 2023 Perihal Penilaian Mandiri SAKIP SKPD melaui SAKUNTALA pada Tanggal 29 Mei 2023.



Kegiatan Pengisian data Aplikasi Penilaian AKIP Secara Mandiri

(Aplikasi SAKUNTALA)

- Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) SKPD berdasarkan Surat Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 700.1.2.1/166-LHE AKIP/Insp/2023 Tanggal 27 Juni 2023 bahwa Sekretariat Daerah memperoleh nilai sebesar **82** dengan kategori **A (Memuaskan)** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA SKPD	PERENCANAAN KINERJA (30 %)	PENGUKURAN KINERJA (30%)	PELAPORAN KINERJA (15%)	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL (25%)	NILAI TOTAL

SEKRETARIAT DAERAH	**24.6**	**24.6**	**12.3**	**20.5**	**82 A**

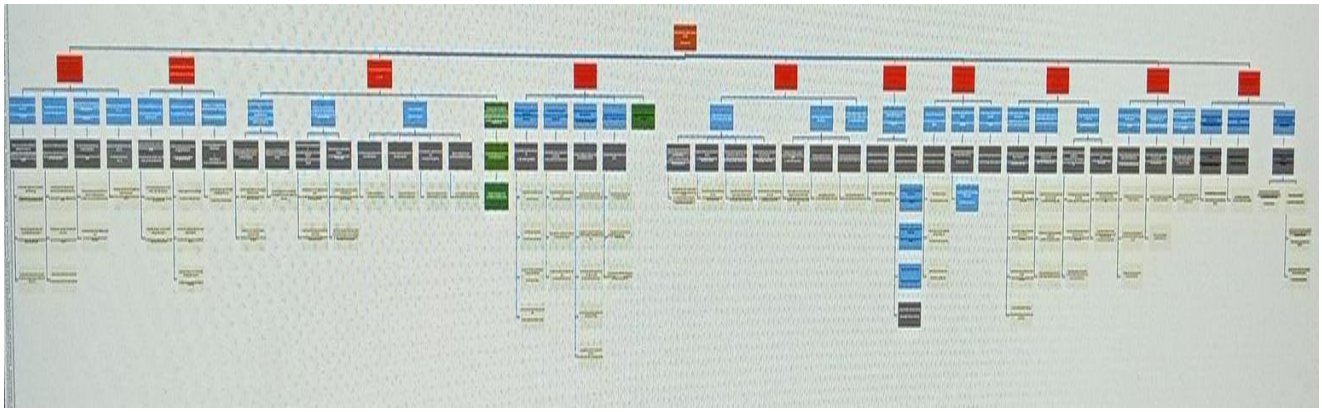
- Tindak Lanjut Asistensi Pohon Kinerja, Laporan Kinerja (LKj) dan TLHE SAKIP SKPD berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor 000.8.6.3/0281/ORG Tanggal 30 Januari 2024, maka dengan ini dilaksanakan kegiatan rapat intern perbaikan Pohon Kinerja berdasarkan hasil desk dengan Kemenpan dan RB.





Dokumentasi Kegiatan Rapat Hasil Asistensi Pohon Kinerja dengan Kemenpan dan RB

Selanjutnya hasil dari rapat intern tersebut tersusunlah Pohon Kinerja Bagian - Bagian Lingkup Sekretariat Daerah untuk Tahun 2024, dengan gambaran sebagai berikut :



Pohon Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2024

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain:

- Kurang tajamnya analisa terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) masing - masing Bagian
- Petugas penyusun laporan kinerja kurang memahami sepenuhnya Sistem AKIP;
- Anggota Tim Penyusunan SAKIP dari Bagian-Bagian dalam menyampaikan data tidak tepat waktu; dan
- Kurang cermatnya dalam hal penyajian data.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Meningkatkan kompetensi petugas penyusun Laporan Kinerja;
- Rapat secara berkala dalam rangka membahas penyajian data dalam dokumen Laporan Kinerja; dan
- Intensitas komunikasi melalui *WhatsApp Group* dengan “Tim Kinerja” Sekretariat Daerah.

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Agar lebih mengoptimalisasikan aplikasi SAKUNTALA sehingga tidak terjadi lagi kendala upload data;
- Melaksanakan Bimtek terkait penyusunan Laporan Kinerja;
- Melaksanakan Monev terkait capaian kinerja secara berkala;
- Koordinasi lebih intens dengan Pembina SAKIP Kabupaten; dan
- FGD

SASARAN 3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD

Indikator 2 : Nilai SPIP Sekretariat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	Nilai SPIP Sekretariat Daerah	3.7	Masih tahap *baseline SPIP* Terintegrasi	Masih tahap *baseline SPIP* Terintegrasi	Bagian Perencanaan dan Keuangan Mengampu Misi ke- 3 "*Membangun tata kelola pemerintahan yang baik* (***Good Governance***)"

Pengendalian Intern Lingkup Sekretariat Daerah telah melaksanakan 5 (lima) unsur SPIP, yaitu :

1) Lingkungan Pengendalian;
2) Penilaian Risiko;
3) Kegiatan Pengendalian;
4) Informasi dan Komunikasi;
5) Pemantauan Pengendalian Internal.

Pada Tahun 2023 ini Pelaksanaan Kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diawali dengan Sosialisasi Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 94 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang dilaksanakan pada Tanggal 21 November 2023 di Aula Inspektorat Kabupaten Tanah Laut.



Kegiatan Sosialisasi Peraturan Bupati Tentang SPIP Tahun 2023

Selanjutnya Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4/Kep-Sekda/2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Berdasarkan Undangan Sekertaris Daerah Nomor 700.1.11.1/3156/Insp/2023 Tanggal 14 Desember 2023 Perihal Undangan Pendampingan Penyusunan Risk Register SKPD yang dilaksanakan pada Tanggal 19 Desember 2023 di Aula Inspektorat Kabupaten Tanah Laut, Penyusunan Risk Register ini didampingi oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.



Dokumentasi Kegiatan Penyusunan Risk Register Tahun 2023

Pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Sekretariat Daerah Tahun 2023 dapat dilihat pada matriks dibawah ini :

MATRIKS PELAKSANAAN PENILAIAN MANDIRI SPIP TERINTEGRASI

SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2023

NO	URAIAN KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN	KETERANGAN
1	Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 94 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	21 November 2023	Sosialisasi Peraturan Bupati
2	Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4/Kep-Sekda/2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.	Januari 2023	Keputusan Sekretaris Daerah tentang SPIP
3	Berdasarkan Undangan Sekertaris Daerah Nomor 700.1.11.1/3156/Insp/2023 Tanggal 14 Desember 2023 Perihal Undangan Pendampingan Penyusunan Risk Register SKPD	19 Desember 2023	Pendampingan Penyusunan Risk Register SKPD

4	Menyampaikan Penyusunan Dokumen Risk Register kepada Inspektorat Kabupaten Tanah Laut	22 Desember 2023	Penyampaian Dokumen Risk Register

Pelaksanaan Pengendalian Intern Lingkup Sekretariat Daerah melaksanakan 5 (Lima) unsur SPIP dan 25 (Dua Puluh Lima) Sub Unsur dan telah diformalkan dalam bentuk laporan SPIP Sekretariat Daerah Semester I dan Semester II Tahun 2023, dan pengendalian intern tersebut telah menjabarkan pencapaian 4 (Empat) tujuan SPIP yaitu :

NO	TUJUAN SPIP	PENCAPAIAN TUJUAN
1	Efektivitas dan Efisiensi	Capaian Fisik Kegiatan 98.34% dan realisasi keuangan 92.27%, dalam artian ada efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dikarenakan capaian fisik kegiatan lebih besar dibanding dengan realisasi keuangan
2	Keandalan Pelaporan Keuangan dan Kepegawaian	A. Pelaporan Keuangan melalui : 1. SIPD dan FMIS, disamping itu juga telah dilaksanakan rekon keuangan dan rekon pendapatan pertriwulan 2. Laporan Keuangan Akhir Tahun Sekretariat Daerah (CALK) Tahun 2023 3. Laporan Keuangan baik untuk anggaran belanja dan pendapatan dilaksanakan secara bulanan, triwulan, dan tahunan 4. Melaksanakan monev terhadap realisasi belanja dan realisasi pendapatan per triwulan B. Pelaporan Kepegawaian melalui : 1. Daftar Urut Kepangkatan (DUK) 2. Nominatif PNS Sekretariat Daerah 3. Pelayanan Administrasi Kepegawaian melalui aplikasi SIMPEG, SIMFONI, SIDIKA, SKP E-KITA dan SIAB 4. Laporan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Semester I dan Semester II 5. Pengelolaan Kearsipan 6. Pencatatan Surat Masuk dan Surat Keluar
3	Pengamanan Aset	Adanya Surat Edaran Bupati Tanah Laut Nomor 900/2873/BPKAD/XI/2023 Tentang Langkah – Langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2023 yang terkait

		dengan Penatausahaan Aset dan Pemanfaatan dan Pengendalian Aset. Pengamanan aset telah dilakukan melalui : 1. Laporan BMD Sekretariat Daerah secara berkala yaitu laporan bulanan, triwulan dan tahunan 2. Pencatatan aset melalui KIB (Kartu Inventaris Barang) 3. Berita acara pemakaian aset 4. Laporan BMD melalui SIMDA BMD
4	Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang - undangan	Menindaklanjuti LHP dari BPK/BPKP yaitu : 1. Belum tuntasnya regulasi yang mendukung kegiatan penyediaan air bersih (Bag. Perekonomian, Adm Pemb dan SDA). 2. Belum tertibnya penatausahaan aset tetap Kabupaten Tanah Laut (Bag. Umum) 3. Belum tuntasnya pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang dioperasikan pihak lain pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Dinas Kepemudaan dan Olahraga Belum Sesuai Ketentuan. (Bag. Umum) 4. Belum tuntasnya Aset Tak berwujud yang sudak tidak digunakan lagi dalam Operasional Pemerintahan Belum diusulkan untuk dihapuskan. (Bag. Umum)

Dalam rangka percepatan penyelesaian tindal lanjut temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dimana pada Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dijelaskan pada Ayat (1) Pejabat Wajib Menindaklanjuti Rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dan sesuai dengan Amanat Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal/Eksternal pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, maka diperlukan rekonsiliasi dengan SKPD yang masih terdapat temuan yang belum ditindaklanjuti dan status temuan yang belum dianggap tuntas oleh pihak BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas telah dilaksanakan rekonsiliasi tindak lanjut hasil Pemeriksaan BPK pada tanggal 13 s.d 15 Februari 2023 dengan menghadirkan pejabat PIC Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan seluruh SKPD Lingkup Pemerintah

Kabupaten Tanah Laut, berdasarkan Surat Bupati Tanah Laut Nomor 800/0449/Insp/2023 Perihal Rekonsiliasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK.



Dokumentasi Kegiatan Rekonsiliasi TLHP BPK RI Tahun 2023

Selanjutnya dilaksanakan Pemeriksaan Intern atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 terkait Indikasi Kelebihan Pembayaran Tunjangan anak pada Sekretariat Daerah, kegiatan konfirmasi data tersebut dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2023 berdasarkan Surat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 900/165/II/BPKAD/2023 Perihal Konfirmasi Atas Indikasi Temuan Kelebihan Tunjangan Anak TA 2022.

Sebagai tindak lanjut terhadap kegiatan rekonsiliasi TLHP BPK RI, maka dilaksanakan kegiatan konfirmasi TLHP BPK RI pada tanggal 1 Maret 2023 berdasarkan Surat Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 800/231/INSP/2023 Perihal Konfirmasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI.



Dokumentasi Kegiatan Konfirmasi TLHP BPK RI Tahun 2023

Status Temuan untuk Sekretariat Daerah termuat didalam dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dibawah ini :



MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS MANAJEMEN ASET TAHUN ANGGARAN 2007
NOMOR LHP: TANGGAL

No	SKPD	TEMUAN	REKOMENDASI	STATUS	DOKUMEN TINDAK LANJUT	Hasil Verifikasi BPK Per 23 DESEMBER 2022	Dokumen yang Telah Ditindaklanjuti SKPD
1	2	3	4	5	6	7	
1	SEKRETARIAT DAERAH	Bangunan dan Gedung Milik Pemerintah Provinsi Kalsel Senilai Rp1.155.123.000,00 Tercatat Sebagai Aset Milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	BPK RI merekomendasikan Bupati Tanah Laut untuk: a. Segera mengkonfirmasi kejelasan status kepemilikan atas bangunan tersebut kepada pihak Provinsi Kalimantan Selatan selaku pengguna barang pada saat ini dan menetapkan status barang (FPI dan PPI) dengan Keputusan Kepala Daerah;	BELUM TUNTAS	a. Bupati Tanah Laut meindaklanjuti dengan Surat Bupati Tanah Laut No 700/311-I.E/Bawaskab tgl 19 Agustus 2008, yang memerintahkan kepada Kepala BPKKD untuk segera mengkonfirmasi kejelasan status kepemilikan atas bangunan tersebut kepada pihak Provinsi Kalimantan Selatan; . *) Ditindaklanjuti dengan Surat Setda Kab Tala No.027/1172/DPPKA/2011 tgl 29 Des 2011 kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov.Kalsel agar memberikan konfirmasi dan penjelasan secara tertulis atas kejelasan status penguasaan maupun penggunaan aset FPI dan PPI. (TL Des 2011). b. Disampaikan konfirmasi atas aset FPI Muara Kintap & PPI Swarangan melalui Surat Kepala Dinas Perikanan & Kelautan Provinsi Kalsel No. 027/1317-UMPEG/DISKANLUT tgl 28 Desember 2011 perihal Konfirmasi atas aset FPI Muara Kintap dan PPI Swarangan. (TL 30 Sep 2012) 1. Ditindaklanjuti dengan Surat Plh. Kepala Dinas Perikanan dan kelautan Provinsi Kalimantan selatan Nomor : 027/1317-Umpeg/Diskanlut Tanggal 28 Mei 2012 Kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalsel Perihal Konfirmasi atas aset FPI Muara Kintap dan PPI Swarangan 2. Ditindaklanjuti dengan surat Sekretaris Daerah Nomor : 032/3755/PA/BPKAD/XII/2020 Tanggal 30 Desember 2020 Kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalsel Perihal Konfirmasi atas Status Aset Pelabuhan Perikanan (PP) Swarangan. 3. Ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 188.45/133-KUM/2012 tentang Penetapan status penggunaan barang milik daerah pada 46 (empat puluh enam)SKPD Kab. Tala TA 2012 4. Ditindaklanjuti dengan Buku Inventaris Gabungan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Belum sesuai rekomendasi karena belum ada penetapan status barang (FPI dan PPI) dengan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Status Barang.	

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
PEMERIKSAAN KINERJA PENYEDIAAN AIR BERSIH PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT PDAM KABUPATEN TANAH LAUT DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA TAHUN 2014 DAN SEMESTER I TAHUN 2014
NOMOR LHP: 27/LHP/XIX.BJM/12/2014 TANGGAL

No	SKPD	TEMUAN	REKOMENDASI	STATUS	DOKUMEN TINDAK LANJUT	Hasil Verifikasi BPK Per 23 DESEMBER 2022	Dokumen yang Telah Ditindaklanjuti SKPD
1	2	3	4	5	6	7	
1	BAGIAN EKONOMI	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Belum Melakukan Monitoring dan Evaluasi Atas Kegiatan Penyediaan Air Bersih Secara Memadai	Menetapkan SOP tentang monitoring dan evaluasi penyediaan air bersih	BELUM TUNTAS Dokumen SOP	disampaikan Instruksi Bupati Tanah Laut Nomor 700/363/Inspektorat/2015, Tanggal 13 Januari 2015 (update per 29/06/2015)	belum sesuai rekomendasi	

Activate Windows

Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK – RI) yang dilaksanakan pada Tanggal 6 s.d 8 Juni 2023 dihadiri oleh Kasubbag Pengelola Keuangan, berdasarkan Surat Bupati Tanah Laut Nomor 800/1468/Insp/2023 Tanggal 30 Mei 2023.



Dokumentasi Kegiatan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK – RI) Tahun 2023

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain:

- Petugas penyusun laporan kinerja kurang memahami maksud unsur-unsur SPIP;
- Kurang cermatnya dalam hal penyajian data

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Melakukan koordinasi secara intens dengan Tim Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP Terintegrasi.
- Meningkatkan kompetensi petugas penyusun laporan agar lebih memahami unsur-unsur SPIP
- Rapat secara berkala dalam rangka membahas penyajian data dalam dokumen SPIP

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Melaksanakan Bimtek terkait Manjemen Risiko
- Melaksanakan Monev terkait Rencana Tindak Lanjut Risiko
- Koordinasi lebih intens dengan Pembina SPIP Kabupaten
- FGD

SASARAN 4 Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah

Indikator : Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan sesuai aturan

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
2	Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan sesuai aturan	100%	100%	100%	Bagian Perencanaan dan Keuangan Mengampu Misi ke- 3 "*Membangun tata kelola pemerintahan yang baik* (***Good Governance***)"

Sedangkan untuk pelayanan administrasi keuangan dilaksanakan melalui penatausahaan keuangan, monitoring dan evaluasi intern terhadap capaian keuangan per Triwulan, melakukan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan anggaran Bagian-Bagian lingkup Sekretariat Daerah serta monitoring dan evaluasi penerapan SPI dengan menjalankan prinsip-prinsip efektif dan efisien anggaran, pelaporan keuangan yang andal, pengamanan asset BMD dan ketaatan terhadap peraturan.

Penatausahaan Keuangan Daerah Lingkup Sekretariat Daerah dilaksanaan dengan berpedoman pada Surat Edaran Bupati Tanah Laut Nomor 900/02/BPKAD/2023 tentang Penatausahaan keuangan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023. Dan sosialisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan pada 6 Januari 2023 bertempat di Aula BPKAD yang dihadiri seluruh Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD Lingkup Kabupaten Tanah Laut.



Dokumentasi Sosialisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023

Dalam Rangka pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah diawali dengan menetapkan Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran (PA) yang ditetapkan

dengan surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/1305-KUM/2022 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Sebagai Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2023, Mempunyai tugas :

a) Menyusun Rencana Kerja Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah
b) Menyusun Dokumen Pengesahan Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah
c) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja
d) Melaksanakan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya
e) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
f) Melaksanakan pemungutan retribusi daerah
g) Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan
h) Menandatangani Surat Perintah Pembayaran (SPM)
i) Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya
j) Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya
k) Mengawasi pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya
l) Menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)
m) Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah
n) Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pengguna Anggaran (PA) melimpahkan atau menetapkan sebagian kewenangannya kepada :

1. Kepala Bagian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/ 1-KUM/2023 Tentang Penunjukan dan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Layanan Umum Daerah Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023, dengan tugas sebagai berikut :
    a) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;

b) Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
c) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
d) Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
e) Menandatangani Surat Perintah Membayar - Langsung dan Surat Perintah Membayar – Tambah Uang;
f) Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
g) Melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran;
h) Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran; dan
i) Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.

2. Menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 9/KEP-SEKDA/2023 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023, dengan tugas sebagai berikut :
   a) Melakukan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU), Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) beserta bukti kelengkapannya yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran;
   b) Menyiapkan Surat Perintah Pembayaran (SPM);
   c) Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
   d) Melaksanakan fungsi akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
   e) Menyusun Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
   f) Melakukan verifikasi Surat Perintah Pembayaran (SPM) atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari Bendahara Penerimaan; dan
   g) Menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU), Surat Permintaan Pembayaran

Langsung (SPP-LS) beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan Surat Perintah Pembayaran (SPM)

3. Menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 3/KEP-SEKDA/2023 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dengan tugas sebagai berikut:
    a) Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaanteknis Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
    b) Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan
    c) Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub Kegiatan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang mengatur mengenai barang/jasa
    d) Menyusun jadawal pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan
    e) Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan
    f) Melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan kepada Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran
    g) Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan
    h) Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan
    i) Menyiapkan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan
    j) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bertanggungjawab pada Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran
    k) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berhalangan sementara sesuai ketentuan perundang-undangan, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengamil alih mandat yang dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
4. Menetapkan Bendahara Pegeluaran berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/1310-KUM/2023 tentang Penunjukan dan Penetapan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023, dengan tugas sebagai berikut :

a) Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambah Uang dan Surat Permintaan Pembayaran – Langsung
b) Menerima dan menyimpan Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU) dan Tambah Uang (TU)
c) Melaksanakan pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya
d) Menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
e) Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran
f) Membuat laporan pertanggungjawaban secara administrative kepada Pengguna Anggaran dan laporan pertanggungjawabansecara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah secara periodik
g) Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sehubungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut terdiri dari 9 (Sembilan) Bagian dengan anggaran yang cukup besar maka harus ditunjuk dan ditetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian-bagian Lingkup Sekretariat Daerah dengan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45 / 2 - KUM/2023 Tentang Penunjukan dan Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkup pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya sebagai langkah awal pelaksanaan kegiatan Tahun 2023 ditetapkan besaran Uang Persediaan (UP) bagi SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/ 3 – KUM/2023 Tentang penetapan Besaran uang Persediaan (UP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023.

Dengan adanya pelaksanaan Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022 BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan pemeriksaan dan permintaan data/dokumen awal terkait pelaksanaan Anggaran SKPD berdasarkan Surat Badan Pemeriksa keuangan Republik Indonesia perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 01/S/Interim LK_Tala/01/2023 tanggal 25 Januari 2023 Hal Pemberitahuan Pemeriksaan dan Permintaan Data/Dokumen Awal serta Surat Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 700/203/Insp/2023 tanggal 16 Februari 2023 Perihal Permintaan Dokumen,

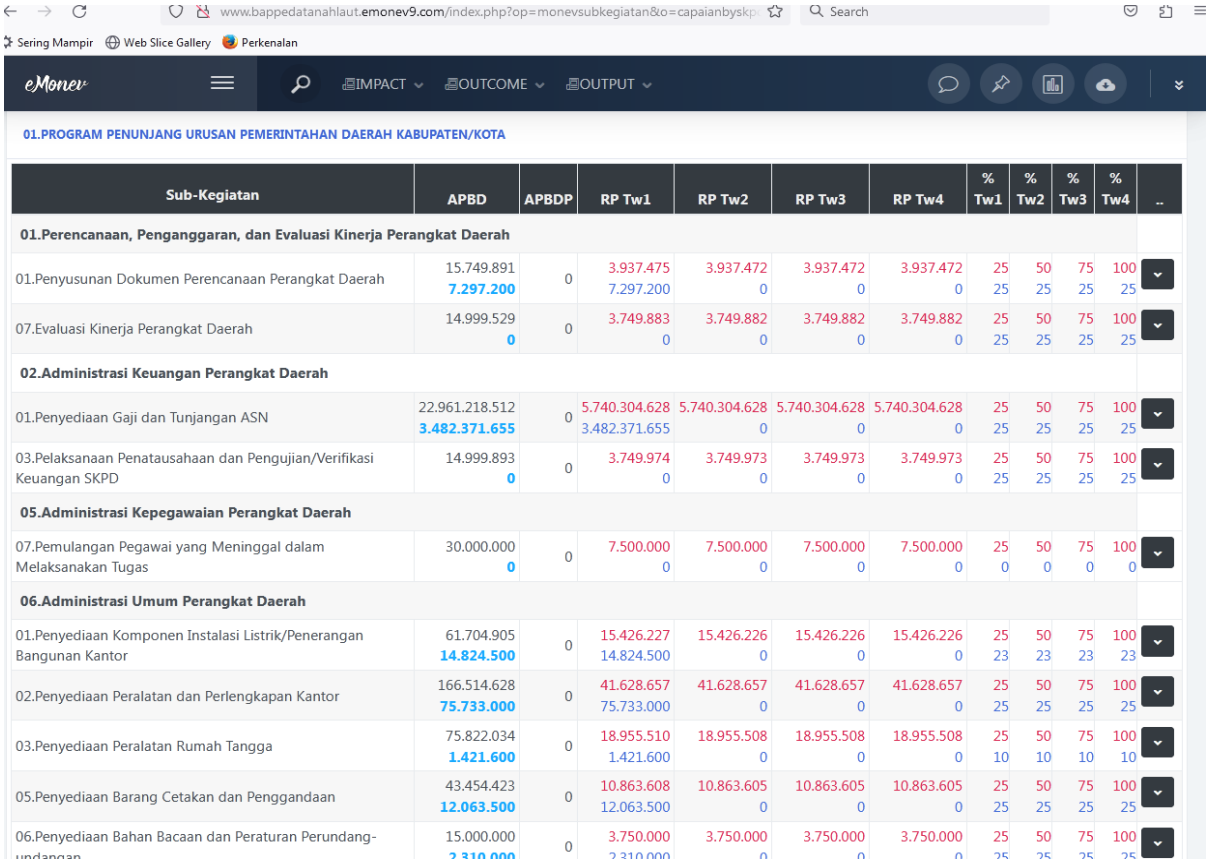
data dan dokumen tersebut dikirimkan melalui website https://tinyurl.com/interimpelaihari paling lambat pada tanggal 27 Januari 2023.

Menindaklanjuti Surat Kepala KPPN Pelaihari Nomor S-360/KPN.1904/2022, Hal Pembuatan Kode *Billing* Secara Otomatis pada TBS, dilaksanakan sosialisasi Pembuatan *Billing* Penerimaan perhitungan pihak ke tiga secara otomatis dengan *upload* Arsi Data Komputer format *Treasury Billing System* (ADK-TBS) pada tanggal 31 Januari 2023 berdasarkan Surat Badan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Nomor 900/130/BPKAD/2023 tanggal 30 Januari 2023 Perihal Pembuatan ADK TBS.



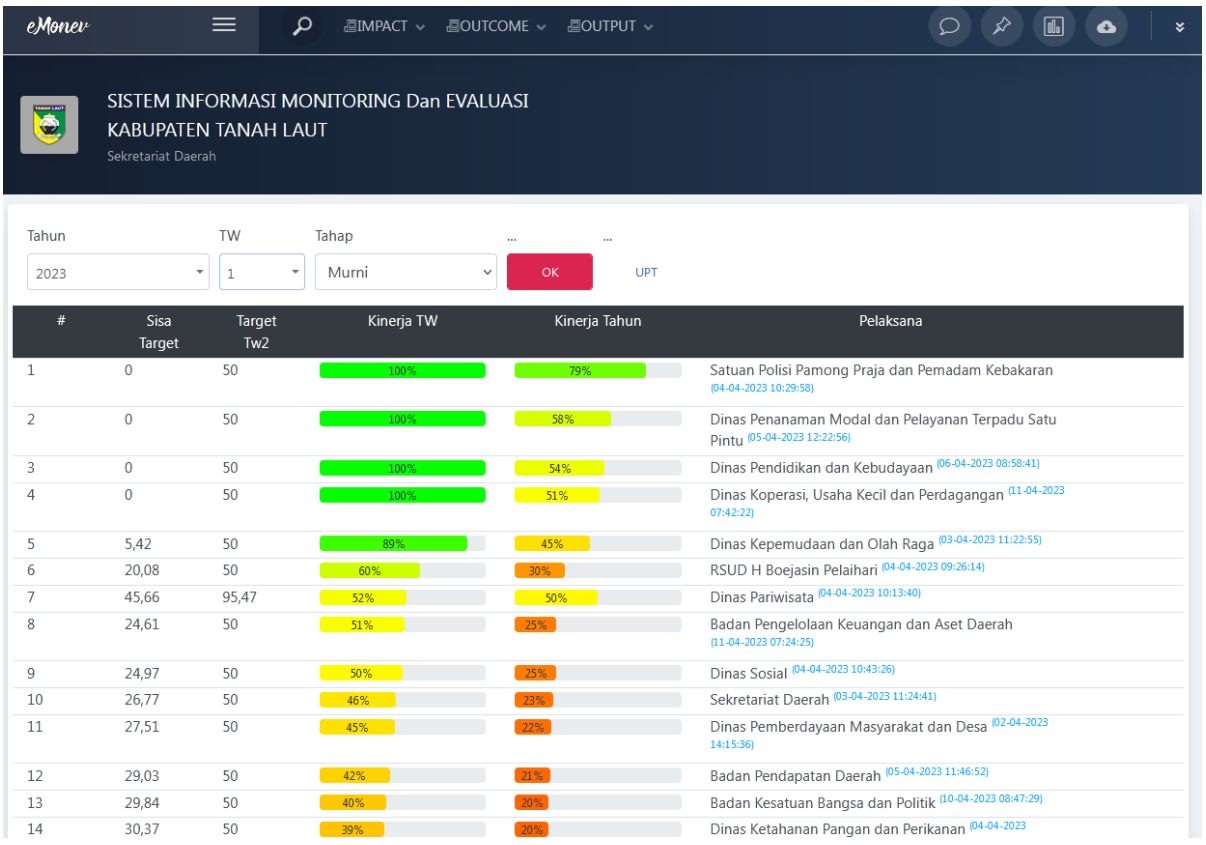
Dokumentasi Kegiatan Pembuatan ADK TBS

Dilaksanakan Monev berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Nomor 000.7.6/0920/Bappeda/2023 Tanggal 31 Maret 2023 Perihal Penginputan E – Monev dengan menginput Realisasi Keuangan, Realisasi Kegiatan/Proses, dan Realisasi Capaian Output Kegiatan dan Sub Kegiatan Triwulan I Tahun Anggaran 2023 melalui sistem E – Monev.



01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sub-Kegiatan	APBD	APBDP	RP Tw1	RP Tw2	RP Tw3	RP Tw4	% Tw1	% Tw2	% Tw3	% Tw4
01.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
01.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.749.891 7.297.200	0	3.937.475 7.297.200	3.937.472 0	3.937.472 0	3.937.472 0	25 25	50 25	75 25	100 25
07.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.999.529 0	0	3.749.883 0	3.749.882 0	3.749.882 0	3.749.882 0	25 25	50 25	75 25	100 25
02.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
01.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.961.218.512 3.482.371.655	0	5.740.304.628 3.482.371.655	5.740.304.628 0	5.740.304.628 0	5.740.304.628 0	25 25	50 25	75 25	100 25
03.Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14.999.893 0	0	3.749.974 0	3.749.973 0	3.749.973 0	3.749.973 0	25 25	50 25	75 25	100 25
05.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
07.Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	30.000.000 0	0	7.500.000 0	7.500.000 0	7.500.000 0	7.500.000 0	25 0	50 0	75 0	100 0
06.Administrasi Umum Perangkat Daerah										
01.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	61.704.905 14.824.500	0	15.426.227 14.824.500	15.426.226 0	15.426.226 0	15.426.226 0	25 23	50 23	75 23	100 23
02.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	166.514.628 75.733.000	0	41.628.657 75.733.000	41.628.657 0	41.628.657 0	41.628.657 0	25 25	50 25	75 25	100 25
03.Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	75.822.034 1.421.600	0	18.955.510 1.421.600	18.955.508 0	18.955.508 0	18.955.508 0	25 10	50 10	75 10	100 10
05.Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	43.454.423 12.063.500	0	10.863.608 12.063.500	10.863.605 0	10.863.605 0	10.863.605 0	25 25	50 25	75 25	100 25
06.Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000 2.310.000	0	3.750.000 2.310.000	3.750.000 0	3.750.000 0	3.750.000 0	25 25	50 25	75 25	100 25



SISTEM INFORMASI MONITORING Dan EVALUASI
KABUPATEN TANAH LAUT
Sekretariat Daerah

Tahun: 2023 | TW: 1 | Tahap: Murni | OK | UPT

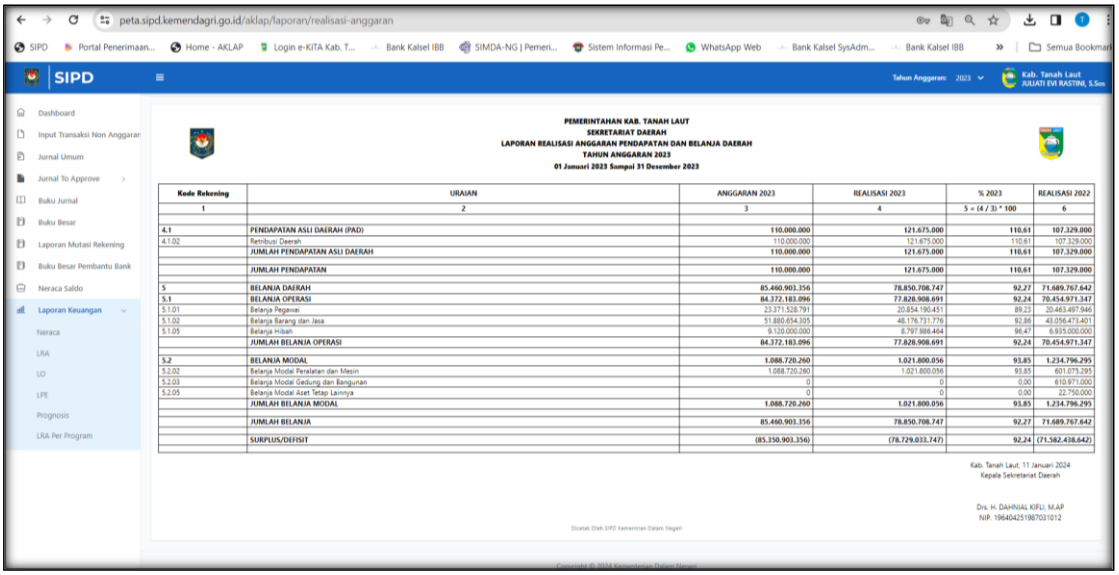
#	Sisa Target	Target Tw2	Kinerja TW	Kinerja Tahun	Pelaksana
1	0	50	100%	79%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (04-04-2023 10:29:58)
2	0	50	100%	58%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (05-04-2023 12:22:56)
3	0	50	100%	54%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (06-04-2023 08:58:41)
4	0	50	100%	51%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan (11-04-2023 07:42:22)
5	5,42	50	89%	45%	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga (03-04-2023 11:22:55)
6	20,08	50	60%	30%	RSUD H Boejasin Pelaihari (04-04-2023 09:26:14)
7	45,66	95,47	52%	50%	Dinas Pariwisata (04-04-2023 10:13:40)
8	24,61	50	51%	25%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (11-04-2023 07:24:25)
9	24,97	50	50%	25%	Dinas Sosial (04-04-2023 10:43:26)
10	26,77	50	46%	23%	Sekretariat Daerah (03-04-2023 11:24:41)
11	27,51	50	45%	22%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (02-04-2023 14:15:36)
12	29,03	50	42%	21%	Badan Pendapatan Daerah (05-04-2023 11:46:52)
13	29,84	50	40%	20%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (10-04-2023 08:47:29)
14	30,37	50	39%	20%	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (04-04-2023

Berdasarkan Surat Edaran Bupati Tanah Laut Nomor 900/2873/BPKAD/XI/2023 tentang Langkah – langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2023, hal ini

dimaksudkan dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah menghadapi akhir Tahun Anggaran 2023 terkait perihal Belanja, Penatausahaan Aset, Pemanfaatan dan Pengendalian Aset, dan Akuntansi.

Pada Tahun Anggaran 2023 Sekretariat Daerah telah melaksanakan kegiatan Penatausahaan Keuangan yang tersaji pada tabel dibawah ini :

REKAPITULASI KEGIATAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KAB. TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2023		
NO	**KEGIATAN**	**JUMLAH**
1	Uang Persediaan (UP)	1 Kali
2	Ganti Uang (GU)	6 Kali
3	LS Gaji PNS	24 Kali
4	LS Gaji PPPK	7 Kali
5	LS Gaji KDH/WKDH	11 Kali
6	LS TPP PNS & PPPK	14 Kali
7	LS Operasional KDH/WKDH	12 Kali
8	LS Rekanan	18 Kali
9	LS Honorarium	21 Kali
10	LS Hadiah	3 Kali
11	LS Hibah	108 Kali
12	LS Makan Minum	2 Kali
13	LS Belanja Jasa	5 Kali
14	LS Belanja Modal	7 Kali
15	LS Perjalanan Dinas	1 Kali
16	LS Belanja Pakaian	1 Kali
TOTAL		241 Kali



PEMERINTAHAN KAB. TANAH LAUT
SEKRETARIAT DAERAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023
01 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	110.000.000	121.675.000	110,61	107.329.000
4.1.02	Retribusi Daerah	110.000.000	121.675.000	110,61	107.329.000
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	110.000.000	121.675.000	110,61	107.329.000
	JUMLAH PENDAPATAN	110.000.000	121.675.000	110,61	107.329.000
5	BELANJA DAERAH	85.460.903.356	78.850.708.747	92,27	71.689.767.642
5.1	BELANJA OPERASI	84.372.183.096	77.828.908.691	92,24	70.454.971.347
5.1.01	Belanja Pegawai	23.371.528.791	20.854.190.451	89,23	20.463.497.946
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.880.654.305	48.176.731.776	92,86	43.056.473.401
5.1.05	Belanja Hibah	9.120.000.000	8.797.986.464	96,47	6.935.000.000
	JUMLAH BELANJA OPERASI	84.372.183.096	77.828.908.691	92,24	70.454.971.347
5.2	BELANJA MODAL	1.088.720.260	1.021.800.056	93,85	1.234.796.295
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.088.720.260	1.021.800.056	93,85	601.075.295
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	610.971.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	0	0,00	22.750.000
	JUMLAH BELANJA MODAL	1.088.720.260	1.021.800.056	93,85	1.234.796.295
	JUMLAH BELANJA	85.460.903.356	78.850.708.747	92,27	71.689.767.642
	SURPLUS/DEFISIT	(85.350.903.356)	(78.729.033.747)	92,24	(71.582.438.642)

Kab. Tanah Laut, 11 Januari 2024
Kepala Sekretariat Daerah

Drs. H. DAHNIAL KIFLI, M.AP
NIP. 196404251987031012

Laporan LRA Tahun Anggaran 2023

Indikator ini dilaksanakan dengan mengevaluasi Realisasi Belanja Sekretariat Daerah per triwulan yaitu :

1. Penyusunan Laporan Realisasi Belanja Sekretariat Daerah Tahun 2023 dengan melaksanakan :
   - Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun Anggaran 2022 pada Tanggal 12 April 2023.



- Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun Anggaran 2023 pada Tanggal 12 Juli 2023**.**



- Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran Triwulan III Tahun Anggaran 2023 pada Tanggal 14 November 2023.



- Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran Triwulan IV Tahun Anggaran 2022 pada Tanggal 14 Desember 2023.



1. Menetapkan Bendahara Penerimaan berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/34-KUM/2023 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Bendahra Penerimaan Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari, Rumah Sakit KH. Mansyur Kintap dan Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Tanah Laut di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023, dengan tugas sebagai berikut :
   a) Menerima penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah
   b) Menyimpan seluruh penerimaan
   c) Menyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke rekening kas umum daerah (kecuali BLUD) paling lambat 1 (satu) hari kerja
   d) Mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui bank
   e) Menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tangggungjawabnya
   f) Melaporakan pertanggungjawaban penerimaan kepada Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Piutang pada Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan aset paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya

   Pada Tahun 2023 Sekretariat Daerah mentargetkan pendapatan sebesar Rp. 110.000.000 dari hasil Retribusi Pemakaian Ruangan dan Pemakaian Kendaraan Bermotor dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	TARGET
1	Retribusi Pemakaian Ruangan	Rp. 50.000.000
2	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	Rp. 60.000.000
		Rp. 110.000.000

Dalam rangka upaya pencapaian target pendapatan Sekretariat Daerah dilakukan melalui :

1. Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Sekretariat Daerah Semester I dan Semester II Tahun 2023.
2. Rapat Intern dengan pengelola pendapatan dan pelaksana pendapatan terkait strategi peningkatan pendapatan.
3. Menaikkan tarif sewa Gedung dan sewa BUS dengan diusulkannya Peraturan Bupati sebagai turunan dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

A. Tarif retribusi pemakaian ruangan yang baru dan lama dapat dilihat dari tabel berikut ini :

No	Jenis Barang	Perda No 1 Tahun 2013	Rencana Perbub Baru
1	Kursi	Rp. 1.000/buah	Rp. 2.000/buah
2	Sound System	Rp. 100.000/buah	Rp. 200.000/buah
3	Balairung Tuntung Pandang	Rp. 400.000/siang	Rp. 2.000.000/siang
		Rp. 500.000/malam	Rp. 2.500.000/malam
4	Gedung sarantang Saruntung	Rp. 300.000/siang	Rp. 1.000.000/siang
		Rp. 400.000/malam	Rp. 1.500.000/malam
5	Sewa Kantin	Rp. 50.000/Bulan	Rp. 300.000/Bulan
6	Fasilitas ruang rapat Barakat	-	Rp. 300.000/hari

7	Ruang Rapat Lantai III	-	Rp. 300.000/hari

B. Proyeksi Penerimaan Retribusi Daerah Sekretariat Daerah Tahun 2024 S/D Tahun 2026

No	Objek Retribusi	Tahun (Rp)				
		2023	2024	2025	2026	
1	Retribusi Pemakaian Ruang	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Ged. Balairung, Ged.SS, R. Barakat, R. Rapat Lt.III dan Kantin Setda
2	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	60.000.000	62.000.000	65.000.000	67.000.000	BUS, ELP
	JUMLAH	**110.000.000**	**112.000.000**	**115.000.000**	**117.000.000**	

Dalam rangka sinkronisasi pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Tanah Laut yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tatacara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya, maka perlu dilaksanakan kegiatan Koordinasi Akuntansi Penerimaan Kas dan Rekonsiliasi Penerimaan Pendapatan Triwulan IV Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 16 s.d 17 Februari 2023 berdasarkan Surat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 900/211/BPKAD-AKT/II/2023 perihal Undangan Koordinasi Akuntansi Penerimaan Kas dan Rekonsiliasi Penerimaan Pendapatan Triwulan IV Tahun 2022.



Dokumentasi Kegiatan Koordinasi Akuntansi Penerimaan Kas dan Rekonsiliasi Penerimaan Pendapatan Triwulan IV Tahun 2022

Koordinasi Akuntansi Penerimaan Kas dan Rekonsiliasi Penerimaan Pendapataan Triwulan I Tahun 2023 dilaksanakan pada Tanggal 16 Mei 2023 berdasarkan Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 900/523/BPKAD-AKT/V/2023 Tanggal 8 Mei 2023.



Dokumentasi Kegiatan Rapat Koordinasi Akuntansi Penerimaan Kas dan Rekonsiliasi Penerimaan Pendapataan Triwulan I Tahun 2023

Selanjutnya dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah dari penerimaan Retribusi Daerah, Penerimaan BLUD dan Implementasi Transaksi Non Tunai maka dilaksanakan rapat evaluasi tersebut pada tanggal 7 Maret 2023 berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor 900.1.3.2/84/BAPENDA tanggal 3 Maret 2023 Perihal Rapat Evaluasi Penerimaan Retribusi Daerah dan BLUD, dengan agenda rapat :

1. Penyampaian realisasi pendapatan sampai dengan akhir Februari 2023.
2. Implementasi Transaksi Non Tunai (QRIS) oleh Bank Kal Sel.

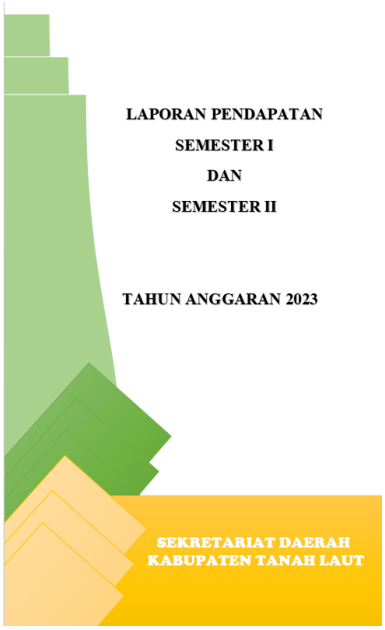
3. Rencana pelaksanaan FGD FMIS bersama BPKP RI Perwakilan Kal Sel.



Dokumentasi Rapat Evaluasi Penerimaan Retribusi Daerah dan BLUD Tahun Anggaran 2023

Terkait dengan pelaporan pendapatan Sekretariat Daerah dilakukan melalui :

1. Rekon Pendapatan Triwulan I s.d Triwulan IV Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah
2. Laporan Bulanan Pendapatan Sekretariat Daerah yang disampaikan ke Badan Pendapatan Daerah
3. Laporan Pendapatan Sekretariat Daerah Semester I dan Semester II Tahun 2023



Dokumen Laporan Pendapatan Sekretariat Daerah Semester I dan Semester II Tahun Anggaran 2023

Dalam rangka penyusunan target proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Tanah Laut Perubahan APBD TA. 2023 dan APBD TA. 2024 berdasarkan Surat Sekretaris

Daerah Nomor 900.1.3.2/0802/BAPENDA tanggal 17 Maret 2023 Perihal Penyusunan Proyeksi Target Pendapatan Daerah Tahun 2023 Perubahan dan Tahun 2024, dan paling lambat diserahkan pada tanggal 21 Maret 2023.



Sehubungan dengan Surat kepala Badan Pendapatan Daerah Noomor 900.1.3.2/120/BAPENDA Tanggal 27 Maret 2023 Perihal Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, kepada seluruh SKPD diminta agar proses transaksi Pendapatan Dareah dilakukan secara Non Tunai melalui kanal *Quick Response Code Indonesian Strandart (QRIS).*

Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor 900.1.3.2/1664/BAPPEDA/2023 Tanggal 21 Juni 2023 Perihal Undangan, Kegiatan Rapat ini dihadiri oleh Seluruh Kepala SKPD Pengelola Pendapatan dengan agenda rapat yaitu Penyusunan Proyeksi Target Pendapatan Daerah untuk Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2023.



Dokumentasi Kegiatan Penyusunan Proyeksi Target Pendapatan Daerah untuk Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2023

Koordinasi Akuntansi Penerimaan Kas dan Rekonsiliasi Penerimaan Pendapataan Triwulan II Tahun 2023 dilaksanakan pada Tanggal 18 Juli 2023

berdasarkan Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 900/779/BPKAD-AKT/VII/2023 Tanggal 13 Juli 2023.



Dokumentasi Kegiatan Rapat Koordinasi Akuntansi Penerimaan Kas dan Rekonsiliasi Penerimaan Pendapataan Triwulan II Tahun 2023

FGD Persiapan Rancangan Peraturan Bupati Tanah Laut Terhadap Rancangan PERDA Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor 900.1.3.1/395/BAPENDA Tanggal 14 Juli 2023 yang dipimpin oleh Pejabat Eselon II dan dilaksanakan pada Tanggal 18 Juli 2023.





Dokumentasi Kegiatan FGD Persiapan Rancangan Peraturan Bupati Tanah Laut Terhadap Rancangan PERDA Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024

Penyusunan Proyeksi Target Pendapatan TA 2024 dan Kesepaatan dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 900.1.3.2/2295/BAPENDA/2023 Tanggal 06 September 2023 Perihal Penyusunan Target Pendapatan Dearah TA 2024.



Dokumentasi Kegiatan Rapat Penyusunan Proyeksi Target Pendapatan TA 2024

Adapun realisasi pendapatan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terinput dalam aplikasi SIMDA Pendapatan melebihi target tahunan yaitu sebesar 110.31%, dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN RETRIBUSI	TARGET ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	Retribusi Pemakaian Ruangan	50.000.000	46.490.000	
2	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	60.000.000	75.185.000	
	TOTAL	**110.000.000**	**121.675.000**	**110.61%**

Upaya Strategi peningkatan pendapatan Sekretariat Daerah untuk Tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Penerapan aplikasi eTALAse untuk Pelayanan Sekretariat Daerah berupa Penyewaan Mobil dan Penyewaan Tempat
2. Memperbaiki sarana dan prasarana Kekayaan Daerah Sekretariat Daerah.
3. Meningkatkan Pelayanan Prima terhadap pelanggan atau penyewa.

Pada Tahun 2023 telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi terkait Capaian Pendapatan Sekretariat Daerah Tahun 2023 yang dihadiri oleh Pejabat Pengelola Pendapatan, Bendahara Penerimaan, Pengelola Gedung dan Pengemudi armada BUS. Dari hasil monev tersebut diharapkan dapat menaikkan pendapatan melalui :

- Penerapan aplikasi eTALAse untuk Pelayanan Sekretariat Daerah berupa Penyewaan Mobil dan Penyewaan Tempat.
- Menaikkan tarif Retribusi Pemakaian Ruangan dan Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor.



Kegiatan Monev Pendapatan Semester I dan Semester II Sekretariat Daerah TA 2023

Untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2023 bahwa realisasi fisik **98.34%** lebih besar capaiannya dibandingkan dengan realisasi belanja **92.27%** sebagaimana tabel dibawah ini :

NO	PAGU ANGGARAN	REALISASI BELANJA				CAPAIAN FISIK			
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	Rp. 85.460.903.356	Rp. 12.878.126.095 (15.07%)	Rp. 37.555.962.441 (43.95%)	Rp. 55.010.287.398 (64.37%)	Rp. 78.850.708.747 **(92.27%)**	23.18%	53.16%	75.59%	**98.34%**

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain:

1. Bendahara Pengeluaran Pembantu terkadang kurang teliti dalam hal Penginputan SPj kedalam aplikasi SIPD-RI.
2. Kurangnya fitur pada aplikasi SIPD khususnya terkait fitur Penatausahaan Keuangan Daerah
3. Terjadi pemborosan waktu karena terkait laporan Penatausahaan Keuangan Daerah dilakukan 2 (dua) kali penginputan yaitu, data laporan Penatausahaan Keuangan Daerah di input terlebih dahulu kedalam SIPD selanjutnya di input kembali ke dalam aplikasi Financial Management Information System (FMIS) BPKP. Dan penginputan sistem ini akan berlaku juga untuk tahun selanjutnya.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Diadakan pembekalan mengenai mekanisme penginputan aplikasi SIPD secara tepat secara berkesinambungan.
- Agar dilengkapinya fitur dalam aplikasi SIPD
- Aplikasi SIPD dan FMIS BPKP di integrasikan agar memudahkan penginputan

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Agar dilakukan FGD
- *Sharing Knowledge* antara Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian-bagian, dan Bendahara Penerimaan dengan admin SIPD

6. Analisa Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia

Pada Tahun Anggaran 2023 Bagian Perencanaan dan Keuangan mendapatkan pagu sebesar Rp. 23.422.600.854 terealisasi Rp. 20.893.126.951 realisasi keuangan sebesar 89.20%, dengan rincian sebagai berikut :

1) Untuk mencapai sasaran Meningkatnya layanan administrasi bidang perencanaan dan keuangan dengan **Indikator Persentase layanan administrasi bidang perencanaan** dan dengan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu Rp 35.862.518 terealisasi Rp 27.760.900 dengan realisasi keuangan sebesar 71.41% dan dilaksanakan oleh 5 (lima) orang Sumber

Daya Manusia. Kegiatan Indikator ini dilaksanakan melalui rapat-rapat koordinasi dengan bagian-bagian lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut. Disamping itu terkendala dengan PERPRES NO.33 TAHUN 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional.

Untuk capaian kinerja terhadap IKU tersebut diatas adalah **100%** sedangkan untuk realisasi anggarannya sebesar **75.23%.** Dalam artian IKU ini telah berhasil dilaksanakan dengan efektif dan efisien dikarenakan capaian kinerjanya lebih besar daripada realisasi anggaran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI
100%	75.23%	24.77%

2) Untuk mencapai sasaran Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja dan keuangan lingkup Sekretariat Daerah dengan **Indikator Persentase kualitas penyusunan pelaporan kinerja yang sesuai aturan dan Indikator Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan sesuai aturan** ditunjang dengan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan pagu Rp 22.676.428.057 terealisasi Rp 20.194.578.571 dengan realisasi keuangan sebesar 89.06% dan Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan pagu Rp 710.310.279 terealisasi Rp 670.787.480 dengan realisasi keuangan sebesar 94.44% dan dilaksanakan oleh 9 (sembilan) orang Sumber Daya Manusia. Kegiatan indikator ini tidak sepenuhnya terealisasi dikarenakan sifatnya *accress* belanja pegawai.

Untuk capaian kinerja terhadap IKU tersebut diatas adalah **100%** sedangkan untuk realisasi anggarannya sebesar **89.07%.** Dalam artian IKU ini telah berhasil dilaksanakan dengan efektif dan efisien dikarenakan capaian kinerjanya lebih besar daripada realisasi anggaran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI
100%	89.07%	10.93%

3) Untuk mencapai sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD dengan **Nilai SAKIP Sekretariat Daerah dan Nilai SPIP Sekretariat Daerah** ditunjang dengan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu pagu Rp 35.862.518 terealisasi Rp 27.760.900 dengan realisasi keuangan sebesar 71.41% dan dilaksanakan oleh 4 (empat) orang Sumber Daya Manusia. Kegiatan Indikator ini dilaksanakan melalui rapat-rapat koordinasi dengan bagian-bagian lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut. Disamping itu terkendala dengan PERPRES NO.33 TAHUN 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional. Untuk capaian kinerja terhadap IKU tersebut diatas adalah **98.97%** sedangkan untuk realisasi anggarannya sebesar **80.43%.** Dalam artian IKU ini telah berhasil dilaksanakan dengan efektif dan efisien dikarenakan capaian kinerjanya lebih besar daripada realisasi anggaran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini

CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI
98.97%	80.43%	18.54%

4) Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah dengan **Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan sesuai aturan** ditunjang dengan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD dengan Pagu Anggaran Rp. 15.209.545 terealisasi sebesar Rp. 11.175.600 dan realisasi keuangan sebesar 73.48% dan dilaksanakan oleh 9 (sembilan) orang SDM.

Untuk capaian kinerja terhadap IKU tersebut diatas adalah **100%** sedangkan untuk realisasi anggarannya sebesar **83.96%.** Dalam artian IKU ini telah berhasil dilaksanakan dengan efektif dan efisien dikarenakan capaian kinerjanya lebih besar daripada realisasi anggaran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini

CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI
100%	83.96%	16.04%

Tabel Indikator Kinerja Realisasi Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2023 (Rp)	%	SDM	KET
1	Persentase layanan administrasi Bidang Perencanaan	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kegiatan Perancanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				- Kabag Perencanaan dan Keuangan - Sub Koordinator Perencanaan - Pengelolaa Perencanaan - PTT (2 Orang)	
			- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.862.989	15.696.200	75.23%		
2	Persentase kualitas penyusunan pelaporan kinerja yang sesuai aturan		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				- Kabag Perencanaan dan Keuangan - Sub Koordinator Keuangan - Verifikator Keuangan - Bendahara Pengeluaran - Pengadministrasi Keuangan - Pengadministrasi Penerimaan - PTT (3 Orang)	
			- Sub Kegiatan Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	22.661.218.512	20.183.402.971	89.07%		
3	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan sesuai aturan		- Sub Kegiatan Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	15.209.545	11.175.600	73.48%		
			Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					
			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	710.310.279	670.787.480	94.44%		
4	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				- Kabag Perencanaan dan Keuangan - Sub Koordinator Pelaporan - PTT (2 Orang)	
5	Nilai SPIP Sekretariat Daerah		- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.999.529	12.064.700	80.43%		

Analisa Capaian Sasaran Strategis

Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa lingkup Kabupaten Tanah Laut secara elektronik	Persentase paket pengadaan yang terlayani dalam pengadaan/jasa sesuai standar dan tepat waktu	100%	100%	100%	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Mengampu Misi ke-3 ""*Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik* ***(Good Governance)"***
2	Meningkatnya SKPD melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem LPSE	Persentase SKPD yang melakukan pengadaan barang/jasa pemerintahan melalui sistem LPSE	100%	100%	100%	
3	Meningkatnya Kompetensi SDM dalam Proses PBJ yang Berkualitas	Persentase SDM yang Kompeten dalam Pengadaan Barang/Jasa	100%	100%	100%	
4	Meningkatnya efisiensi pagu Pengadaan Barang Jasa	Persentase efisiensi pagu Pengadaan Barang Jasa	100%	71%	71%	
ESELON IV						
1	Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai standar dan tepat waktu	Jumlah Terlaksananya kegiatan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai standar dan tepat waktu	150 Paket	249 Paket	166%	Kasubbag Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
2	Melakukan pendampingan SKPD dalam perencanaan pengadaan dan pengelolaan kontrak	Jumlah fasilitasi SKPD yang didampingi dalam perencanaan pengadaan dan pengelolaan kontrak	40 SKPD	40 SKPD	100%	Kasubbag Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa

Berikut disajikan Perbandingan Capaian Sasaran Strategis Bagian Pengadaan Barang/Jasa terhadap capaian tahun sebelumnya.

Tabel Capaian Sasaran Indikator Kinerja Bagian Pengadaan Barang/Jasa Terhadap capaian tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Tahun 2023		
			2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase paket pengadaan yang terlayani dalam pengadaan barang/jasa sesuai standar dan tepat waktu	%	165%	110%	100%	100%	100%
2	Persentase SKPD yang melakukan pengadaan barang/jasa pemerintahan melalui sistem LPSE	%	57,5%	117%	100%	100%	100%
3	Persentase SDM yang Kompeten dalam Pengadaan Barang/Jasa	%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatnya efisiensi pagu Pengadaan Barang Jasa	%	75%	179%	100%	71%	71%
	Rata Rata Capaian						**92.75%**

Pemaparan analisa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut yaitu :

❖ **Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja**

Capaian kinerja Bagian Perencanaan dan Keuangan ada 4 (Empat) indikator dengan rincian sebagai berikut :

1) Capaian Kinerja Bagian Pengadaan Barang/Jasa terhadap Indikator yaitu “Persentase paket pengadaan yang terlayani dalam proses pengadaan barang/jasa sesuai standar dan tepat waktu”.

   Dari target kinerja yang sebanyak 150 paket, telah terealisasi sebanyak 249 paket, sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian kinerjanya adalah 166%.

2) Capaian kinerja Bagian Pengadaan Barang/Jasa terhadap indikator yaitu “Persentase SKPD yang melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem LPSE”.

   Untuk mencapai indikator ini dilakukan secara bertahap agar SKPD memanfaatkan sistem pengadaan SPSE, yang dipaparkan sebagai berikut :

NO	TAHUN	TARGET	JUMLAH SKPD TARGET	REALISASI	JUMLAH SKPD REALISASI
1.	2021	75%	30	57.5%	23
2.	2022	85%	34	117%	40
3.	2023	100%	40	100%	40

Dari target kinerja sebanyak 40 SKPD (Tahun 2023) yang melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem LPSE, telah terealisasi sebanyak 40 SKPD yang melaksanakan PBJ Pemerintah melalui sistem SPSE, sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian kinerjanya adalah 100%.

3) Capaian kinerja Bagian Pengadaan Barang/Jasa terhadap indikator Persentase SDM yang Kompeten dalam Pengadaan Barang/Jasa. Dari target kinerja sebanyak 20 orang yang kompeten dalam Pengadaan Barang/Jasa, telah terealisasi sebanyak 20 orang yang telah kompeten mengikuti Bimtek dan pelatihan Kompetensi sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja telah terealisasi 100%.
4) Capaian kinerja Bagian Pengadaan Barang/Jasa terhadap indikator Persentase efisiensi pagu Pengadaan Barang/Jasa.

   Persentase efisiensi pagu pengadaan barang/jasa merupakan indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur penghematan biaya yang telah dilaksanakan Pemerintah Daerah dalam proses pengadaan Barang/Jasa. Target persentase efisiensi pagu pengadaan barang/jasa yang harus dicapai per tahun adalah 5%.

   Pada tahun 2023, penghematan biaya yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kab. Tanah Laut dalam proses tender pengadaan barang/jasa sebagai efisiensi pagu pengadaan barang/jasa adalah 3.57%. Sehingga persentase capaian kinerja 3.57% terhadap target 5% adalah 71%.
5) Di Tahun 2023 Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kab. Tanah Laut telah mencapai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) memperoleh penilaian dengan bobot 80.8 dengan predikat BAIK. Penilaian ITKP sebagai aspek indikator “Antara” dalam Indeks Reformasi Birokrasi. (Peratura Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024)

❖ **Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya**

1. Persentase paket pengadaan yang terlayani dalam proses pengadaan barang/jasa sesuai standar dan tepat waktu di **Tahun 2023** mencapai 100%, sedangkan **Tahun 2022** yaitu 110%.

2. Persentase SKPD yang melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem LPSE di **Tahun 2023** sebesar 100% dari target yang dicanangkan 100% (40 SKPD dari target 40 SKPD). Di **Tahun 2022** Persentase SKPD yang melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem LPSE sebesar 117% dari target 85% (40 SKPD dari target 34 SKPD).
3. Persentase SDM yang kompeten dalam Pengadaan Barang/Jasa mencapai di **Tahun 2023** mencapai 100%, sama dengan **Tahun 2022** yaitu 100%.
4. Persentase Efisiensi Pagu Pengadaan Barang/Jasa di **Tahun 2023** sebesar 71% dari target 100%. Penghematan biaya yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kab. Tanah Laut dalam proses tender pengadaan barang/jasa sebagai efisiensi pagu pengadaan barang/jasa adalah 3.57% dari target 5%.

   Jika tercapai 5% maka efisiensi pagu pengadaan barang/jasa sebesar 100%.

   Jika tercapai 3.57% maka efisiensi pagu pengadaan barang/jasa sebesar 71%.

❖ **Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Eselon III Selama 5 (Lima) Tahun (2018-2023)**

NO	IKU ESELON III		2019			2020			2021			2022			2023			PENANGGUNG JAWAB/BAGIAN
	SASARAN	INDIKATOR	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	
	Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa lingkup Kabupaten Tanah Laut secara elektronik	Persentase paket pengadaan yang terlayani dalam proses pengadaan barang/jasa sesuai standar dan tepat waktu	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Bagian PBJ**
	Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa lingkup Kabupaten Tanah Laut secara elektronik	Persentase paket pengadaan yang terlayani dalam proses pengadaan barang/jasa sesuai standar dan tepat waktu	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Bagian Pengadaan Barang/Jasa**
	Meningkatnya SKPD melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem LPSE	Persentase SKPD yang melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem LPSE	-	-	-	100%	55%	55%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Bagian Pengadaan Barang/Jasa**
	Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa lingkup Kabupaten Tanah Laut secara elektronik	Persentase paket pengadaan yang terlayani dalam pengadaan/jasa sesuai standar dan tepat waktu	-	-	-	-	-	-	100%	165%	165%	100%	110%	110%	100%	100%	100 %	**Bagian Pengadaan Barang/Jasa**

	Meningkatnya SKPD melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem LPSE	Persentase SKPD yang melakukan pengadaan barang/jasa pemerintahan melalui sistem LPSE	-	-	-	-	-	-	75%	57.50 %	76.67 %	85%	117%	142.6 %	100%	100%	100 %	**Bagian Pengadaan Barang/Jasa**
	Meningkatnya Kompetensi SDM dalam Proses PBJ yang Berkualitas	Persentase SDM yang Kompeten dalam Pengadaan Barang/Jasa	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	**Bagian Pengadaan Barang/Jasa**
	Meningkatnya efisiensi pagu Pengadaan Barang Jasa	Persentase efisiensi pagu Pengadaan Barang Jasa	-	-	-	-	-	-	100%	75%	75%	5%	8.95 %	179%	100%	71%	71%	**Bagian Pengadaan Barang/Jasa**

❖ **Analisa Peningkatan dan Penurunan Kinerja**

Sasaran 1 Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa lingkup Kabupaten Tanah Laut secara elektronik

Indikator : Persentase paket pengadaan yang terlayani dalam pengadaan barang/jasa sesuai standar dan tepat waktu

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa lingkup Kabupaten Tanah Laut secara elektronik	Persentase paket pengadaan yang terlayani dalam pengadaan barang/jasa sesuai standar dan tepat waktu	100%	166%	166%	Bagian PBJ Mengampu Misi ke-3 ***“Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)”***

Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai fungsi yaitu melaksanakan pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi.

Dalam pengelolaan dan pembinaan PBJ tersebut kunci kesuksesannya yaitu jika paket pengadaan yang dilayani dapat diproseskan sesuai standar dan tepat waktu.

Agar paket pengadaan yang dilayani dapat selesai tepat waktu diperlukan peran serta yang sangat besar oleh pelaku pengadaan yang memahami terkait proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dalam pencapaian persentase paket pengadaan yang terlayani dalam proses pengadaan barang/jasa sesuai standar dan tepat waktu menghadapi kendala yaitu :

1. Kurangnya pemahaman para PA/KPA dan PPK dalam menyusun Perencanaan Pengadaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah;
2. Sulitnya kerjasama SKPD untuk dievaluasi dalam proses pengadaan barang/jasa;
3. Sulitnya membina hubungan dengan para pemangku kepentingan guna menciptakan proses pengadaan barang/jasa yang selaras.

Solusi yang dilaksanakan dalam menghadapi kendala yang disebutkan di atas adalah :

1. Meningkatkan pemahaman para pelaku pengadaan dalam setiap proses pengadaan barang/jasa pemerintah;
2. Memahamkan SKPD terkait pentingnya evaluasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah di SKPD sehingga akan menghasilkan proses pengadaan yang lebih baik;
3. Memahamkan pelaku pengadaan terkait pentingnya pengelolaan sistem informasi pengadaan barang/jasa secara elektronik;
4. Membuka komunikasi secara intens dengan para pemangku kepentingan guna menciptakan proses pengadaan barang/jasa yang selaras.

Rencana aksi perbaikan yang akan dilakukan adalah :

1. Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis untuk para pelaku pengadaan yang terencana dan terkoordinir;
2. Melaksanakan pelatihan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
3. Mengagendakan rapat dengan para pemangku kepentingan untuk menyamakan persepsi tentang pengadaan barang/jasa.



GAMBAR 1
Kegiatan Pelayanan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Dalam Mendampingi SKPD

Sasaran 2 Meningkatnya SKPD melakukan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Sistem LPSE

Indikator : Persentase SKPD yang melakukan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Sistem LPSE

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
2	Meningkatnya SKPD melakukan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan melalui system LPSE	Persentase SKPD yang melakukan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Melalui Sistem LPSE	100%	100%	100%	Bagian PBJ Mengampu Misi ke-3 ***“Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)”***

Selain peningkatan kualitas layanan pengadaan barang/jasa, Bagian Pengadaan Barang/Jasa harus mengarahkan SKPD agar dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah menggunakan sistem LPSE.

Tujuan dari dilaksanakannya Pengadaan barang/jasa secara elektronik (melalui LPSE) adalah:

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
2. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;
3. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan;
4. Mendukung proses monitoring dan audit; dan
5. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*.

Untuk itu maka Bagian Pengadaan Barang/Jasa selalu mengusahakan agar SKPD di Pemerintah Kab. Tanah Laut melaksanakan proses pengadaan barang/jasa melalui sistem LPSE.

Proses pengadaan barang/jasa melalui sistem LPSE diantaranya:

- Pengadaan langsung secara elektronik (e-PL)
- E-Tendering;
- E-Seleksi;
- E-Purchasing (Katalog lokal dan katalog nasional);
- Non E-Tendering dan Non E-Purchasing (Pencatatan); dan
- E-Kontrak

Di Tahun 2023, persentase SKPD yang melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem LPSE sebesar 100% dari target 100% (40 SKPD dari target 40 SKPD).

Proses pengadaan yang dilaksanakan oleh SKPD melalui Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (SPSE) di Tahun 2023 adalah kegiatan e-tendering, e-seleksi, e-purchasing (Katalog lokal maupun katalog nasional), e-pengadaan langsung dan pencatatan non tender.
Di Tahun 2023 ini, semua SKPD juga sudah bertransaksi pengadaan barang/jasa (di bawah 50 juta) melalui aplikasi Sosialita. Aplikasi Sosialita adalah Aplikasi yang memfasilitasi kegiatan Sistem Order Semua Instansi Lingkup Tanah Laut.

Untuk capaian indikator sasaran meningkatnya SKPD melakukan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Sistem LPSE pada Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik dilaksanakan melalui Program Perekonomian dan Pembangunan Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan pagu Rp. 285.598.545,- terealisasi Rp. 279.597.500,- dengan realisasi keuangan sebesar 97.9%.

Adapun penyebab realisasi keuangan sebesar 97.9% dikarenakan ada beberapa uraian kegiatan yang menyisakan anggaran seperti Belanja kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan dan Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin.

Terdapat beberapa kendala agar SKPD melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui SPSE tersebut, yaitu :

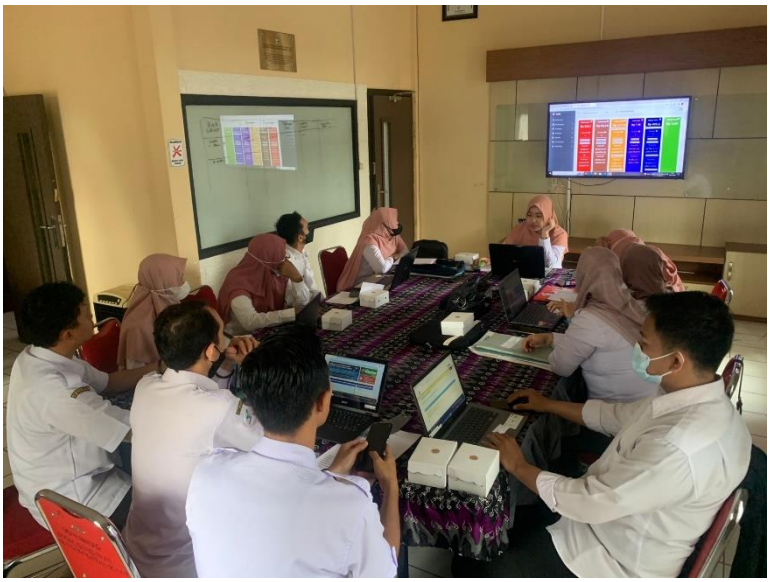
1. Masih kurangnya pemahaman dan kecakapan pelaku pengadaan di SKPD terkait pemanfaatan sistem pengadaan barang/jasa melalui SPSE (terutama untuk e-PL, Pencatatan non Tender dan E-Kontrak);
2. Pelaksanaan pemanfaatan sistem pengadaan tidak dapat dilaksanakan sepenuhya secara elektronik (manual) terutama untuk metode pengadaan langsung secara elektronik (e-PL). Hal tersebut terjadi karena pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, masih memperbolehkan pelaksanaan secara manual.

Solusi yang dilaksanakan dalam menghadapi kendala yang disebutkan di atas adalah:

1. Peningkatan pemahaman dan kecakapan pelaku pengadaan di SKPD dalam memanfaatkan sistem pengadaan;
2. Koordinasi dengan pimpinan daerah dan stake holder di Pemerintah Daerah Kab. Tanah Laut terkait adanya keharusan dalam pemanfaatan sistem pengadaan dalam pelaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah terutama untuk e-purchasing, non e-Tendering & non e-Purchasing dan e-kontrak.
3. Untuk pengadaan barang/jasa konstruksi/jasa lainnya di atas 200 Juta dan pengadaan jasa konsultansi di atas 100 juta telah dilaksanakan E-Tendering dan E-Seleksi oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Rencana aksi perbaikan untuk peningkatan SKPD melakukan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Sistem LPSE yang akan dilakukan adalah :

1. Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis untuk para pelaku pengadaan yang terencana dan terkoordinir dalam pemanfaatan sistem LPSE;
2. Melaksanakan koordinasi dengan stake holder lain (Bappeda, BPKAD dan Inspektorat) untuk menyamakan persepsi tentang pengadaan barang/jasa dalam pemanfaatan SPSE.



GAMBAR 2
Kegiatan Pendampingan SKPD yang melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem LPSE Oleh Bag. Pengadaan Barang/jasa

Sasaran 3 Meningkatnya Kompetensi SDM dalam proses PBJ yang berkualitas

Indikator : Persentase SDM yang Kompeten dalam Pengadaan Barang/Jasa

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
3	Meningkatnya Kompetensi SDM dalam proses PBJ yang berkualitas	Persentase SDM yang kompeten dalam Pengadaan Barang/Jasa	100%	100%	100%	Bagian PBJ Mengampu Misi ke-3 “***Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*** ***(Good Governance)”***

Sesuai dengan pencapaian level 3 proaktif kematangan UKPBJ, sebuah UKPBJ harus memenuhi 9 variabel yang mana salah satu dari variabel tersebut adalah tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa yang berkualitas dan kompeten di bidangnya. Sehingga target pencapaian kinerja organisasi akan mudah direalisasi.

SDM pada bagian pengadaan barang/jasa ini terdiri atas :

- Sumber Daya Pengelola Fungsi PBJ;
  - Pengelola PBJ (JF PPBJ)
  - Personil lainnya (Non JF PPBJ)
- Sumber Daya Perancang Kebijakan dan Sistem PBJ; dan
- Sumber Daya Pendukung Ekosistem PBJ.

Dari unsur sumber daya pada bagian PBJ harus saling bekerja sama dalam melaksanakan pelayanan yang meliputi pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan Sistem pengadaan secara elektronik dan pengelolaan pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa.

Indikator kinerja untuk sub bagian Pembinaan dan Advokasi PBJ yaitu Persentase SDM yang kompeten dalam Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai realisasi capaian kinerja mencapai 100% (Tahun 2023).

Untuk capaian indikator sasaran meningkatnya kompetensi SDM dalam proses PBJ yang berkualitas pada Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi PBJ dilaksanakan melalui Program Perekonomian dan Pembangunan Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan pagu Rp. 436.527.295,- terealisasi Rp. 362.200.978,- dengan realisasi keuangan sebesar 83%.

Adapun penyebab realisasi keuangan sebesar 83% dikarenakan ada beberapa uraian kegiatan yang menyisakan anggaran seperti Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor – Souvenir/Cendera Mata, Honorarium narasumber atau pembahasan, moderator, pembawa acara dan panitia serta Belanja Perjalanan Dinas Biasa. Sisa Anggaran dikarenakan :

- PPN yang tidak direalisasikan secara maksimal karena banyak penyedia yang pajaknya terkategori Non PKP;
- Tidak digunakannya honorarium narasumber beserta biaya transportasi dan biaya hotel narasumber dan souvenir/cendera mata narasumber, karena terbatasnya waktu untuk melaksanakan bimbingan teknis/sosialisasi/pelatihan/workshop;
- Kegiatan Belanja Bimbingan Teknis yang tidak semuanya diikuti oleh SDM UKPBJ karena terbatasnya Pelatihan/Bimbingan Teknis yang ditawarkan untuk diikuti.

Ada beberapa kendala dalam mewujudkan SDM yang kompeten dalam pengadaan barang/jasa, yaitu :

1. Terbatasnya kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis yang sesuai dengan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ);
2. Sulitnya persyaratan kompetensi yang dilaksanakan oleh LKPP untuk lulus menjadi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ);
3. Rendahnya kesadaran pelaku pengadaan di SKPD untuk meningkatkan pemahaman terkait Pengadaan Barang/Jasa.

Solusi yang dilaksanakan dalam menghadapi kendala yang disebutkan di atas adalah:

1. Pemetaan kebutuhan pelatihan pengadaan barang/jasa untuk JF PPBJ;
2. Pemantauan kinerja SDM untuk personil UKPBJ
3. Pemetaan kebutuhan pelatihan pengadaan barang/jasa untuk semua pelaku pengadaan di SKPD;

4. Perlu kunjungan ke SKPD untuk melaksanakan FGD terkait regulasi dan implementasi pengadaan barang/jasa pemerintah di SKPD.

Rencana aksi perbaikan untuk peningkatan Kompetensi SDM dalam proses PBJ yang berkualitas yang akan dilakukan adalah :

1. Melaksanakan koordinasi dengan LKPP terkait pemenuhan kebutuhan pelatihan dan bimbingan teknis SDM JF PPBJ;
2. Penyusunan jadwal kegiatan pembinaan pelaku pengadaan yang lebih terarah, efektif dan efisien dan perlu kunjungan ke SKPD untuk melaksanakan FGD terkait regulasi dan implementasi pengadaan barang/jasa pemerintah di SKPD;
3. Melaksanakan sosialisasi/bimtek Pengadaan Barang/Jasa di kegiatan coffee morning (bersama Bupati).



GAMBAR 3
Kegiatan Peningkatan Kompetensi PA/KPA dan PPK SKPD Kab. Tanah Laut

Sasaran 4 Meningkatnya Efisiensi Pagu Pengadaan Barang Jasa

Indikator : Persentase Efisiensi Pagu Pengadaan Barang Jasa

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
4	Meningkatnya Efisiensi Pagu Pengadaan Barang Jasa	Persentase Efisiensi Pagu Pengadaan Barang Jasa	100%	71%	71%	Bagian PBJ Mengampu Misi ke-3 ““***Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*** ***(Good Governance)”***

Mengikuti arahan dari Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2019 tentang Contoh Bukti Dukung Model Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (MK-UKPBJ) Level proaktif, Bagian Pengadaan Barang/Jasa diharuskan untuk memiliki indikator kinerja terkait Penghematan biaya yaitu Persentase Efisiensi Pagu Pengadaan Barang/Jasa. Sesuai arahan SE tersebut maka Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab. Tanah Laut membuat indikator kinerja yaitu Persentase Efisiensi Pagu Pengadaan Barang/Jasa dengan target 100%, yang dihitung dengan cara mengukur total nilai dari pagu anggaran dibandingkan dengan total nilai kontrak. Nilai 100% akan tercapai jika efisiensi pagu pengadaan barang/jasa mencapai target 5%.

Capaian kinerja untuk Persentase Efisiensi Pagu Pengadaan Barang/Jasa di Tahun 2023 adalah 3.57% dari target 5%. Dari nilai 3.57% maka tercapai persentase sebesar 71%.

Adapun kendala untuk meningkatkan efisiensi pagu pengadaan barang/jasa yaitu kurangnya kemampuan kompetensi SKPD dalam menyusun dokumen persiapan pengadaan.

Untuk **rencana aksi** di tahun yang akan datang, terkait dengan pencapaian target penghematan biaya, Bagian pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kab. Tanah Laut akan memperbanyak kegiatan sosialisasi dan pembinaan terhadap pelaku pengadaan di SKPD agar lebih cakap dalam penyusunan dokumen persiapan pengadaan (spesifikasi teknis/KAK, HPS dan Rancangan Kontrak).

❖ **Analisa Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia**

Pada Tahun Anggaran 2023 Bagian Pengadaan Barang/Jasa mendapatkan pagu sebesar Rp. 1.392.152.439 terealisasi Rp. 1.084.222.634 realisasi keuangan sebesar 77.9%, dengan rincian sebagai berikut :

1) Untuk mencapai sasaran Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa lingkup Kabupaten Tanah Laut secara elektronik dengan Indikator Persentase paket pengadaan yang terlayani dalam pengadaan/jasa sesuai standar dan tepat waktu dan dengan Program Perekonomian dan Pembangunan, Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan Pagu Rp. 670.026.599 terealisasi Rp. 442.424.156 dengan realisasi keuangan sebesar 66.0% dan dilaksanakan oleh 5 (lima) orang sumber daya manusia. Kegiatan indiaktor ini dilaksanakan melalui pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa, penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

   Untuk capaian kinerja terhadap IKU tersebut di atas adalah 100% sedangkan untuk realisasi anggarannya sebesar 66.0%. Dengan demikian maka IKU telah dilaksanakan dengan efektif dan efisien sehingga capaian kinerjanya lebih besar daripada realisasi anggaran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI
100%	66.03%	33.97%

2) Untuk mencapai sasaran Meningkatnya SKPD melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem LPSE dengan indikator Persentase SKPD yang melakukan pengadaan barang/jasa pemerintahan melalui sistem LPSE, Program Perekonomian dan Pembangunan, Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik dengan Pagu Rp. 285.598.545 terealisasi Rp. 279.597.500 dengan realisasi keuangan sebesar 97.9% dan dilaksanakan oleh 9 (sembilan) orang sumber daya manusia. Kegiatan indiaktor ini dilaksanakan melalui pelaksanaan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa (termasuk akun pengguna sistem pengadaan secara elektronik) dan infrastrukturnya, pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara

elektronik, fasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa identifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi dan mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan.

Untuk capaian kinerja terhadap IKU tersebut di atas adalah 100% sedangkan untuk realisasi anggarannya sebesar 97.9%. Dengan demikian maka IKU telah selaras dengan realisasi anggara dan telah dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI
100%	97.90%	2.10%

3) Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Kompetensi SDM dalam Proses PBJ yang Berkualitas dengan indikator Persentase SDM yang Kompeten dalam Pengadaan Barang/Jasa, Program Perekonomian dan Pembangunan, Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa dengan Pagu Rp. 436.527.295 terealisasi Rp. 362.200.978 dengan realisasi keuangan sebesar 83% dan dilaksanakan oleh 5 (lima) orang sumber daya manusia. Kegiatan indiaktor ini dilaksanakan melalui pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan desa serta bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, antara lain SIRUP, SPSE, e-katalog, e-monev, SIKaP.

Untuk capaian kinerja terhadap IKU tersebut di atas adalah 100% sedangkan untuk realisasi anggarannya sebesar 83%. Dengan demikian maka IKU telah dilaksanakan dengan efektif dan efisien sehingga capaian kinerjanya lebih besar daripada realisasi anggaran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI
100%	83%	17%

4) Untuk mencapai sasaran Meningkatnya efisiensi pagu Pengadaan Barang Jasa dengan indikator Persentase efisiensi pagu Pengadaan Barang dan Jasa Program Perekonomian dan Pembangunan, Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan Pagu Rp. 670.026.599 terealisasi Rp. 442.424.156 dengan realisasi keuangan sebesar 66.0% dan dilaksanakan oleh 5 (lima) orang sumber daya manusia. Kegiatan indiaktor ini dilaksanakan melalui pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa, penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Untuk capaian kinerja terhadap IKU tersebut di atas adalah 71% sedangkan untuk realisasi anggarannya sebesar 66.0%. Dengan demikian maka IKU telah dilaksanakan dengan efektif dan efisien sehingga capaian kinerjanya lebih besar daripada realisasi anggaran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI
71%	66.00%	5%

Tabel Indikator Kinerja Realisasi Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2023 (Rp)	%	SDM	KET
1	Persentase paket pengadaan yang terlayani dalam pengadaan/jasa sesuai standar dan tepat waktu	**Program Perekonomian dan Pembangunan**	**Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa** Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	670.026.599	442.424.156	66.00%	- Kabag PBJ - Kasubbag Pengelolaan PBJ - Pengelola Unit Layanan Pengadaan (ULP) - PTT (2 Orang)	
2	Persentase SKPD yang melakukan pengadaan barang/jasa pemerintahan melalui sistem LPSE	**Program Perekonomian dan Pembangunan**	**Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa** Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	285.598.545	279.597.500	97.9%	- Kabag PBJ - Sub Koordinator Pengelolaan LPSE - Pengelola LPSE - Pengelola Penyelenggara Media Elektronik - Pengadministrasian LPSE - PTT (2 Orang) - Tenaga Ahli (2 Orang)	

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2023 (Rp)	%	SDM	KET
3	Persentase SDM yang Kompeten dalam Pengadaan Barang/Jasa	**Program Perekonomian dan Pembangunan**	**Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa** Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi PBJ	436.527.295	362.200.978	83%	- Kabag PBJ - Sub Koordinator Pembinaan dan Advokasi PBJ - Pengelola Perbendaharaan dan Pelayanan - PTT (2 Orang)	
4			**Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**				- Kabag PBJ	

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2023 (Rp)	%	SDM	KET
	Persentase efisiensi pagu Pengadaan Barang Jasa	**Program Perekonomian dan Pembangunan**	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	670.026.599	42.424.156	66.00%	- Kasubbag Pengelolaan PBJ - Pengelola Unit Layanan Pengadaan (ULP) - PTT (2 Orang)	

❖ **Analisa Capaian Kinerja Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa**

Untuk capaian indikator sasaran pada Kasubbag Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan melalui Program Perekonomian dan Pembangunan Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan pagu Rp. 670.026.599,- terealisasi Rp. 442.424.156,- dengan realisasi keuangan sebesar 66.0%.

Adapun penyebab realisasi keuangan sebesar 66.0% dikarenakan ada beberapa uraian kegiatan yang menyisakan anggaran seperti belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan computer, belanja makanan dan minuman rapat, honorarium narasumber atau pembahasan, moderator, pembawa acara dan panitia dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa. Sisa Anggaran dikarenakan :

- PPN yang tidak direalisasikan secara maksimal karena banyak penyedia yang pajaknya terkategori Non PKP;
- Kegiatan Perjalanan Dinas Biasa banyak tidak terserap secara efektif karena pengadaan barang/jasa banyak dilaksanakan dengan metode e-purchasing/e-katalog sehingga kelompok kerja pemilihan tender/seleksi jarang melakukan kegiatan klarifikasi dan verifikasi lapangan.
- Tidak efektifnya anggaran perjalanan dinas dikarenakan adanya rincian tempat tujuan perjalanan dinas, sehingga sulit untuk terealisasi, yang mana harus selalu menyesuaikan tujuan yang ada di DPA;
- Tidak digunakannya honorarium narasumber beserta transport dan biaya hotel.

Tabel Indikator Kinerja dan Realisasi Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia
Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP) 2023	REALISASI ANGGARAN (RP) 2023	%	SDM	KET
1	Jumlah Pemilih penyedia Barang/Jasa yang difasilitasi	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa**	**670.026.599**	442.424.156	66.03%	1 Kasubbag, 15 JF PPBJ dan 1 Pengelola ULP	2 PTT
2	Jumlah Pemilih penyedia Barang/Jasa yang difasilitasi		Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					

Capaian Sasaran dan Indikator Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dapat dilihat pada analisa sebagai berikut :

Tabel Capaian Sasaran dan Indikator Kasubbag Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai standar dan tepat waktu	Jumlah Terlaksananya kegiatan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai standar dan tepat waktu	150 Paket	249 Paket	166%	Kasubbag Pengadaan Barang dan Jasa
2	Melakukan pendampingan SKPD dalam perencanaan pengadaan dan pengelolaan kontrak	Jumlah fasilitasi SKPD yang didampingi dalam perencanaan pengadaan dan pengelolaan kontrak	40 SKPD	40 SKPD	100%	Kasubbag Pengadaan Barang dan Jasa

SASARAN 1 Memfasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Sesuai Standar dan Tepat Waktu

Indikator : Jumlah Terlaksananya kegiatan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai standar dan tepat waktu

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai standar dan tepat waktu	Jumlah Terlaksananya kegiatan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai standar dan tepat waktu	150 Paket	249 Paket	166%	Kasubbag Pengadaan Barang Dan Jasa

Jumlah terlaksanakannya kegiatan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai standar dan tepat waktu sebanyak 249 paket.

Dalam melaksanakan indikator tersebut menghadapi kendala yaitu :

- Terlambatnya pemasukan Dokumen Persiapan Pengadaan dari SKPD ke UKPBJ (masuk di triwulan II – April, Mei dan Juni) sehingga beban kerja Pokja Pemilihan menjadi tertumpuk pada triwulan tersebut.
- Masih kurangnya pengetahuan dan wawasan pelaku pengadaan di SKPD dalam menyusun dokumen persiapan pengadaan (Spesifikasi teknis, HPS dan Rancangan kontrak);

- Kurangnya pemanfaatan sistem pengadaan oleh pelaku pengadaan di SKPD, sehingga banyak pelaporan data pengadaan yang belum terdata di SPSE.
- SKPD terlambat dalam pelaksanaan pengumuman Rencana Umum Pengadaan melalui aplikasi SiRUP.

Solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi kendala adalah :

- UKPBJ melaksanakan pendampingan dengan menugaskan Pengelola PBJ untuk mendampingi PPK dalam pelaksanaan penyusunan Dokumen Persiapan Pengadaan;
- UKPB selalu menyampaikan himbauan kepada SKPD agar segera menyampaikan permohonan tender/seleksi ke UKPBJ melalui rapat koordinasi (*Coffee Morning*) yang biasanya dilakukan di awal pekan;
- UKPBJ melaksanakan monitoring pelaksanaan input RUP dan melaksanakan pelatihan (*coaching clinic*) tata cara input RUP kepada SKPD serta memberikan pendampingan dalam pelaksanaan input RUP kepada SKPD.

Rencana aksi perbaikan yang dilakukan adalah :

- Melaksanakan sosialisasi dan peningkatan kompetensi kepada pelaku PBJ yang ada di SKPD dengan lebih intensif dengan cara kunjungan ke SKPD;
- Menyampaikan himbauan kepada SKPD melalui Sekretaris Daerah tentang pelaksanaan pengumuman Rencana Umum Pengadaan melalui aplikasi SiRUP dengan dikenakannya sanksi bagi SKPD yang terlambat dalam pelaksanaan.



GAMBAR 4
Kegiatan Reviu Pengadaan Oleh Pokja Pemilihan Bersama SKPD Dalam Proses Pemilihan Penyedia

SASARAN 2 Memfasilitasi Pendampingan SKPD dalam Perencanaan Pengadaan dan Pengelolaan Kontrak

Indikator : Jumlah fasilitasi SKPD yang didampingi dalam perencanaan pengadaan dan pengelolaan kontrak

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Melakukan pendampingan SKPD dalam perencanaan pengadaan dan pengelolaan kontrak	Jumlah fasilitasi SKPD yang didampingi dalam perencanaan pengadaan dan pengelolaan kontrak	40 SKPD	40 SKPD	100%	Kasubbag Pengadaan Barang Dan Jasa

Jumlah fasilitasi SKPD yang didampingi dalam perencanaan pengadaan dan pengelolaan kontrak sebanyak 40 SKPD.

Dalam melaksanakan indikator tersebut menghadapi kendala yaitu :

- Sulitnya mendapatkan informasi tentang inventarisasi paket PBJ yang ada di SKPD;
- Sulitnya mendapatkan informasi tentang e-purchasing (e-katalog lokal dan e-katalog nasional) yang telah selesai dilaksanakan oleh PPK;
- Sulitnya koordinasi dengan SKPD (khususnya PPK) dalam hal pendampingan pengelolaan kontrak.

Solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi kendala adalah :

- Menyampaikan himbauan kepada SKPD melalui Sekretaris Daerah pada kegiatan rapat koordinasi agar SKPD melaksanakan pengumuman Rencana Umum Pengadaan sesegera mungkin, sehingga UKPBJ bisa segera menginventarisasi, memetakan dan merencanakan strategi pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- Menyampaikan kepada SKPD agar melibatkan JF PPBJ yang ada di UKPBJ untuk berperan serta mendampingi dalam pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan kontrak PBJ.
- Melaksanakan kegiatan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan wawasan pelaku pengadaan di SKPD dalam memanfaatkan system pengadaan.

Rencana aksi perbaikan yang dilakukan kedepannya adalah :

- Melaksanakan monitoring dan evaluasi intensif kepada SKPD terkait pelaksanaan pengumuman Rencana Umum Pengadaan agar bisa dilaksanakan di awal tahun,

sehingga UKPB dapat lebih mudah untuk memetakan dan merencanakan strategi pelaksanaan pengadaan barang/jasa

- Melaksanakan bimbingan teknis/workshop tim teknis PPK dalam memanfaatkan sistem pengadaan.
- Lebih intens melaksanakan sosialisasi kepada SKPD tentang peran serta Pengelola PPBJ dalam pendampingan perencanaan dan pengelolaan kontrak PBJ dengan tujuan agar Pengelola PPBJ lebih dilibatkan dalam pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan kontrak PBJ.

Analisa Capaian Sasaran Strategis

Kepala Bagian Hukum

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya informasi produk hukum	Persentase informasi produk hukum	100%	100%	100%	Bagian Hukum Mengampu Misi ke- 3 *"Membangun tata kelola pemerintahan yang baik* ***(Good Governance)"***
2	Meningkatnya harmonisasi produk hukum	Persentase produk hukum yang harmonis	100%	100%	100%	
3	Tingkat penanganan kasus/perkara hukum di lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase kasus/perkara hukum yang tertangani	100%	100%	100%	
4	Nilai Pemenuhan Kepedulian HAM di Kabupaten Tanah Laut	Nilai Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM)	Nilai 76	Nilai 81,95	107.82%	

❖ **Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja**

Capaian kinerja Bagian Hukum dari 4 (empat) indikator sebagai berikut:

1) Persentase informasi produk hukum pada Tahun 2023 dengan target 100% telah dapat terealisasi sebesar 100%;
2) Persentase produk hukum yang harmonis pada Tahun 2023 dengan target 100% telah dapat terealisasi sebesar 100%;
3) Persentase kasus/perkara hukum yang tertangani pada Tahun 2023 dengan target 100% telah dapat terealisasi sebesar 100%;
4) Nilai Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM) pada Tahun 2023 dengan target nilai 76 dapat terealisasi dengan baik dengan realisasi Nilai 81,95 dan mendapatkan penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2023 dengan realisasi adalah sebesar 107,82%;

Berikut disajikan Perbandingan Capaian Sasaran Strategis Bagian Hukum terhadap capaian tahun sebelumnya

Tabel Capaian Sasaran Indikator Kinerja Bagian Hukum terhadap capaian tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Tahun 2023		
			2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase informasi produk hukum	%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase produk hukum yang harmonis	%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase kasus/perkara hukum yang tertangani	%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Nilai Pemenuhan Kepedulian HAM di Kabupaten Tanah Laut	Nilai	-	Nilai 78,4	Nilai 76	Nilai 81,95	107.82%
	Rata – Rata Capaian						**101.95%**

❖ **Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya**

Capaian kinerja Bagian Hukum ada 4 (Empat) indikator adalah **101.95%** dengan rincian sebagai berikut :

1) Persentase informasi produk hukum pada Tahun 2023 dan Tahun 2022 sama-sama terealisasi 100%;
2) Persentase produk hukum yang harmonis pada Tahun 2023 dan Tahun 2022 sama-sama terealisasi 100%;
3) Persentase kasus/perkara hukum yang tertangani pada Tahun 2023 dan Tahun 2022 sama-sama terealisasi 100%;
4) Nilai Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM) pada Tahun 2023 terealisasi dengan baik dengan Nilai 81,95 sedangkan untuk Tahun 2022 juga tertangani dengan baik dengan nilai 78,4.

❖ **Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Eselon III Selama 5 (Lima) Tahun (2019-2023)**

1) Indikator Kinerja Utama (IKU) Eselon III pada Tahun 2019 hanya ada 3 (tiga) yaitu Jumlah Produk Hukum Daerah/lainnya yang harmonis dengan capaian 237%, Jumlah masalah hukum yang diselesaikan dengan capaian 100%, dan diraihnya predikat Kabupaten/Kota Peduli HAM dengan capaian 100%;

2) Indikator Kinerja Utama (IKU) Eselon III pada Tahun 2020 bertambah 1 (satu) sehingga menjadi 4 (empat) indikator yaitu Persentase Produk Hukum Daerah/lainnya yang harmonis dengan capaian 100%, Persentase masalah hukum yang diselesaikan dengan capaian 100%, dan Hasil Penilaian Atas Pemenuhan HAM dengan capaian 100%, Persentase produk hukum daerah yang terdokumentasi dan dipublikasikan dengan capaian 100%;
3) Indikator Kinerja Utama (IKU) Eselon III pada Tahun 2021 ada 4 (empat) indikator yaitu Persentase informasi produk hukum dengan capaian 100%, Persentase produk hukum yang harmonis dengan capaian 100%, dan Persentase kasus/perkara hukum yang tertangani dengan capaian 125%, dan Nilai Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM) yang tidak dapat terealisasi dikarenakan peniadaan kegiatan penilaian ditahun tersebut oleh Kementerian Hukum dan HAM R.I.
4) Indikator Kinerja Utama (IKU) Eselon III pada Tahun 2022 ada 4 (empat) indikator yaitu Persentase informasi produk hukum dengan capaian 100%, Persentase produk hukum yang harmonis dengan capaian 100%, dan Persentase kasus/perkara hukum yang tertangani dengan capaian 100%, dan Nilai Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM) dengan capaian 104,5%.
5) Indikator Kinerja Utama (IKU) Eselon III pada Tahun 2023 ada 4 (empat) indikator yaitu Persentase informasi produk hukum dengan capaian 100%, Persentase produk hukum yang harmonis dengan capaian 100%, dan Persentase kasus/perkara hukum yang tertangani dengan capaian 100%, dan Nilai Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM) dengan capaian 107.82%.

❖ **Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Eselon III Selama 5 (Lima) Tahun (2018-2023)**

NO	IKU ESELON III		2019			2020			2021			2022			2023			PENANGGUNG JAWAB/BAGIAN
	SASARAN	INDIKATOR	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	
	Meningkatnya Pelayanan terhadap stakeholder dalam hal produk hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah Produk Hukum Daerah/lainnya yang harmonis	562	1.333	237%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Bagian Hukum**
	Tingkat Penanganan masalah hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	Jumlah masalah hukum yang diselesaikan	4	4	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Bagian Hukum**
	Peningkatan kepedulian HAM di Kabupaten Tanah Laut	Diraihnya predikat Kabupaten/Kota Peduli HAM	1	1	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Bagian Hukum**
	Produk Hukum Daerah yang terdokumentasi dan dipublikasikan	Jumlah produk hukum daerah yang terdokumentasi dan dipublikasikan	450	450	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Bagian Hukum**
	Meningkatnya Pelayanan terhadap stakeholder dalam hal produk hukum yang sesuai	Persentase Produk Hukum Daerah/lainnya yang harmonis	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Bagian Hukum**

	dengan ketentuan peraturan perundang-undangan																	
	Tingkat Penanganan masalah hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	Persentase masalah hukum yang diselesaikan	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Bagian Hukum**
	Peningkatan kepedulian HAM di Kabupaten Tanah Laut	Hasil Penilaian Atas Pemenuhan HAM	-	-	-	Nilai 75	Nilai 79,64	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Bagian Hukum**
	Produk Hukum Daerah yang terdokumentasi dan dipublikasikan	Persentase produk hukum daerah yang terdokumentasi dan dipublikasikan	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Bagian Hukum**
	Meningkatnya informasi produk hukum	Persentase informasi produk hukum	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	**Bagian Hukum**
	Meningkatnya harmonisasi produk hukum	Persentase produk hukum yang harmonis	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	**Bagian Hukum**
	Tingkat penanganan kasus/perkara hukum di lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase kasus/perkara hukum yang tertangani	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	**Bagian Hukum**
	Nilai Pemenuhan Kepedulian HAM di Kabupaten Tanah Laut	Nilai Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM)	-	-	-	-	-	-	Nilai 75	-	-	Nilai 75	Nilai 78,4	104,5 %	Nilai 76	Nilai 81,95	107. 82%	**Bagian Hukum**

❖ **Analisa Peningkatan dan Penurunan Kinerja**

SASARAN 1 Meningkatnya Informasi Produk Hukum

Indikator : Persentase Infomasi Produk Hukum

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya informasi produk hukum	Persentase informasi produk hukum	100%	100%	100%	Bagian Hukum Mengampu Misi ke- 3 *"Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (**Good Governance**)"*

Dalam rangka untuk meningkatnya informasi produk hukum maka Bagian Hukum melalui Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum telah melakukan publikasi atau penyebar luasan produk hukum daerah melalui website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Tanah dengan cara mendigitalisasikan produk hukum daerah yang telah diundangkan pada Tahun 2023.

Publikasi atau penyebar luasan produk hukum juga dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum, pada Tahun 2023 telah dilakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2022 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Kintap, Kecamatan Jorong, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Bumi Makmur dan Kecamatan Pelaihari. Selain itu juga dilaksanakan sosialisasi tentang Hukum Waris dan Pertanahan dengan Peserta Camat, Lurah serta Kepala Desa se Kabupaten Tanah Laut.

Bagian Hukum juga melaksanakan cetak terhadap produk hukum daerah sebanyak 500 eksemplar Lembaran Daerah pada Tahun 2023. Setelah dilakukan cetak, Produk hukum daerah tersebut dipublikaskan dengan cara membagikan produk hukum daerah yang telah dibukukan tersebut kepada SKPD sampai dengan Kecamatan.

Sehingga target 100% yang telah dibuat sebelumnya dapat dianggap terealisasikan semua atau 100% Sehingga capaiannya adalah sebesar 100%.

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain:

- Proses penginputan atau pengunggahan data produk hukum daerah belum terjadwal dengan baik dikarenakan padatnya kegiatan pada Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum karena sejak Tahun 2021 juga melakukan pencetakan terhadap produk hukum penetapan.
- File atau dokumen Peraturan Daerah Tahun 2005 kebawah yang masih belum ditemukan arsipnya karena proses pengarsipan waktu itu masih belum sebagus saat ini. kebawah

dan Peraturan Bupati Tahun 2013 ke bawah tidak tersedia karena terkendala tidak adanya file atau dokumen karena ditahun-tahun tersebut Perbup langsung dicetak oleh SKPD masing-masing.

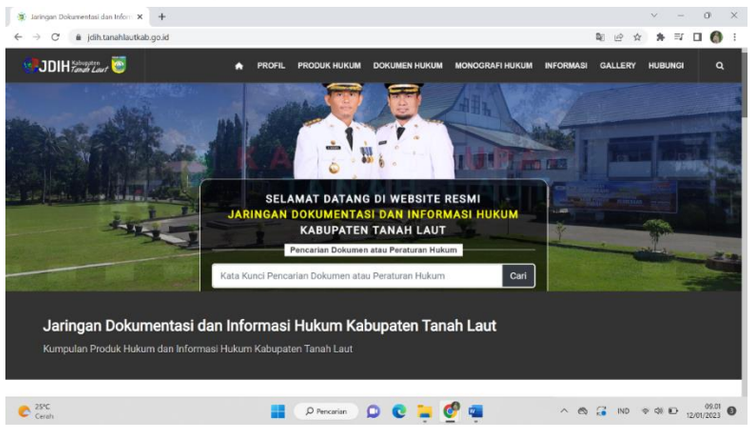
- Masih terbatasnya anggaran untuk melakukan pencetak produk hukum dan sosialisasi hukum

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Perlu membuat jadwal rutin untuk melakukan proses digitalisasi dan penginputan data ke website JDIH Tanah Laut
- Perlu melakukan pengumpulan dan pencarian terhadap dokumen-dokumen yang belum lengkap baik diruang arsip atau ke SKPD-SKPD terkait secara bertahap
- perlu penambahan anggaran pada cetak produk hukum agar dapat mencetak lebih banyak produk hukum dan kegiatan sosialisasi hukum

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- membuat jadwal rutin untuk melakukan proses digitalisasi dan penginputan data ke website JDIH Tanah Laut
- melakukan pengumpulan dan pencarian terhadap dokumen-dokumen yang belum lengkap baik diruang arsip atau pada SKPD-SKPD terkait secara bertahap
- Penganggaran pembuatan cetak produk hukum



(Screenshot website https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/)



(Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah)



(Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Hukum Waris dan Pertanahan)

SASARAN 2 Meningkatnya harmonisasi produk hukum

Indikator : Persentase produk hukum yang harmonisasi

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
2	Meningkatnya harmonisasi produk hukum	Persentase produk hukum yang harmonis	100%	100%	100%	Bagian Hukum Mengampu Misi ke- 3 "*Membangun tata kelola pemerintahan yang baik* (***Good Governance***)"

Dalam hal ini bagian hukum menerima dan melakukan koreksi terhadap *draft* rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati yang diusulkan oleh SKPD terkait ke bagian hukum. Selanjutnya juga dilakukan autentifikasi terhadap draf rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati.

Melakukan rapat-rapat serta fasilitasi dan evaluasi terhadap draf rancangan peraturan daerah dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Provinsi Kalimantan Selatan serta jika diperlukan konsultasi dan koordinasi dengan kementerian terkait. Hal tersebut juga bisa dilakukan terhadap rancangan peraturan bupati jika diperlukan. Dan khusus untuk Harmonisasi terhadap Peraturan Daerah wajib dilakukan melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan. Untuk Tahun 2023 ada sebanyak 5 Peraturan Daerah yang telah diundangkan dan sebelumnya telah dilakukan fasilitasi dan harmonisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 121 Peraturan Bupati, 1.484 Keputusan Bupati dan 7 Instruksi Bupati. Sehingga target 100% yang telah dibuat sebelumnya dapat direalisasikan 100% Sehingga capaiannya adalah sebesar 100%.

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain:

- Prosedur penetapan pembuatan produk hukum yang panjang sehingga perjalanan dari mulai draf s/d penetapan terkesan lama terutama rancangan peraturan daerah yang terkadang terkendala dalam proses di DPRD.
- Adakalanya juga SKPD pengusul lambat dalam melakukan pengembalian draf setelah dikoreksi untuk dicetak sehingga terkesan prosesnya menjadi lama.
- belum siapnya SKPD pengusul terhadap draft dan kajian rancangan peraturan daerah (naskah akademik) serta materi muatan yang perlu dikonsultasikan terlebih dahulu ke kementerian / lembaga terkait atau pakar hukum atau tenaga ahli.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Petugas perlu menghubungi SKPD pengusul untuk mengingatkan agar draf yang telah diperbaiki agar segera diserahkan kembali ke bagian hukum
- Perlunya penganggaran pembuatan (naskah akademik) untuk kajian Rancangan Peraturan Daerah serta honorarium narasumber
- Perlunya penganggaran perjalanan dinas luar daerah untuk melakukan rapat-rapat koordinasi ditingkat pemerintah pusat maupun daerah.

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Petugas perlu menambahkan kolom baru yaitu kolom “tanggal berkas kembali/diterima” setelah perbaikan oleh SKPD pada buku tanda terima, sehingga bisa dilihat SKPD mana yang telah mengembalikan dan yang belum mengembalikan berkas.
- Penambahan anggaran pembuatan (naskah akademik) untuk kajian Rancangan Peraturan Daerah serta honorarium narasumber
- Penganggaran perjalanan dinas luar daerah untuk melakukan rapat-rapat koordinasi ditingkat pemerintah pusat maupun daerah.



(Dokumentasi Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah)



(Dokumentasi Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah)

SASARAN 3 Tingkat penanganan kasus/perkara hukum di lingkungan Pemerintah Daerah

Indikator : Persentase kasus/perkara hukum yang tertangani

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
3	Tingkat penanganan kasus/perkara hukum di lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase kasus/perkara hukum yang tertangani	100%	100%	100%	Bagian Hukum Mengampu Misi ke- 3 *"Membangun tata kelola pemerintahan yang baik* ***(Good Governance)"***

Pemberian layanan bantuan hukum, bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, SKPD, dan Pemerintahan Desa di Tahun 2023 berjumlah 5 (lima) kasus/perkara hukum yang telah dibantu penanganannya oleh Bagian Hukum melalui Sub Kegiatan Bantuan Hukum. Kasus/perkara Hukum yang ditangani tersebut terdiri dari 2 (dua) perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan register perkara Nomor: 17/G/2022/PTUN.BJM yang dikuasakan oleh Lurah Angsau dan Camat Pelaihari dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), dan Perkara Nomor : 25/G/2022/PTUN.BJM dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), lalu 2 (dua) perkara Perdata di Pengadilan Negeri Pelaihari dengan register perkara Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Pli yang dikuasakan oleh Camat Kintap dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), dan Perkara Nomor : 2/Pdt.G/2022/PN Pli yang dikuasakan oleh Camat Panyipatan ke Bagian Hukum dan saat ini masih dalam proses persidangan banding, serta 1 (satu) perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan register perkara Nomor : 631/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel antara Pemerintah Kabupaten

Tanah Laut (turut tergugat) dengan PT. Perintis Embee yang saat ini masih dalam proses persidangan pertama.

Dalam fasilitasi penanganan kasus/perkara tidak serta merta dapat diprediksi kapan kasus tersebut dapat dianggap selesai, karena bisa saja salah satu pihak melakukan upaya hukum sehingga waktu atau proses akan tetap berlanjut sampai dengan ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Bahwa telah dilakukan fasilitasi bantuan hukum terhadap semua kasus yang masuk atau yang dimintakan pendampingan, sehingga Persentase kasus/perkara hukum yang tertangani dengan target 100% yang telah dibuat sebelumnya dapat dianggap terrealisasikan semua atau 100% Sehingga capaiannya adalah sebesar 100%.

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain:

- kurang tanggapnya SKPD atau Pemberi Kuasa dalam memenuhi berkas atau dokumen yang dibutuhkan untuk kepentingan membuat jawaban dan bukti-bukti didalam persidangan, dan hadir pada saat mediasi dan sidang pemeriksaan setempat.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- koordinasi dan komunisasi dengan pemberi kuasa

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Tetap terus melakukan koordinasi dan komunikasi dalam persiapan sampai dalam peanganan perkara sampai dengan selesai.



(Dokumentasi rapat persiapan jawaban gugatan PT. Parembee Nomor: 631/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel)



Dokumentasi mediasi gugatan PT. Parembee Nomor: 631/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel

SASARAN 4 Nilai Pemenuhan Kepedulian HAM di Kabupaten Tanah Laut

Indikator : Nilai Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM)

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
4	Nilai Pemenuhan Kepedulian HAM di Kabupaten Tanah Laut	Nilai Kabupaten/ Kota Peduli HAM (KKP HAM)	Nilai 76	Nilai 81,95	107.82%	Bagian Hukum Mengampu Misi ke- 3 "*Membangun tata kelola pemerintahan yang baik* (***Good Governance***)"

Bahwa pada Tahun 2023 kegiatan Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM oleh Kementerian Hukum dan HAM kembali dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM R.I, proses pengumpulan bahan/formulir penilaian kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM telah dilakukan oleh Bagian Hukum sejak awal Tahun 2023 yang diambil dari data-data pada Tahun 2022 yang dikumpulkan dari SKPD-SKPD terkait yang wajib dilengkapi dengan data dukung untuk setiap poinnya.

Ada 10 Kelompok HAK yang wajib terpenuhi dalam penilaian kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM yaitu hak atas bantuan hukum, hak atas informasi, hak atas turut serta dalam pemerintahan, hak atas keberagaman dan pluralisme, hak atas kependudukan, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas lingkungan yang baik dan sehat serta hak atas perumahan yang layak dan hak perempuan dan anak. Kabupaten Tanah Laut mendapat Total Nilai 81,95 dengan Kriteria Peduli HAM, sehingga realisasinya melebihi target yang semula hanya ditargetkan mendapat nilai 76 dengan realisasi nilai 81,95 atau 107.82%.

Meski memenuhi target, namun dalam pelaksanaan indikator tersebut di atas masih terdapat beberapa kendala antara lain:

- Masih terdapat beberapa nilai capaian dibawah 60 untuk beberapa kelompok hak pada penilaian kriteria Kab/Kota Peduli HAM, hal tersebut dikarenakan kurangnya data dukung yang diberikan oleh SKPD/Lembaga terkait.
- Adanya beberapa kegiatan khususnya RANHAM yang menjadi nilai tambah dalam penilaian kriteria Kab/Kota Peduli HAM yang memang tidak dapat terlaksana karena tidak direncanakan dan dianggarkan oleh SKPD/Lembaga terkait.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- koordinasi dan komunisasi hingga jemput bola untuk membantu SKPD/Lembaga terkait untuk dapat melengkapi data dukung atas form yang telah diberikan.
- Koordinasi dengan BAPPEDA terkait keigatan-kegiatan dalam rangka pemenuhan data RANHAM yang perlu dianggarkan oleh SKPD/Lembaga terkait.

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Karena pemilik data adalah SKPD/Lembaga terkait (pihak eksternal) maka tugas Bagian Hukum selaku koordinator dalam kegiatan Penilaian Kab/Kota Peduli HAM hanyalah terus melakukan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan SKPD/Lembaga terkait terkait pengisian form/data-data yang diperlukan.
- Menyerahkan Laporan Penilaian Kreteria Kab/Kota Peduli HAM dan RANHAM kepada BAPPEDA agar dapat dijadikan bahan untuk perencanaan yang menjamin pemenuhan Hak Asasi Manusia pada tahun berikutnya.

❖ **Analisa Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia**

Untuk mencapai sasaran strategis / kinerja utama dalam meningkatnya informasi produk hukum, meningkatnya harmonisasi produk hukum, tingkat penanganan kasus/perkara hukum di lingkungan Pemerintah Daerah dan Nilai Pemenuhan Kepedulian HAM di Kabupaten Tanah Laut yang di tunjangan dalam program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat melalui Kegiatan Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum dengan jumlah Pagu sebesar Rp. 2.229.556.766,- dengan realisasi sebesar 1.625.809.811,- atau sebesar 72,92% dengan rincian sebagai berikut:

1) Untuk mencapai **sasaran** Meningkatnya informasi produk hukum dengan **Indikator** Persentase informasi produk hukum pada Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan pagu Rp 388.429.596 terealisasi Rp 313.830.296 dengan realisasi keuangan sebesar 80.79% yang dilaksanakan oleh Kepala Bagian Hukum dan 5 (lima) orang staf yang terdiri dari 1 (satu) orang Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda, 1 (satu) orang Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum (1 orang) dan 3 (tiga) orang PTT

Untuk capaian kinerja terhadap IKU tersebut diatas adalah **100%** sedangkan untuk realisasi anggarannya sebesar **80,79%.** Dalam artian IKU ini telah dilaksanakan dengan efektif dan efisien dikarenakan capaian kinerjanya lebih besar daripada realisasi anggaran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI
100%	80.79%	19,21%

2) Untuk mencapai **sasaran** meningkatnya harmonisasi produk hukum dengan **Indikator** Persentase produk hukum yang harmonis pada Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan pagu Rp 902.546.592 terealisasi Rp 734.031.291 dengan realisasi keuangan sebesar 81.33% yang dilaksanakan oleh Kepala Bagian Hukum dan 3 (tiga) orang staf yang terdiri dari 1 (satu) orang Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda, 1 (satu) orang Analis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dan 1 (satu) orang PTT.

Untuk capaian kinerja terhadap IKU tersebut diatas adalah **100%** sedangkan untuk realisasi anggarannya sebesar **81.33%.** Dalam artian IKU ini telah dilaksanakan dengan efektif dan efisien dikarenakan capaian kinerjanya lebih besar daripada realisasi anggaran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI
100%	**81.33%**	18,67%

3) Untuk mencapai **sasaran** Tingkat penanganan kasus/perkara hukum di lingkungan Pemerintah Daerah dengan **Indikator** Persentase kasus/perkara hukum yang tertangani pada Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan pagu Rp 938.580.578 terealisasi Rp 572.584.764 dengan realisasi keuangan sebesar 81.33% yang dilaksanakan oleh Kepala Bagian Hukum dan 4 (empat) orang staf yang terdiri dari 1 (satu) orang Penyusun Bahan Bantuan Hukum, 1 (satu) orang Penyuluh Hukum Pertama (1 orang) dan 2 (dua) orang PTT.

Untuk capaian kinerja terhadap IKU tersebut diatas adalah **100%** sedangkan untuk realisasi anggarannya sebesar 61.58%. Dalam artian IKU ini telah dilaksanakan dengan efektif dan efisien dikarenakan capaian kinerjanya lebih besar daripada realisasi anggaran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI
100%	61.58%	38,42%

4) Untuk mencapai **sasaran** Nilai Pemenuhan Kepedulian HAM di Kabupaten Tanah Laut dengan **Indikator** Nilai Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM) pada Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan pagu Rp 938.580.578 terealisasi Rp 572.584.764 dengan realisasi keuangan sebesar 81.33% yang dilaksanakan oleh Kepala Bagian Hukum dan 4 (empat) orang staf yang terdiri dari 1 (satu) orang Penyusun Bahan Bantuan Hukum, 1 (satu) orang Penyuluh Hukum Pertama (1 orang) dan 2 (dua) orang PTT.

Untuk capaian kinerja terhadap IKU tersebut diatas adalah **107.82%** sedangkan untuk realisasi anggarannya sebesar 61.58%. Dalam artian IKU ini telah dilaksanakan dengan efektif dan efisien dikarenakan capaian kinerjanya lebih besar daripada realisasi anggaran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI
107.82%	61.58%	46,42%

Tabel Indikator Kinerja dan Realisasi Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2023 (Rp)	%	SDM	KET
1	Persentase informasi produk hukum	**PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**					
			Sub Kegaiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	388.429.596	313.830.296	80.79%	5	- Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda (1 orang) - Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum (1 orang) PTT (3 orang)
2	Persentase produk hukum yang harmonis		**Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**					
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	902.546.592	734.031.291	81.33%	4	- Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda (1 orang) - Analis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (1 orang) PTT (1 orang)
3	Persentase kasus/perkara hukum yang tertangani	Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat	**Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**					
4	Nilai Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM)	Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	938.580.578	577.948.224	61.58%	4	- Penyusun Bahan Bantuan Hukum (1 orang) - Penyuluh Hukum Pertama (1 orang) PTT (2 orang)

Analisa Capaian Sasaran Strategis

Kepala Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya layanan informasi penyelenggaraan pembangunan daerah dan komunikasi pimpinan, keprotokolan dan dokumentasi.	Persentase penyebarluasan informasi/pemberitaan pembangunan pemerintahan daerah yang bisa diakses masyarakat melalui media	100%	100%	100%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Mengampu Misi ke- 3 *"Membangun tata kelola pemerintahan yang baik* ***(Good Governance)"***
		Persentase kegiatan dokumentasi KDH/WKDH yang terlayani	100%	100%	100%	
		Persentase kegiatan KDH/WKDH/SKPD/ tamu Daerah yang terlayani keprotokolannya	100%	100%	100%	
		Persentase komunikasi pimpinan yang terfasilitasi	0%	0%	0%	
		Persentase pengaduan masyarakat yang ditandaklanjuti	100%	0%	0%	
ESELON IV						
1	Kegiatan keprotokolan KDH/WKDH yang terlayani	Jumlah kegiatan KDH/WKDH yang terlayani keprotokolannya	360 Kali	360 Kali	100%	Kasubbag Protokol
2	Pelayanan tamu KDH/WKDH yang terlayani	Jumlah tamu KDH/WKDH yang terlayani dengan baik	24 Kali	24 Kali	100%	Kasubbag Protokol

❖ **Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja**

Rata-rata capaian kinerja bagian protokol dan komunikasi pimpinan adalah **100%,** dengan rincian sebagai berikut:

1) Persentase penyebarluasan informasi/pemberitaan pembangunan pemerintahan daerah yang bisa diakses masyarakat melalui media terealisasi sebesar 100% dari target 100%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerjanya adalah 100%.
2) Persentase kegiatan Dokumentasi KDH/WKDH/SKPD yang terlayani terealisasi sebesar 100% dari target 100%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerjanya adalah 100%.

3) Persentase kegiatan KDH/WKDHSKPD/ tamu daerah yang terlayani keprokolannya terealisasi sebesar 100% dari target 100%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerjanya adalah 100%.
4) Persentase Komunikasi Pimpinan yang terfasilitasi tahun 2023 yang dipublikasikan melalui media cetak sudah dimutasikan ke Dinas Komunikasi dan Informatika.
5) Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti adalah 0% dari target 100%, Karena tidak terdapat aduan dari Masyarakat.

Berikut disajikan Perbandingan Capaian Sasaran Strategis Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan terhadap capaian tahun sebelumnya :

Tabel Capaian Sasaran Indikator Kinerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan terhadap capaian Tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Tahun 2023		
			2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase penyebarluasan informasi/pemberitaan pembangunan pemerintahan daerah yang bisa diakses masyarakat melalui media	%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase kegiatan dokumentasi KDH/WKDH yang terlayani	%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase kegiatan KDH/WKDH/SKPD/ tamu Daerah yang terlayani keprotokolannya	%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Presentase komunikasi pimpinan yang terfasilitasi	%	0%	0%	0%	0%	0%
5	Persentase pengaduan masyarakat yang ditandaklanjuti	%	0	0%	100%	0%	0%
	Rata – Rata Capaian						**85%**

❖ **Perbandingan realisasi dengan Tahun Sebelumnya**

Capaian kinerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan ada 5 (Lima) indikator adalah 100% dengan rincian sebagai berikut :

1) Persentase penyebarluasan informasi/pemberitaan pembangunan pemerintahan daerah pada Tahun 2023 tidak mengalami perubahan yaitu tercapai 100%
2) Persentase kegiatan dokumentasi KDH/WKDH/SKPD yang terlayani pada Tahun 2023 tidak mengalami perubahan yaitu tercapai 100%

3) Persentase kegiatan KDH/WKDH/SKPD/tamu daerah yang terlayani keprotokolannya pada Tahun 2023 tidak mengalami perubahan yaitu tercapai 100%
4) Persentase komunikasi pimpinan yang terfasilitasi pada tahun 2023 yang dipublikasikan melalui media cetak sudah dimutasikan ke Dinas Komunikasi dan Informatika.
5) Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti pada Tahun 2023 tidak mengalami perubahan yaitu 0%

❖ **Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Eselon III Selama 5 (Lima) Tahun (2018-2023)**

NO	IKU ESELON III		2019			2020			2021			2022			2023			PENANGGUNG JAWAB/BAGIAN
	SASARAN	INDIKATOR	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	
	Meningkatnya layanan informasi penyelenggaraan pembangunan daerah, kehumasan dan keprotokolan	Persentase penyebarluasan informasi/pemberitaan pembangunan pemerintahan daerah yang bisa diakses masyarakat melalui media	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Bagian Humas dan Keprotokolan**
		Persentase kegiatan kehumasan KDH/WKDH/SKPD/ Masyarakat yang terlayani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Bagian Humas dan Keprotokolan**
		Persentase kegiatan KDH/WKDH/SKPD/ tamu daerah yang terlayani keprokolannya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Bagian Humas dan Keprotokolan**
		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Bagian Humas dan Keprotokolan**
	Meningkatnya layanan informasi penyelenggaraan pembangunan daerah dan komunikasi pimpinan, keprotokolan dan dokumentasi.	Persentase penyebarluasan informasi/pemberitaan pembangunan pemerintahan daerah yang bisa diakses masyarakat melalui media	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	**Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan**

		Persentase kegiatan dokumentasi KDH/WKDH yang terlayani	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	**Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan**
		Persentase kegiatan KDH/WKDH/SKPD/ tamu Daerah yang terlayani keprotokolannya	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	**Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan**
		Persentase komunikasi pimpinan yang terfasilitasi	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	**Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan**
		Persentase pengaduan masyarakat yang ditandaklanjuti	-	-	-	-	-	-	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	**Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan**

❖ **Analisa program penunjang**

SASARAN 1 Meningkatnya Layanan Informasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah dan Komunikasi Pimpinan, Keprotokolan dan Dokumentasi.

Indikator 1 : Persentase Penyebarluasan Informasi/Pemberitaan Pembangunan Pemerintahan Daerah yang Bisa Diakses Masyarakat Melalui Media

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya layanan informasi penyelenggaraan pembangunan daerah dan komunikasi pimpinan, keprotokolan dan dokumentasi.	Persentase penyebarluasan informasi/pemberitaan pembangunan pemerintahan daerah yang bisa diakses masyarakat melalui media	100%	100%	100%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Mengampu Misi ke- 3 *"Membangun tata kelola pemerintahan yang baik* ***(Good Governance)"***

Indikator ini dilaksanakan dengan menilai presentase dari jumlah kegiatan pemerintah secara keseluruhan dibandingkan dengan jumlah kegiatan yang terpublikasikan melalui media elektronik, media online maupun media sosial dengan target sebesar 100% dan terealisasi 100%. Indikator ini dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan dengan pagu Rp 376.842.278,00 terealisasi Rp 349.788.200,00 dengan realisasi keuangan sebesar 93 %.

Kendala yang dihadapi adalah :

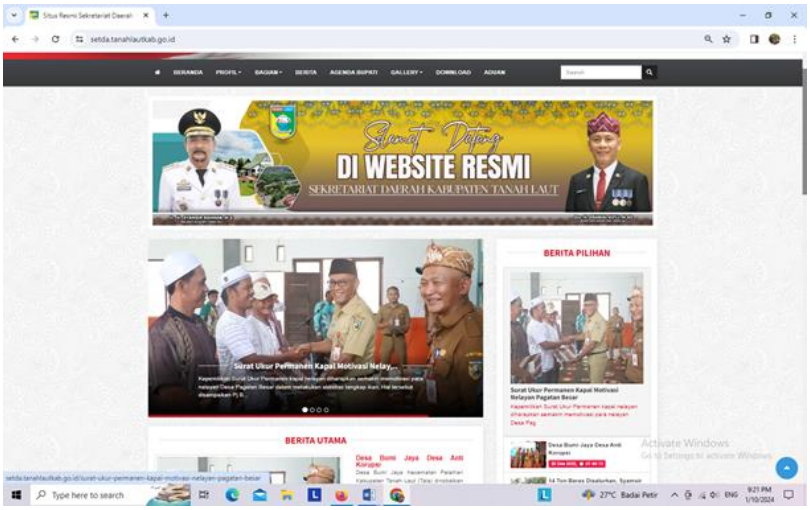
- Penyebarluasan informasi / pemberitaan melalui web dan media sosial, masih kurangnya ketepatan waktu dalam menyebarkan informasi yang harus dipublikasikan.

Solusi yang dilakukan adalah :

- Meningkatkan kualitas SDM agar lebih disiplin dalam mengelola infomasi yang dipublikasikan melalui web dan media sosial.

Rencana Aksi yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Meningkatkan kualitas SDM melalui evaluasi kinerja agar lebih disiplin dalam mempublikasikan kegiatan pemerintah daerah melalui web dan media sosial yang dikelola pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.







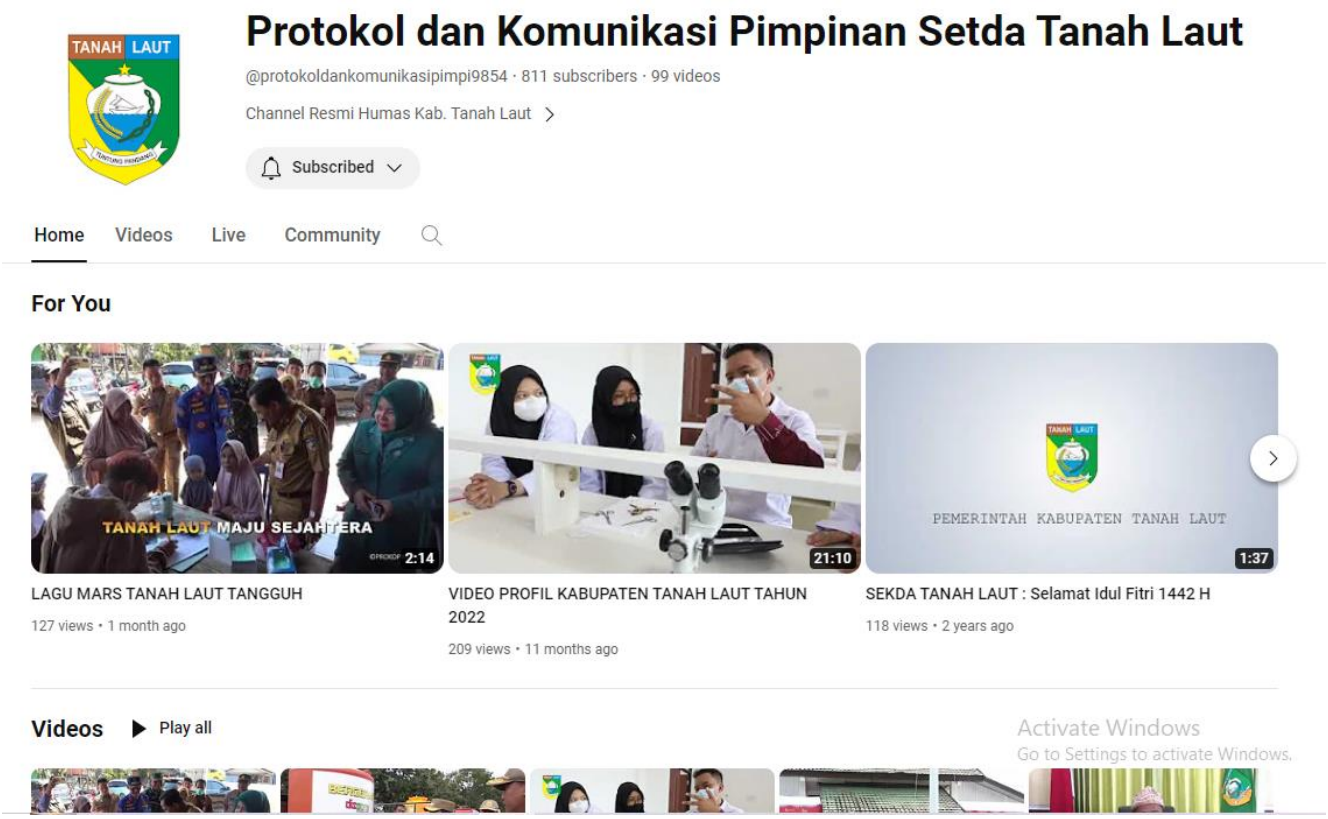


Foto : Media Publikasi Kegiatan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Indikator 2 : Persentase kegiatan dokumentasi KDH/WKDH yang terlayani

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya layanan informasi penyelenggaraan pembangunan daerah dan komunikasi pimpinan, keprotokolan dan dokumentasi.	Persentase kegiatan dokumentasi KDH/WKDH yang terlayani	100%	100%	100%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Mengampu Misi ke- 3 *"Membangun tata kelola pemerintahan yang baik* ***(Good Governance)****"*

Indikator ini dilaksanakan dengan menilai presentase dari jumlah kegiatan pemerintah secara keseluruhan dibandingkan dengan jumlah kegiatan yang terdokumentasikan dengan target sebesar 100% dan terealisasi 100%. Indikator ini dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan dengan pagu Rp 465.528.744,00 terealisasi sebesar Rp 422.330.100,00 atau sebesar 91,00 %.

Kendala yang dihadapi adalah :

- Kualitas sarana penyimpanan Dokumentasi kegiatan KDH / WKDH yang masih kurang memadai.

  Kurangnya koordinasi dengan instansi/pelaksana kegiatan sehingga masih terdapat kegiatan yang tumpang tindih dan tidak terdokumentasi dengan baik.

Solusi yang dilakukan adalah :

- Meningkatkan Sumber Daya Manusia Pendokumentasian Pimpinan dan Kualitas sarana penyimpanan dokumentasi kegiatan KDH / WKDH pada Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan agar lebih memadai.

Rencana Aksi yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Meningkatkan kualitas pendokumentasian dan sarana penyimpanan dokumentasi kegiatan pimpinan.
- Meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan seluruh instansi dalam pelaksanaan kegiatan KDH/WKDH agar tidak terjadi tumpang tindih jadwal kegiatan sehingga seluruh kegiatan dapat terfasilitasi dan terdokumentasikan.



Foto : Beberapa dokumentasi kegiatan KDH/WKDH

Indikator 3 : Persentase kegiatan KDH/WKDH/SKPD/ tamu daerah yang terlayani keprokolannya

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya layanan informasi penyelenggaraan pembangunan daerah dan komunikasi pimpinan, keprotokolan dan dokumentasi.	Persentase kegiatan KDH/WKDH/SKPD/ tamu Daerah yang terlayani keprotokolannya	100%	100%	100%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Mengampu Misi ke- 3 "*Membangun tata kelola pemerintahan yang baik* (***Good Governance***)"

Indikator ini dilaksanakan dengan menilai presentase dari jumlah tamu daerah secara keseluruhan dibandingkan dengan jumlah tamu daerah yang terlayani keprotokolannya dengan target sebesar 100% dan terealisasi 100%. Indikator ini dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan dengan pagu Rp 487.150.560,00 terealisasi sebesar Rp 445.113.123,00 atau sebesar 91,3 %.

Kendala yang dihadapi adalah :

- Kurangnya koordinasi antara pelaksana kegiatan dengan Sub Bagian Fasilitasi Keprotokolan.

Solusi yang dilakukan adalah :

- Menginformasikan kepada pelaksana kegiatan agar terlebih dulu melakukan koordinasi dengan Sub Bagian fasilitasi Keprotokolan.

Rencana Aksi yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Meningkatkan kualitas pelayanan keprotokolan kegiatan pimpinan.
- Meningkatkan kerja sama dengan seluruh instansi dalam pelaksanaan kegiatan KDH/WKDH agar tidak terjadi tumpang tindih jadwal kegiatan sehingga seluruh kegiatan dapat terlayani keprotokolannya dengan baik.



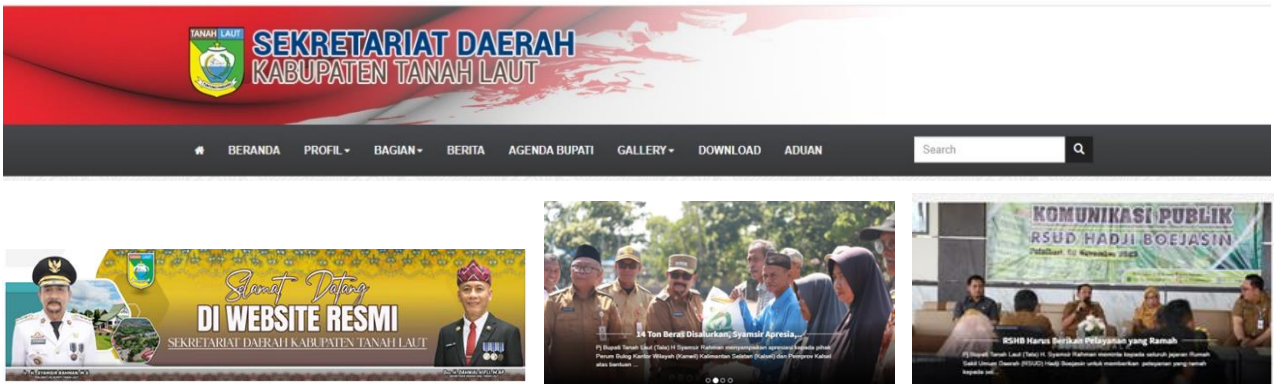


Foto :. Beberapa kegiatan KDH/WKDH yang terfasilitasi Keprotokolannya.

Indikator 4 : Presentase komunikasi pimpinan yang terfasilitasi

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya layanan informasi penyelenggaraan pembangunan daerah dan komunikasi pimpinan, keprotokolan dan dokumentasi.	Persentase komunikasi pimpinan yang terfasilitasi	0%	0%	0%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Mengampu Misi ke- 3 *"Membangun tata kelola pemerintahan yang baik* ***(Good Governance)"***

Indikator ini sejak Tahun 2022 tidak dilaksanakan karena seluruh kegiatan pimpinan yang dipublikasikan melalui media cetak sudah dimutasikan ke Dinas Komunikasi dan Informatika, sehingga Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan melalui Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan tidak menganggarkan lagi.



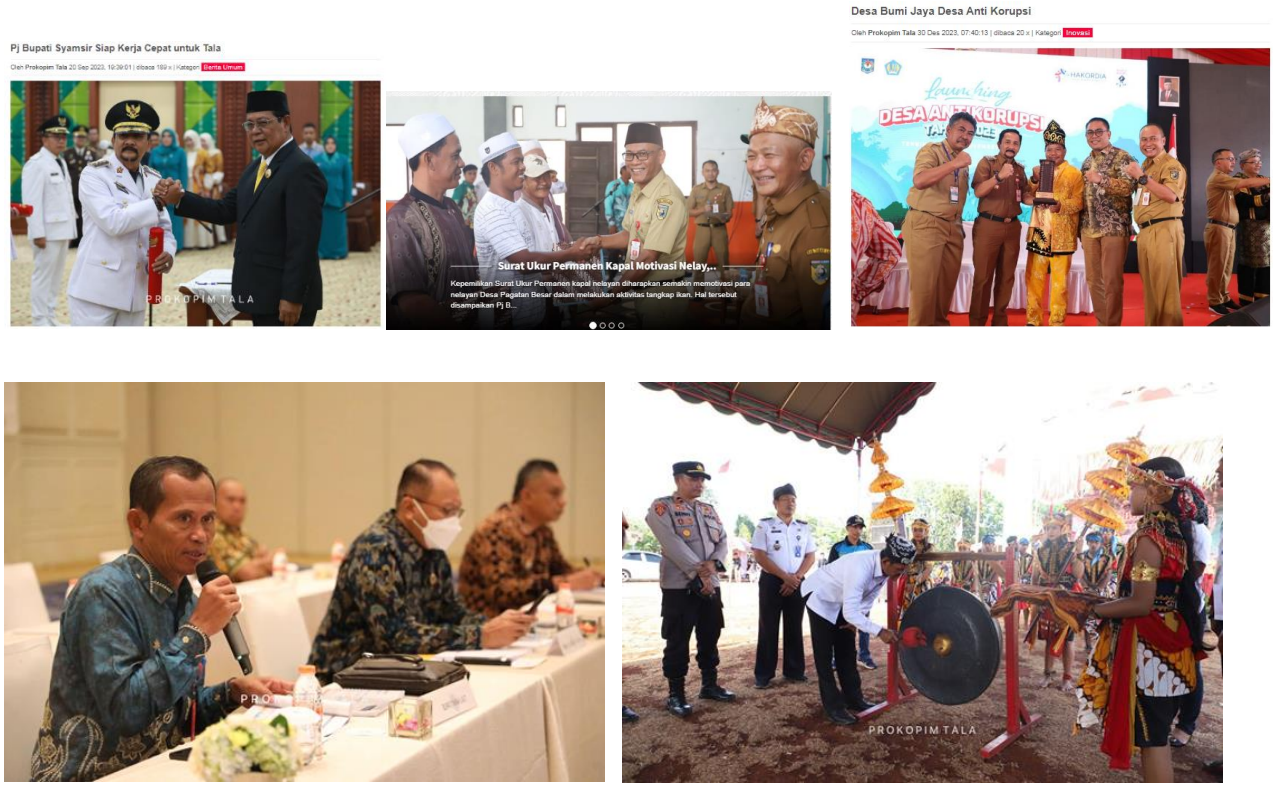


Foto : 1. salah satu media publikasi kegiatan pemerintah daerah kabupaten Tanah Laut melalui website setda.tanahlautkab.go.id

2. Beberapa dokumentasi kegiatan KDH/WKDH

Indikator 5 : Persentase pengaduan masyarakat yang ditandaklanjuti

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya layanan informasi penyelenggaraan pembangunan daerah dan komunikasi pimpinan, keprotokolan dan dokumentasi.	Persentase pengaduan masyarakat yang ditandaklanjuti	100%	0%	0%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Mengampu Misi ke- 3 "*Membangun tata kelola pemerintahan yang baik* (***Good Governance***)"

Pada tahun ini tidak ada pengaduan maupun yang ditindaklnjuti dengan target sebesar 100%. Indikator ini dilaksanakan melalui aplikasi yang terintegrasi dengan seluruh SKPD di lingkup pemerintah kabupaten Tanah Laut melalui aplikasi E-Lapor, WBS, kotak surat, dan layanan aduan di website sekretariat daerah.

Kendala yang dihadapi adalah :

- Kurangnya pemahaman masyarakat terkait prosedur penyampaian aduan.

Solusi yang dilakukan adalah :

- Melakukan Sosialisasi kepada masyarakat agar penyampaian aduan sesuai dengan prosedur.

Rencana Aksi yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait dalam rangka tindak lanjut jika ditemukan laporan yang masuk.

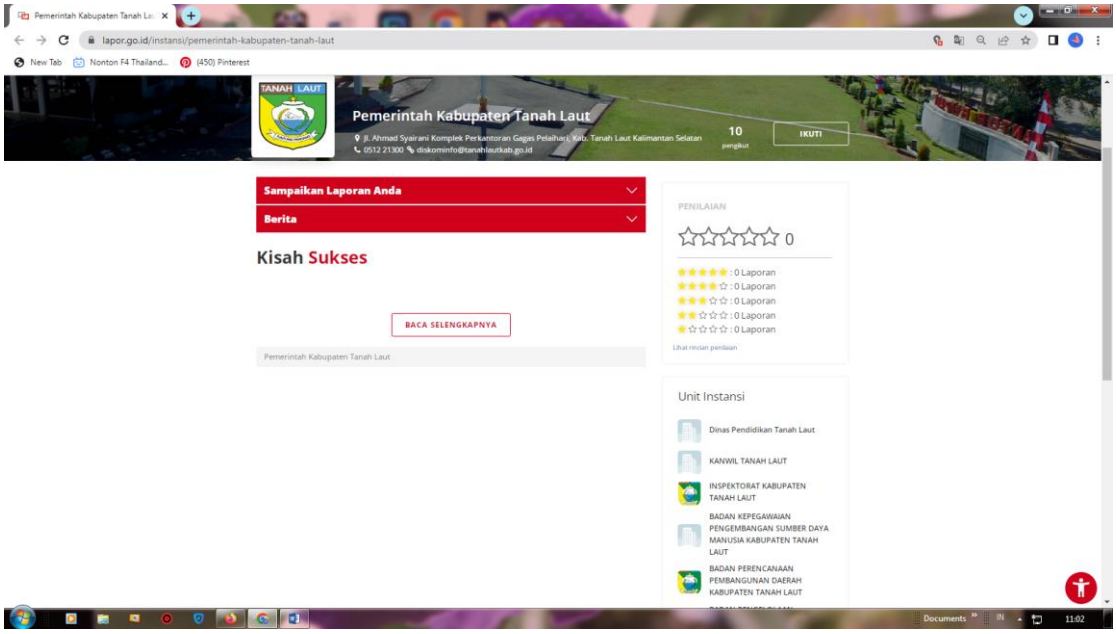


Foto : Tampilan Website E-LAPOR kabupaten TANAH LAUT

❖ Analisa Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia

1) Untuk mencapai sasaran Meningkatnya kualitas pelaksanaan layanan informasi penyelenggaraan pembangunan daerah, protokol dan komunikasi pimpinan dengan indikator Persentase penyebarluasan informasi/pemberitaan pembangunan pemerintahan daerah yang bisa diakses masyarakat melalui media sosial dan website serta ditunjang Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan dengan pagu Rp. 376.842.278,00 terealisasi Rp. 349.788.200,00 dengan realisasi keuangan sebesar **92.82%** sedangkan capaian kinerjanya **100%**. Dalam artian IKU ini telah berhasil dilaksanakan dengan efektif dan efisien dikarenakan capaian kinerjanya lebih besar daripada realisasi anggaran serta dilaksanakan oleh 8 (delapan) orang Sumber Daya Manusia yaitu Kepala Bagian

Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Sub Koordinasi Komunikasi Pimpinan, Pranata Komputer Lanjutan, dan 5 (lima) orang Pegawai Tidak Tetap (PTT).

CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI
100%	92,82%	7,18%

2) Untuk mencapai sasaran Meningkatnya kualitas pelaksanaan layanan informasi penyelenggaraan pembangunan daerah, protokol dan komunikasi pimpinan dengan indikator Persentase kegiatan dokumentasi KDH/WKDH/SKPD yang terlayani ditunjang dengan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan dengan pagu Rp 465.528.744,00 terealisasi sebesar Rp 422.330.100,00 atau sebesar **90.72 %** sedangkan capaian kinerjanya **100%**. Dalam artian IKU ini telah berhasil dilaksanakan dengan efektif dan efisien dikarenakan capaian kinerjanya lebih besar daripada realisasi anggaran serta dilaksanakan oleh 9 (sembilan) orang Sumber Daya Manusia, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Sub Koordinasi Dokumentasi Pimpinan, satu orang pelaksana, dan 6 (enam) orang Pegawai Tidak Tetap (PTT).

CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI
100%	90,72%	9,28%

3) Untuk mencapai sasaran Meningkatnya kualitas pelaksanaan layanan informasi penyelenggaraan pembangunan daerah, protokol dan komunikasi pimpinan dengan indikator presentasi kegiatan KDH/WKDH/SKPD/Tamu Daerah yang terlayani keprotokolannya ditunjang dengan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan dengan pagu Rp 487.150.560,00 terealisasi sebesar Rp 445.113.123,00 atau sebesar **91.37%,** sedangkan capaian kinerjanya **100%**. Dalam artian IKU ini telah berhasil dilaksanakan dengan efektif dan efisien dikarenakan

capaian kinerjanya lebih besar daripada realisasi anggaran serta dilaksanakan oleh 11 (sebelas) orang Sumber Daya Manusia yaitu Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Kasubbag Protokol, 6 (enam) orang Petugas Protokol, dan 4 (empat) orang Pegawai Tidak Tetap (PTT).

CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI
100%	91,37%	8,63%

4) Untuk mencapai sasaran Meningkatnya kualitas pelaksanaan layanan informasi penyelenggaraan pembangunan daerah, protokol dan komunikasi pimpinan dengan indikator Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti melalui aplikasi yang terintegrasi dengan seluruh SKPD di lingkup pemerintah kabupaten Tanah Laut melalui aplikasi E-Lapor dengan program kegiatan Lapor KTA dilaksanakan oleh 3 (tiga) orang SDM yaitu Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Sub Koordinasi Komunikasi Pimpinan dan operator, sepanjang tahun 2023 nol persen, karena tidak adanya aduan, hanya saja kegiatan ini masuk dalam indikator kinerja utama.

CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI
-	92,82%	-

5) Pencapaian Realisasi Anggaran Tahun 2023 pada Bagian Protokol dan komunikasi Pimpinan dengan Jumlah pagu Rp 1.329.521.582,00 terealisasi Rp 1.217.231.423,00 atau sebesar 91.55% dikarenakan :
   - Adanya peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 yang mengatur tentang perjalanan dinas , dimana didalamnya mengatur besaran uang transport lokal perjalanan dinas dalam kota kurang dari 8 (delapan) jam.

Tabel Indikator Kinerja dan Realisasi Program Penunjang

dan Sumber Daya Manusia

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2023 (Rp)	%	SDM	Ket
1	Persentase penyebarluasan informasi/ pemberitaan pembangunan pemerintahan daerah yang bisa diakses masyarakat melalui media	Program Penunjang Urusan Pemda Kabupaten/Kota	**Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**					
			- Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	376.842.278	349.788.200	92.82%	7	
2	Presentase komunikasi pimpinan yang terfasilitasi							
3	Persentase pengaduan masyarakat yang ditandaklanjuti							
4	Persentase kegiatan dokumentasi KDH/WKDH yang terlayani		- Sub Kegiatan Fasilitasi Pendokumentasian Tugas Pimpinan	465.528.744	422.330.100	90.72%	8	
5	Persentase kegiatan KDH/WKDH/SKPD/ tamu Daerah yang terlayani keprotokolannya		- Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	487.150.560	445.113.123	91.37%	11	
JUMLAH					**1.217.231.423**	**91.55%**		

❖ **Analisa Capaian Kinerja Kepala Sub Bagian Protokol**

Untuk capaian indikator sasaran pada Kasubbag Protokol dilaksanakan melalui program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, fasilitasi Keprotokolan dengan pagu Rp 487.150.560,00 terealisasi Rp 445.113.123,00 dengan realisasi keuangan sebesar 91.37%, dan dilaksanakan oleh 12 (dua belas) orang SDM yaitu Kepala Bagian Protokol dan komunikasi Pimpinan, Kasubbag Protokol, 6 (enam) Orang Petugas Protokol dan 4 (Empat) orang Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Tabel Indikator Kinerja dan Realisasi Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia
Kepala Sub Bagian Protokol

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2023 (Rp)	%	SDM	Ket
1	Jumlah Kegiatan KDH/WKDH yang terlayani Keprotokolannya	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				11	
2	Jumlah tamu KDH/WKDH yang terlayani dengan baik		- Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	487.150.560	445.113.123	91.37%	11	

Capaian Sasaran dan Indikator Kepala Sub Bagian Protokol dapat dilihat pada analisa sebagai berikut :

Tabel Capaian Kinerja Kepala Sub Bagian Protokol

	SASARAN STRATEGIS / KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
1	Kegiatan keprotokolan KDH/WKDH yang terlayani	Jumlah kegiatan KDH/WKDH yang terlayani keprotokolannya	360 Kali	360 Kali	100%	Kasubbag Protokol
2	Pelayanan tamu KDH/WKDH yang terlayani	Jumlah tamu KDH/WKDH yang terlayani dengan baik	24 Kali	16 Kali	66%	Kasubbag Protokol

SASARAN 1 Kegiatan Keprotokolan KDH/WKDH yang Terlayani

Indikator : Jumlah Kegiatan KDH/WKDH yang Terlayani Keprotokolannya

NO	SASARAN STRATEGIS / KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
1	Pelayanan tamu KDH/WKDH yang terlayani	Jumlah kegiatan KDH/WKDH yang terlayani keprotokolannya	360 Kali	360 Kali	100%	Kasubbag Protokol

Pada Tahun 2023 pelayanan keprotokolan kegiatan KDH/WKDH/SKPD terlaksana sesuai dengan target dan tercapai 100%.

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah:

- Peningkatan Koordinasi dengan Penyelenggara Acara dan ADC/Ajudan Pimpinan dan mengingatkan kembali kepada pelaksana acara agar menyampaikan surat permohonan fasilitasi kegiatan ke Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
- Menyediakan armada/alat transportasi yang lebih memadai untuk pelaksanaan fasilitasi keprotokolan KDH/WKDH di lapangan.





Foto : Beberapai kegiatan KDH/WKDH yang terfasilitasi Keprotokolannya.

SASARAN 2 Pelayanan Tamu KDH/WKDH Yang Terlayani

Indikator : Jumlah tamu KDH/WKDH yang Terlayani dengan Baik

NO	SASARAN STRATEGIS / KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Pelayanan tamu KDH/WKDH yang terlayani	Jumlah tamu KDH/WKDH yang terlayani dengan baik	24 Kali	16 Kali	66%	Kasubbag Protokol

Pada Tahun 2023 seluruh tamu KDH/WKDH terlayani dengan baik sesuai dengan prosedur pelayanan.

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah:

- Mengadakan bimbingan teknis fasilitasi keprotokolan dan komunikasi pimpinan kepada SKPD dan organisasi.





Foto : Beberapa pelayanan Tamu KDH/WKDH yang terfasilitasi Keprotokolannya.

Analisa Capaian Sasaran Strategis

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat

NO	SASARAN STRATEGIS /KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya Pembinaan Lembaga sosial dan keagamaan	Persentase peningkatan Lembaga sosial dan keagamaan yang dibina	100%	96.09%	98.04%	Bagian Kesejahteraan Rakyat **Mengampu Misi ke-3** *"Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang baik* ***(Good Governance)"***
2	Meningkatnya layanan bantuan sosial keagamaan	Persentase layanan bantuan sosial keagamaan	100%	98.09%	98.09%	
3	Meningkatnya Peran serta Organisasi/ Lembaga Keagamaan /SKPD dalam Bidang Pemuda dan Olahraga	Persentase hasil tindak lanjut koordinasi kegiatan bidang keagamaan, pemuda dan olahraga	100%	83.01%	83.01%	

❖ **Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja**

Capaian kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan rincian sebagai berikut :

1) Persentase Peningkatan lembaga sosial dan keagamaan yang di bina pada Sub Kegiatan Fasilitasi Bina Mental Spiritual Bagian Kesejahteraan Rakyat berupa fasilitasi pemberian bantuan hibah kepada lembaga/organisasi sosial keagamaan pada prinsipnya berjalan baik dan lancar dengan realisasi capaian 98,04% dan realisasi keuangan dari pagu anggaran sebesar Rp. 9.285.373.530,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.921.864.464,- atau 96,09%, tetapi memang masih ada beberapa kendala yang dihadapi yaitu antara lain masih kurangnya pemahaman pengurus lembaga/organisasi penerima hibah dalam hal administrasi dari perencanaan sampai dengan pelaporan penggunaan dana hibah, dengan rincian sebagai berikut :

a. Fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual secara fisik dapat terealisasi 100%, yaitu terlaksananya :
   - Sosialisasi Pencairan dan Pelaporan Dana Hibah Daerah TA. 2023.
   - Kegiatan UKS dengan berkoordinasi dengan instansi terkait.
   - Kunjungan kerja study tiru ke Pemerintah Kabupaten Kota Baru

   dengan realisasi keuangan dari pagu anggaran sebesar Rp. 9.285.373.530,- terealisasi Rp. 8.921.864.464,- atau 96,09%

b. Proposal hibah lembaga / organisasi keagamaan yang disetujui oleh Pemerintah Daerah pada TA. 2023 sebanyak 113 Proposal serta realisasi proposal sebanyak 108 buah dan 5 buah proposal tidak mencairkan, namun secara keuangan dari Pagu Rp 9.285.373.530,- terealisasi Rp. 8.921.864.464 atau 96,09% karena ada proposal yang tidak direalisasikan dana hibah sebesar Rp. 363.509.066,-

2) Persentase layanan bantuan sosial keagamaan pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial Bagian Kesejahteraan Rayat, pada dasarnya dapat terlaksana sesuai yang direncanakan dengan realisasi 98.09% dan realisasi keuangan dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 21.392.598.317,- terealisasi sebesar Rp. 20.972.958.226,- atau 98,04%, yang terdiri dari terlaksananya 4 (empat) kegiatan dan terbayarnya insentif kepada Tenaga pengajar pada TKA/TPA, Madin/MIS, Pondok Pesantren dan Penyuluh Agama, dengan rincian sebagai berikut :

- 4 (empat) Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
  - Kegiatan Study Tiru DPC FKDT Ke Indramayu Propinsi Jawa Barat.
  - Kegiatan Wisuda Santri TPA/TKA se Kab. Tanah Laut.
  - Kegiatan Seleksi Bagi Penyuluh Agama Islam Se Kabupaten Tanah Laut.
  - Kegiatan Melaksanakan Pembinaan Kepada tenaga pengajar di TKA/TPA, Madin/MIS, Ponpes dan Penyuluh Agama
- Jumlah Tenaga pengajar pada TKA/TPA, Madin/MIS, Pondok Pesantren dan Penyuluh Agama yang mendapatkan insentif dari Pemerintah Daerah melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat berjumlah 3.310 orang dengan besaran Rp. 21.392.598.317,-, yang terdiri dari guru-guru pada lembaga pendidikan keagamaan TKA/TPA berjumlah 1.908 orang, Madin/MIS berjumlah 466 orang, Pondok Pesantren berjumlah 696 orang dan Tenaga Penyuluh Agama berjumlah 240 orang.

  Dari total keseluruhan tenaga pengajar yang berjumlah 3.310 orang, ada insentif yang dikembalikan ke Kas Daerah sebanyak 45 orang disebabkan berhenti, meninggal dunia dan lulus sebagai Tenaga P3K Pemerintah Daerah Kab. Tanah Laut.

NO	KECAMATAN	JUMLAH GURU TPA	JUMLAH GURU MADIN	JUMLAH GURU P0NPES	JUMLAH PENYULUH ISLAM	JUMLAH PENYULUH HINDU	JUMLAH PENYULUH KRISTEN
1	Pelaihari	436	36	227	48	4	7
2	Bajuin	122	-	10	16	-	3
3	Panyipatan	111	65	34	20	-	3
4	Takisung	160	41	13	17	-	-
5	Batu Ampar	216	7	27	19	4	5
6	Jorong	151	59	73	12	-	-
7	Kintap	210	60	72	20	4	-
8	Tambang Ulang	118	24	27	14	-	-
9	Kurau	102	19	12	12	-	-
10	Bumi Makmur	114	57	-	10	-	-
11	Bati Bati	168	98	201	22	-	-
JUMLAH		**1908**	**466**	**696**	**210**	**12**	**18**

3) Persentase hasil lanjutan koordinasi kegiatan bidang keagamaan, pemuda dan olahraga pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat Bagian Kesejahteraan Rakyat pada dasarnya dapat terlaksana dengan realisasi fisik 83,01% dan realisasi keuangan dari pagu anggaran sebesar Rp. 4.123.329.348,- dapat terealisasi Rp. 3.422.672.460,- atau 83,01%, dengan rincian sebagi berikut :

a. Terlaksananya 11 Kegiatan Keagamaan dari 11 Kegiatan yang direncanakan yaitu :

- Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1443 H.
- Safari Ramadhan Bupati dan Wabub Tanah Laut.
- Shalat idul Fitri dan Idul Adha berjamaah bersama Bupati dan Wakil Bupati serta Halal Bihalal.
- Tausiyah lingkup Sekretariat Daerah Kab. Tanah Laut.
- Penyelenggaraan Ibadah Haji Kab. Tanah Laut Tahun 2023.
- Pemberian Bantuan Beasiswa bagi Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa Bidang Agama.
- Musabaqah Qira'atil Kutub Tk. Kab. Tanah Laut.
- Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 H.
- Shalat Hajat peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia.
- Shalat Hajat Hari Jadi Kab. Tanah Laut Tahun 2023.
- Gema Al Qur'an Tanah Laut Tahun 2023.

b. Fasilitasi kegiatan Lembaga/Organisasi Keagamaan, terdiri dari :
   a. Fasilitasi kegiatan LPTQ Kabupaten Tanah Laut berupa Pelantikan dan Orientasi Dewan Hakim MTQ Tk. Kab. Tanah Laut dan Fasilitasi pada MTQ Tk. Nasional dimana Kalimantan Selatan sebagai tuan rumah.
   b. Fasilitasi kegiatan FKDT Kabupaten Tanah Laut pada MQK TK. Kabupaten
   c. Fasilitasi kegiatan FKPP Kabupaten Tanah Laut berupa Peringatan Hari Santri Nasional di Kabupaten Tanah Laut.
   d. Fasilitasi kegiatan BHR Kabupaten Tanah Laut berupa kegiatan Ru'yatul Hilal 1 Syawal 1443 H dan Pengukuran arah Kiblat tempat Ibadah (Masjid/Langgar/Mushala) di Kab. Tanah Laut.

Berikut disajikan Perbandingan Capaian Sasaran Indikator Kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat terhadap capaian tahun sebelumnya :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Tahun 2023		
			2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase peningkatan Lembaga sosial dan keagamaan yang dibina	%	96,43%	76.67%	100%	96,09%	98.04%
2	Persentase layanan bantuan sosial keagamaan	%	98,81%	93.63%	100%	98.04%	98.09%
3	Persentase hasil tindak lanjut koordinasi kegiatan bidang keagamaan, pemuda dan olahraga	%	72,23%	89.65%	100%	83,01%	83.01%
	Rata – Rata Capaian						**93.04%**

❖ **Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya :**

Rata-rata capaian kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah **93.04%,** dengan rincian sebagai berikut:

1) Persentase realisasi peningkatan pelayanan lembaga sosial dan keagamaan berupa pelaksanaan kegiatan dan pemberian bantuan hibah kepada lembaga/organisasi keagamaan di Kab. Tanah Laut Tahun 2022 sebesar 76.67%.dan Tahun 2023 sebesar 98.04%, maka terjadi kenaikan sebesar 21.37%.
2) Persentase realiasi layanan kesejahteraan sosial bagi lembaga pendidikan keagamaan yakni berupa pelaksanaan kegiatan dan pemberian insentif Tenaga pengajar pada TKA/TPA, Madin/MIS, Pondok Pesantren dan Penyuluh Agama di

Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 sebesar 93,63% dan Tahun 2023 sebesar 98,09% mengalami kenaikan sebesar 4,46%.

3) Persentase hasil tindak lanjut koordinasi kegiatan bidang keagamaan, pemuda dan olahraga yang dilaksanakan pada Tahun 2022 sebesar 89,65% dan Tahun 2023 sebesar 83,01%, yang mana mengalami penurunan sebesar 6,64%

❖ **Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Eselon III Selama 5 (Lima) Tahun (2018-2023)**

No	Indikator Kinerja	Satuan	% Capaian				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase peningkatan Lembaga sosial dan keagamaan yang dibina	%	100%	86%	84,93%	96,36%	76.67%
2	Persentase layanan bantuan sosial keagamaan	%	100%	99,51%	100%	99,22%	93.63%
3	Persentase hasil tindak lanjut koordinasi kegiatan bidang keagamaan, pemuda dan olahraga	%	100%	61,74%	11,77%	100%	89.65%

1) Persentase capaian Indikator Kinerja Utama peningkatan pelayanan lembaga sosial dan keagamaan berupa pelaksanaan kegiatan dan pemberian bantuan hibah kepada lembaga/organisasi keagamaan di Kab. Tanah Laut dari Tahun 2018-2023 pada dasarnya dapat terlaksana dengan baik, namun tidak dapat terealisasi 100% pada Tahun 2019, Tahun 2020 dan Tahun 2021 disebabkan :
   - Terjadinya Pandemi Covid-19 sehingga penerima hibah tidak dapat melaksanakan kegiatan.
   - Pemohon hibah sudah melaksanakan kegiatan fisiknya sebelum ada pencairan dana.
   - Pelaksanaan kegiatan fisik dari penerima hibah tidak sesuai dengan RAB Permohonan awal sehingga dana untuk organisasi tersebut tidak bisa di cairkan.
   - Pengurus Lembaga tidak mengajukan berkas pencairan dana hibah disebabkan adanya perhantian pengurus Lembaga/organisasi.
2) Persentase capaian Indikator Kinerja Utama layanan kesejahteraan sosial bagi lembaga pendidikan keagamaan yakni berupa pelaksanaan kegiatan dan pemberian insentif Tenaga pengajar pada TKA/TPA, Madin/MIS, Pondok Pesantren dan Penyuluh Agama di Kabupaten Tanah Laut dari Tahun 2018-2023 pada dasarnya dapat terlaksana dengan baik, namun tidak dapat terealisasi 100% pada Tahun 2019 dan Tahun 2023, hal ini disebabkan adanya tenaga pengajar yang berhenti, meninggal dunia dan mengundurkan diri karena lulus menjadi tenaga P3K di Kab. Tanah Laut.

3) Persentase capaian Indikator Kinerja Utama hasil tindak lanjut koordinasi kegiatan bidang keagamaan, pemuda dan olahraga yang dilaksanakan pada tahun 2018-2023 pada dasarnya dapat terlaksana dengan baik, namun tidak dapat terealisasi 100% pada Tahun 2019 dan Tahun 2020, hal ini disebabkan Pandemi Covid-19 yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang banyak tidak dapat dilaksanakan.

❖ Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Eselon III Selama 5 (Lima) Tahun (2018-2023)

NO	IKU ESELON III		2019			2020			2021			2022			2023			PENANGGUNG JAWAB/BAGIAN
	SASARAN	INDIKATOR	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	
	Meningkatnya kualitas layanan untuk kesejahteraan rakyat	Persentase layanan keagamaan yang ditindaklanjuti	100%	86%	86%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Bagian Kesejahteraan Rakyat**
	Meningkatnya layanan bantuan sosial kegamaan	Persentase layanan batuan sosial keagamaan	100%	99,51 %	99,51 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Bagian Kesejahteraan Rakyat**
	Meningkatnya kerukunan umat beragama	Persentase peningkatan pelayanan lembaga keagamaan	-	-	-	100%	84,93%	84,93 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Bagian Kesejahteraan Rakyat**
	Meningkatnya peran Organisasi/lembaga pendidikan keagamaan dan kesejahteraan sosial	Persentase layanan kesejahteraan sosial bagi lembaga pendidikan keagamaan	-	-	-	100%	99,83%	99,94 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Bagian Kesejahteraan Rakyat**
	Meningkatnya peran Organisasi/Lembaga Keagamaan/SKPD Bidang Pemuda dan Olahraga	Persentase hasil tindak lanjut koordinasi kegiatan bidang keagamaan, pemuda dan olahraga	-	-	-	100%	11,77%	11,77 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Bagian Kesejahteraan Rakyat**
	Meningkatnya Pembinaan Lembaga sosial dan keagamaan	Persentase peningkatan Lembaga sosial dan	-	-	-	-	-	-	100%	96,43 %	96,36 %	100%	76.67 %	76.67 %	100%	98.04 %	98.04%	**Bagian Kesejahteraan Rakyat**

		keagamaan yang dibina															
	Meningkatnya layanan bantuan sosial keagamaan	Persentase layanan bantuan sosial keagamaan	-	-	-	-	-	-	100%	98,81 %	99,22 %	100%	93.63 %	93.63 %	100%	98.09 %	98.09%	**Bagian Kesejahteraan Rakyat**
	Meningkatnya Peran serta Organisasi/ Lembaga Keagamaan /SKPD dalam Bidang Pemuda dan Olahraga	Persentase hasil tindak lanjut koordinasi kegiatan bidang keagamaan, pemuda dan olahraga	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	89.65 %	89.65 %	100%	83.01 %	83.01%	**Bagian Kesejahteraan Rakyat**

❖ **Analisa Peningkatan dan Penurunan Kinerja**

SASARAN 1 Meningkatnya Pembinaan Lembaga Sosial dan Keagamaan

Indikator : Persentase Peningkatan Lembaga Sosial dan Keagamaan yang Dibina

NO	SASARAN STRATEGIS /KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya Pembinaan Lembaga sosial dan keagamaan	Persentase peningkatan Lembaga sosial dan keagamaan yang dibina	100%	96.09%	98.04%	Bagian Kesejahteraan Rakyat **Mengampu Misi ke-3** *"Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang baik* *(Good Governance)"*

Layanan Bagian Kesejahteraan Rakyat semakin banyak tahun demi tahun, ini dilihat dari banyak organisasi/kelembagaan sosial dan keagamaan yang memohon bantuan baik itu berupa fisik maupun kegiatan keagamaan. Jumlah proposal yang disetujui pada Tahun 2023 sebanyak 113 proposal dan 108 buah proposal yang ditindak lanjuti dan yang tidak menindaklajuti sebanyak 5 proposal oleh pemohon serta pagu anggaran dengan realisasi keuangan dari pagu anggaran sebesar Rp. 9.285.373.530,- dan terealisasi Rp. 8.921.864.464,- atau 96,09%

NO	URAIAN	JUMLAH PROPOSAL YANG MASUK	JUMLAH PROPOSAL YANG DITINDAK LANJUTI	JUMLAH PROPOSAL YANG TIDAK DITINDAK LANJUTI	CAPAIAN 2023
1	Jumlah Proposal Hibah	158 Proposal	113 Proposal	45 Proposal	**71,51 %**

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain:

- Bagi pengurus organisasi/kelembagaan keagamaan yang memohon bantuan hibah kebanyakan tidak atau belum memahami tata cara dan kelengkapan administrasi Proposal yang diajukan.
- Lambatnya dalam hal pencairan dana hibah dikarenakan pengurus lembaga/ organisasi cenderung lambat dalam pengajukan kelengkapan administrasi pencairan dana hibah kepada Tim verifikasi di Bagian Kesra.

- Permintaan RAB proposal pencairan berbeda dengan RAB proposal awal sehingga terjadi beberapa kali perbaikan yang memakan waktu bagi pengurus lembaga/organisasi tersebut.
- Kurangnya pemahaman dalam meng SPJ kan dana hibah.
- Adanya pengurus pemohon hibah yang berhenti atau meninggal dunia yang mengakibatkan pengurus yang baru tidak mau mencairkan dana hibah tersebut

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Melaksanakan sosialisasi kepada pemohon hibah secara langsung dan meminta kepada aparat Desa dan Kecamatan untuk menyampaikan syarat-syarat proposal mengajukan permohonan fisik maupun kegiatan kepada bagian kesejahteraan rakyat.
- Sebelum membuat permohonan proposal terlebih dahulu melakukan musyarawah pengurus dengan warga berkaitan dengan permintaan apa yang diinginkan.
- Meningkatkan koordinasi yang intensif kepada pejabat atau intansi terkait.

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Melaksanakan sosialisasi kepada penerima pencairan hibah secara langsung dan sosialisasi bagaimana membuat laporan keuangan bantuan hibah
- Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas realisasi kemajuan pelaksanaan hibah kepada pemohon proposal secara berkelanjutan serta pengawasan terus menerus.

Daftar Penerima Hibah
Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut
Tahun Anggaran 2023 Hibah Uang yang Direkomendasikan Oleh
Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah

NO.	NAMA	ALAMAT	JUMLAH BANTUAN
1. KECAMATAN PELAIHARI			
1	Badan Pengelola Masjid Besar Al Manar	Kel. Angsau Kec.Pelaihari	Rp 500.000.000
2	Badan Pengelola Masjid Agung Syuhada	Kel. Pelaihari Kec.Pelaihari	Rp 500.000.000
3	Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut	Kel.Pelaihari Kec.Pelaihari	Rp 500.000.000
4	Pengurus Majlis Ta'lim An-Nur	Kel. Angsau Kec.Pelaihari	Rp 300.000.000

5	Pengurus Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kabupaten Tanah Laut	Kel. Angsau Kec.Pelaihari	Rp	250.000.000

NO.	NAMA	ALAMAT	JUMLAH BANTUAN	
1. KECAMATAN PELAIHARI				
6	Badan Pengelola Masjid Al Ikhlas	Kel.Sarang Halang Kec.Pelaihari	Rp	200.000.000
7	Pengurus Pimpinan Cabang Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU) Kabupaten Tanah Laut	Kel.Sarang Halang Kec.Pelaihari	Rp	100.000.000
8	Pengurus Pimpinan Cabang FATAYAT Nahdlatul Ulama Kabupaten Tanah Laut	Kel. Pelaihari Kec.Pelaihari	Rp	100.000.000
9	Pengurus Mesjid Baiturrahim	Desa Kampung Baru Kec.Pelaihari	Rp	100.000.000
10	Pengurus Majelis Ta'lim Rizky Az Zikra	Kel.Karang Taruna Kec.Pelaihari	Rp	100.000.000
11	Pengurus Masjid Nurul Mu'min	Desa Sumber Mulia Kec.Pelaihari	Rp	75.000.000
12	Pengurus Majelis Ta'lim Aunul Muta'allimin	Kel.Pelaihari Kec.Pelaihari	Rp	75.000.000
13	Pengurus Group Habsyi Al - Qubro	Kel.Karang Taruna Kec.Pelaihari	Rp	60.000.000
14	Pengurus Masjid Hasnur Al-Muhtadin	Desa Pemuda Kec.Pelaihari	Rp	50.000.000
15	Badan Pengelola Masjid Assu'ada	Desa Tampang Kec. Pelaihari	Rp	50.000.000
16	Pengurus Langgar Norsilvia Firdaus	Kel. Sarang Halang Kec. Pelaihari	Rp	40.000.000
17	Pengurus Langgar Al-Hijrah	Desa Telaga Kec.Pelaihari	Rp	25.000.000
18	Pengurus Langgar Babul Jannah	Desa Telaga Kec.Pelaihari	Rp	25.000.000
19	Pengurus Majelis Ta'lim Miftahul Jannah	Desa Panggung Baru Kec.Pelaihari	Rp	20.000.000
20	Pengurus Langgar Miftahul Jannah	Kel. Angsau Kec.Pelaihari	Rp	20.000.000
21	Pengurus Perkumpulan Maulid Habsyi Al-Hikmah	Desa Panggung Baru Kec.Pelaihari	Rp	15.000.000
22	Pengurus Kelompok Maulid Habsyi Al Barokah	Desa Atu-AtuKec.Pelaihari	Rp	15.000.000

23	Pengurus Kelompok Maulid Habsyi Annur	Desa Kampung Baru Kec.Pelaihari	Rp	15.000.000
24	Pengurus Kelompok Habsyi An Najwa	Desa Telaga Kec.Pelaihari	Rp	15.000.000

NO.	NAMA	ALAMAT	JUMLAH BANTUAN	
1. KECAMATAN PELAIHARI				
25	Pengurus Musholla Athoriqus Sa'adah	Desa Sungai Riam Kec.Pelaihari	Rp	10.000.000
26	Pengurus Langgar Darul Muhajirin	Kel. Sarang Halang Kec. Pelaihari	Rp	35.000.000
JUMLAH PROPOSAL		**26**	**Rp**	**3.195.000.000**
2. KECAMATAN BATI-BATI				
1	Pengurus Masjid Raudhatul Jannah	Desa Kait Kait Kec.Bati-Bati	Rp	100.000.000
2	Pengurus Yayasan Nurul Huda Kait Kait Baru	Desa Kait Kait Baru Kec.Bati Bati	Rp	70.000.000
3	Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Darussalim Bati-Bati	Desa Bati-Bati Kec.Bati-Bati	Rp	50.000.000
4	Pengurus Masjid Al-Mujahidin	Desa Kait-Kait Baru Kec.Bati-Bati	Rp	35.000.000
5	Pengurus Masjid Darul Muflihin	Desa Bentok Kampung Kec.Bati-Bati	Rp	35.000.000
6	Pengurus Mesjid Husnul Khotimah	Desa Padang Kec.Bati-Bati	Rp	35.000.000
7	Pengurus Masjid Baiturrahman	Desa Ujung Kec.Bati-Bati	Rp	35.000.000
8	Pengurus Mushalla Al-Isra	Desa Nusa Indah Kec.Bati-Bati	Rp	25.000.000
9	Pengurus Grup Maulid An-Nisa	Desa Bentok Kampung Kec.Bati-Bati	Rp	15.000.000
JUMLAH PROPOSAL		**9**	**Rp**	**400.000.000**
3. KECAMATAN TAMBANG ULANG				
1	Pengurus Mesjid Taufiqqurrahman	Desa Pulau Sari Kec. Tambang Ulang	Rp	500.000.000
2	Pengurus Mesjid Nurul Iman	Desa Bingkulu Kec.Tambang Ulang	Rp	300.000.000
3	Pengurus Mesjid Thoba	Desa Sungai Pinang Kec.Tambang Ulang	Rp	100.000.000
4	Pengurus Langgar Al-Mujahidin	Desa Sungai Pinang Kec.Tambang Ulang	Rp	75.000.000

5	Pengurus Badan Komunikasi Pemuda Remaja Mesjid Indonesia (BKPRMI) Kec. Tambang Ulang	Kec.Tambang Ulang	Rp	50.000.000

NO.	NAMA	ALAMAT	JUMLAH BANTUAN	
3. KECAMATAN TAMBANG ULANG				
6	Pengurus Langgar Darul Huda	Desa Tambang Ulang Kec. Tambang Ulang	Rp	50.000.000
7	Pengurus Mesjid Al-Hijriyah	Desa Pulau Sari Kec. Tambang Ulang	Rp	35.000.000
8	Pengurus Musholla Darul Ilmi	Desa Martadah Baru Kec.Tambang Ulang	Rp	20.000.000
9	Pengurus Musholla Darussalam	Desa Martadah Baru Kec.Tambang Ulang	Rp	20.000.000
10	Pengurus Musholla Nurul Iman	Desa Martadah Baru Kec.Tambang Ulang	Rp	20.000.000
JUMLAH PROPOSAL		**10**	**Rp**	**1.170.000.000**
4. KECAMATAN KURAU				
1	Pengurus Masjid Sirajuddin	Desa Kali Besar Kec. Kurau	Rp	100.000.000
2	Pengurus Masjid Nurul Hidayah	Desa Handil Negara Kec. Kurau	Rp	70.000.000
3	Pengurus Musholla Darul Muttaqin	Desa Kali Besar Kec. Kurau	Rp	60.000.000
4	Pengurus Mesjid Syamsul Ma'arif	Desa Raden Kec.Kurau	Rp	50.000.000
5	Pengurus Majelis Al Habsy Al Mubarokah	Desa Maluka Baulin Kec. Kurau	Rp	15.000.000
6	Pengurus Majelis Taklim Sullamul Anwar	Desa Kurau Kec.Kurau	Rp	15.000.000
JUMLAH PROPOSAL		**6**	**Rp**	**310.000.000**
5. KECAMATAN BUMI MAKMUR				
1	Pengurus Mesjid Darul Ula	Desa Handil Labuan Amas Kec.Bumi Makmur	Rp	100.000.000
2	Pengurus Masjid Shiratul Jannah	Desa Kurau Utara Kec.Bumi Makmur	Rp	100.000.000

3	Pengurus Masjid Nurul Hidayah	Desa Handil Birayang Bawah Kec.Bumi Makmur	Rp	50.000.000
4	Pengurus Masjid Darul Muslimin	Desa Handil Suruk Kec.Bumi Makmur	Rp	40.000.000

5. KECAMATAN BUMI MAKMUR				
5	Pengurus Masjid Al Manar	Desa Handil Babirik Kec. Bumi Makmur	Rp	30.000.000
6	Pengurus Kelompok Maulid Habsyi Tsamaratul Jannah	Desa Handil Labuan Amas Kec.Bumi Makmur	Rp	15.000.000
JUMLAH PROPOSAL		**6**	**Rp**	**335.000.000**
6. KECAMATAN BAJUIN				
1	Pengurus Masjid Mujahidin	Desa Galam Kec.Bajuin	Rp	300.000.000
2	Pengurus Mesjid Jami Hidayatul Muttaqin	Desa Tebing Siring Kec.Bajuin	Rp	150.000.000
3	Pengurus Mesjid Darul Istiqamah	Desa Tanjung Pasar Kec.Bajuin	Rp	100.000.000
4	Takmir Masjid Nurul Hijrah	Desa Tebing Siring Kec.Bajuin	Rp	100.000.000
5	Pengurus Masjid Nurul Iman	Desa Ketapang Kec.Bajuin	Rp	75.000.000
6	Pengurus Masjid At Taubah	Desa Pemalongan Kec.Bajuin	Rp	35.000.000
7	Pengurus Langgar Al Muhajirin	Desa Pemalongan Kec.Bajuin	Rp	25.000.000
8	Pengurus Langgar Al-Muhajirin	Desa Tebing Siring Kec.Bajuin	Rp	25.000.000
9	Pengurus Masjid Al Muhajirin	Desa Pemalongan Kec.Bajuin	Rp	20.000.000
10	Pengurus Kelompok Maulid Habsyi An-Najah	Desa Tanjung Kec. Bajuin	Rp	15.000.000
11	Pengurus Kelompok Maulid Habsyi Al Hidayah	Desa Tebing Siring 3 Kec.Bajuin	Rp	15.000.000
12	Pengurus Group Sholawat Maulidur Rosul	Desa Ketapang Kec.Bajuin	Rp	15.000.000

13	Pengurus Perkumpulan Maulid Habsyi Nurul Hasanah	Desa Tirta Jaya Kec.Bajuin	Rp	15.000.000
14	Pengurus Group Habsy Ulfatuz Zahro	Desa Tebing Siring 1 Kec.Bajuin	Rp	15.000.000
15	Pengurus Al-Habsyi Alfa Salam	Desa Pemalongan Kec.Bajuin	Rp	15.000.000
JUMLAH PROPOSAL		**15**	**Rp**	**920.000.000**

7. KECAMATAN BATU AMPAR				
1	Pengurus Lembaga Adat Banjar Sukasari	Desa Tajau Pecah Kec.Batu Ampar	Rp	300.000.000
2	Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Darul Huda	Desa Damit Kec.Batu Ampar	Rp	200.000.000
3	Pengurus Desa Adat Mekar Sari	Desa Tajau Pecah Kec.Batu Ampar	Rp	200.000.000
4	Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia Kab. Tanah Laut	Desa Tajau Pecah Kec.Batu Ampar	Rp	100.000.000
5	Badan Pengelola Musholla Fatul Huda	Desa Batu Ampar Kec.Batu Ampar	Rp	100.000.000
6	Pengurus Musholla Miftahul Huda	Desa Durian Bungkuk Kec. Batu Ampar	Rp	90.000.000
7	Pengurus Majelis Jemaat Gereja Kalimantan Evangelis Imanuel Ambawang	Desa Ambawang Kec.Batu Ampar	Rp	40.000.000
8	Pengurus Masjid Baitul Mu'min	Desa Batu Ampar Kec.Batu Ampar	Rp	35.000.000
9	Pengurus Musholla Nurul Ikhsan	Desa Jilatan Kec.Batu Ampar	Rp	25.000.000
10	Pengurus Langgar Baitul Ishlah	Desa Batu Ampar Kec.Batu Ampar	Rp	20.000.000
11	Pengurus Majelis Ta'lim Ummatul Mustofa	Desa Tajau Mulya Kec.Batu Ampar	Rp	20.000.000
12	Pengurus Musholla Nurul Hidayah	Desa Tajau Pecah Kec.Batu Ampar	Rp	70.000.000
13	Pengurus Majelis Maulid Habsyi An-Nisa	Desa Batu Ampar Kec.Batu Ampar	Rp	15.000.000
14	Pengurus Majelis Maulid Habsyi Zahratunnisa	Desa Batu Ampar Kec.Batu Ampar	Rp	15.000.000

JUMLAH PROPOSAL		**14**	**Rp**	**1.230.000.000**
8. KECAMATAN JORONG				
1	Pengurus Yayasan Al Qolam	Desa Karang Rejo Kec.Jorong	Rp	75.000.000
2	Pengurus Yayasan Hidayaturrahman	Desa Asri Mulya Kec.Jorong	Rp	70.000.000
3	Pengurus Masjid At-Taqwa	Desa Alur Kec.Jorong	Rp	70.000.000
4	Badan Pengurus Langgar Taufiqurrahman	Desa Jorong Kec.Jorong	Rp	35.000.000

8. KECAMATAN JORONG				
5	Pengurus Masjid Jami Nurul Huda	Desa Karang Rejo Kec.Jorong	Rp	20.000.000
6	Pengurus Majelis Ta'lim Nuruddin Anshor	Desa Simpang Empat Sungai Baru Kec.Jorong	Rp	20.000.000
7	Pengurus Majelis Ta'lim At-Taqwa	Desa Jorong Kec.Jorong	Rp	20.000.000
8	Pengurus Group Habsyi Hidayatunnisa	Desa Swarangan Kec.Jorong	Rp	15.000.000
9	Pengurus Group Maulid Habsyi Syifa'ul Qolby	Desa Sabuhur Kec.Jorong	Rp	15.000.000
JUMLAH PROPOSAL		**9**	**Rp**	**340.000.000**
9. KECAMATAN TAKISUNG				
1	Pengurus Yayasan Pendidikan Nurul Adzulam	Desa Benua Tengah Kec. Takisung	Rp	150.000.000
2	Pengurus Masjid Mushollal Yaqin	Desa Pagatan Besar Kec.Takisung	Rp	100.000.000
3	Pengurus Yayasan Cinta Tunas Bangsa	Desa Gunung Makmur Kec. Takisung	Rp	50.000.000
4	Pengurus Langgar Riadhus Sholihin	Desa Sumber Makmur Kec.Takisung	Rp	20.000.000
5	Pengurus Group Maulid Al-Habsyi Arrahman	Desa Gunung Makmur Kec.Takisung	Rp	15.000.000
JUMLAH PROPOSAL		**5**	**Rp**	**335.000.000**
10. KECAMATAN KINTAP				
1	Pengurus Lembaga Bendesa Adat Banjar Karang Sari	Desa Sebamban Baru Kec.Kintap	Rp	225.000.000
2	Pengurus Yayasan Nurul Iman Sebamban Baru	Desa Sebamban Baru Kec.Kintap	Rp	50.000.000

3	Pengurus Masjid Nurul Iman	Desa Kebun Raya Kec. Kintap	Rp	35.000.000
4	Pengurus Masjid Nurul Hidayah	Desa Muara Kintap Kec.Kintap	Rp	35.000.000
5	Ta'mir Masjid Baiturrahman	Desa Kebun Raya Kec. Kintap	Rp	35.000.000
6	Pengurus Masjid Al Falah	Desa Muara Kintap Kec.Kintap	Rp	35.000.000
7	Pengurus Mushalla Al Barokah	Desa Muara Kintap Kec.Kintap	Rp	25.000.000
JUMLAH PROPOSAL		**7**	**Rp**	**440.000.000**

11. KECAMATAN PANYIPATAN				
1	Pengurus Yayasan Pesantren Datu Pamulutan	Desa Tanjung Dewa Kec.Panyipatan	Rp	300.000.000
2	Pengurus Langgar Al-Munawwarah	Desa Kandangan Lama Kec.Panyipatan	Rp	35.000.000
3	Pengurus Yayasan Sullamul Ulum	Desa Panyipatan Kec.Panyipatan	Rp	35.000.000
4	Pengurus Langgar Darul Mu'minin	Desa Kandangan Baru Kec. Panyipatan	Rp	35.000.000
5	Pengurus Yayasan Al Mabrur	Desa Sukaramah Kec.Panyipatan	Rp	30.000.000
6	Rukun Kematian Al Husna Sumber Sari	Desa Sukaramah Kec.Panyipatan	Rp	10.000.000
JUMLAH PROPOSAL		**6**	**Rp**	**445.000.000**
JUMLAH KESELURUHAN				
JUMLAH PROPOSAL				
113			**Rp. 9.120.000.000**	

FOTO KEGIATAN

PELAKSANAAN 2 KEGIATAN :

1. Sosialisasi Pencairan dan Pertanggung jawaban Dana Hibah









Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Pencaiaran Pertanggungjawaban Dana Hibah Fisik Lembaga keagamaan/Organisasi Keagamaan tahun 2023

2. Kunjungan Kerja Study Tiru Ke Pemerintah Kota Baru





Dokumentasi Kegiatan Kunjungan Kerja Study Tiru Ke Kabupaten Kota Baru Propinsi Kalimantan Selatan

PEMBERIAN BANTUAN DANA HIBAH :

1. Penandatanganan NPHD dan SPJ Pencairan Dana Hibah





Dokumentasi Penandatangan NPHD bagi lembaga keagamaan / Organisasi Keagamaan yang menerima dana hibah tahun 2023






Dokumentasi Penandatangan NPHD bagi lembaga keagamaan / Organisasi Keagamaan yang menerima dana hibah tahun 2023

2. Monitoring dan Evaluasi









Dokumentasi kegiatan monitoring sebelum penyerahan dana hibah fisik kepada Lembaga Keagamaan/Organiasi Keagamaan




Dokumentasi kegiatan monitoring sebelum penyerahan dana hibah fisik kepada Lembaga Keagamaan/Organiasi Keagamaan









Dokumentasi kegiatan monitoring sebelum penyerahan dana hibah fisik kepada Lembaga Keagamaan/Organiasi Keagamaan

SASARAN 2 Meningkatnya Layanan Bantuan Sosial Keagamaan

Indikator : Persentase layanan bantuan sosial keagamaan

NO	SASARAN STRATEGIS /KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
2	Meningkatnya layanan bantuan sosial keagamaan	Persentase layanan bantuan sosial keagamaan	100%	98.04%	98.09%	Bagian Kesejahteraan Rakyat **Mengampu Misi ke-3** *"Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang baik* ***(Good Govermance)"***

Daftar Tenaga Pengajar TPA, Madin, Ponpes,
Penyuluh Agama Islam, Penyuluh Agama Hindu dan Penyuluh Agama Kristen
Lingkup Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023

NO	KECAMATAN	JUMLAH GURU TPA	JUMLAH GURU MADIN	JUMLAH GURU P0NPES	JUMLAH PENYULUH ISLAM	JUMLAH PENYULUH HINDU	JUMLAH PENYULUH KRISTEN
1	Pelaihari	436	36	227	48	4	7
2	Bajuin	122	-	10	16	-	3
3	Panyipatan	111	65	34	20	-	3
4	Takisung	160	41	13	17	-	-
5	Batu Ampar	216	7	27	19	4	5
6	Jorong	151	59	73	12	-	-
7	Kintap	210	60	72	20	4	-
8	Tambang Ulang	118	24	27	14	-	-
9	Kurau	102	19	12	12	-	-
10	Bumi Makmur	114	57	-	10	-	-
11	Bati Bati	168	98	201	22	-	-
JUMLAH		**1908**	**466**	**696**	**210**	**12**	**18**

Layanan Bagian Kesejahteraan Rakyat semakin banyak tahun demi tahun, ini dilihat dari banyaknya bangunan sekolah-sekolah keagamaan dan juga tenaga pengajar pada TKA/TPA, Madin/MIS, dan Pondok Pesantren. Jumlah tenaga pengajar se Kabupaten yang diberikan insentif dari Pemerintah Daerah melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun 2023 berjumlah 3.310 orang. Dari total keseluruhan tenaga pengajar dan penyuluh agama tersebut ada 47 orang yang mengundurkan diri, lulus P3K, dan meninggal dunia dipertengahan tahun selama Tahun 2023, sehingga berjumlah 3.263 orang yang dibayar insentifnya dan sebanyak 47 orang tersebut tidak dicairkan insentifnya dari kas Daerah di Kab. Tanah Laut, Pagu Anggaran sebesar Rp. 21.392.598.317,- terealisasi sebesar Rp. 20.972.958.226,- atau 98,04%

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas pada dasarnya dapat terlaksana dengan baik, tetapi ada ditemukan beberapa kendala antara lain:

- Kurangnya komunikasi antara guru dengan Kepala sekolah serta supervisor dan Koordinator Kecamatan BKPRMI, Madin, Ponpes dan PAH.
- Dewan Pengurus Kabupaten BKPRMI, Madin, Ponpes dan PAH harus menginformasikan kepada kepala sekolah, Koordinator Kecamatan untuk mendata ulang TKA/TPA, Madin/MIS, Ponpes dan PAH yang benar benar bersedia menjadi Tenaga Pengajar di Lingkungan Pemerintah Daerah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah

- Supervisor serta Koordinator BKPRMI, Madin, Ponpes dan PAH harus aktif melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada TKA/TPA, Madin/MIS, Ponpes dan PAH.
- Meningkatkan koordinasi antara DPK dan DPD BKPRMI, Madin, Ponpes dan PAH agar setiap permasalahan yang dihadapi dilapangan dapat diselesaikan dengan cepat.

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan kedepannya adalah :

- Meningkatkan monitoring dan evaluasi secara intensif kepada TKA/TPA, Madin, Ponpes dan PAH se Kabupaten Tanah Laut.
- Seluruh Kepala Sekolah maupun tenaga pengajar pada TKA/TPA, Madin, Ponpes dan menyusun target yang ingin dicapai pada setiap tingkatan pembelajaran baik di TKA/TPA, Madin, dan Ponpes agar kualitas hasil yang diharapkan dalam pembelajaran dapat tercapai.
- Setiap penandatangan insentif tenaga pengajar dan penyuluh agama dihadiri oleh Pengurus BKPRMI dan Madin kecamatan dan Kabupaten serta bagian kesejahteran rakyat pada saat rapat rutin dan melampirkan photo penandatangan persekolahan.
- Bagi Pondok Pesantren dan Penyuluh Agama penandatangannya dimasing masing pondok dan di Kantor KUA kecamatan masing-masing yang dilampiri dengan photo seluruh tenaga pengajar pondok dan penyuluh agama masing masing.

FOTO KEGIATAN

PELAKSANAAN 4 KEGIATAN :

1. *Kunjungan Kerja Study Tiru DPD FKDT Ke Indramayu Jawa Barat*







Dokumentasi kegiatan Kunjungan Kerja Study Tiru Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan Dewan Pengurus Derah Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPD-FKDT) Ke Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat dan DPD FKDT Indramayu.

2. BATAMAT DAN WISUDA SANTRI TPA / TPA







Dokumentasi Kegiatan Batamat Al Qur'an dan Wisuda Santri Taman Pendidikan Al Qur'an yang dilaksanakan pada masing-masing kecamatan





Dokumentasi Penyerahan secara Simbolis oleh Bapak Bupati Program Bantuan Jaminan Kematian dari BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris

Seleksi Penyuluh Agama Islam Daerah







Dokumentasi kegiatan seleksi secara tertulis bagi penyuluh agama islam daerah











Dokumentasi kegiatan seleksi secara lisan bagi penyuluh agama islam daerah dimasing-masing zona





Dokumentasi kegiatan seleksi secara lisan bagi penyuluh agama islam daerah dimasing-masing zona

4. Melaksanakan Pembinaan terhadap Tenaga Pengajar dan Penyuluh Agama





Dokumentasi Kegiatan monitoring, verifikasi dan pembinaan kepada guru-guru TKA/TPA 20223







Dokumentasi menerima konsultasi dan koordinasi dengan kordinator Penyuluh Agama Hindu dan kordinator Penyuluh Agama Islam serta guru madin Kecamatan Panyipatan




Dokumentasi kegiatan Pembinaan terhadap penyuluh agama islam daerah se kecamatan kintap dan kegiatan pembinaan terhadap guru TKA/TPA se Kecamatan Takisung

PEMBAYARAN INSENTIF

1. *Penandatanganan SPJ Pembayaran Insentif*



2.



D

Dokumentasi Penandatangan Insentif Guru-Guru TKA/TPA se Kecamatan Pelaihari

SASARAN 3 Meningkatnya Peran Serta Organisasi/ Lembaga Keagamaan/SKPD Dalam Bidang Pemuda dan Olahraga

Indikator : Persentase Hasil Tindak Lanjut Koordinasi Kegiatan Bidang Keagamaan, Pemuda dan Olahraga

NO	SASARAN STRATEGIS /KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
3	Meningkatnya Peran serta Organisasi/ Lembaga Keagamaan /SKPD dalam Bidang Pemuda dan Olahraga	Persentase hasil tindak lanjut koordinasi kegiatan bidang keagamaan, pemuda dan olahraga	100%	83.01%	83.01%	Bagian Kesejahteraan Rakyat **Mengampu Misi ke-3** *"Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang baik* *(**Good Governance**)"*

Layanan Bagian Kesejahteraan Rakyat dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagaman yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan organisasi/lembaga keagamaan dan SKPD terkait pada dasarnya dapat terlaksana dengan baik, ini dapat dilihat dari realisasi dan capaian kinerja pada Tahun 2023 yang meningkat dari Tahun 2022, tetapi memang terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain :

- Kegiatan fasilitasi Musabaqah Qira'atul Kutub tingkat propinsi tahun 2023 yang bersifat even tahunan tidak dapat terjadwal sesuai rencana awal sehingga ada kegiatan yang tidak dapat terfasilitasi dengan maksimal karena jadwal pelaksanaan kegiatan bersamaan dengan kegiatan lain.

  Jumlah realisasi keuangan dari pagu anggaran sebesar Rp. 4.123.329.348,- dapat terealisasi Rp. 3.422.672.460,- atau 83,01%, dengan rincian sebagi berikut :

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah

- Meningkatkan koordinasi yang baik dengan organisasi/lembaga keagamaan maupun dengan instansi terkait.

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan kedepannya adalah :

Meningkatkan dan menjalin koordinasi dengan semua pihak terkait serta menyusun rencana kegiatan dengan baik.

FOTO KEGIATAN

PELAKSANAAN 11 KEGIATAN KEAGAMAAN :

1. Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1444 H





Dokumentasi Kegiatan Isra Me'raj Nabi Muhammad SAW di lingkungan Sekretariat Daerah

2. Safari Ramadhan Bupati dan Wabub Tanah Laut.





Dokumentasi kegiatan safari Ramadhan dan penyerahan secara simbolis bantuan hibah fisik










BANK KALSEL







3. Shalat idul Fitri dan Idul Adha berjamaah bersama Bupati dan Wakil Bupati serta Halal Bihalal.





Dokumentasi kegiatan safari Ramadhan dan penyerahan secara simbolis bantuan hibah fisik

4. Tausiyah lingkup Sekretariat Daerah Kab. Tanah Laut









Dokumentasi kegiatan Tausyiah di langgal Al Ikhlas di lingkungan Sekretariat Daerah

5. Penyelenggaraan Ibadah Haji Kab. Tanah Laut Tahun 2023.










Dokumentasi kegiatan pemberangkatan jama'ah haji Kabupaten Tanah Laut pada saat di asrama haji Banjar baru

6. Pemberian Bantuan Beasiswa bagi Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa Bidang Agama 2023

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN JUMLAH BANTUAN BEASISWA BAGI SANTRI, USTADZ/ USTADZAH, DAN MAHASISWA (BIDANG AGAMA) KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	N A M A	ALAMAT	SEKOLAH	JUMLAH BANTUAN BEASISWA
1.	M. Ahsin Sakho	Jl. Perintis RT. 17 RW. 06 No. 48 Kelurahan Pelaihari Kec. Pelaihari	Hadramaut (Yaman)	Rp. 35.000.000,-
2.	Ahmad Yasir	Jl. A. Yani RT. 012 RW. 004 Desa Jorong Kec. Jorong	Universitas Al Azhar (Mesir)	Rp. 35.000.000,-
3.	Muhammad Rifki	Jl. A. Yani RT. 02 RW. 02 Desa Benua Raya Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut	Rubath Tarim (Yaman)	Rp. 35.000.000,-
4.	Muhammad Yahya	Jl. Boer Anwar RT. 06 Desa Pemuda Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut	Hadramaut (Yaman)	Rp. 35.000.000,-
5.	M. Alvin Shafari	Jl. Pesantren RT. 008 RW. 003 Desa Bati-Bati Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut	Al Lisan Al Umm Tarim (Yaman)	Rp. 35.000.000,-
6.	Nisa Susmini	Jl. Simpang Swarangan RT. 012 RW. 004 Kec. Jorong Kab. Tanah Laut	Universitas Al Ahgaff (Yaman)	Rp. 35.000.000,-
7.	Muhammad Dzaky Almer	Jl. Griya Persada Asri Komplek Griya Persada Asri Kelurahan Sarang Halang Kec. Pelaihari	Darus Sholihin (Yaman)	Rp. 35.000.000,-
8.	Ahmad Farid Ma'ruf	Jl. Ambawang Kelurahan Sarang Halang Kec. Pelaihari	Darus Sholihin (Yaman)	Rp. 35.000.000,-
9.	Aisyifa Syahilla	Jl. Pasar Hewan RT. 07 Kelurahan Sarang Halang Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut	Hadramaut (Yaman)	Rp. 35.000.000,-

10.	Diana Fitria Rahimah	Jl. Liang Anggang RT. 008 RW. 006 Desa Liang Anggang Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut	Universitas Al Ahgaff (Yaman)	Rp. 35.000.000,-
11.	Sarifah Hafifah	Jl. Pusaka Kelurahan Pelaihari Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut	Darul Faqih (Yaman)	Rp.10.000.000,-
12.	Ridho Anugerah Fama	Jl. Gembira RT. 02 RW. 01 Kelurahan Pelaihari Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut	Universitas Al Wasathiyah (Yaman)	Rp.10.000.000,-
13.	Najwa Fahrida	Jl. H. Boejasin RT. 022 RW. 001 Kelurahan Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut	Darul Hadits (Yaman)	Rp.10.000.000,-
14.	Muhammad Yunus	Desa Pamalongan RT. 01 Kec. Bajuin Kab. Tanah Laut	Rubath Tarim (Yaman)	Rp.10.000.000,-
15.	Achmad Naseh	Desa Sungai Cuka Kec. Kintap Kab. Tanah Laut	Universitas Al Ahgaff (Yaman)	Rp.10.000.000,-
16.	Jam'ani	Desa Ranggang RT. 004 RW. 002 Kec. Takisung Kab. Tanah Laut	Universitas Al Azhar (Mesir)	Rp.10.000.000,-
17.	Akhmad Ikhsan	Jl. Gg. Syarif Husin RT. 016 RW. 005 Kelurahan Pelaihari Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut	Ma'had Al Yusra (Yaman)	Rp.10.000.000,-
18.	Abi Yazid Bustami	Jl. Murung Kenanga RT. 004 RW. 002 Desa Bati-Bati Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut	Universitas Al Azhar (Mesir)	Rp.10.000.000,-
19.	Nisrida Ulfah	Jl. Beramban Raya RT. 21/007 Kelurahan Pelaihari Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut	Universitas Al Ahgaff (Yaman)	Rp.10.000.000,-
20.	M. Isro Irfan Maulana	Jl. Datu Daim RT. 28 RW. 02 Kelurahan Pelaihari Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut	Darus Sholihin (Yaman)	Rp.10.000.000,-
21.	Putri Ananda Septariana	Jl. Matah II Nomor 13 RT. 07 RW. 02 Kelurahan	Universitas Al Ahgaff (Yaman)	Rp.10.000.000,-

		Karang Taruna Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut		
22.	M. Gumilang Ramadhan	Jl. Fathurrahman RT. 21 Desa Gunung Makmur Kec. Takisung Kab. Tanah Laut	Ma'had Al-Idrus (Yaman)	Rp.10.000.000,-
23.	Nur Ma'rifah Zahro	Jl. Al Fatah RT. 27 No. 23 Kelurahan Pelaihari Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut	Universitas Al Ahgaff (Yaman)	Rp.10.000.000,-
24.	Nezha Nisfi Asy-Syafiqah	Jl. A. Syairani Komp. Kijang mas Permai E/10 RT. 10 RW. 04 Kelurahan Sarang Halang Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut	Universitar Al Azhar (Mesir)	Rp.10.000.000,-
25.	Akbar Thabrani	Desa Tajau Pecah RT. 1 RW. 1 Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut	Universitas Al Azhar (Mesir)	Rp.10.000.000,-
26.	Nor Hayri	Jl. Pesantren RT. 007 RW. 002 Desa Padang Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut	Universitas Al Azhar (Mesir)	Rp.10.000.000,-
27.	Siti Nur Husna	Jl. A. Yani Desa Ujung RT. 001 RW. 001 Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut	Ma'had Ar Rusyd (Yaman)	Rp.10.000.000,-
28.	Luthfi Anshari	Desa Bentok Darat RT. 01 RW. 01 Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut	Universitas Al Ahgaff (Yaman)	Rp.10.000.000,-
29.	Amalia Sholehah	Komp. Bajuin Raya Jl. Kihung No. 6 RT. 004 RW. 002 Kelurahan Pelaihari Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut	Darul Faqih (Yaman)	Rp.10.000.000,-
30.	M. Hasanudin	Jl. Datu Daim RT. 006 RW. 002 Kelurahan Pelaihari Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut	Universitas Al Azhar (Mesir)	Rp.10.000.000,-
31.	Miftahur Rahmah	Jl. Abadi Gang Berlian RT. 003 RW. 001 Kelurahan Pelaihari Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut	Universitas Al Azhar (Mesir)	Rp.10.000.000,-

32.	Muhammad Fauzan	Jl. Pariwisata RT. 01 RW. 01 Desa Tanjung Dewa Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut	Universitas Al Wasathiyah (Yaman)	Rp.10.000.000,-
33.	Fardhan Yuliannor	Jl. Purnawirawan Komp. Sejahtera Mandiri Blok C No. 5 RT. 012 RW. 001 Kelurahan Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut	Universitas Al Azhar (Mesir)	Rp.10.000.000,-
34.	M. Adabun Jamil	Jl. Sebelas Maret Desa Alur RT. 08 Dusun 2 Kec. Jorong Kab. Tanah Laut	Ma'had Darul Mustafa - Tarim (Yaman)	Rp.10.000.000,-
35.	Fatia Rizkiyana	Jl. Atilam RT. 08 RW. 04 Gg. Tambrin No. 2 Kelurahan Pabahanan	Universitar Al Azhar (Mesir)	Rp.10.000.000,-
36.	Yuliani	Jl. Pusaka RT. 003 RW. 001 Kintap	Universitar Al Azhar (Mesir)	Rp.10.000.000,-
37.	Farah Shofia Mujib	Komp. Citra Indah Permai RT. 06 / 02 Desa Atu-Atu Kec. Pelaihari	Universitar Al Azhar (Mesir)	Rp.10.000.000,-
TOTAL				Rp. 620.000.000,-








Dokumentasi kegiatan penyerahan bantuan Beasiswa pendidikan keagamaan bagi santri yang sekolah keluar Negeri

7. Musabaqah Qira'atil Kutub Tk. Nasional.









Dokumentasi kegiatan MQK TK. Nasional di daerah Lamongan Jawa Timur

Musabaqah Qira'atil Kutub Tk. Kab. Tanah Laut





Dokumentasi kegiatan MQK TK. Kabupaten di daerah Lamongan Jawa Timur

8. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 H.







Dokumentasi kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW di lingkungan Sekretariat Saerah

9. SHALAT HAJAT DALAM RANGKA HARI KEMERDEKAAN RI





Dokumentasi shalat hajat dalam rangka Hari Kemerdekaan RI ke 78 tahun

10. SHALAT HAJAT DALAM RANGKA HARI JADI KABUPATEN TANAH LAUT





Dokumentasi kegiatan shalat hajat dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Tanah Laut ke 58 Tahun

Gema Al Qur'an Tanah Laut Tahun 2023









Dokumentasi kegiatan Gema Al Qur'an dan MTQ TK. Nasional dan MTQ TK. Internasional

FASILITASI KEGIATAN LEMBAGA/ORGANISASI KEAGAMAAN :

1. Fasilitasi kegiatan LPTQ Kabupaten Tanah Laut berupa Pelantikan dan Orientasi Dewan Hakim MTQ Tk. Kab. Tanah Laut dan Fasilitasi pada MTQ Tk. Propinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Banjar Baru sebagai Tuan Rumah .













Dokumentasi kegiatan MTQ TK. Propinsi yang dilaksanakan Di Kabupaten Banjar Baru





Dokumentasi pemberian hadiah bonus kepada peserta kafilah MTQ TK. Propinsi yang juara oleh Pemerintah Daerah

2. Fasilitasi kegiatan PESPARAWI TK. Propinsi Kalimantan Selatan Di Kabupaten Tanjung sebagai tuan rumah









Dokumentasi kegiatan pelantikan kepengurusan PESPARAWI dan keingkutsertaan lomba PESPARAWI TK. Propinsi Kalimantan Selatan di kabupaten Tabalong

3. Fasilitasi kegiatan FKPP Kabupaten Tanah Laut berupa Peringatan Hari Santri Nasional di Kabupaten Tanah Laut.





Dokumentasi kegiatan hari santi di kabupaten Tanah Laut dan penyerahan bantuan kepada santri yang tidak mampu dari BAZNAS Kabupaten Tanah Laut.





Dokumentasi kegiatan hari santi di kabupaten Tanah Laut dan penyerahan bantuan kepada santri yang tidak mampu dari BAZNAS Kabupaten Tanah Laut.

3. Fasilitasi kegiatan BHR Kabupaten Tanah Laut berupa kegiatan Ru'yatul Hilal 1 Syawal 1444 H dan Pengukuran arah Kiblat tempat Ibadah (Masjid/Langgar/Mushala) di Kab. Tanah Laut.





Dokumentasi kegiatan Badan Hisab Rukyah (BHR) pada saat penentuan awal puasa pada tahun 1444 H di Pantai Batakan Baru Kecamatan Panyipatan









Dokumentasi kegiatan Tim Badan Hisab Rukyah (BHR) pada saat menentukan arah kiblat sebelum membangun tempat ibadah masjid atau langgar

❖ **Analisa Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia**

1). Untuk mencapai sasaran meningkatnya pembinaan lembaga sosial dan keagamaan yang ditindaklanjuti Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dengan indikator persentase peningkatan lembaga sosial dan keagamaan yang dibina, dengan pagu Rp. 9.285.373.530,- terealiasi Rp. 8.921.864.464,- atau 96,09% dan dilaksanakan oleh 4 (empat) orang SDM yaitu Sub Koord. Bina Mental dan Spiritual, Pengadministrasian umum, dan 2 (dua) orang tenaga PTT. Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor : 188.45/215-KUM/2023 tentang Pemberian Hibah Uang Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023, Untuk capaian kinerja terhadap IKU tersebut diatas adalah **98,04%** sedangkan untuk realisasi anggarannya sebesar **96,09%.** Dalam artian IKU ini telah berhasil dilaksanakan dengan efektif dan efisien dikarenakan capaian kinerjanya lebih besar daripada realisasi anggaran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini

CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI
98,04%	96,09%	1,95%

2). Untuk mencapai sasaran meningkatkan kualitas pelaksanaan layanan bantuan sosial keagamaan yang ditindaklanjuti Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dengan indikator presentase layanan bantuan sosial keagamaan pada program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, dengan pagu Rp. 21.392.598.317,- terealiasi Rp. 20.972.958.226,- atau 98,04% dan dilaksanakan oleh 4 (empat) orang SDM yaitu Sub Koord. Kesejahteraan Sosial, Pengelola bantuan sosial keagamaan, dan 2 orang tenaga PTT. Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 212 tahun 2020 tentang insentif bagi tenaga pengajar pada taman pendidikan Al Qur'an, Madrasah Diniyah/ Madrasah Ibtidaiyah Swasta, Pondok Pesantren dan Penyuluh Agama yang ditunjuk oleh daerah dilingkungan Pemeintah Daerah Kabupaten Tanah Laut. Untuk capaian kinerja terhadap IKU tersebut diatas adalah **98,09%** sedangkan untuk realisasi anggarannya sebesar **98,04%.** Dalam artian IKU ini telah berhasil dilaksanakan dengan efektif dan efisien sesuai capaian kinerjanya dengan realisasi anggaran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini

CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI
98,09%	98,04%	0,05%

3). Untuk mencapai sasaran meningkatnya peran serta Organisasi/Lembaga Keagamaan/SKPD dalam bidang pemuda dan olah raga yang ditindaklanjuti Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dengan indikator persentase hasil tindak lanjut koordinasi kegiatan bidang keagamaan, pemuda dan olah raga, dengan pagu Rp. 4.123.329.348,- terealiasi Rp 3.422.672.460,- atau 83,01% dan dilaksanakan oleh 6 (Enam) orang SDM yaitu Kepala Bagian, Sub Koord. Kesejahteraan Masyarakat, Pengelola data Kesejahteraan Masyarakat, Pengadministrasi umum, dan 3 (tigaa) orang tenaga PTT. Untuk capaian kinerja terhadap IKU tersebut diatas adalah **83,01%** sedangkan untuk realisasi anggarannya sebesar **83.01%.** Dalam artian IKU ini telah berhasil dilaksanakan dengan efektif dan efisien sesuai capaian kinerjanya dengan realisasi anggaran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini

CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI
83,01%	83.01%	0,00%

Tabel Indikator Kinerja dan Realisasi Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2023 (Rp)	%	SDM	KET
1	Persentase peningkatan Lembaga sosial dan keagamaan yang dibina	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHRTERAAN RAKYAT**	**Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**					
			- Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	9.285.373.530	8.921.864.464	96.09%	4	
2	Persentase layanan bantuan sosial keagamaan		- Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluas, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	21.392.598.317	20.972.958.226	98.04%	4	
3	Persentase hasil tindak lanjut koordinasi kegiatan bidang keagamaan, pemuda dan olahraga		- Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	4.126.365.043	3.422.672.460	82.95%	6	

Analisa Capaian Sasaran Strategis

Kepala Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya penyelesaian permasalahn terkait Perekonomian dan Pembangunan Daerah	Persentase penyelesaian permasalahan terkait perekonomian dan pembangunan	100 %	98%	98%	Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam **Mengampu Misi ke-5** *"Membangun Sinergitas Yang Baik Antar Tingkat Pemerintahan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat"*
2	Meningkatnya BUMD yang sehat dan berdayasaing	Persentase BUMD yang berkinerja positif	100%	95%	95%	
3	Meningkatnya Pelaku UMKM yang terfasilitasi permodalan	Persentase UMKM yang terfasilitasi permodalan	100%	100%	100%	
4	Meningkatnya kualitas manajemen data administrasi pembangunan yang proporsional	Persentase SKPD yang menyampaikan laporan progres pembangunan fisik	85%	100%	100%	

❖ **Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja**

Rata-rata capaian kinerja Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan SDA dari target indikator adalah sebagai berikut:

1) Persentase Fasilitasi penyelesaian permasalahan terkait perekonomian dan pembangunan adalah 98%, dengan rincian sebagai berikut :
   - Persentase Fasilitasi penyelesaian permasalahan dan perumusan kebijakan dalam rangka evaluasi penyaluran Kredit **Program Gapura Karomah** capaian kinerjanya adalah 100%.
   - Kegiatan Fasilitasi penyusunan kajian analisis investasi kepada BUMD PT. Air Minum Berkah Banua dan PT. BPD Kalimantan Selatan capaian kinerjanya adalah 100%.
   - Fasilitasi tindak lanjut penyelesaian dan pembahasan Raperda Investasi Pemerintah Daerah capaian kinerjanya adalah 100%.
   - Fasilitasi kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan kegiatan pendukungnya capaian kinerjanya adalah 100%.
   - Persentase fasilitasi kegiatan dukungan Pemerintah Daerah terhadap Program Permodalan dari Pemerintah Pusat capaian kinerjanya adalah 100%.

2) BUMD yang berkinerja posoitif sebanyak 3 buah atau secara persentase 95% dari target 100%. Persentase capaian ditetapkan sebesar 95% karena belum selesainya permasalahan yang masih belum selesai yaitu belum terlaksananya kegiatan seleksi calon direksi BUMD PD. Baratala.
3) Persentase SKPD Yang Menyampaikan Laporan progress pembangunan fisik adalah 100% dari target 85% atau capainya adalah 117%. Target capaian ditetapkan 85% karena pada tahun sebelumnya targetnya hanya sebesar 80%, hal ini karena tidak semua SKPD di awal tahun menyampaikan rencana pembangunan fisiknya.
4) Persentase penerapan kebijakan dalam rangka peningkatan penyaluran permodalan kepada Pelaku UMKM melalui program Gapura Karomah, KUR dan UMi mencapai hasil 100%, sehingga 75% dari jumlah UMKM yang mengajukan fasilitas permodalan telah terpenuhi atau mencapai target 100%. Target capaian sebesar 75% ditetapkan karena pada akhir tahun tidak semua

Capaian target kinerja sasaran strategis/kinerja utama Meningkatnya penyelesaian permasalahan terkait perekonomian dan pembangunan daerah adalah sebesar 98%, hal ini dikarenakan belum selesainya permasalahan penyetoran PAD oleh BUMD PD. Baratala dan harus ditindaklanjuti pada tahun berikutnya

Berikut disajikan Perbandingan Capaian Sasaran Strategis Bagian Perekonomian, Adm Pembangunan dan SDA terhadap capaian tahun sebelumnya

Tabel Capaian Sasaran Indikator Kinerja Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam terhadap Capaian Tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Tahun 2023		
			2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase penyelesaian permasalahan terkait perekonomian dan pembangunan	%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase BUMD yang berkinerja positif	%	75%	75%	100%	95%	95%
3	Persentase UMKM yang terfasilitasi permodalan	%	75%	75%	100%	100%	100%
4	Persentase SKPD yang menyampaikan laporan progres pembangunan fisik	%	75%	80%	85%	100%	100%
	Rata – Rata Capaian						**98.75%**

❖ **Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Tahun Sebelumnya**

Realiasasi capaian kinerja Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan SDA pada Tahun 2023 dengan capaian **98,75 %** berbanding dengan capaian kinerja Tahun 2022 yang mencapai 100%, Adapun rincian capaian pada masing-masing Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut:

a) Persentase Fasilitasi penyelesaian permasalahan terkait perekonomian dan pembangunan adalah 100% sama dengan capaian kinerja program Tahun 2022 yaitu 100%.
b) Persentase BUMD yang berkinerja posoitif capaiannya adalah 95% sama dengan capaian kinerja program Tahun 2022 yaitu 75%
c) Persentase kebijakan fasilitasi Program permodalan untuk UMKM melalui program Gapura Karomah, KUR dan UMi capaian kinerjanya adalah 100% capaian kinerja program Tahun 2021 yaitu 75%
d) Persentase SKPD Yang Menyampaikan Laporan progress pembangunan fisik adalah 100% lebih baik dibandingkan dengan Tahun 2022 yaitu 80%

❖ **Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Eselon III Selama 5 (Lima) Tahun (2018-2023)**

NO	IKU ESELON III		2019			2020			2021			2022			2023			PENANGGUNG JAWAB/BAGIAN
	SASARAN	INDIKATOR	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	
	Meningkatnya kualitas penyelesaian permasalahan terkait Perekonomian dan Pembangunan Daerah	Persentase Permasalahan yang berhasil ditindaklanjuti di bidang pengembangan Potensi Perekonomian	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Bagian Perekonomian Pembangunan**
		Fasilitasi pembinaan dan monev BUMD Kabupaten Tanah Laut	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Bagian Perekonomian Pembangunan**
	Meningkatnya kualitas penyelesaian permasalahan terkait Perekonomian dan Pembangunan Daerah	Persentase fasilitasi penyelesaian permasalahan terkait perekonomian dan pembangunan	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Bagian Perekonomian Pembangunan**
	Meningkatnya BUMD yang sehat dan berdayasaing	Persentase BUMD yang berkinerja positif	-	-	-	75%	50%	66,67 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Bagian Perekonomian Pembangunan**
	Meningkatnya kualitas manajemen administrasi pembangunan yang proporsional sesuai dengan kewenangan	Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan	-	-	-	75%	50%	66,67 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Bagian Perekonomian Pembangunan**
	Meningkatnya hasil promosi potensi Daerah	Persentase peningkatan investasi	-	-	-	50%	50%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Bagian Perekonomian Pembangunan**

	Meningkatnya penyelesaian permasalahn terkait Perekonomian dan Pembangunan Daerah	Persentase penyelesaian permasalahan terkait perekonomian dan pembangunan	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98%	98%	**Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam**
	Meningkatnya BUMD yang sehat dan berdayasaing	Persentase BUMD yang berkinerja positif	-	-	-	-	-	-	75%	75%	100%	75%	75%	100%	100%	95%	95%	**Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam**
	Meningkatnya Pelaku UMKM yang terfasilitasi permodalan	Persentase UMKM yang terfasilitasi permodalan	-	-	-	-	-	-	75%	75%	100%	75%	75%	100%	100%	100 %	100%	**Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam**
	Meningkatnya kualitas manajemen data administrasi pembangunan yang proporsional	Persentase SKPD yang menyampaikan laporan progres pembangunan fisik	-	-	-	-	-	-	80%	80%	100%	80%	80%	100%	85%	100 %	100%	**Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam**

❖ **Analisa Peningkatan dan Penurunan Kinerja**

SASARAN 1 Meningkatnya Penyelesaian Permasalahan Terkait Perekonomian dan Pembangunan Daerah

Indikator : Persentase Penyelesaian Permasalahan Terkait Perekonomian dan Pembangunan

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya penyelesaian permasalahan terkait Perekonomian dan Pembangunan Daerah	Persentase penyelesaian permasalahan terkait perekonomian dan pembangunan	100 %	100%	100%	Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam **Mengampu misi ke-5** *"Membangun Sinergitas Yang Baik Antar Tingkat Pemerintahan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat"*

Persentase kebijakan penyelesaian permasalahan terkait perekonomian dan pembangunan merupakan akumulasi dari kegiatan koordinasi dan fasilitasi yang melahirkan beberapa kebijakan dibidang perekonomian guna menyelesaikan permasalahan dibidang perekonomian dan administrasi pembangunan. Selain fasilitasi penyelesaian permasalahan perekonomian dan administrasi pembangunan, juga kegiatan fasilitasi lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan untuk ditindaklanjuti sesuai tupoksi .

Capaian indikator kinerja utama Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam pada Tahun 2023 yaitu Meningkatnya penyelesaian permasalahan terkait Perekonomian dan Pembangunan Daerah sebesar 100% sama dengan capaian kinerja program Tahun 2022 yaitu 100%, namun ada beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target tersebut antara lain :

- Beberapa rumusan kebijakan telah disusun dan direkomendasikan untuk dilaksanakan guna menunjang peningkatan perekonomian daerah namun belum dapat berjalan secara maksimal.
- Kurangnya informasi dan sosialisasi dari Pemerintah pusat terkait proses pelaporan P3DN.
- SKPD masih kurang familiar terhadap kebijakan baru tentang penginputan laporan P3DN.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Dalam penerapan rekomendasi kebijakan dilakukan evaluasi setiap periode dan pada saat timbulnya masalah akibat penerapan kebijakan tersebut.
- Melakukan rapat teknis dan mengkoordinir SKPD untuk melakukan konsultasi ke Kementerian terkait pelaporan P3DN
- Memfasilitasi kegiatan sosialisasi kepada PIC SKPD dalam hal pelaporan P3DN dengan menggandeng pihak Kementerian sebagai narasumber.

Rencana aksi yang diperlukan

- Melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan
- Monitoring terhadap capaian penginputan laporan P3DN oleh SKPD
- Merencanakan kegiatan sosialisasi pada tahun berikutnya untuk refreshment tatacara input laporan kepada SKPD
- Melakukan pengumpulan data dan analisa terhadap hasil dari pelaksanaan kebijakan serta terhadap permasalahan yang muncul.



FGD dan sosialisasi input P3DN



Rapat Koordinasi lingkup Asisten Perekonomian dan Pembangunan

SASARAN 2 Meningkatnya BUMD yang Sehat dan Berdaya saing

Indikator : Persentase BUMD yang Berkinerja Positif

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
2	Meningkatnya BUMD yang sehat dan berdayasaing	Persentase BUMD yang berkinerja positif	100%	95%	95%	Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam **Mengampu misi ke-5** *"Membangun Sinergitas Yang Baik Antar Tingkat Pemerintahan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat"*

Capaian indikator kinerja Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam berikutnya yaitu Meningkatnya BUMD yang sehat dan berdayasaing pada Tahun 2023 sebesar 95% lebih baik dibandingkan dengan capaian Tahun 2022 yaitu 75%, namun ada beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target tersebut antara lain :

- Masih belum selesainya proses perhitungan nilai asset yang akan dijadikan penyertaan modal pemerintah berupa asset kepada BUMD PT. Air Minum Berkah Banua dikarenakan banyaknya titik – titik pipa yang harus disurvey dan nilai asset yang besar.
- Belum selesainya proses pembahasan Raperda tentang penyertaan modal Pemerintah kepada BUMD PT. BPR Tanah Laut.
- Belum 100% penyetoran bagi hasil pendapatan oleh PD. Baratala kepada Pemerintah daerah dari kinerja perusahaan pada tahun 2022.
- Masih adanya nilai NPL pada PT. BPR Tanah Laut yang disebabkan oleh Debitur Program Gapura Karomah yang macet.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Proses perhitungan akan dilakukan pada awal tahun agar semua titik pipa dapat disurvey untuk estimasi perhitungan
- Secara aktf melakukan koordinasi dengan pihak Legislatif serta melaksanakan FGD investasi daerah untuk mendapatkan masukan dari semua pihak sebagai sarana untuk meyakinkan pihak legislatif
- Melakukan koordinasi dengan Banwas PD. Baratala untuk focus mengawal penyelesaian pembayaran bagi hasil yang telah terhutang di tahun 2023

- Memfasilitasi rapat antara PT. BPR Tala dengan SKPD pembina pelaku usaha mikro untuk tindak lanjut penanganan debitur program Gapura Karomah yang macet
- Merancang kebijakan terkait pengelolaan dana investasi program Gapura Karomah untuk membantu PT. BPR dalam mengurangi NPL dari program Gapura Karomah

Rencana aksi yang diperlukan

- Koordinasi dan konsultasi dengan BPKAD dan PUPRP untuk memastikan proses perhitungan asset yang akan disertakan kepada BUMD PT. Air Minum Berkah Banua berjalan lancar
- Melakukan koordinasi dengan pihak inspektorat dan BPK untuk mengakomodir keinginan pimpinan untuk pemeriksaan kinerja manajemn PD. Baratala
- Rapat koordinasi setiap akhir triwulan





Rapat Koordinasi Pembinaan BUMD

SASARAN 3 Meningkatnya Pelaku UMKM yang Terfasilitasi Permodalan

Indikator : Persentase UMKM yang Terfasilitasi Permodalan

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
3	Meningkatnya Pelaku UMKM yang terfasilitasi permodalan	Persentase UMKM yang terfasilitasi permodalan	100%	100%	100%	Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam **Mengampu Misi ke-5** *"Membangun Sinergitas Yang Baik Antar Tingkat Pemerintahan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat"Masyarakat"*

Capaian indikator kinerja Bagian Perekonomian Adm Pembangunan dan SDA yang berikutnya yaitu Meningkatnya Pelaku UMKM yang Terfasilitasi Permodalan pada Tahun 2023 sebesar 100%, namun ada beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target tersebut antara lain :

- Adanya keterlambatan dana investasi untuk Tahun 2023 terlambat di cairkan kepada PT. BPR Tanah Laut, sehingga terlambat juga untuk disalurkan kepada calon debitur Gapura Karomah;
- Masih tingginya angka NPL yang berasal dari debitur Gapura Karomah membuat penyaluran program Gapura Karomah oleh BPR menjadi lebih berhati – hati.
- Masih adanya opini dari pihak BPK tentang kemungkinan terjadinya kerugian daerah akibat menunggaknya pembayaran cicilan program gapura karomah
- Dampak elnino yang mengakibatkan kemarau yang Panjang dan panas membuat penyaluran kredit dibidang pertanian kurang maksimal, baik Program Gapura Karomah maupun Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Rapat koordinasi dan monitoring secara berkala terhadap penyaluran dana program gapura karomah oleh PT. BPR Tanah Laut, namun masih mengutamakan prinsip kehati – hatian.
- Mengajukan perubahan regulasi penyaluran dana investasi program Gapura Karomah untuk menindaklanjuti temuan BPK dengan menambahkan klausul pengalihan resiko

kredit kepada PT. BPR dan penambahan masa pengelolaan dana invetasi untuk PT. BPR

- Melakukan koordinasi secara intens dengan SKPD untuk penambahan calon debitur yang akan di fasilitasi permodalan program Gapura Karomah pada anggaran perubahan agar tidak banyak lagi pelaku usaha mikro yang masuk daftar tunggu/*waiting list*.
- Melakukan pendampingan kepada PT. BPR dalam melakukan penagihan kepada debitur program gapura karomah sekaligus pembinaan pelaku usaha UMKM oleh SKPD teknis
- Rapat koordinasi Tim Monitoring dan Evaluasi penyaluran KUR di Kabupaten Tanah Laut

Rencana aksi yang diperlukan

- Memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi tim teknis dengan PT. BPR Tanah Laut tentang progress penyaluran kredit gapura karomah dan monitoring secara berkala terhadap penyaluran dana program gapura karomah
- Memfasilitasi terlaksananya rapat dan koordinasi kegiatan perubahan regulasi penyaluran dana investasi program Gapura Karomah untuk menindaklanjuti temuan BPK dengan menambahkan klausul pengalihan resiko kredit kepada PT. BPR dan penambahan masa pengelolaan dana invetasi untuk PT. BPR.
- Menyusun jadwal monitoring bersama tim teknis dan PT. BPR untuk kunjungan ke rumah debitur yang menunggak pembayaran.
- Memfasilitasi pelaksanaan Rapat koordinasi Tim Monitoring dan Evaluasi penyaluran KUR di Kabupaten Tanah Laut.





Rapat Koordinasi dengan SKPD Pembina UMKM

SASARAN 4 Meningkatnya Kualitas Manajemen Data Administrasi Pembangunan yang Proporsional

Indikator : Persentase SKPD yang Menyampaikan Laporan Progres Pembangunan Fisik

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya kualitas manajemen data administrasi pembangunan yang proporsional	Persentase SKPD yang menyampaikan laporan progres pembangunan fisik	85%	100%	100%	Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam **Mengampu Misi ke-5** *"Membangun Sinergitas Yang Baik Antar Tingkat Pemerintahan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat"Masyarakat"*

Capaian indikator kinerja Bagian Perekonomian Pembangunan yang terakhir yaitu Meningkatnya Kualitas Manajemen Data Administrasi Pembangunan yang Proporsional pada Tahun 2023 sebesar 100%, lebih tinggi dibandingkan dengan capaian Tahun 2022 yaitu 80%, namun ada beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target tersebut antara lain :

- Keterlambatan penyampaian laporan oleh SKPD;
- Data pelaporan yang diserahkan masih gabungan antara kegiatan pembangunan fisik dengan kegiatan pembangunan berupa renovasi.
- Alasan keterlambatan progress realisasi fisik penggunaan dana DAK masih kurang detail dan bersifat umum.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Melakukan desk kepada SKPD teknis untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan pembangunan fisik baik secara online maupun offline;
- Melakukan koordinasi dengan Bappeda untuk menyamakan data capaian realisasi pembangunan untuk pembangunan yang berasal dari APBD;
- Melakukan koordinasi secara berkala dan sewaktu – waktu yang diperlukan dengan Biro Adbang Provinsi Kalsel untuk menyamakan data dan update data pembangunan

Rencana aksi yang diperlukan

- Memfasilitasi pelaksanakan rapat koordinasi secara berkala

- Melaksanakan kunjungan untuk konsultasi dan koordinasi terkait pelaporan administrasi pembangunan dengan Biro Adbang provinsi Kalsel
- Menetapkan PIC tiap SKPD untuk pelaporan progress kinerja fisik





Rapat koordinasi Adm Pembangunan

❖ Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Dalam rangka untuk mencapai sasaran Meningkatnya kualitas penyelesaian permasalahan terkait Perekonomian dan Pembangunan Daerah dengan indikator Persentase kebijakan penyelesaian permasalahan terkait perekonomian dan pembangunan dilakukan rapat koordinasi internal Bagian Perekonomian, Adm Pembangunan dan SDA setiap akhir triwulan. Hal ini untuk memastikan capaian serapan anggaran berjalan sesuai rencana anggaran kas dan apabila ada kegiatan yang tidak mungkin dilaksanakan maka disepakati untuk digeser atau dihapus pada perubahan anggaran tahun berjalan.





Rapat Koordinasi Internal Bagian Perekonomian, Adm Pembangunan dan SDA

❖ **Analisa Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia**

Pada Tahun Anggaran 2023 Bagian Perekonomian, Adm Pembangunan dan Sumber Daya Alam mendapatkan pagu Rp 724.329.579,- terealisasi Rp 585.280.050,- dengan realisasi keuangan sebesar 80,80% dengan rincian sebagai berikut :

1) Untuk mencapai sasaran Meningkatnya penyelesaian permasalahan terkait Perekonomian dan Pembangunan Daerah dengan **Persentase penyelesaian permasalahan terkait perekonomian dan pembangunan** dan dengan Program Perekonomian dan Pembangunan, **Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian** dengan pagu Rp 237.426.710 terealisasi Rp 223.171.250 dengan realisasi keuangan sebesar 94% dan dilaksanakan oleh 2 (dua) orang Sumber Daya Manusia. Kegiatan Indikator ini dilaksanakan melalui rapat-rapat koordinasi dengan SKPD teknis lingkup koordinasi Bagian Perekonomian, Adm Pembangunand dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut. Efesiensi anggaran terjadi karana penurunan harga oleh penyedia pada kegiatan tertensu.
Untuk capaian kinerja terhadap IKU tersebut diatas adalah **98%** sedangkan untuk realisasi anggarannya sebesar **94%.** Dalam artian IKU ini telah berhasil dilaksanakan dengan efektif dan efisien dikarenakan capaian kinerjanya lebih besar daripada realisasi anggaran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI
98%	94%	4%

2) Untuk mencapai sasaran Meningkatnya BUMD yang sehat dan berdayasaing dengan **Indikator Persentase BUMD yang berkinerja positif** ditunjang dengan Program Perekonomian dan Pembangunan, Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian dengan pagu Rp 297.915.910 terealisasi Rp 190.315.020 dengan realisasi keuangan sebesar 63,88% dan dilaksanakan oleh 3 (tiga) orang Sumber

Daya Manusia. Kegiatan indikator ini tidak sepenuhnya terealisasi dikarenakan adanya sub kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan.

Untuk capaian kinerja terhadap IKU tersebut diatas adalah **95%** sedangkan untuk realisasi anggarannya sebesar **63,88%.** Dalam artian IKU ini telah berhasil dilaksanakan dengan efektif dan efisien dikarenakan capaian kinerjanya lebih besar daripada realisasi anggaran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI
95%	63,88%	31,12%

3) Untuk capaian sasaran Meningkatnya Pelaku UMKM yang terfasilitasi permodalan dengan Indikator **Persentase UMKM yang terfasilitasi permodalan** ditunjang dengan Program Perekonomian dan Pembangunan, Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian dengan pagu Rp 143.226.359 terealisasi Rp 126.616.528 dengan realisasi keuangan sebesar 88,40% dan dilaksanakan oleh 3 (tiga) orang Sumber Daya Manusia. Indikator kegiatan ini dilaksanakan melalui rapat-rapat koordinasi dengan SKPD teknis lingkup koordinasi Bagian Perekonomian Pembangunan dan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan perekonomian.

Untuk capaian kinerja terhadap IKU tersebut diatas adalah **100%** sedangkan untuk realisasi anggarannya sebesar **80.40%.** Dalam artian IKU ini telah berhasil dilaksanakan dengan efektif dan efisien dikarenakan capaian kinerjanya lebih besar daripada realisasi anggaran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini

CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI
100%	80.40%	11,60%

4) Untuk capaian sasaran Meningkatnya kualitas manajemen data administrasi pembangunan yang proporsional dengan Indikator **Persentase SKPD yang menyampaikan laporan progres pembangunan fisik** ditunjang dengan Program Perekonomian dan Pembangunan, Kegiatan Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan dengan pagu Rp 45.760.600 terealisasi Rp 45.177.252 dengan realisasi keuangan sebesar 98,73% dan dilaksanakan oleh 3 (tiga) orang Sumber Daya Manusia. Indikator kegiatan ini dilaksanakan melalui rapat-rapat koordinasi dengan SKPD teknis lingkup koordinasi Bagian Perekonomian Pembangunan dan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan perekonomian.

Untuk capaian kinerja terhadap IKU tersebut diatas adalah **100%** sedangkan untuk realisasi anggarannya sebesar **98,73%.** Dalam artian IKU ini telah berhasil dilaksanakan dengan efektif dan efisien dikarenakan capaian kinerjanya lebih besar daripada realisasi anggaran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini

CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI
100%	98,73%	1,27%

Tabel Indikator Kinerja dan Realisasi Program Perekonomian dan Pembangunan

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2023 (Rp)	%	SDM	Ket
1	Persentase penyelesaian permasalahan terkait perekonomian dan pembangunan	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**					
			- Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	237.426.710	223.171.250	94%	2 Orang	1 PNS dan 1 PTT
2	Persentase BUMD yang berkinerja positif		- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	297.915.910	190.315.020	63.88%	3 Orang	1 PNS dan 2 PTT
3	Persentase UMKM yang terfasilitasi permodalan		- Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	143.226.359	126.616.528	88.40%	3 Orang	2 PNS dan 1 PTT
4	Persentase SKPD yang menyampaikan laporan progres pembangunan fisik		**Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**					
			- Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	45.760.600	45.177.252	98.73%	3 Orang	2 PNS dan 1 PTT

4. Perbandingan Realisasi Capaian Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2023

Tabel Realisasi Capaian Sasaran Strategis

Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 dan Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS SESUAI RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2018-2023	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2022	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
1	2	3	4	5	6
Eselon II					
Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	82	90.44	89.99	109.75%
Inovasi publik yang diciptakan oleh SKPD	Jumlah inovasi SKPD yang didaftarkan	1	10	8	800%
Meningkatnya skor LPPD Kabupaten	Skor LPPD Kabupaten	ST 3,150	Nilai Belum Terbit	Nilai Belum Terbit	Nilai Belum Terbit
Meningkatnya Penerapan RB Pemerintah Daerah	Persentase SKPD dengan nilai RB minimal B	0	100	0	0
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Persentase SKPD dengan nilai SAKIP minimal BB	100	100	77,5	77,5%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	83	84.2	82	98.79%
	Nilai SPIP Sekretariat Daerah	3,7	Masih dalam tahap *Baseline* SPIP	Masih dalam tahap *Baseline* SPIP	Masih dalam tahap *Baseline* SPIP
Meningkatnya tata kelola Kepemerintahaan yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Nilai RB Sekretariat Daerah	92	92.59	Setda tidak termasuk RB tematik	Setda tidak termasuk RB tematik
	Nilai ZI Sekretariat Daerah	85	87.74	80.83	95.09%
Meningkatnya kebijakan perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang diterapkan	100%	100%	100%	100%

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2023*

SASARAN STRATEGIS SESUAI RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2018-2023	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2022	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
1	2	3	4	5	6
Eselon III					
Meningkatnya kualitas layanan umum dan Rumah Tangga Pimpinan dengan baik	Persentase layanan Pimpinan/Bagian/SKPD/ Masyarakatdengan baik	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang berhasil di tindaklanjuti	100%	76%	83.67%	83.67%
	Persentase kegiatan peringatan hari besar Nasional/Kabupaten yang diselenggarakan	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Persentase Penyelesaian Permasalahan pada Kegiatan Pemekaran Kecamatan	100%	-	100%	100%
Meningkatnya Pemenuhan IKK SKPD	Persentase Pemenuhan IKK SKPD	100%	95%	100%	100%
Meningkatnya Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak ke tiga	Persentase Dokumen Kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil ditindaklanjuti	100%	100%	208%	114%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase SKPD dengan nilai komponen pelaporan kinerja minimal 10	90%	97,5%	77.5%	77.5%
Meningkatnya Nilai Area Perubahan RB SKPD	Persentase SKPD dengan Nilai Komponen Area Perubahan RB minimal 60	40%	100%	0	0
Meningkatnya Penataan Ketatalaksanaan dan pelayanan publik	Persentase unit pelayanan dengan nilai SKM minimal 80	100%	100%	100%	100%
	Persentase SKPD yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	95%	100%	100%
Meningkatnya efektifitas kelembagaan analisa dan evaluasi jabatan	Persentase Perangkat daerah dengan kelembagaan yang efektif	100%	90%	0	0
Meningkatnya layanan administrasibidang perencanaan dan keuangan	Persentase layanan administrasi bidang perencanaan tepat waktu	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja dan keuangan lingkup Sekretariat Daerah	Persentase kualitas penyusunan pelaporan kinerja yang sesuai aturan	100%	100%	100%	100%

SASARAN STRATEGIS SESUAI RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2018-2023	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2022	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	83	84.2	82	98.79%
	Nilai SPIP Sekretariat Daerah	3,7	Masih dalam tahap *Baseline* SPIP	Masih dalam tahap *Baseline* SPIP	Masih dalam tahap *Baseline* SPIP
Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan sesuai aturan	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya pengelolaan Barang/Asset Lingkup Sekretariat Daerah Secara Tertib	Persentase layanan pada bagian-bagian lingkup Setda sarana prasarana/asset milik Setda terkelola dengan baik	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di bidang Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	Persentase Pelayanaan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di bidang Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya kualitas pengelolaan kepemerintahaan yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Nilai komponen area perubahaan Refromasi Birokrasi lingkup Sekretariat Daerah	91	92.59	Sekretariat Daerah tidak termasuk RB Tematik	Sekretariat Daerah tidak termasuk RB Tematik
	Nilai komponen area perubahaan Zona Integritas lingkup Sekretariat Daerah	84	87.74	80.83	95.09%
Meningkatnya kualitas layanan pengadaaan barang dan jasa lingkup Kabupaten Tanah Laut secara elektronik	Persentase paket pengadaan yang terlayani dalam proses pengadaan barang/jasa sesuai standard an tepat waktu	100%	110%	100%	100%
Meningkatnya SKPD melakukan pengadaan barang/jasa pemerintahan melalui system LPSE	Persentase SKPD yang melakukan pengadaan barang/jasa pemerintahaan melalui system LPSE	85%	117%	100%	100%
Meningkatnya Kompetensi SDM dalam Proses PBJ yang Berkualitas	Persentase SDM yang Kompeten dalam Pengadaan Barang/Jasa	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Efisiensi pagu Pengadaan Barang jasa	Persentase Efisiensi pagu Pengadaan Barang Jasa	100%	5%	228%	228%
Meningkatnya informasi produk hukum	Persentase informasi produk hukum	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya harmonisasi produk hukum	Persentase produk yang harmonis	100%	100%	100%	100%

SASARAN STRATEGIS SESUAI RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2018-2023	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2022	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
1	2	3	4	5	6
Tingkat penanganan kasus/perkara hukum di lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase kasus/perkara hukum yang tertangani	100%	100%	100%	100%
Nilai Pemenuhan Kepedulian HAM di Kabupaten Tanah Laut	Nilai Kabupaten/Kota Peduli HAM	75	Nilai 78,4	Nilai 81,95	107.82%
Meningkatnya layanan informasi penyelenggaraan pembangunan daerah dan komunikasi pimpinan, keprotokolan dan dokumentasi	Persentase penyebarluasan informasi/pemberitaan pembangunan pemerintahan daerah yang bisa diakses masyarakat melalui media	100%	100%	100%	100%
	Persentase kegiatan dokumentasi KDH/WKDH yang terlayani	100%	100%	100%	100%
	Persentase kegiatan KDH/WKDH/SKPD/ tamu daerah yang terlayani keprokolannya	100%	100%	100%	100%
	Persentase komunikasi pimpinan yang terfasilitasi	100%	0%	100%	100%
	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	0%	25%	25%
Meningkatnya Pembinaan Lembaga sosial dan keagamaan	Persentase Peningkataan Lembaga social dan keagamaan yang dibina	100%	99.64%	98.04%	98.04%
Meningkatnya layanaan bantuan social keagamaan	Persentase layanaan bantuan sosial keagamaan	100%	98.04%	98.09%	98.09%
Meningkatnya peran serta Organisasi/lembaga keagamaan/SKPD dalam Bidang Pemuda dan Olahraga	Persetanse hasil tindak lanjut koordinasi kegiatan bidang keagamaan, pemuda dan olahraga	100%	89.65%	83.01%	83.01%
Meningkatnya penyelesaian permasalahaan terkait Perekonomian dan Pembangunan Daerah	Persentase penyelesaian permasalahan terkait perekonomian dan pembangunan	100%	100 %	98%	98%
Meningkatnya BUMD yang sehat dan berdayasaing	Persentase BUMD yang berkinerja positif	75%	75%	95%	95%
Meningkatnya pelaku UMKM yang terfasilitasi permodalan	Persentase UMKM yang terfasilitasi permodalan	75%	75%	100%	100%
Meningkatnya kualitas manajemen data administrasi pembangunan yang proporsional	Persentase SKPD yang menyampaikan lapoaaran progres pembangunan fisik	80%	80%	100%	100%

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2023*

5. Laporan Pengukuran Kinerja Sekretariat Daerah Triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023

Laporan pengukuran kinerja Sekretariat Daerah dimaksudkan untuk memberikan gambaran dalam hal pencapaian kinerja untuk Triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini :

CAPAIAN IKU ESELON II

No	Kinerja Utama	Indikator	Capaian Tahun Lalu	Target	Realisasi					Capaian Tahun 2023	Target Akhir Renstra	Capaian 2023 terhadap target akhir Renstra (%)	Penanggung Jawab (Bagian)
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Realisasi Tahun 2023 (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(10/12)	14
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	90,44	82	20%	25%	25%	109.75%	89.98	109.75%	82	109.73%	Umum
2	Inovasi Publik yang diciptakan oleh SKPD	Jumlah inovasi SKPD yang didaftarkan	10	1	0	8 inovasi	8 inovasi	8 inovasi	8 inovasi	800%	1	800%	Organisasi
3	Meningkatnya skor LPPD Kabupaten	Skor LPPD Kabupaten	Nilai belum terbit dari KEMENDA GRI	ST 3,150	Nilai belum terbit dari KEMENDA GRI	Nilai belum terbit dari KEMENDA GRI	Nilai belum terbit dari KEMENDA GRI	Nilai belum terbit dari KEMENDA GRI	Nilai belum terbit dari KEMENDA GRI	Nilai belum terbit dari KEMENDA GRI	-	-	Pemerintahan
4	Meningkatnya Penerapan RB Pemerintah Daerah	Persentase SKPD dengan nilai RB minima B	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Organisasi
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Persentase SKPD dengan nilai SAKIP minimal BB	100%	100	0	0	77.5%	0	77.5%	77.5%	100%	0	Organisasi
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	84,2	83	0	82	82	82	82	98.79%	83	98.79%	Perencanaan dan Keuangan
		Nilai SPIP Sekretariat Daerah	Masih dalam tahap *Baseline* SPIP	3,7	Masih dalam tahap *Baseline* SPIP	Masih dalam tahap *Baseline* SPIP	Masih dalam tahap *Baseline* SPIP	Masih dalam tahap *Baseline* SPIP	Masih dalam tahap *Baseline* SPIP	Masih dalam tahap *Baseline* SPIP	-	-	Perencanaan dan Keuangan
7	Meningkatnya tata kelola kepemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Nilai RB Sekretariat Daerah	92.59	92	21%	47%	47%	47%	Sekretariat Daerah tidak termasuk RB Tematik	Sekretariat Daerah tidak termasuk RB Tematik	92	-	Umum
		Nilai ZI Sekretariat Daerah	87.74	85	20%	80.83	-	-	80.83	95.09%	85	95.09%	Umum

No	Kinerja Utama	Indikator	Capaian Tahun Lalu	Target	Realisasi					Capaian Tahun 2023	Target Akhir Renstra	Capaian 2023 terhadap target akhir Renstra (%)	Penanggung Jawab (Bagian)
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Realisasi Tahun 2023 (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(10/12)	14
8	Meningkatnya Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang diterapkan	100%	100%	25%	55%	77%	100%	100%	100%	100%	100%	Perekonomian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2023*

CAPAIAN IKU ESELON III

No	Kinerja Utama	Indikator	Capaian Tahun Lalu	Target	REALISASI					Capaian Tahun 2023	Target Akhir Renstra	Capaian 2023 terhadap target akhir Renstra (%)	Penanggung Jawab
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Realisasi %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= (10/12)	14
1	Meningkatnya kualitas layanan umum dan Rumah Tangga Pimpinan dengan baik	Persentase layanan Pimpinan/Bagian/ SKPD/Masyarakat dengan baik	100%	100%	25%	25%	25%	100%	100%	100%	100%	100%	Umum
2	Meningkatnya Pengelolaan Barang/Aset Lingkup Sekretariat Daerah Secara Tertib	Persentase layanan pada bagian-bagian lingkup Setda sarana prasarana/asset milik Setda terkelola dengan baik	100%	100%	25%	25%	25%	100%	100%	100%	100%	100%	Umum
3	Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Kebijakan Pemantau dan Evaluasi di bidang Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	Persentase Pelayanaan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	100%	100%	0%	25%	25%	100%	100%	100%	100%	100%	Umum
4	Meningkatkan kualitas pengelolaan kepemerintahaan yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Nilai komponen area perubahan Reformasi Birokrasi lingkup Sekretariat Daerah	101.7%	92	0	50	50	Sekretariat Daerah tidak termasuk RB Tematik	Sekretariat Daerah tidak termasuk RB Tematik	Sekretariat Daerah tidak termasuk RB Tematik	92	-	Umum

No	Kinerja Utama	Indikator	Capaian Tahun Lalu	Target	REALISASI					Capaian Tahun 2023	Target Akhir Renstra	Capaian 2023 terhadap target akhir Renstra (%)	Penanggung Jawab
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Realisasi %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= (10/12)	14
		Nilai komponen area perubahaan Zona Integritas lingkup Sekretariat Daerah	104.4%	85	0	50	50	80.83	80.83	95.09%	85	95.09%	Umum
5	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang berhasil di tindaklanjuti	76%	100%	25%	25%	16.23%	22.44%	83.67%	83.67%	100%	83.67%	Pemerintahan
		Persentase kegiatan peringatan hari besar Nasional/ Kabupaten yang diselenggarakan	111,11%	100%	0	0	15.11%	84.89%	100%	100%	100%	100%	Pemerintahan
6	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Persentase Penyelesaian Permasalahan pada Kegiatan Pemekaran Kecamatan	-	100%	0	25%	14.11%	60.89%	100%	100%	100%	100%	Pemerintahan
7	Meningkatnya Pemenuhan IKK SKPD	Persentase Pemenuhan IKK SKPD	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pemerintahan
8	Meningkatnya Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak ke tiga	Persentase Dokumen Kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil ditindaklanjuti	100%	100%	25.00%	50%	58%	75%	208%	208%	100%	208%	Pemerintahan
9	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase SKPD dengan nilai komponen pelaporan kinerja minimal 10	108,33%	100%	0	0	80%	0	80%	80%	100%	80%	Organisasi
10	Meningkatnya Nilai Area Perubahan RB SKPD	Persentase SKPD dengan Nilai Komponen Area Perubahan RB Minimal 60	250%	50%	0	0	0	0	0	0	50%	0	Organisasi
11	Meningkatnya Penataan Ketatalaksanaan dan pelayanan publik	Persentase unit pelayanan dengan nilai SKM minimal 80	100%	100%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	100%	100%	Organisasi
		Persentase SKPD yang memiliki	95%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	Organisasi

No	Kinerja Utama	Indikator	Capaian Tahun Lalu	Target	REALISASI					Capaian Tahun 2023	Target Akhir Renstra	Capaian 2023 terhadap target akhir Renstra (%)	Penanggung Jawab
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Realisasi %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= (10/12)	14
		Standar Operasional Prosedur (SOP)											
12	Meningkatnya efektifitas kelembagaan analisa dan evaluasi jabatan	Persentase Perangkat daerah dengan kelembagaan yang efektif	90%	100%	0	0	0	0	0	0	100%	0	Organisasi
13	Meningkatnya layanan administrasibidang perencanaan dan keuangan	Persentase layanan administrasi bidang perencanaan tepat waktu	100%	100%	57%	60%	72%	100%	100%	100%	100%	100%	Perencanaan dan Keuangan
14	Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja dan keuangan lingkup Sekretariat Daerah	Persentase penyusunan pelaporan kinerja yang sesuai aturan	100%	100%	25%	50%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	Perencanaan dan Keuangan
15	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	101.44%	83	0%	82	82	82	82	98.79%	83	98.79%	Perencanaan dan Keuangan
		Nilai SPIP Sekretariat Daerah	Masih Tahap *Baseline SPIP* Terintegrasi	3,7	-	-	-	-	-	-	3.7	-	Perencanaan dan Keuangan
16	**Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah**	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan sesuai aturan	100%	100%	25%	50%	75%	94%	94%	94%	100%	94%	Perencanaan dan Keuangan
17	Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa lingkup Kabupaten Tanah Laut secara elektronik	Persentase paket pengadaan yang terlayani dalam proses pengadaan barang/jasa sesuai standar dan tepat waktu	110%	100%	20.0%	45%	66.7%	100%	100%	100%	100%	100%	Pengadaan Barang/Jasa
18	Meningkatnya SKPD melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem LPSE	Persentase SKPD yang melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem LPSE	142,6%	100%	30.0%	43%	93%	100%	100%	100%	100%	100%	Pengadaan Barang/Jasa

No	Kinerja Utama	Indikator	Capaian Tahun Lalu	Target	REALISASI					Capaian Tahun 2023	Target Akhir Renstra	Capaian 2023 terhadap target akhir Renstra (%)	Penanggung Jawab
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Realisasi %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= (10/12)	14
19	Meningkatnya Kompetisi SDM dalam Proses PBJ yang Berkualitas	Persentase SDM yang Kompeten dalam Pengadaan Barang/Jasa	100%	100%	0.0%	32%	86%	100%	100%	100%	100%	100%	Pengadaan Barang/Jasa
20	Meningkatnya Efisiensi pagu Pengadaan Barang jasa	Persentase Efisiensi pagu Pengadaan Barang Jasa	179%	100%	25%	50%	82%	71%	228%	228%	100%	228%	Pengadaan Barang/Jasa
21	Meningkatnya informasi produk hukum	Persentase informasi produk hukum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Hukum
22	Meningkatnya harmonisasi produk hukum	Persentase produk yang harmonis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Hukum
23	Tingkat penanganan kasus/perkara hokum di lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase kasus/perkara hukum yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Hukum
24	Nilai Pemenuhan Kepedulian HAM di Kabupaten Tanah Laut	Nilai Kabupaten/Kota Peduli HAM	104,5%	76	-	-	-	Nilai 81,95	Nilai 81,95	107.82%	Nilai 76	107.82%	Hukum
25	Meningkatnya layanan informasi penyelenggaraan pembangunan daerah dan komunikasi pimpinan, keprotolan dan dokumentasi	Persentase penyebarluasan informasi/ pemberitaan pembangunan pemerintahan daerah yang bisa diakses masyarakat melalui media	100%	100%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	100%	100%	100%	100%	Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		Persentase kegiatan dokumentasi KDH/WKDH yang terlayani	100%	100%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	100%	100%	100%	100%	Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		Persentase kegiatan KDH/WKDH SKPD/ tamu daerah yang terlayani keprokolannya	100%	100%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	100%	100%	100%	100%	Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		Persentase komunikasi pimpinan yang terfasilitasi	0%	100%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	100%	100%	100%	100%	Protokol dan Komunikasi Pimpinan

No	Kinerja Utama	Indikator	Capaian Tahun Lalu	Target	REALISASI					Capaian Tahun 2023	Target Akhir Renstra	Capaian 2023 terhadap target akhir Renstra (%)	Penanggung Jawab
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Realisasi %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= (10/12)	14
		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	0	100%	25.0%	0.0%	0%	0.0%	25%	25%	100%	25%	Protokol dan Komunikasi Pimpinan
26	Meningkatnya Pembinaan Lembaga sosial dan keagamaan	Persentase Peningkataan Lembaga sosial dan keagamaan yang dibina	76,67%	100%	16%	16%	66.67%	98.04%	98.04%	98.04%	100%	98.04%	Kesejahteraan Rakyat
27	Meningkatnya layanaan bantuan social keagamaan	Persentase layanaan bantuan sosial keagamaan	93,63%	100%	14%	14%	92.79%	98.09%	98.09%	98.09%	100%	98.09%	Kesejahteraan Rakyat
28	Meningkatnya peran serta Organisasi/lembaga keagamaan/SKPD dalam Bidang Pemuda dan Olahraga	Persetanse hasil tindak lanjut koordinasi kegiatan bidang keagamaan, pemuda dan olahraga	89.65%	100%	5%	5%	80%	83.01%	83.01%	83.01%	100%	83.01%	Kesejahteraan Rakyat
29	Meningkatnya penyelesaian permasalahaan terkait Perekonomian dan Pembangunan Daerah	Persentase penyelesaian permasalahan terkait perekonomian dan pembangunan	100%	100%	25%	60%	75%	98%	98%	98%	100%	98%	Perekonomian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam
30	Meningkatnya BUMD yang sehat dan berdayasaing	Persentase BUMD yang berkinerja positif	100%	100%	25%	55%	55%	95%	95%	95%	100%	95%	Perekonomian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam
31	Meningkatnya pelaku UMKM yang terfasilitasi permodalan	Persentase UMKM yang terfasilitasi permodalan	100%	100%	25%	40%	85%	100%	100%	100%	100%	100%	Perekonomian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam
32	Meningkatnya kualitas manajemen data administrasi pembangunan yang proporsional	Persentase SKPD yang menyampaikan laporan progres pembangunan fisik	100%	85%	25%	55%	85%	100%	100%	100%	85%	100%	Perekonomian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam

CAPAIAN IKU ESELON IV

No	Kinerja Utama	Indikator	Capaian Tahun Lalu	Target	REALISASI					Capaian Tahun 2023	Target Akhir Renstra	Capaian 2023 terhadap target akhir Renstra (%)	Penanggung Jawab
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Realisasi %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(10/12)	14
1	Melaksanakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana/aset Sekretariat Daerah	Jumlah sarana dan prasarana/aset milik Setda yang terpelihara dan terkelola dengan baik	100%	614 Jenis	**150 Jenis**	**150 Jenis**	**150 Jenis**	**614 Jenis**	**614 Jenis**	**100%**	614 Jenis	**100%**	Umum
2	Melaksanakan Pelayanan Urusan pimpinan/Bagian/SKPD/ dan Masyarakat	Jumlah layanan pimpinan/Bagian/ SKPD dan Masyarakat terlayani dengan baik	100%	70.822 Ok	17705 Ok	17705 Ok	17705 Ok	70822 Ok	70822 Ok	100%	70.822 Ok	100%	Umum
3	Melaksanakan Pelayanan bidang transportasi, konsumsi dan gedung pertemuan di Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah layanan transportasi, konsumsi dan gedung pertemuan di Lingkup Sekretariat Daerah terlayani dengan baik	100%	100	25%	25%	25%	100%	100%	100%	100	100%	Umum
4	Melaksanakan pengadaan aset di Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah aset yang didistribusikan di Lingkup Sekretariat Daerah	100%	91 Jenis	22 Jenis	22Jenis	22Jenis	91Jenis	91Jenis	100%	91 Jenis	100%	Umum
5	Melaksanakan Pengelolaan, Pencatatan Aset dan Penghapusan aset di Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah aset Sekretariat Daerah yang terkelola dan tercatat dengan baik	81%	2.468 Jenis	617Jenis	617 Jenis	617 Jenis	2468 Jenis	2468 Jenis	100%	2.468 Jenis	100%	Umum
6	Melaksanakan Rumusan Analisa Kebutuhan Barang di Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah dokumen analisa kebutuhan barang berupa rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) sesuai standar dan kebutuhan di lingkup Sekretariat Daerah	100%	9 Dokumen	0 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	100%	9 Dokumen	100%	Umum

No	Kinerja Utama	Indikator	Capaian Tahun Lalu	Target	REALISASI					Capaian Tahun 2023	Target Akhir Renstra	Capaian 2023 terhadap target akhir Renstra (%)	Penanggung Jawab
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Realisasi %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(10/12)	14
7	Memberikan pelayanan Surat Menyurat lingkup SKPD dan Setda sesuai SOP	Jumlah SKPD/Bagian lingkup Setda yang terlayani administrasi surat menyurat	100%	40 SKPD dan 9 Bagian	1.699 surat	1.225 surat	1400 surat	1.533 surat	5.827 surat		40 SKPD dan 9 Bagian		Umum
8	Memberikan pelayanan Administrasi Kepegawaian lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah administrasi kepegawaian lingkup Sekretariat Daerah yang terselesaikan	104%	250 Kali	65 Kali	65Kali	65Kali	260Kali	260Kali	104%	250 Kali	104%	Umum
9	Memberikan pelayanan Administrasi Pimpinan lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi pimpinan daerah (KDH/WKDH/ Sekda)	108%	250 Kali	26 kali	93 kali	71 kali	60 kali	250 kali	100%	250 Kali	100%	Umum
10	Pengelolaan dan penyimpanan arsip lingkup Setda	Jumlah arsip yang terkelola sesuai SOP	97%	3.500 Surat	1.072 surat	800 surat	800 surat	1.100 surat	3.772 surat	107%	3.500 Surat	107%	Umum
11	Melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah dokumen area perubahan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	100%	126 Dokumen	16 Dokumen	37 Dokumen	37 Dokumen	36 Dokumen	126 Dokumen	100%	126 Dokumen	100%	Umum
12	Melaksanakan Zona Integritas di lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah dokumen area perubahan Zona Integritas lingkup Sekretariat Daerah	100%	96 Dokumen	20 Dokumen	76 Dokumen	-	-	96 Dokumen	100%	96 Dokumen	100%	Umum
13	Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai standar dan tepat waktu	Jumlah terlaksanakannya kegiatan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai standar dan tepat waktu	110%	150 Paket	30 Paket	68 Paket	100 Paket	249 Paket	249 Paket	166%	150 Paket	166%	Pengadaan Barang/Jasa
14	Memfasilitasi pendampingan SKPD dalam perencanaan pengadaan dan pengelolaan kontrak	Jumlah fasilitasi SKPD yang didampingi dalam perencanaan pengadaan dan pengelolaan kontrak	100%	40 SKPD	40 SKPD	17 SKPD	40 SKPD	40 SKPD	40 SKPD	100%	40 SKPD	100%	Pengadaan Barang/Jasa

No	Kinerja Utama	Indikator	Capaian Tahun Lalu	Target	REALISASI					Capaian Tahun 2023	Target Akhir Renstra	Capaian 2023 terhadap target akhir Renstra (%)	Penanggung Jawab
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Realisasi %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(10/12)	14
15	Kegiatan keprotokolan KDH/WKDH yang terlayani	Jumlah kegiatan KDH/WKDH yang terlayani keprotokolannya	100%	360 Kali	90 Kali	90 Kali	90 Kali	90 Kali	360 Kali	100%	360 Kali	100%	Protokol dan Komunikasi Pimpinan
16	Pelayanan tamu KDH/WKDH yang terlayani	Jumlah tamu KDH/WKDH yang terlayani dengan baik	100%	24 Kali	2 Kali	2 Kali	6	6	16 Kali	66%	24 Kali	66%	Protokol dan Komunikasi Pimpinan

6. Rencana Aksi dan Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah Triwulan I s.d Triwulan IV Tahun 2023

Dalam rangka pemantauan Rencana Aksi yang dilaksanakan untuk mengendalikan kinerja, maka dilakukan perbaikan dan pemantauan atas Rencana Aksi dari Triwulan I s.d Triwulan IV. (Tabel Rencana Aksi dan Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah Triwulan I s.d Triwulan IV Tahun 2023 terlampir)

B. Akuntabilitas Keuangan

1. Anggaran dan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023

Tahun Anggaran 2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut memperoleh anggaran yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sebesar **Rp. 85.460.903.356**

Tabel Anggaran Belanja Operasi, Belanja Modal dan Realisasi APBD
Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2023

NO	BAGIAN	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	CAPAIAN %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pemerintahan	1.503.669.876	1.366.611.561	90.89%
2	Hukum	2.229.556.766	1.625.809.811	72.92%
3	Organisasi	522.274.530	435.682.009	83.42%
4	Perekonomian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam	724.329.579	585.280.050	80.80%
5	Pengadaan Barang dan Jasa	1.392.152.439	1.084.222.634	77.88%
6	Kesejahteraan Rakyat	34.804.336.890	33.317.495.150	95.73%
7	Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.329.521.582	1.217.231.423	91.55%
8	Umum	19.532.460.840	18.325.249.158	93.82%
9	Perencanaan dan Keuangan	23.422.600.854	20.893.126.951	89.20%
	JUMLAH	**85.460.903.356**	**78.850.708.747**	**92.27%**

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2023*

Anggaran Belanja Tahun 2023 ini dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung Tupoksi Sekretariat Daerah yang terdiri dari 3 (tiga) Program, 18 (Delapan Belas) Kegiatan dan 47 (Empat Puluh Tujuh) Sub Kegiatan

Tabel Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	CAPAIAN %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	**PENDAPATAN**	**110.000.000**	**121.675.000**	**110,61**
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	**110.000.000**	**121.675.000**	**110,61**
	Pendapatan Restribusi Daerah	110.000.000	121.675.000	110,61
	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
2	**BELANJA**	**85.460.903.356**	**78.850.708.747**	**92,27**
	BELANJA OPERASI	**84.372.183.096**	**77.828.908.691**	**92,24**
	Belanja Pegawai	23.371.528.791	20.854.190.451	89,23
	Belanja Barang dan Jasa	51.880.654.305	8.797.986.464	92,86
	Belanja Hibah	9.120.000.000	8.797.986.464	96,47
3	**BELANJA MODAL**	**1.088.720.260**	**1.021.800.056**	**93,85**
	Belanja Peralatan dan Mesin	1.088.720.260	1.021.800.056	93,85
	Belanja Bangunan dan Gedung	-	-	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	
	Jumlah Belanja	**85.460.903.356**	**78.850.708.747**	**92,27**
	SURPLUS/ (DEFISIT)	**(85.350.903.356)**	**78.729.033.747)**	**92,24**

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2023*

Untuk Anggaran Pendapatan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2023 dari target **Rp 110.000.000,00** terealisasi sebesar **Rp 121.675.000,00.**

2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Tahun Anggaran 2023 Sekretariat Daerah telah melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan DPA SKPD Tahun Anggaran 2023, dengan total anggaran sebesar Rp 85.460.903.356,- dengan jumlah Program 3 (Tiga) 18 (Delapan Belas) Kegiatan dan 47 (Empat Puluh Tujuh) Sub Kegiatan. Terkait realisasi keuangan atas pelaksanaan sasaran dan program dapat dilihat pada tabel berikut ini :

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2023 (RP)	RP (%) REALISASI 2023	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5		4
Meningkatnya layanan administrasi bidang perencanaan	Persentase layanan administrasi Bidang Perencanaan	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Kegiatan Perancanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			Bagian Perencanaan dan Keuangan
			- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.862.989	15.696.200	
Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja lingkup Sekretariat Daerah	Persentase kualitas penyusunan pelaporan kinerja yang sesuai aturan		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			
			- Sub Kegiatan Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	22.661.218.512	20.183.402.971	
Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan sesuai aturan		- Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	15.209.545	11.175.600	
			Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
			- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	710.310.279	670.787.480	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			
	Nilai SPIP Sekretariat Daerah		- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.999.529	12.064.700	
Meningkatnya Akuntabilitas ,inerja Instansi Pemerintah	Persentase SKPD dengan nilai Komponen	**Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**Kegiatan Penataan Organisasi**			Bagian Organisasi

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2023 (RP)	RP (%) REALISASI 2023	PENANGGUNG JAWAB
	Pelaporan Kinerja Minimal 10					
Meningkatnya Nilai Area Perubahan RB SKPD	Persentase SKPD dengan Nilai Komponen Area Perubahan RB minimal 60		Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	295.047.321	254.588.847	
Meningkatnya Penataan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	Persentase Unit Pelayanan dengan Nilai SKM Minimal 80		**Kegiatan Penataan Organisasi**			
	Persentase SKPD yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)		Sub Kegiatan Fasilitasi pelayanan publik dan tatalaksana	124.754.512	85.217.862	
Meningkatnya Efektifitas Kelembagaan Analisa dan Evaluasi Jabatan	Persentase Perangkat Daerah dengan Kelembagaan yang efektif		**Kegiatan Penataan Organisasi**			
			Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	102.472.697	95.875.300	
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang berhasil di tindaklanjuti	**Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan**			Bagian Pemerintahan
	Persentase Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional/Kabupaten yang diselenggarakan		Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	671.925.147	638.602.000	
Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Persentase Penyelesaian Permasalahan pada Kegiatan Pemekran Kecamatan		**Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan**			
			Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	270.501.270	217.838.271	
Meningkatnya Pemenuhan IKK SKPD	Persentase Pemenuhan IKK SKPD		**Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan**			
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	301.768.194	271.381.868	

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2023 (RP)	RP (%) REALISASI 2023	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga	Persentase dokumen Kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil ditindaklanjuti		**Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah**			
			Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	259.475.265	238.789.422	
Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan barang dan jasa Lingkup Kabupaten Tanah Laut secara Elektronik	Persentase Paket Pengadaan yang terlayani dalam pengadaaan barang/jasa sesuai standar dan tepat waktu	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa**			Bagian Pengadaan Barang/Jasa
Meningkatnya SKPD melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui system LPSE	Persentase SKPD yang melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui system LPSE		Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	670.026.599	442.424.156	
Meningkatnya Kompetensi SDM dalam proses PBJ yang berkualitas	Persentase SDM yang kompeten dalam Pengadaan Barang/Jasa		**Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa**			
			Sub Kegiatan Pengelolaan layanan Pengadaan Secara Elektronik	285.598.545	279.597.500	
Meningkatnya Efisiensi pagu Pengadaan Barang Jasa	Persentase Efisiensi pagu Pengadaan Barang Jasa		**Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa**			
			Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	436.527.295	362.200.978	
Meningkatnya Informasi Produk Hukum	Persentase Informasi Produk Hukum	**Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat**	**Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**			Bagian Hukum
			Sub Kegaiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	388.429.596	313.830.296	
Meningkatnya Harmonisasi Produk Hukum	Persentasi Produk Hukum yang harmonis		**Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**			
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	902.546.592	734.031.291	
Tingkat Penanganan kasus/perkara hukum di Lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase kasus/perkara hukum yang tertangani		**Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**			

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2023 (RP)	RP (%) REALISASI 2023	PENANGGUNG JAWAB
Nilai Pemenuhan Kepedulian HAM di Kabupaten Tanah Laut	Nilai Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM)		Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	938.580.578	577.948.224	
Meningkatnya Layanan Informasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah dan Komunikasi Pimpinan, Keprotokolan dan Dokumentasi.	Persentase Penyebarluasan Informasi/Pemberitaan Pembangunan Pemerintah Daerah yang bisa diakses masyarakat melalui media	**Program Penunjang Urusan Pemda Kabupaten/Kota**	**Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**			Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
	Persentase Komunikasi Pimpinan yang terfasilitasi		Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	376.842.278	349.788.200	
	Persentase Pengaduan masyarakat yang di tindaklanjuti					
	Persentase Kaegiatan dokumentasi KDH/WKDH yang terlayani		Sub Kegiatan Fasilitasi Pendokumentasian Tugas Pimpinan	465.528.744	422.330.100	
	Persentase Kegiatan KDH/WKDH/SKPD/Tamu daerah yang terlayani Keprotokolannya		Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	487.150.560	445.113.123	
Meningkatnya Kaulitas Layanan Umum dan Rumah Tangga Pimpinan dengan Baik	Persentase Layanan Pimpinan/Bagian/SKPD/ Masyarakat dengan baik	**Program Penunjang Urusan Pemda Kabupaten/Kota**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**			Bagian Umum
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.814.600.000	4.457.108.602	
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	358.211.281	346.788.077	
Meningkatnya Pengelolaan Barang/Asset Lingkup Sekretariat Daerah secara tertib	Persentase Layanan pada Bagian-bagian lingkup Setda sarana prasarana/asset milik Sekretariat Daerah terkelola dengan Baik		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**			
			Sub Kegiatan Peyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bagunan Kantor	86.709.585	82.066.500	
			Kegiatan Peyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2023 (RP)	RP (%) REALISASI 2023	PENANGGUNG JAWAB
			Sub Kegiatan Peyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.129.581.560	1.840.270.201	
			Sub Kegiatan Peyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.695.189.983	3.628.988.218	
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
			Sub Kegiatan Peyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	329.793.000	326.865.589	
			Sub Kegiatan Peyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	1.746.620.000	1.746.410.598	
			Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	358.211.281	346.788.077	
Meningkatnya kualitas pelaksanaan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di Bidanf Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	Persentase Pelaksanaaan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian		**Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**			
			Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	138.379.817	120.782.250	
			Kegiatan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat daerah			
			Sub Kegian Pemulangan Pegawai yang Meninggal Dunia Dalam Melaksanakan Tugas	30.000.000	0	
			Kegiatan Adminstrasi Umum Perangkat daerah			
			Sub Kegiatan Peyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.814.600.000	4.457.108.602	
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.129.581.560	1.840.270.201	
Meningkatnya kualitas pengelolaan kepemerintahan	Nilai Komponen Area Perubahan Reformasi		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**			

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2023 (RP)	RP (%) REALISASI 2023	PENANGGUNG JAWAB
yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Birokrasi Lingkup Sekretariat Daerah					
	Nilai Komponen Area Perubahan Zona Integritas Lingkup Sekretariat		Sub Kegiatan Peyediaan barang cetakan dan Penggandaan	67.624.914	60.410.990	
			Kegiatan Peyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
			Sub Kegiatan Peyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.674.000.000	1.590.715.747	
			Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			
			Sub Kegiatan Peyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	789.940.000	681.221.000	
			Sub Kegiatan Peyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	419.990.000	343.384.000	
			Sub Kegiatan Penyedia Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah	1.490.570.000	1.451.080.850	
Meningkatnya Pembinaan Lembaga Sosial dan keagamaan	Persentase peningkatan Lembaga sosial dan keagamaan yang dibina	**Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**			Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluas, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	9.285.373.530	8.921.864.464	
Meningkatnya Layanan Bantuan sosial keagamaan	Persentase layanan bantuan sosial keagamaan		Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	21.392.598.317	20.972.958.226	
Meningkatnya peran serta Organisasi /Lembaga Keagamaan /SKPD dalam Bidang Pemuda dan Olahraga	Persentase hasil tindak lanjut koordinasi kegiatan bidang keagamaan, pemuda dan olahraga		Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	4.126.365.043	3.422.672.460	
Meningkatnya Penyelesaian Permasalahan terkait	Persentase Penyelesaian Permasalahan terkait	**Program Perekonomian dan Pembangunan**	**Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**			Bagian Perekonomian,

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2023 (RP)	RP (%) REALISASI 2023	PENANGGUNG JAWAB
Perekonomian dan Pembangunan Daerah	Perekonomian dan Pembangunan		Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	237.426.710	223.171.250	Administrasi Pembangunan dan SDA
Meningkatnya BUMD yang sehat dan berdayasaing	Persentase BUMD yang berkinerja Positif		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	297.915.910	190.315.020	
Meningkatnya Pelaku UMKM yang terfasilitasi Permodalan	Persentase UMKM yang Terfasilitasi Permodalan		Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	143.226.359	126.616.528	
Meningkatnya Kualitas Manajemen data administrasi pembangunan yang proporsional	Persentase SKPD yang menyampaikan Laporan Progres Pembangunan fisik		**Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**			
			Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	45.760.600	45.177.252	

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2023*

3. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023

Untuk anggaran belanja program dan kegiatan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp. 76.807.742.632,-,-** dengan capaian realisasi sebesar **Rp 71.688.787.342,- (93.32%)**, sedangkan untuk anggaran belanja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp 85.460.903.356,-** dengan capaian realisasi sebesar **Rp 78.850.708.747,- (92.27%)**. Perbandingan anggaran dan realisasi tersebut di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel Perbandingan Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023

No	Program/Kegiatan Tahun 2022	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023	Anggaran (Rp)		% Realisasi	
			2022	2023	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bagian Pemerintahan						
	PROGRAM PEMERITAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT **Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan**	**PROGRAM PEMERITAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** **Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan**	1.137.238.122	1.244.194.611	**75%**	**90.65%**
	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	712.494.262	671.925.147	68%	95.04%
	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	264.455.080	270.501.270	91%	80.53%
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	160.288.780	301.768.194	98%	89.93%
	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	**Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**104.510.650**	**259.475.265**	**85%**	**92.03%**
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	104.510.650	259.475.265	85%	92.03%
Bagian Organisasi						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA **Kegiatan Penataan Organisasi**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA** **Kegiatan Penataan Organisasi**	**272.899.875**	**522.274.530**	**76%**	**83.42%**
	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	78.260.873	102.472.697	67%	93.56%
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	97.524.800	124.754.512	83%	68.31%
	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	97.114.202	295.047.321	79%	86.92%
Bagian Hukum						
	PROGRAM PEMERITAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT **Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Hukum**	**PROGRAM PEMERITAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** **Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Hukum**	**1.038.558.036**	**2.229.556.766**	**70%**	**72.92%**

No	Program/Kegiatan Tahun 2022	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023	Anggaran (Rp)		% Realisasi	
			2022	2023	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	688.762.976	902.546.592	73%	81.33%
	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	135.148.400	938.580.578	47%	61.58%
	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	214.646.660	388.429.596	84%	80.79%
Bagian Pengadaan Barang/Jasa						
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN **Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** **Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**902.460.388**	**1.392.152.439**	**88%**	**77.88%**
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	323.443.651	670.026.599	90%	66.03%
	Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	261.865.500	285.598.545	93%	97.90%
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	317.151.237	436.527.295	82%	82.97%
Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam						
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN **Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** **Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**402.063.900**	**678.568 .979**	**90%**	**79.59%**
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	199.106.900	297.915.910	82%	63.88%
	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	-----	143.226.359		88.40%
	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	202.957.000	237.426.710	99%	94%
	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	**Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**151.229.000**	**45.760.600**	93%	98.73%
	Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	151.229.000	45.760.600	93%	98.73%
Bagian Kesejahteraan Rakyat						

No	Program/Kegiatan Tahun 2022	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023	Anggaran (Rp)		% Realisasi	
			2022	2023	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	PROGRAM PEMERITAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT **Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**PROGRAM PEMERITAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** **Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**30.010.245.492**	**34.804.336.890**	**97%**	**95.73%**
	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Metal Spritual	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Metal Spritual	7.016.683.200	9.285.373.530	100%	96.09%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	20.036.513.850	21.392.598.317	98%	98.04%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	2.957.048.442	4.126.365.043	90%	82.95%
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA **Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA** **Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**986.485.397**	**1.329.521.582**	**93%**	**91.55%**
	Sub Kegiatan Fasilitas Keprotokolan	Sub Kegiatan Fasilitas Keprotokolan	283.644.476	487.150.560	95%	91.37%
	Sub Kegiatan Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Sub Kegiatan Fasilitas Komunikasi Pimpinan	293.624.956	376.842.278	**92%**	**92.82%**
	Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	409.215.965	465.528.744	94%	90.72%
Bagian Umum						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**				
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Sub Kegiatan Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	0	0	**0%**	**0%**
	Sub Kegiatan Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas		0		0%	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		3.850.000		5%	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**				

No	Program/Kegiatan Tahun 2022	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023	Anggaran (Rp)		% Realisasi	
			2022	2023	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	111.428.500	86.705.585	94%	94.65%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	136.285.050	1.299.159.669	86%	93.56%
	Sub Kegiatan Penyedia Bahan Logistik Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	274.139.580	124.240.667	82%	77.71%
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan	90.657.000	67.624.914	94%	89.33%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	18.000.000	15.000.000	**45%**	**98.80%**
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	17.650.000	16.200.000	24%	38.73%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Konsultasi SKPD	2.914.160.260	4.814.600.000	99%	92.57%
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**75.491.358**		91%	
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		75.491.358		91%	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**5.385.035.933**	**7.498.771.543**	92%	94.15%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.403.273.421	1.674.000.000	83%	95.02%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	441.292.000	2.129.581.560	83%	86.41%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.540.470.512	3.695.189.983	98%	98.21%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**3.617.023.828**	**2.741.278.645**	99%	99.81%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	232.944.765	329.793.000	100%	99.11%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.801.801.915	1.746.620.000	100%	99.99%
	Sub Kegiatan Pemelihara Mabel	Sub Kegiatan Peralatan Mesin Lainnya	17.910.000	306.654.064	90%	99.94%

No	Program/Kegiatan Tahun 2022	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023	Anggaran (Rp)		% Realisasi	
			2022	2023	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.215.970.648	358.211.581	99%	99.90%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		348.396.500		93%	
	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Oprasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	**Kegiatan Administrasi Keuangan dan Oprasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**93.300.000**	**138.379.817**	30%	87.28%
	Sub Kegiatan Penyedia Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Sub Kegiatan Penyedia Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	**93.300.000**	138.379.817		87.28%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan *Medical Check Up* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		-			
	Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	**Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**2.778.330.127**	**2.700.500.000**	99%	91.68%
	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	828.412.500	789.940.000	96%	86.24%
	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	655.336.000	419.990.000	100%	81.76%
	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah	1.294.581.627	1.490.570.000	99%	97.35%
Bagian Perencanaan dan Keuangan						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA **Kegiatan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA** **Kegiatan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	16.085.900	35.862.518	**79%**	**77.41%**
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.917.500	20.862.989	79%	**75.23%**
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.168.400	14.999.529	79%	80.43%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**19.705.155.610**	**22.676.428.057**	**91%**	**89.09%**
	Sub Kegiatan Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	19.697.014.310	22.661.218.512	%	89.07%
	Sub Kegiatan Pelaksaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sub Kegiatan Pelaksaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8.141.300	15.209.545	90%	73.48%

No	Program/Kegiatan Tahun 2022	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023	Anggaran (Rp)		% Realisasi	
			2022	2023	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Oprasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	**Kegiatan Administrasi Keuangan dan Oprasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**766.483.636**	**710.310.279**	93%	94.44%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	766.483.636	710.310.279	93%	94.44%

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2023*

4. Pada Tahun Anggaran 2023 Sekretariat Daerah telah melaksanakan efisiensi dan efektifitas Capaian Kinerja dengan Realisasi Anggaran, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Efesiensi dan efektifitas Capaian Kinerja dengan Realisasi Anggaran

Sekretariat Daerah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Capaian Keuangan (%)	Capaian Kinerja (%)	Efisiensi (%)	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = (5-4)	(7)
1	Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	96.23	109.75	13.52	Sekretaris Daerah dan Bagian Umum
2	Inovasi publik yang diciptakan oleh SKPD	Jumlah inovasi SKPD yang didaftarkan	86.31	100	13.69	Sekretaris Daerah dan Bagian Organisasi
3	Meningkatnya skor LPPD Kabupaten	Skor LPPD Kabupaten	95.04	Nilai dari KEMENDAGRI belum terbit	Nilai dari KEMENDAGRI belum terbit	Sekretaris Daerah dan Bagian Pemerintahan
4	Meningkatnya Penerapan RB Pemerintah Daerah	Persentase SKPD dengan nilai RB minimal B	86.29	0	-	Sekretaris Daerah dan Bagian Organisasi
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Persentase SKPD dengan nilai SAKIP minimal BB	86.29	77.5	0	Sekretaris Daerah dan Bagian Organisasi
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	80.43	98.79	18.36	Sekretaris Daerah dan Bagian Perencanaan dan Keuangan
		Nilai SPIP Sekretariat Daerah		Masih Tahap *Baseline* SPIP Terintegrasi	Masih Tahap *Baseline* SPIP Terintegrasi	
7	Meningkatnya tata kelola	Nilai RB Sekretariat Daerah	89.33	-	-	

	kepemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Nilai ZI Sekretariat Daerah	92.91	95.09	2.18	Sekretaris Daerah dan Bagian Umum
8	Meningkatnya kebijakan perekonomian dan pembangunan	Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang diterapkan	98.73	100	1.27	Sekda dan Kabag Perkonomian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam
9	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang berhasil di tindaklanjuti	95.04	83.67	-	Bagian Pemerintahan
		Persentase kegiatan Peringatan hari besar Nasional/Kabupaten yang diselenggarakan		100	10.07	
10	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Persentase Penyelesaian Permasalahan pada Kegiatan Pemekran Kecamatan	80.53	100	19.47	Bagian Pemerintahan
11	Meningkatnya Pemenuhan IKK SKPD	Persentase Pemenuhan IKK SKPD	89.93	100	4.96	Bagian Pemerintahan
12	Meningkatnya Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak ke Tiga	Persentase dokumen kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil ditindaklanjuti	92.03	208	115.97	Bagian Pemerintahan
13	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase SKPD dengan nilai komponen pelaporan kinerja minimal 10	86.29	77.5	-	Bagian Organisasi
14	Meningkatnya nilai Area Perubahan RB SKPD	Persentase SKPD dengan Nilai Komponen Area Perubahan RB minimal 60		0	-	Bagian Organisasi

15	Meningkatnya Penataan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	Persentase Unit Pelayanan dengan nilai SKM Minimal 80	68.31	100	31.69	Bagian Organisasi
		Persentase SKPD yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)		100	31.69	Bagian Organisasi
16	Meningkatnya efektifitas kelembagaan analisa dan evaluasi jabatan	Persentase perangkat daerah dengan kelembagaan yang efektif	93.56	100	6.44	Bagian Organisasi
17	Meningkatnya layanan administrasi bidang perencanaan	Persentase layanan administrasi bidang perencanaan	75.23	100	24.77	Bagian Perencanaan dan Keuangan
18	Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja lingkup Sekretariat Daerah	Peresentase kualitas penyusunan pelaporan kinerja yang sesuai aturan	89.07	100	10.93	Bagian Perencanaan dan Keuangan
19	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	80.43	98.97	18.54	Bagian Perencanaan dan Keuangan
		Nilai SPIP Sekretariat Daerah		Masih Tahap *Baseline SPIP* Terintegrasi	Masih Tahap *Baseline SPIP* Terintegrasi	Bagian Perencanaan dan Keuangan
	Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan sesuai aturan	83.96	100	16.04	Bagian Perencanaan dan Keuangan
20	Meningkatnya kualitas layanan umum dan Rumah Tangga Pimpinan dengan baik	Persentase layanan Pimpinan/Bagian/SKPD/ Masyarakat dengan baik	96.23	100	3.77	Bagian Umum

21	Meningkatnya Pengelolaan Barang/Asset Lingkup Sekretariat Daerah Secara Tertib	Persentase layanan pada Bagian-Bagian lingkup Setda sarana prasarana/aset milik Sekretariat Daerah terkelola dengan baik	89.03	100	10.97	Bagian Umum
22	Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di bidang Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	Persentase Pelaksanaan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	93.05	100	6.95	Bagian Umum
23	Meningkatkan kualitas pengelolaan kepemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Nilai komponen area perubahan Reformasi Birokrasi lingkup Sekretariat Daerah	89.33	Sekretariat Daerah tidak termasuk RB Tematik	Sekretariat Daerah tidak termasuk RB Tematik	Bagian Umum
		Nilai komponen area perubahan Zona Integritas lingkup Sekretariat Daerah	90.09	95.09	5	Bagian Umum
24	Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa lingkup Kabupaten Tanah Laut secara elektrionik	Persentase Paket pengadaan yang terlayani dalam pengadaan/jasa sesuai standar dan tepat waktu	66.03	100	33.97	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
25	Meningkatnya SKPD melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem LPSE	Persentase SKPD yang melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem LPSE	66.03	100	33.97	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
26	Meningkatnya kompetensi SDM dalam proses PBJ yang berkualitas	Persentase SDM yang kompeten dalam Pengadaan Barang/jasa	97.90	100	2.1	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
27	Meningkatnya efisiensi pagu Pengadaan Barang Jasa	Persentase efisiensi pagu Pengadaan Barang Jasa	82.97	71	-	Bagian Pengadaan Barang/Jasa

28	Meningkatnya Informasi Produk Hukum	Persentase Informasi Produk Hukum	80.79	100	19.21	Bagian Hukum
29	Meningkatnya Harmonisasi Produk Hukum	Persentase Produk hukum yang harmonis	81.33	100	18.67	Bagian Hukum
30	Tingkat Penanganan kasus/perkara hukum di lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase kasus/perkara hukum yang tertangani	61.58	100	38.42s	Bagian Hukum
31	Nilai Pemenuhan Kepedulian HAM di Kabupaten Tanah Laut	Nilai Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM)	61.58	107.82	46.24	Bagian Hukum
32	Meningkatnya layanan informasi penyelenggaraan pembangunan daerah dan komunikasi pimpinan, keprotokolan dan dokumentasi	Persentase penyebarluasan informasi/pemberitaan pembangunan pemerintah daerah yang bisa diakses masyarakat melalui media	92.82	100	7.18	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		Persentase kegiatan dokumentasi KDH/WKDH yang terlayani	92.82	100	7.18	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		Persentase kegiatan KDH/WKDH/SKPD/Tamu daerah yang terlayani keprotokolannya	92.82	100	7.18	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		Persentase komunikasi pimpinan yang terfasilitasi	90.72	100	9.28	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		Persentase pengaduan masyarakat yang di tindaklanjuti	91.37	25	-	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
33	Meningkatnya pembinaan Lembaga sosial dan keagamaan	Persentase peningkatan Lembaga sosial dan keagamaan yang dibina	96.09	98.04	1.95	Bagian Kesejahteraan Rakyat

34	Meningkatnya layanan bantuan sosial keagamaan	Persentase layanan bantuan sosial keagamaan	98.04	98.09	0.05	Bagian Kesejahteraan Rakyat
35	Meningkatnya peran serta Organisasi/Lembaga Keagamaan/SKPD dalam Bidang Pemuda dan Olahraga	Persentase hasil tindak lanjut koordinasi kegiatan bidang keagamaan, pemuda dan olahraga	82.95	83.01	0.06	Bagian Kesejahteraan Rakyat
36	Meningkatnya Penyelesaian Permasalahan terkait Perekonomian dan Pembangunan Daerah	Persentase penyelesaian permasalahan terkait perekonomian dan pembangunan	94	98	4	Bagian Perkonomian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam
37	Meningkatnya BUMD yang sehat dan berdayasaing	Persentase BUMD yang berkinerja positif	63.88	95	31.12	Bagian Perkonomian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam
38	Meningkatnya Pelaku UMKM yang terfasilitasi permodalan	Persentase UMKM yang terfasilitasi	88.40	100	11.60	Bagian Perkonomian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam
39	Meningkatnya kualitas manajemen data administrasi pembangunan yang proporsional	Persentase SKPD yang menyampaikan laporan progres pembangunan fisik	98.73	100	1.27	Bagian Perkonomian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

LKj bagi Sekretariat Daerah mempunyai makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dalam pengukuran kinerja yang telah dilakukan dan dikuatkan dengan data dukung yang menguraikan bukan hanya pencapaian Tahun 2023, namun juga melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA secara umum.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang telah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Sekretariat Daerah untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam menunjang pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) Tahun 2023, yang mencakup penentuan program,kegiatan dan sub kegiatan serta alokasi anggarannya, juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Secara umum pencapaian kinerja sasaran telah memenuhi target sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, namun masih terdapat beberapa indikator sasaran yang tidak tercapai yaitu untuk indikator sasaran Eselon II yang belum tercapai 3 (Tiga) indikator kemudian indikator sasaran Eselon III yang belum tercapai 10 (Sepuluh) indikator dan indikator sasaran Eselon IV yang belum tercapai 1 (Satu) indikator, yang tersaji pada tabel di bawah ini :

NO	INDIKATOR YANG BELUM TERCAPAI	JUMLAH INDIKATOR
1	Eselon II	3 indikator
2	Eselon III	10 indikator
3	Eselon IV	1 indikator

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Strategi yang dapat dilakukan untuk peningkatan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut di tahun mendatang antara lain :

NO	STRATEGI PENINGKATAN	BAGIAN
1	Membuat berita acara penelusuran asset yang tidak ditemukan dan diusulkan untuk dihapus atau hibah.	Bagian Umum
2	Membuat surat edaran mengenai batasan usulan RKBU.	
3	Mensinkronkan jadwal kegiatan rapat Koordinasi Pemerintah Daerah (Coffee Morning) agar tidak terbentur dengan jadwal agenda pimpinan.	Bagian Pemerintahan
4	Lebih cepat mengkoordinasikan dalam menyinkronkan jadwal agenda kegiatan Pejabat Provinsi Kalimantan Selatan yang akan di undang pada Hari Jadi Kabupaten Tanah Laut.	
5	Meningkatkan koordinasi dengan Tim Batas Desa untuk penyelesaian dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka pemekaran kecamatan	
6	Mengadakan sosialisasi penyusunan LPPD dengan narasumber dari Tim EPPD Provinsi dan Pusat	
7	Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait rencana kegiatan-kegiatan penyusunan Dokumen Kerjasama Daerah yang akan direalisasikan di tahun anggaran berjalan maupun anggaran tahun berikutnya.	
8	Terus memberikan reward dan punishment kepada SKPD sesuai dengan nilai beberapa indikator salah satunya adalah Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diperoleh sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 95 Tahun 2022.	Bagian Organisasi
9	Melaksanakan asistensi peningkatan kualitas Laporan Kinerja (LKj) SKPD dengan narasumber dari Kemenpan dan RB sehingga bisa diketahui kekurangan-kekurangan secara detail dalam LKj SKPD.	
10	Mengintegrasikan seluruh sistem pengukuran kinerja individu dan organisasi.	
11	Selalu melaksanakan kegiatan perencanaan sesuai dengan SOP	Bagian Perencanaan dan Keuangan
12	Meningkatkan kompetensi para petugas penyusun perencanaan	
13	Melakukan monev capian kinerja secara berkala dan berkelanjutan	
14	Menyampaikan surat permintaan data kinerja dengan mencantumkan batas waktu	
15	Melaksanakan Bimtek terkait penyusunan Laporan Kinerja	
16	Koordinasi lebih intens dengan Pembina SAKIP Kabupaten	

17	Melaksanakan Bimtek terkait Manjemen Risiko	
18	*Sharing Knowledge* antara Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian-bagian, dan Bendahara Penerimaan dengan admin SIPD	
19	Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis untuk para pelaku pengadaan yang terencana dan terkoordinir	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
20	Melaksanakan pelatihan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik	
21	Mengagendakan rapat dengan para pemangku kepentingan untuk menyamakan persepsi tentang pengadaan barang/jasa	
22	Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis untuk para pelaku pengadaan yang terencana dan terkoordinir dalam pemanfaatan sistem LPSE	
23	Melaksanakan koordinasi dengan stake holder lain (Bappeda, BPKAD dan Inspektorat) untuk menyamakan persepsi tentang pengadaan barang/jasa dalam pemanfaatan SPSE	
24	Melaksanakan koordinasi dengan LKPP terkait pemenuhan kebutuhan pelatihan dan bimbingan teknis SDM JF PPBJ	
25	Penyusunan jadwal kegiatan pembinaan pelaku pengadaan yang lebih terarah, efektif dan efisien dan perlu kunjungan ke SKPD untuk melaksanakan FGD terkait regulasi dan implementasi pengadaan barang/jasa pemerintah di SKPD	
26	membuat jadwal rutin untuk melakukan proses digitalisasi dan penginputan data ke website JDIH Tanah Laut	Bagian Hukum
27	melakukan pengumpulan dan pencarian terhadap dokumen-dokumen yang belum lengkap baik diruang arsip atau pada SKPD-SKPD terkait secara bertahap	
28	Penganggaran pembuatan cetak produk hukum	
29	Petugas perlu menambahkan kolom baru yaitu kolom "tanggal berkas kembali/diterima" setelah perbaikan oleh SKPD pada buku tanda terima, sehingga bisa dilihat SKPD mana yang telah mengembalikan dan yang belum mengembalikan berkas.	
30	Penambahan anggaran pembuatan (naskah akademik) untuk kajian Rancangan Peraturan Daerah serta honorarium narasumber	
31	Penganggaran perjalanan dinas luar daerah untuk melakukan rapat-rapat koordinasi ditingkat pemerintah pusat maupun daerah.	

32	Tetap terus melakukan koordinasi dan komunikasi dalam persiapan sampai dalam peanganan perkara sampai dengan selesai	
33	Menyerahkan Laporan Penilaian Kreteria Kab/Kota Peduli HAM dan RANHAM kepada BAPPEDA agar dapat dijadikan bahan untuk perencanaan yang menjamin pemenuhan Hak Asasi Manusia pada tahun berikutnya.	
34	Karena pemilik data adalah SKPD/Lembaga terkait (pihak eksternal) maka tugas Bagian Hukum selaku koordinator dalam kegiatan Penilaian Kab/Kota Peduli HAM hanyalah terus melakukan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan SKPD/Lembaga terkait terkait pengisian form/data-data yang diperlukan.	
35	Meningkatkan kualitas SDM melalui bimtek agar lebih tanggap dalam mempublikasikan kegiatan pemerintah daerah melalui web dan media sosial yang dikelola pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
36	Meningkatkan kualitas pendokumentasian dan sarana penyimpanan dokumentasi kegiatan pimpinan	
37	Meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan seluruh instansi dalam pelaksanaan kegiatan KDH/WKDH agar tidak terjadi tumpang tindih jadwal kegiatan sehingga seluruh kegiatan dapat terfasilitasi dan terdokumentasikan.	
38	Meningkatkan kualitas pelayanan keprotokolan kegiatan pimpinan.	
39	Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait dalam rangka tindak lanjut jika ditemukan laporan yang masuk	
40	Melaksanakan sosialisasi kepada penerima pencairan hibah secara langsung dan sosialisasi bagaimana membuat laporan keuangan bantuan hibah	Bagian Kesejahteraan Masyarakat
41	Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas realisasi kemajuan pelaksanaan hibah kepada pemohon proposal secara berkelanjutan serta pengawasan terus menerus.	
42	Meningkatkan monitoring dan evaluasi secara intensif kepada TKA/TPA, Madin, Ponpes dan PAH se Kabupaten Tanah Laut.	
43	Seluruh Kepala Sekolah maupun tenaga pengajar pada TKA/TPA, Madin, Ponpes dan menyusun target yang ingin dicapai pada setiap tingkatan pembelajaran baik di TKA/TPA, Madin, dan Ponpes agar kualitas hasil yang diharapkan dalam pembelajaran dapat tercapai.	
44	Meningkatkan dan menjalin koordinasi dengan semua pihak terkait serta menyusun rencana kegiatan dengan baik.	

45	Melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan	Bagian Perekonomia, Adm Pembangunan dan SDA
46	Monitoring terhadap capaian penginputan laporan P3DN oleh SKPD	
47	Koordinasi dan konsultasi dengan BPKAD dan PUPRP untuk memastikan proses perhitungan asset yang akan disertakan kepada BUMD PT. Air Minum Berkah Banua berjalan lancar	
48	Melakukan koordinasi dengan pihak inspektorat dan BPK untuk mengakomodir keinginan pimpinan untuk pemeriksaan kinerja manajemn PD. Baratala	
49	Memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi tim teknis dengan PT. BPR Tanah Laut tentang progress penyaluran kredit gapura karomah dan monitoring secara berkala terhadap penyaluran dana program gapura karomah	
50	Memfasilitasi terlaksananya rapat dan koordinasi kegiatan perubahan regulasi penyaluran dana investasi program Gapura Karomah untuk menindaklanjuti temuan BPK dengan menambahkan klausul pengalihan resiko kredit kepada PT. BPR dan penambahan masa pengelolaan dana invetasi untuk PT. BPR.	
51	Menyusun jadwal monitoring bersama tim teknis dan PT. BPR untuk kunjungan ke rumah debitur yang menunggak pembayaran.	

Pelaihari, 19 Januari 2024

Sekretaris Daerah,
Kabupaten Tanah Laut

Drs. H. DAHNIAL KIFLI,MAP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19640425 198703 1 012